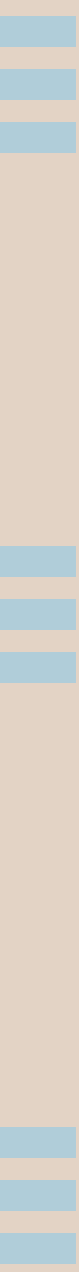

MENABUNG MEMBANGUN BANGSA

MENABUNG MEMBANGUN BANGSA



MENABUNG MEMBANGUN BANGSA

Pengarah

Hilmar Farid

Penanggung Jawab

Triana Wulandari

Koordinator

Suharja

Edy Suwardi

Editor Substansi

Triana Wulandari

Bondan Kanumoyoso

Agus Widiatmoko

Editor Bahasa

Rini Adiati Ekoputranti

Penulis

Supratikno Raharjo

Nunus Supardi

Erwien Kusuma

Tata Letak dan Grafis

Wahid dan Hamdan

Penerbit

Direktorat Sejarah

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2019

ISBN 978-623-7092-07-0

MENABUNG MEMBANGUN BANGSA



**DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2019**

Pengantar Direktur Sejarah



Direktur Sejarah,
Dra. Triana Wulandari, M.Si.

Bangsa Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kegiatan menabung. Sebagaimana gotong royong, menabung dalam masyarakat Nusantara dapat kita telusuri jejaknya hingga zaman Majapahit pada abad ke-13 – 15 masehi. Ditemukannya Celengan di situs Trowulan, ibukota kerajaan Majapahit, menguatkan dugaan bahwa celengan telah berkembang pada masa itu disamping beberapa perangkat irigasi dan benda terakota lainnya. Celengan yang pernah ditemukan terdiri dari tiga bentuk: manusia berupa anak kecil, binatang (babi atau celeng, domba, kura-kura, dan gajah), dan yang terbanyak berupa guci. Dari temuan artefak celengan kita dapat menyimpulkan bahwa menabung adalah warisan budaya bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia telah menabung dan terus dilakukan secara turun temurun dan bertahan hingga zaman sekarang.

Menabung adalah kegiatan menyimpan atau menyisihkan sebagian dari jerih payah atau apa yang dimiliki untuk dikumpulkan sebagai bekal hidup di hari esok dalam bentuk uang atau barang. Mulanya

menabung menggunakan celengan atau lumbung desa secara bersama, lalu pada masa modern orang mulai menabung ke kantor pos dan bank. Seperti yang juga terjadi pada banyak masyarakat di dunia, masyarakat Indonesia juga tidak hanya menabung dalam bentuk uang. Sebagai masyarakat agraris, mereka biasanya menabung sebagian hasil panennya, seperti padi dan jagung dalam lumbung. Selain lumbung keluarga, terdapat pula lumbung desa yang bersifat komunal. Di dalamnya, setiap keluarga menabung secara sukarela untuk kepentingan bersama.

Buku menabung membangun bangsa yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ini disusun untuk menggambarkan kebudayaan menabung masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuknya yang terus berlangsung dari masa ke masa. Buku ini tidak hanya mengulas tabungan atau celengan atau lumbung yang berkembang dalam masyarakat, tapi juga mengisahkan bagaimana upaya pemerintah dalam memanfaatkan budaya menabung untuk mendukung pembangunan dan menggerakkan ekonomi secara nasional. Buku ini menggambarkan bahwa pemerintah memiliki andil dan tanggung jawab menggerakkan masyarakat untuk menabung, baik demi kepentingan individu masyarakat maupun kepentingan negara.

Harapan utama melalui penyusunan buku Indonesia Menabung adalah mengingatkan kembali masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bahwa menabung dalam segala bentuknya adalah bagian dari budaya bangsa yang patut dilestarikan. Manfaat menabung telah dinikmati oleh banyak orang dan banyak pemerintah dari masa ke masa. Selain berbagai nilai luhur yang tersimpan dalam usaha menabung, seperti hemat, disiplin, sabar, dan cermat dalam merencanakan apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, menabung juga memberikan keuntungan ekonomi bagi individu penabung.

Selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan hari Menabung Sedunia tahun 2016, bahwa masyarakat Indonesia harus mengedepankan budaya produktif, antara lain dengan menabung dan berinvestasi. Menurut Presiden, melalui tabungan dan investasi, roda perekonomian dapat bergerak sehingga menopang pertumbuhan ekonomi. Kiranya buku ini dapat menjadi salah satu narasi pembuka bagi pemerintah dan masyarakat untuk kembali mengembangkan budaya produktif yang sejatinya telah kita miliki sejak dahulu kala.

Dengan demikian, bertolak dari pengalaman masa lalu, budaya menabung dapat terus kita lestarikan dan kembangkan sesuai dengan semangat zaman sekarang yang semakin modern dengan penggunaan teknologi informasi. Semoga buku ini dapat menginspirasi para pembaca, terutama generasi muda, untuk menciptakan bentuk *celengan-celengan baru* sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam era teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Semoga!

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan



Direktur Jenderal Kebudayaan,
Hilmar Farid

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan buku sejarah menabung yang diprakarsai Direktorat Sejarah. Buku sejarah berjudul “Menabung Membangun Bangsa” terbit disaat yang tepat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai rasa optimisme akan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam membangun Indonesia. Buku ini memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada kita, bahwasannya menabung bukanlah hal yang baru dan muncul sewaktu bersentuhan dengan kehidupan modern, namun sejarah dan budaya menabung sudah ada sejak masyarakat nusantara menghuni kepulauan nusantara.

Budaya menabung yang semula untuk memenuhi dan menyalurkan kebutuhan hidup terhadap situasi dan adaptasi lingkungannya, seperti halnya menyimpan bahan pangan, baik yang bersifat nabati maupun hewani. Budaya seperti ini ada sejak masa prasejarah, masa klasik hindu dan buddha, premodern kemudian

berkembang hingga sekarang, seiring dengan dinamika kehidupan di tengah peradaban dunia. Ketika pusat-pusat peradaban dunia mulai bersentuhan dan berinteraksi antar satu bangsa dengan bangsa lain, baik di bidang perdagangan, agama, sosial, budaya, bahkan politik, masyarakat nusantara mendiami pulau-pulau turut serta aktif dalam kancah pergaulan dunia, kebiasaan menabung tidak hilang begitu saja, justru berkembang dan diperkaya dengan sistem pengetahuan ekonomi dari luar.

Tradisi menabung yang semula masih terbatas penyimpanan bahan pangan, komoditi perdagangan seperti rempah-rempah, barang berharga seperti batu mulia, logam emas, dan benda-benda berharga lainnya. kebiasaan menabung mengalami kemajuan yang cukup pesat terutama pada masa Majapahit. Beredarnya alat tukar uang logam pada era Majapahit memunculkan tradisi baru berupa menabung uang logam (uang gobog) dalam wadah terakota yang umumnya berbentuk dikenal dengan “Celengan”. Sebuah tradisi yang sudah melampaui zaman modern, sebelum Eropa melakukan kolonisasi di Nusantara.

Kosa kata “Celengan” merujuk bentuk arca figurin Celeng atau hewan babi (*latin; suscrofa*) berbahan terakota dan banyak di temukan di Situs Trowulan, Ibu Kota Kerajaan Majapahit. Celengan dalam kosa kata masyarakat Indonesia kemudian berkembang untuk menyebut kata lain dari “Menabung”. Tradisi menabung yang semula bersifat tradisional di masyarakat terus beradaptasi dengan dunia perbankan modern. Sikap mental suka menabung masyarakat Indonesia ini penting untuk dikembangkan dalam memberi kontribusi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu kami menyambut positif dengan terbitnya buku sejarah menabung di Indonesia.

Akhirnya selamat membaca, semoga buku “Menabung Membangun Bangsa” menjadi spirit dan sarana memelihara ingatan kolektif tentang sejarah dan tradisi menabung masyarakat Indonesia.

Daftar Isi

iv	PENGANTAR DIREKTUR SEJARAH
vi	SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
2	PENDAHULUAN
2	Menabung sebagai Strategi Menghadapi Masa Depan
6	Menabung dan Perkembangan Masyarakat Indonesia
18	MENABUNG MASA PRAMODERN
20	Masa Prasejarah
30	Masa Kerajaan Nusantara
65	Warisan Tradisi Menabung yang Dipertahankan
80	MENABUNG PADA MASA PRAKEMERDEKAAN
83	Menabung Masa VOC (1602-1799)
91	Menabung Masa Hindia Belanda (1800-1942)
140	Menabung Masa Pendudukan Jepang
166	MENABUNG PADA MASA KEMERDEKAAN
166	Menabung Mengisi Kemerdekaan
176	Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949
217	Menabung di Era Deregulasi Ekonomi
228	Menabung di Ujung Orde Baru
238	MASA DEPAN BUDAYA MENABUNG
238	Menabung Pascareformasi
243	Gerakan Indonesia Menabung
248	Menabung sebagai Budaya Produktif
253	Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital
256	SIMPULAN
272	DAFTAR PUSTAKA



Pendahuluan

Menabung sebagai Strategi Menghadapi Masa Depan

Istilah *menabung* bisa diberi makna sangat luas. Kalimat “menabunglah untuk menghadapi hari tua” dapat diberi makna bermacam-macam bergantung kepada orang yang menyampaikan. Jika itu disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, bisa saja yang dimaksud adalah agar anaknya membiasakan diri menyimpan uang untuk ditabung. Hal itu dilakukan agar kebutuhan penting pada masa depan dapat dipenuhi tanpa harus berhutang berutang kepada orang lain. Namun, kata *menabung* itu dapat juga digunakan oleh seorang dokter dalam memberi saran agar pasiennya menjaga pola makan yang sehat dan sering berolahraga agar di masa tua tetap tetap sehat. Guru sekolah dapat menggunakan kalimat yang sama kepada murid-muridnya agar mereka lebih giat belajar sehingga tidak banyak mengalami kesulitan ketika kelak terjun ke dalam masyarakat. Namun, pesan apa yang sebenarnya hendak disampaikan dengan imbauan itu? Pertanyaan itu mudah dijawab oleh para orang tua, guru, tokoh agama, dokter atau siapa pun yang telah banyak memiliki pengalaman hidup. Kata *menabung* begitu luas pengertiannya sehingga kalimat yang berupa imbaun itu sebenarnya bisa disampaikan oleh siapa saja sesuai dengan konteks permasalahannya.

Jika seseorang menyampaikan imbaun itu kepada anak-anaknya yang boros, sebenarnya ada kecemasan

pada orang tuanya bahwa anaknya dapat mengalami kesulitan keuangan pada saat dewasa nanti bila tidak mengubah kebiasaan buruknya. Seorang guru meminta muridnya untuk lebih banyak belajar karena khawatir kelak muridnya tidak sanggup menghadapi kehidupan yang keras ketika sudah terjun di masyarakat. Tokoh agama mengimbau santri atau jemaatnya untuk lebih banyak mempraktikkan nilai-nilai agama karena khawatir mereka berkembang menjadi pribadi yang buruk dan dapat membawa bencana bagi lingkungannya. Dalam arti luas ini, menabung dapat dipahami sebagai bentuk “investasi” yang perlu dilakukan dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik kelak. Mengapa manusia bersedia berkorban untuk terhindar dari kondisi yang mungkin dapat memcelakakannya?

Secara naluri, manusia tidak berbeda dengan hewan dalam hal keinginan untuk melawan kesulitan, rasa sakit, dan kematian. Naluri itu telah diwarisi tubuh fisik kita dan dikuatkan melalui proses pembelajaran dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, manusia membangun mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu melalui proses belajar. Ia belajar dari pengalaman orang lain dan dari pengalaman sendiri. Bahkan, belajar dari fenomena alam. Itulah yang membedakan manusia dari binatang pada umumnya. Melalui proses belajar itulah, manusia mengasah keterampilan untuk mengatasi masalah yang pada gilirannya mendorong temuan baru, baik dalam bentuk peralatan atau “perangkat teknologi”, maupun pembaruan.

Mekanisme pembelajaran, penciptaan/ penemuan, dan pembaruan menyebabkan manusia lebih unggul daripada makhluk lain dan menjadikannya mampu membangun kebudayaan yang berubah, baik secara evolusioner maupun

revolusioner. Manusia memiliki kemampuan adaptasi yang jauh lebih baik daripada makhluk lain karena memiliki kebudayaan yang memungkinkannya mengembangkan teknologi peralatan untuk menyambung keterbatasan fisiknya.

Di samping kemampuan yang telah disebutkan di atas, manusia juga memiliki kemampuan untuk mengatasi kendala yang dibayangkan dapat terjadi pada masa depan, yaitu dengan melakukan perencanaan. Hal itu dimungkinkan karena pikiran manusia memiliki kemampuan yang tidak terbatas dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan makhluk lain.

Dalam kaitan itu perlu dikemukakan gagasan ahli psikologi Thomas Suddendorf mengenai konsep “*mental time travel*” atau “*chronosthesia*”. Konsep itu menjelaskan kemampuan manusia dalam merekonstruksi secara mental peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Hal itu disebut “*episodic memory*” dan juga kemampuan untuk membayangkan skenario yang mungkin dapat terjadi pada masa depan yang disebut “*episodic foresight*” atau “*episodic future thinking*”. Konsep itu dianggap sangat penting untuk memahami karakteristik manusia sehingga menjadi perhatian psikologi, *cognitive neuroscience*, filsafat, dan disiplin ilmu lain. Salah satu pokok perhatian para ilmuwan yang meneliti hal itu adalah hakikat hubungan antara ingatan dan ramalan serta evolusi kecerdasan manusia yang pada taraf tertentu menjadikan manusia jauh lebih unggul daripada binatang.

Disebut *time travel* karena masa lalu adalah peristiwa yang sudah lalu. Namun, manusia dapat merasakan kembali pengalaman masa lampau itu dalam waktu yang sangat cepat, yaitu melalui

mekanisme mengingat kembali (*episodic memory*). Manusia juga dapat melakukan perjalanan ke masa depan, bisa dekat atau jauh, juga dalam waktu yang pendek, yaitu dengan cara membayangkan apa yang mungkin dapat terjadi atau yang diharapkan akan terjadi kelak. Disebut perjalanan mental (*mental travel*) karena hal itu berlangsung secara mental di dalam otak manusia. Kemampuan mahluk manusia dalam melakukan perjalanan secara mental terhadap waktu itu, khususnya perjalanan ke masa depan, menjadi pusat perhatian karena memiliki potensi sebagai penggerak utama dalam evolusi manusia.

Jika diterima asumsi bahwa mekanisme mental (*time travel*) merupakan ciri unik manusia, kemampuan itu mungkin mulai dimiliki sejak sekitar enam juta tahun lalu, yaitu ketika pendahulu manusia mulai melepaskan diri dari garis evolusi yang sebelumnya dilalui bersama spesies terdekatnya, yaitu simpanse. Bukti tertuanya dalam bentuk artefak dikenal sebagai kapak genggam bersisi dua (*bifacial handaxes*) yang dihubungkan dengan awal mula kehadiran *homo erectus*.

Dalam tulisannya yang berjudul “*Mental time travel and the shaping of human mind*”, Thomas Suddendorf dkk. (2014) menyatakan bahwa naluri, pembelajaran, dan memori adalah alat adaptasi yang membuat spesies manusia dan hewan menjadi tangguh dalam melawan tantangan lingkungan. Namun, hanya manusia yang memiliki jenis memori khusus yaitu “*episodic memory*” yang memungkinkannya memilih perilaku yang lebih lebih baik berdasarkan kejadian spesifik pada masa lalu. Kondisi serupa itu mendorong lebih jauh kemampuan manusia membayangkan kejadian tertentu pada masa depan, membuat rencana spesifik dan membandingkan macam-macam skenario. Bersamaan dengan perkembangan dalam bahasa, manusia membagikan informasi pengalamannya, baik yang jelas maupun yang membingungkan.

Perkembangan mekanisme *mental time travel* dan bahasa diperkirakan terjadi pada masa kehidupan zaman pleistosen. Tekanan-tekanan alam yang berhasil dilewati pada masa itu, seperti perubahan iklim dan berubahnya hutan-hutan menjadi padang sabana, menyebabkan hubungan antarmanusia makin kuat, membuat perencanaan lebih terperinci dan komunikasi antarkelompok menjadi makin intensif. Bersamaan dengan itu, otak manusia makin berkembang hingga memunculkan jenis spesies manusia yang lebih berkembang sebagaimana diwakili oleh Homo Neanderthal dan keturunannya pada sekitar 500.000 tahun yang lalu. Pada periode itu pula diperkirakan masa kanak-kanak menjadi makin lama, yang semula hanya 2,5 tahun menjadi sekitar 7 tahun. Suatu periode yang panjang untuk memungkinkan pikiran dan bahasa berkembang secara maksimal.

Jika dipandang dari segi tanggapannya terhadap permasalahan yang dihadapinya, perencanaan bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu perencanaan yang sifatnya reaktif dan perencanaan yang sifatnya reflektif dan visioner. Perencanaan yang sifatnya reaktif diwujudkan oleh reaksi cepat yang berlangsung dalam waktu yang relatif pendek. Misalnya ketika menghadapi kesulitan untuk melarikan diri ketika dikejar binatang buas,

manusia segera bereaksi dengan naik pohon atau segera mengambil batang kayu untuk menyerang balik. Sementara itu, tanggapan yang sifatnya reflektif dan visioner merupakan strategi untuk menghindari tanggapan reaktif yang berpotensi membawa bencana. Manusia mengingat kejadian masa lampau yang dapat membawa tragedi, mencoba untuk menganalisis sebab-sebabnya, dan membayangkan suatu jalan keluar yang dapat direncanakan agar kejadian serupa tidak terulang pada masa depan. Ancaman binatang buas dapat dikurangi dengan menciptakan senjata pembunuh atau membangun rumah di atas panggung. Misalnya, ancaman kelaparan dapat diantisipasi dengan bertani di lahan yang lebih subur atau lebih luas, atau menyimpan makanan cadangan di lumbung-lumbung.

Berdasarkan cara pandang sebagaimana telah dijelaskan, tema menabung di sini berkaitan dengan strategi perencanaan yang bersifat reflektif dan visioner. Telah dikemukakan bahwa menabung dapat diberi beberapa makna bergantung pada apa yang dibayangkan akan diperoleh pada saat tertentu pada masa depan. Apabila yang dibayangkan adalah memperoleh jaminan keamanan pangan, misalnya, dilakukanlah upaya menyimpan kelebihan makanan dengan lebih dahulu menciptakan sarannya, yaitu lumbung atau alat penyimpan lain. Jika yang diharapkan adalah terhindar dari penyakit mematikan, dilakukan upaya untuk mempelajari ramuan kesehatan atau mempelajari mantra-mantra penyembuhan. Apabila yang diharapkan adalah menjadi orang pandai, diupayakan untuk mempelajari berbagai pengetahuan yang dapat membuatnya memiliki kemampuan tertentu. Dengan demikian, menabung dapat berkaitan dengan tujuan ekonomi, kesehatan, dan kompetensi tertentu.

Dalam buku ini menabung dibatasi pada aspek yang berkaitan dengan upaya mengatasi permasalahan ekonomi, baik yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pramodern atau tradisional maupun masyarakat modern. Kasusnya adalah wilayah Nusantara yang kini diberi nama Indonesia. Perekonomian masa pramodern memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat modern maka pembahasan tentang menabung di Indonesia ini dibagi dalam dua bagian, yaitu menabung pada masa pramodern dan modern. Masa pramodern dibagi ke dalam dua subperiode, yaitu prasejarah dan masa kerajaan-kerajaan Nusantara, sedangkan masa modern dibagi ke dalam dua subperiode, yaitu masa kolonial dan masa kemerdekaan.

Dalam buku ini pembabakan seperti itu tidak diartikan sebagai pemisahan dua periode yang menggambarkan pergantian secara tegas satu periode oleh periode berikutnya. Dalam kenyataan tradisi menabung pada masa pramodern berlangsung terus hingga memasuki zaman modern, atau masa kini karena pada bagian akhir pembahasan periode pramodern ditambahkan satu subbab tentang tradisi menabung yang berlanjut. Hal itu sesuai dengan kenyataan bahwa cara-cara menabung secara tradisional tidak berhenti ketika sistem menabung modern melalui dunia perbankan mulai diperkenalkan pada bangsa Indonesia.

Menabung dan Perkembangan Masyarakat Indonesia

Buku ini memuat bahasan tentang hubungan antara perkembangan masyarakat dan budaya menabung. Oleh karena itu, perlu lebih dahulu diberikan gambaran secara garis besar kerangka sejarah perkembangan masyarakat Indonesia yang mengandung informasi yang berkaitan dengan budaya menabung. Perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia biasanya digambarkan sebagai tahapan zaman yang dihubungkan dengan perkembangan evolusien masyarakat dan kebudayaannya. Dalam buku ini periodisasi dibagi secara garis besar ke dalam 4 babakan, yaitu (1) masa Pramodern; (2) masa Prakemerdekaan; dan (3) masa Kemerdekaan. Penggunaan periodisasi seperti itu mungkin mengandung permasalahan dari segi peristilahan, tetapi tetap digunakan sekadar untuk memudahkan dalam membagi dalam unit-unit narasi.

Berdasarkan kerangka tersebut, periode Pramodern memasukkan subperiode-subperiode yang secara konvensional mencakup kehidupan masa prasejarah, dan masa kerajaan (kuno). Di dalam periode Prakemerdekaan tercakup masa VOC dan masa penjajahan Hindia-Belanda, sedangkan periode Kemerdekaan dibagi ke dalam 3 subperiode, yaitu masa awal Kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa Reformasi.

1. Masa Pramodern

Masa Prasejarah

Kehidupan masa prasejarah Indonesia merupakan periode terpanjang dalam sejarah wilayah kepulauan Nusantara. Dimulai sekitar 1,5 juta hingga sekitar 1.600 tahun yang lalu, akhir periode ditandai dengan munculnya tradisi tulis yang dibuktikan oleh temuan prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Periode prasejarah yang sangat panjang ini hampir sepenuhnya direkonstruksi berdasarkan data arkeologi dan data etnografi. Berdasarkan bukti artefak yang ditinggalkan, periode prasejarah ini dapat direkonstruksi ke dalam periode yang lebih terperinci, yaitu (1) masa berburu dan meramu, (2) masa kehidupan bertani, dan (3) masa perundagian. Seluruh subperiode-subperiode itu disusun berdasarkan sudut pandang sosial-ekonomi yang bersifat evolusioner masa yang pertama dipandang sebagai tahap yang paling sederhana disusul oleh masa berikutnya yang lebih maju.

Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan permasalahan kehidupan ekonomi utama adalah ketersediaan bahan pangan yang sepenuhnya tergantung pada alam dan upaya-upaya yang dilakukan agar sumber pangan alami dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Strategi hidup utama adalah bagaimana mendapatkan sumber pangan secara alami dapat terpenuhi setiap musim. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengawetkan sumber pangan alami tersebut agar dapat bertahan lebih lama sehingga kekurangan sumber pangan akibat cuaca ekstrem atau sebab lain dapat diantisipasi. Cara yang dikembangkan adalah dengan mengenali sifat makanan serta daya tahannya baik yang berasal dari tanaman, hewan, maupun buah-buahan. Tanda-tanda alam yang perlu diketahui adalah unsur-unsur yang dapat mempercepat pembusukan atau mengawetkan makanan, misalnya air, matahari, api, serangga, dan jasad renik.

Siklus alam yang bersifat teratur tidak selalu berlaku selamanya. Kadang-kadang muncul fenomena yang dapat memengaruhi berkurangnya atau musnahnya sumber pangan, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran hutan, kemarau panjang, atau hama tanaman. Oleh karena itu, strategi penyelamatan yang dirancang untuk mengatasinya adalah bagaimana caranya membuat bahan pangan dapat diperpanjang masa layak konsumsinya, misalnya dengan memanaskannya di tengah terik matahari atau memanggangnya di atas bara api atau membakarnya dengan api. Cara ini mungkin merupakan strategi paling tua yang mengawali budaya “menabung” dalam arti tidak mengonsumsi sumber pangan dalam satu saat agar bisa digunakan pada masa kemudian. Praktik pengawetan dengan cara demikian dapat mengurangi kadar air dan sekaligus membunuh jasad renik yang dapat mempercepat pembusukan.

Bentuk strategi pada tahap berikutnya adalah membudidayakan tanaman pangan dalam bentuk pertanian sederhana sehingga mengurangi sebagian ketergantungan manusia terhadap alam. Dengan cara demikian, manusia memiliki tambahan alternatif untuk mendapatkan makanan di luar yang disediakan oleh lingkungan alam. Praktik bertani dilakukan dengan cara menanam bibit dalam periode tertentu untuk mendapatkan

panen dengan jumlah yang lebih banyak daripada “investasi bibit” yang dikeluarkannya. Berdasarkan sudut pandang itu, praktik bertani dapat juga dipandang sebagai bentuk praktik menabung.

Pada masa itulah awal mula dikenal budaya menyimpan kelebihan pangan dalam lumbung sebagai wadahnya. Praktik pertanian makin maju ketika manusia memasuki masa berkembangnya spesialisasi kerja. Khususnya dalam bidang produksi peralatan, baik alat-alat yang terbuat dari tanah liat, batu maupun logam yang dapat menopang praktik hidup bertani dan tinggal menetap semipermanen atau permanen. Salah satu peralatan yang sangat penting peranannya dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat yang telah tinggal menetap adalah wadah-wadah berupa gerabah yang terbuat dari tanah liat.

Masa Kerajaan

Berbeda dengan masa prasejarah yang kehadirannya tersebar di seluruh wilayah Nusantara, masa kerajaan-kerajaan Nusantara tidak dialami secara merata. Periode itu umumnya dibagi dua periode, yaitu masa kerajaan Hindu-Buddha yang berlangsung sejak sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15, dan masa kerajaan Islam yang berlangsung sejak sekitar abad ke-13 hingga sekitar abad ke-18. Zaman Hindu-Buddha ditandai oleh dua indikator utama, yaitu munculnya organisasi politik yang disebut negara, dan munculnya tradisi kehidupan kota yang berbasis pada ekonomi pertanian. Kontrol dalam bidang pertanian mencakup pembangunan infrastruktur irigasi, pajak in natura, dan pengerahan tenaga kerja. Bidang perdagangan mencakup regulasi, perdagangan lokal, internasional, dan penggunaan alat tukar dalam bentuk mata uang. Pembangunan infrastruktur pertanian dalam bentuk irigasi memungkinkan produksi panen makin besar dan meningkatkan surplus pangan. Kondisi itu mendorong pembangunan lumbung pangan menjadi makin besar.

Lumbung sebagai sarana untuk menyimpan bahan makanan memberi pengaruh pada pengumpulan pendapatan kerajaan sehingga memungkinkan didirikannya monumen besar. Perkembangan pertanian tidak hanya meningkatkan kemakmuran kerajaan, tetapi juga meningkatkan jumlah penduduk dan bertambahnya pusat permukiman baru. Selain itu, hal tersebut juga mendorong pembuatan sarana untuk menyimpan berbagai kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, periode tersebut juga ditandai oleh berkembangnya tradisi pembuatan gerabah yang makin kompleks, termasuk diperkenalkannya bentuk gerabah khusus yang dibuat untuk menyimpan uang di dalam celengan.

Sistem perdagangan dan pajak yang makin kompleks membutuhkan alat tukar yang praktis, di antaranya adalah mata uang, terutama dalam bentuk logam. Mata uang memang telah dikenal sejak masa perkembangan awal kerajaan Hindu-Buddha. Namun, jenis uang logam tertentu yang bisa dimasukkan ke dalam celengan baru umum digunakan sesudah abad ke-10, sedangkan tradisi menabung celengan baru terbukti dipraktikkan kemudian, yaitu sekitar abad ke-14, terutama pada masa Majapahit.

Sedikit berbeda dengan periode Hindu-Buddha, pada masa kerajaan Islam pusat pemerintahan umumnya tumbuh di wilayah pesisir dengan aktivitas perdagangan sebagai landasan ekonomi yang utama. Di pusat-pusat pemerintahan kerajaan Islam yang tidak memiliki dukungan ekonomi pertanian, sektor perniagaan internasional menjadi andalan utama. Namun, jika kerajaan tersebut memiliki dukungan sektor pertanian, kedua sumber ekonomi menjadi andalan, misalnya kerajaan Islam yang tumbuh di wilayah Jawa Tengah sebagai warisan dari zaman sebelumnya dan Banten yang mengembangkan pertanian pada sekitar abad ke-18.

Kehidupan kota ditandai oleh berkembangnya sektor jasa dan berkembangnya spesialisasi pekerjaan yang makin kompleks terkumpul di kawasan urban. Industri gerabah dan alat-alat pertukangan juga berkembang di wilayah yang menjadi semakin padat penduduknya. Karakteristik pemerintahan dalam organisasi negara dan kehidupan kota sebagaimana digambarkan di atas merupakan faktor yang dapat mendukung tradisi menabung dalam bentuk uang logam yang ditempatkan di dalam wadah-wadah dari tanah liat bakar dapat terus bertahan.

Kerajaan Islam yang muncul menggantikan dominasi kerajaan Hindu-Buddha menjangkau wilayah Nusantara yang lebih luas. Namun, sumber-sumber sejarah yang dapat dikaitkan dengan tradisi menabung sangat terbatas. Para ahli sejarah memberikan penjelasan bahwa kehidupan kota pada periode ini mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan, disebutkan bahwa pada abad ke-17 dan ke-18, urbanisasi di wilayah Nusantara menunjukkan tingkat yang tertinggi di Asia. Salah satu sebabnya adalah berkembangnya aktivitas komersial. Informasi tentang tradisi menabung sebagaimana dijumpai di kota Majapahit, belum ditemukan bukti-buktinya. Namun, dapat diduga bahwa tradisi menyimpan uang bisa jadi dilakukan dengan cara lain, misalnya uang diletakkan pada ruas bambu yang dipotong-potong atau di dalam batang bambu utuh yang digunakan sebagai tiang-tiang atau bagian dari rumah.

2. Masa Prakemerdekaan

Masa VOC

Bangsa Eropa yang pertama kali sampai di Indonesia adalah orang Spanyol dan Portugis. Tujuan utama mereka adalah wilayah Indonesia Timur yang menghasilkan rempah-rempah. Namun, pengaruh bangsa Barat dalam kehidupan ekonomi baru dirasakan setelah Belanda membentuk koloni dagang di Indonesia pada tahun 1602. Belanda sebagai salah satu bangsa maritim di Eropa mendirikan persekutuan dagang untuk menyatukan berbagai kongsi dagang mereka. Kongsi dagang itu diberi nama *VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)*, atau Persekutuan Dagang Hindia Timur.

Ketika bangsa Eropa mulai berdatangan, seluruh tradisi masyarakat, terutama di daerah pedalaman, terus berjalan sebagaimana biasanya. Demikian pula tradisi menabung berupa pengawetan, bercocok tanam, menyimpan di dalam lumbung dan di dalam wadah-

wadah gerabah, dan menyimpan uang di dalam celengan. Bagi bangsa asing yang hanya menekankan kepentingannya pada sektor ekonomi, khususnya perdagangan, tradisi lama yang dianggap paling potensial menghasilkan keuntungan adalah sektor pertanian dan perkebunan.

Ketika VOC masuk wilayah Indonesia, penduduk Nusantara telah memainkan peran penting dalam dunia perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Kerajaan-kerajaan di Nusantara telah menjadi pemain utama dalam perdagangan ini sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha dan kerajaan-kerajaan Islam. Namun, ketika penguasaan laut Nusantara didominasi oleh VOC yang memiliki kekuatan militer lebih kuat, para penguasa lokal mulai terpinggirkan. Pada sekitar akhir abad ke-17, peran para penguasa lokal lebih banyak sebagai pemasok VOC.

Memasuki awal abad ke-18 tradisi menabung dengan corak baru yang dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan masih belum tumbuh. Baru hampir setengah abad kemudian, tepatnya tahun 1746, muncul lembaga bank yang diperkenalkan oleh VOC, yaitu Bank van Leening yang kemudian disusul bank baru yang menyatukan bank sebelumnya, yaitu Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang akan melakukan usaha perdagangan rempah-rempah di Batavia.

Bank VOC yang pertama didirikan ini melayani pinjaman kepada para pedagang swasta dengan cara menjaminkan barang-barang perhiasan dari emas, perak, perhiasan lainnya, kain, linen, barang-barang rumah tangga dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi. Bahkan, binatang dapat juga dijaminkan. Itu artinya bank pertama yang didirikan VOC bukanlah bank seperti apa yang kita kenal sekarang, yaitu tempat menyimpan tabungan, melainkan lebih mirip dengan lembaga pegadaian yang juga telah dikenal dalam tradisi Nusantara sejak masa kerajaan Hindu-Buddha.

Sifat awal bank VOC ini dianggap sebagai embrio lahirnya lembaga pegadaian pada masa selanjutnya. Meskipun VOC selama sekitar 200 tahun VOC mendominasi perdagangan maritim di wilayah Indonesia Timur. Akan tetapi, dua bank yang didirikannya dalam periode lima puluh tahun terakhir usianya bangkrut dan runtuh. Peristiwa itu terjadi pada akhir tahun 1798. Gambaran sistem perbankan selama masa VOC dapat dikatakan tidak mengenal dengan yang disebut dengan tradisi menabung. Bank-bank yang didirikan lebih merupakan lembaga peminjaman modal untuk melayani kepentingan pedagang Eropa.

Masa Hindia-Belanda

Kekuatan VOC yang runtuh digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Layanan perbankan yang semula ditujukan kepada aktivitas perniagaan rempah-rempah, beralih pada aktivitas pertanian dan perkebunan yang dikenal dengan nama *cultuur stelsel* atau “Tanam Paksa”. Kegiatan pertanian yang menjadi fokus utama adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi internasional, antara lain kopi, tebu, dan indigo, sedangkan dalam skala yang lebih kecil tembakau, lada, dan teh. Keadaan ini tentu

memengaruhi berkurangnya perhatian pada praktek pertanian pangan, terutama padi.

Pada masa itu penduduk Indonesia mempraktekan aktivitas pertanian baru yang ditujukan untuk memproduksi tanaman ekspor. Cultuur stelsel yang dianggap gagal menjalankan misinya sampai akhirnya secara resmi dihapus pada tahun 1860 dan benar-benar berakhir pada tahun 1901. Dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk bumiputra pemerintah kolonial memperkenalkan politik etis. Melalui kebijakan ini pemerintah mulai memperhatikan ekonomi rakyat yang berbasis pada pertanian, antara lain, dengan cara membangun sarana irigasi. Ketika memasuki abad ke-20, sebagai dampak revolusi Industri di Eropa, pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan komoditas baru, yaitu tanaman karet dan minyak bumi.

Tradisi menabung dapat dikatakan belum berkembang hingga akhir abad ke-19. Pada saat itu masyarakat Hindia-Belanda makin banyak yang meminjam uang. Namun, penghasilan dan pengeluaran uang tidak selalu bersiklus dalam bulan yang sama, terutama daerah penghasil palawija (jagung, singkong, ubi rambat, kacang tanah dan kacang kedelai) yang belum terlalu dalam mengenal ekonomi uang. Pada umumnya masyarakat di daerah itu, sesudah memenuhi kebutuhan pokok dan pembayaran pajak, hanya sedikit memiliki sisa uang yang dapat digunakan untuk meningkatkan simpanan atau mengembangkan modal. Dengan demikian, jelas bahwa selama periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 masyarakat tidak memiliki tabungan dalam bentuk uang. Biasanya simpanan yang dimiliki masyarakat berupa barang, seperti tanah, ternak, perhiasan, dan padi.

Lembaga bank baru muncul pada tahun 1828 dengan didirikannya DJB (De Javasche Bank). Bank itu disponsori oleh pemerintah dan perusahaan dagang NHM (Nederlandsche Handels Maatschappij) yang didirikan Pemerintah Belanda tahun 1824 untuk menyaingi perusahaan-perusahaan Inggris. DJB muncul karena desakan kuat dari kalangan pengusaha agar segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka, terutama untuk fasilitas pendanaan dan perdagangan luar negeri. Berkembangnya banyak perusahaan swasta dalam bidang perdagangan (ekspor-impor) menyebabkan muncul bank-bank swasta komersial yang menyusul didirikannya De Javasche Bank, di antaranya The Chartered Bank of India, Australia and China (1863), Rotterdamsche Bank (1864), Nederlandsch Indische Handelsbank (1864). Hingga akhir abad ke-19, bank-bank tersebut belum melakukan fungsi intermediasi secara maksimal, termasuk dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.

Baru pada penghujung abad ke-19 muncul bank komersial yang mulai menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, yaitu *Poostpaarbank* (Bank Tabungan Pos). Dengan demikian, pada awal abad ke-20 itu mulai terlihat usaha mengenalkan bentuk tabungan modern kepada masyarakat Hindia Belanda. Tujuan bank itu adalah untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung, sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan pada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia telah mengenal budaya menabung atau menyimpan modal untuk yang dapat digunakan untuk masa depan. Menabung tradisional adalah dengan menggunakan celengan dalam berbagai macam bentuk. Perlu digarisbawahi bahwa dua cara menabung itu, yang tradisional

(celengan) dan yang modern (tabungan bank) terus berlangsung secara beriringan hingga masa sekarang.

Di samping bank-bank yang dimiliki bangsa Barat terdapat juga bank yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Sejak tahun 1904, bangsa Indonesia telah mengenal lumbung desa, bank desa, dan bank kredit rakyat (*volkscredietbank*) yang dikelola oleh Centrale Kas sebagai instansi penilik dan pembina serta sebagai pusat keuangan. Pada tingkat lokal dan regional, bagian dinas lapangan mencoba mendorong rakyat untuk membangun gudang beras atau lumbung padi (*rijtschuren*), bank desa (*dorpsbankjes*), dan bank cabang (*afdelingsbanken*).

Lumbung desa, misalnya, dibentuk di Jawa dengan modal beras yang disimpan oleh masyarakat. Pada masa itu uang masih sangat langka sehingga masyarakat didorong untuk mendirikan lembaga kredit dengan modal yang mereka miliki sendiri, yaitu beras. Fungsi bank rakyat adalah menyediakan kredit untuk kebutuhan penduduk, seperti petani, pedagang, dan orang-orang yang bergerak dalam bidang industri. Mulai tahun 1934 bank rakyat berkembang menjadi *Algemene Volkscredietbank* (AVB) atau Bank Kredit Rakyat Umum. Bank itu mulai menyediakan kredit bagi pegawai pemerintah, pensiunan, dan karyawan swasta.

Pada masa puncaknya tahun 1920-an, dibangun sejumlah 6.000 lumbung padi. Persediaan padi dalam lumbung dapat digunakan pada masa kurang pangan atau dapat dijual pada waktu yang tepat bagi petani. Dengan cara demikian, kebebasan pembeli swasta dibatasi. Dana cadangan dari gudang, sebagian terdiri atas bunga yang berupa uang dan hasil dari beras yang dipinjamkan. Jadi, dalam operasionalnya lumbung sejalan dengan pengaturan produk (*productenhuishouding*) yang ada pada masyarakat desa.

“Bank Desa” (*Dorpsbanken*) adalah bank uang yang meminjamkan uang dengan bunga untuk pembelian benih, pupuk, peralatan pertanian kecil, pendirian usaha kecil, dan sebagainya. Pada tahun 1941 ada lebih dari 1.100 bank tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Selain masyarakat bumiputra, bank-bank tersebut juga dimanfaatkan oleh orang-orang Cina. Bank cabang di Jawa dan bank daerah di luar Jawa dan Madura mengelola uang simpanan pegawai pemerintah, swasta, masyarakat adat bumiputra, dan dana yang dikelola oleh bank desa. Uang itu diinvestasikan dalam proyek-proyek regional untuk pertanian, perikanan, pembuatan jalan, perumahan, dan sebagainya. Pada tahun 1941 ada lebih dari 100 bank di seluruh kepulauan Nusantara. Melalui bank rakyat, dana masyarakat Indonesia mulai terhimpun. Meskipun dana belum banyak jumlahnya, hal itu menunjukkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menabung, baik yang di desa maupun yang di kota, terutama untuk wilayah Jawa dan Madura.

Pada masa pendudukan Jepang yang singkat (1942—1945), bank-bank Hindia Belanda dilukuidasi dan dibubarkan. Hanya Poostpaarbank yang dipertahankan dan diganti dengan nama *Bank Tjokin Kjekoe*.

3. Masa Kemerdekaan Indonesia

Masa Awal Kemerdekaan

Umur bangsa Indonesia jika dihitung sejak kemerdekaan masih relatif muda jika dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju. Jika dihitung sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga saat ini tahun 2018, usia bangsa Indonesia baru mencapai 73 tahun. Meskipun demikian, proses pembentukan menjadi sebuah bangsa telah lama berlangsung. Salah satu aspek yang dapat membantu untuk menjelaskan pembentukan negara bangsa adalah melalui pengetahuan tentang sejarah menabung. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, budaya menabung dalam arti luas telah berlangsung di wilayah Nusantara sejak masa prasejarah. Tradisi itu terus berlangsung hingga masa-masa kemudian melewati periode kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Pengenalan budaya modern pada masa kolonial tidak melenyapkan budaya menabung dari masa sebelumnya sehingga ketika pemerintah Hindia Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang, bank modern tetap dipertahankan. Bank modern yang memiliki akar kuat dalam masyarakat Indonesia adalah Poostpaarbank. Demikian juga ketika Indonesia memasuki alam kemerdekaan, lembaga bank modern yang dirintis oleh pemerintah Hindia Belanda terus dipertahankan dan kemudian dinasionalisasikan, termasuk Poostpaarbank.

Pada awal kemerdekaan, yaitu sesudah RIS dibubarkan, De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi/pusat pemerintah Hindia-Belanda dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral. Sebelum Bank Sentral dibentuk, pada Oktober 1945 pemerintah mendirikan yayasan yang diberi nama Poesat Bank Indonesia. Yayasan itu diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum yang memberi kredit, mengeluarkan obligasi, menerima simpanan giro, deposito, dan tabungan, serta memberikan informasi dan penerangan dalam bidang ekonomi. Baru pada tahun 1946 didirikanlah Bank Nasional Indonesia sebagai bank sirkulasi pertama milik pemerintah RI. Namun, NICA yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia tetap mengoperasikan De Javasche Bank dan bank-bank lain yang pernah ada sebelum 1945. Kondisi dualisme perbankan pada masa perang kemerdekaan baru berakhir sesudah pemerintahan NICA dihapus dan Indonesia memperoleh kedaulatan penuh pada tahun 1949. Sejak 1950 kondisi perbankan di Indonesia mulai membaik, struktur bank yang terdiri atas bank pemerintah, bank swasta, dan bank asing yang sebagian besar merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda kembali berfungsi di dalam pengendalian pemerintahan Indonesia.

Pada saat itu jumlah tabungan makin meningkat. Indikatornya terutama berdasarkan data yang tercatat dalam bank pemerintah, yaitu Bank Tabungan Pos. Meskipun demikian, jumlahnya masih dianggap belum seberapa jika dilihat dari jumlah total penduduk Indonesia pada tahun 1950-an. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pada saat itu rakyat Indonesia belum memiliki hasrat menabung yang kuat. Usaha menabung yang cukup besar terlihat dalam lingkungan tentara dan polisi, juga kalangan pedagang. Para pedagang memiliki jumlah tabungan yang cukup besar meskipun belum stabil posisinya.

Dalam perkembangan selanjutnya bank swasta yang melayani tabungan makin

berkembang dengan berbagai tawaran hadiah yang menarik, baik dalam bentuk uang maupun barang. Minat menabung menunjukkan peningkatan. Ketika memasuki tahun 1960 bank-bank mulai dikendalikan oleh pemerintah. Bank-bank diarahkan untuk membantu pemerintah melalui Program Pembangunan Semesta Berencana. Bank Pos yang kemudian berubah menjadi Bank Tabungan Negara mengalami kendala dalam perkembangannya karena inflasi sepanjang tahun sejak 1965 hingga 1967. Sementara itu, bank tabungan swasta menunjukkan kondisi lebih baik dengan jumlah cabang yang meningkat terus.

Masa Orde Baru dan Reformasi

Ketika memasuki masa Orde Baru, posisi bank sentral ditetapkan sebagai lembaga independen terhadap pemerintah. Gubernur Bank sentral tidak jadi bagian dari kabinet sehingga memiliki fungsi kritik terhadap pemerintah bila melakukan kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Untuk menegaskan fungsi bank yang baru, pada tahun 1968 semua bank pemerintah diatur berdasarkan undang-undang tentang tiap-tiap bank. Dalam upaya memerangi hiperinflasi dan menarik dana masyarakat, Bank Indonesia memperkenalkan Program Deposito Inpres.

Kebijakan berikutnya adalah memperkenalkan skim Tabungan Berhadiah 1969. Skim ini dijalankan dengan suku bunga yang relatif tinggi dan hadiah sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah pun diharapkan dapat menabung di bank-bank pemerintah. Program Tabungan Berhadiah 1969 akhirnya dihentikan pada tahun 1971 karena pemerintah memperkenalkan program baru untuk tabungan masyarakat yaitu tabungan pembangunan nasional (tabanas) dan tabungan asuransi berjangka (taska). Kedua jenis tabungan itu dianggap sebagai cara yang lebih baik untuk menyalurkan simpanan masyarakat melalui perbankan.

Melalui program ini dikampanyekan Gerakan Tabungan Nasional. Pada saat itu Gubernur Bank Indonesia berkirim surat memohon bantuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar membantu Bank Indonesia dalam pengerahan guru dan murid sekolah ke dalam gerakan tabungan nasional. Bantuan tersebut, antara lain, dilakukan dengan menyebarkan alat penerangan bagi suksesnya GTN, termasuk menciptakan dan mengajarkan lagu-lagu tabanas dan taska, mengerahkan murid-murid sekolah dalam kampanye GTN, dan memberi penerangan mengenai pentingnya tabungan bagi pembangunan nasional. Ketua Bappenas saat itu, Widjojo Nitisastro, menjelaskan latar belakang program tabungan nasional. Menurut Nitisastro, pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dengan cara mengumpulkannya. Proses itulah yang disebut dengan menabung.

Pemerintah menabung atau mengumpulkan dana pembangunan dari cukai, bea masuk, dan pajak keuntungan perusahaan negara. Sementara itu, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk investasi selanjutnya, sedangkan masyarakat perseorangan atau keluarga menyisihkan penghasilan untuk dititipkan pada lembaga keuangan. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Radius Prawiro, menyatakan GTN bermaksud

untuk menggali potensi tabungan dari segenap lapisan masyarakat di Indonesia. Menurut Prawiro, tabanas dan taska bertujuan untuk mengarahkan dana yang dimiliki masyarakat untuk hal yang produktif. Cara yang ditempuh adalah dengan mengurangi sebagian dana konsumsinya menjadi dana tabungan yang bisa diikutsertakan ke dalam produksi dalam pembangunan jangka panjang ekonomi Indonesia.

Periode akhir 1980-an hingga tahun 1990-an program ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal itu dapat diketahui dari meningkatnya jumlah nilai tabungan, terutama pada bank-bank swasta. Bank-bank swasta ini bahkan mengembangkan sendiri programnya dalam rangka memperbanyak nasabah, misalnya BCA dan Lippo Bank dengan Tabungan Masa Depan (Tahapan). Sementara itu, BII dan sejumlah bank swasta lain meluncurkan program tabungan kesejahteraan rakyat. Kedua kelompok bank swasta tersebut bersaing dengan ketat, termasuk, dengan meluncurkan program khusus bagi anak-anak. Data tahun 1990 menunjukkan bahwa simpanan masyarakat tersebut mempunyai peranan terbesar, diikuti oleh tabungan milik perseorangan, dan kemudian perusahaan swasta, dan perusahaan negara.

Pada periode itu pula diperkenalkan program tabungan haji sebagai upaya menghimpun dana masyarakat. Tujuannya adalah menggali sumber dana baru untuk membiayai pembangunan ekonomi, sekaligus memupuk semangat masyarakat dalam menabung untuk tujuan tertentu, yaitu ibadah haji. Meskipun bersifat sementara, bank masih dapat memanfaatkan tabungan itu untuk menghimpun dana untuk keperluan kegiatan bank. Program itu dinilai berhasil sebagaimana ditunjukkan oleh angka jumlah calon haji yang meningkat. Kecenderungan kemudian menurun ketika terjadi inflasi sehingga banyak calon haji mengurungkan niatnya untuk pergi haji karena ongkosnya menjadi mahal.

Pada tahun 1991, pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia sepakat mendirikan bank yang menggunakan prinsip Syariah Islam, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian bank yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia itu awalnya memperkenalkan tabungan mudarabah. Melalui produk itu, penarikan simpanan hanya dapat dilakukan melalui perjanjian dengan syarat yang disepakati terlebih dahulu. Pada landasan operasional, perbankan syariah menitikberatkan pada prinsip syariah Islam, yakni uang hanya sebagai alat tukar bukan komoditas dan bunga dalam berbagai bentuknya dilarang.

Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil. Adapun bank konvensional mendasari operasional pada prinsip uang sebagai komoditas yang dipertahankan, serta bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang sudah ditetapkan di muka. Sebagai contoh sederhana, setiap akad atas pinjaman dana melalui syariah bersifat tetap nilainya sampai akhir pelunasan. Hal itu tidak seperti bank konvensional, nilai pinjaman bisa bertambah jika ada perubahan penetapan bunga berjalan. Terinspirasi oleh tangguhannya bank itu jika dibandingkan dengan bank konvensional dari krisis moneter 1997—1998, pemerintah mendirikan bank kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri. Sejak didirikannya, bank itu terus berkembang hingga tahun 2014 dan makin berkembang setelah dibuat UU tentang Bank Syariah pada tahun 2008.

Pada bab-bab selanjutnya, garis besar uraian mengenai budaya menabung sebagaimana diuraikan di atas akan digambarkan lebih rinci. Bab II akan memuat uraian tentang Budaya Menabung pada Masa Prasejarah, Masa Kerajaan dan Tradisi yang Dipertahankan; Bab III akan memuat budaya menabung pada Masa VOC dan Masa Penjajahan Hindia-Belanda; dan Bab IV akan memuat budaya menabung pada masa Kemerdekaan yang dibagi ke dalam 3 subperiode, yaitu Masa Awal Kemerdekaan, Masa Orde Baru, dan Masa Reformasi.

Celengan Babi

Bahan : Tanah Liat
Asal : Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur

Celengan memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang. Istilah Celengan sebenarnya berasal dari kata “Celeng” yang berarti babi dalam Bahasa Jawa Kuno. Hewan Babi sendiri sering dianggap sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Sejumlah celengan ditemukan di situs Trowulan menunjukkan sudah adanya praktek menabung sejak zaman Majapahit. Jenis uang yang disimpan dalam celengan biasanya seperti “kepeng” atau koin lain seperti gobog dan kasha. Hampir seluruh bagian celengan ini terdapat patahan yang sudah direstorasi. Lubang panjang untuk jalur masuk koin berada tepat di punggung bagian atas.



Menabung Masa Pramodern

Bagian ini memuat bahasan tentang sejarah menabung dengan mengambil kasus di salah satu wilayah Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Meskipun penelitian kehidupan masa lalu di Pulau Jawa relatif lebih intensif dan memiliki sumber sejarah yang lebih banyak daripada wilayah lain di Indonesia pengetahuan tentang sejarah menabung masih sangat kurang. Tulisan ini tidak akan membahas sejarah menabung untuk seluruh periode, tetapi lebih menekankan pada uraian tentang tanda-tanda awal dikenalnya tradisi menabung. Sumber utamanya adalah data arkeologi ditambah dengan sumber sejarah sezaman yang dapat memberikan pengertian lebih banyak mengenai kaitan tradisi tersebut dengan situasi lain pada masa itu.

Masa Prasejarah

1. Mengawetkan Makanan

Bentuk budaya menabung pada masa prasejarah yang paling sederhana adalah pengawetan bahan pangan, baik yang bersumber dari hewan maupun tanaman. Pada masa berburu, jenis- sumber pangan tertentu tidak akan bisa diselamatkan bila tidak dilakukan pengawetan. Salah satucara pengawetan adalah dengandipanaskan, baik melalui panas matahari, pengasapan maupun dengan pembakaran. Ikan dan daging misalnya, memiliki daya tahan terbatas untuk bisa dikonsumsi jika tidak diawetkan. Cara yang paling efektif adalah dengan membakarnya. Melalui proses pembakaran, jasad renik yang menyebabkan daging mengalami proses pembusukan dapat dimatikan dan daya tahan makanan menjadi lebih panjang.

Produk tanaman pangan tertentu memerlukan pengawetan dengan cara yang sama, misalnya dipanaskan pada terik matahari atau dekat perapian agar berkurang unsur airnya hingga dapat bertahan lebih lama. Buktiarkeologi mengenai kemampuan itu memang belum ditemukan, tetapi tradisi semacam itu dapat diketahui dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia masa kini yang tidak banyak dipengaruhi oleh tradisi yang datang dari luar. Contohpraktik mengawetkan makanan ditunjukkan di bagian akhir bab ini, yaitu Warisan Tradisi yang Dipertahankan.

2. Bertani dan Beternak

Bertani. Ketika masih menjalani kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, manusia menghadapi kondisi yang sangat rentan karena kebutuhannya sangat ditentukan oleh kondisi alam. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia berusaha untuk menciptakan cara agar tanaman dapat dijinakan. Oleh karena itu, diciptakan tradisi bertani yang memungkinkan manusia mengendalikan tanaman liar menjadi tanaman budi daya hingga kemampuan berproduksi menjadi meningkat. Dengan menanam bibit unggul, manusia berinvestasi di lapangan terbuka dengan perhitungan bahwa kelak akan memberi hasil lebih banyak daripada hanya mengandalkan tanaman pangan liar. Jika dilihat dari segi perkembangan evolusioner, praktik pertanian dapat dianggap sebagai bentuk strategi manusia untuk mengatasi terbatasnya produksi pangan yang dapat dihasilkan dari tradisi berburu dan mengumpulkan makanan. Periode pengenalan tradisi bertani itulah yang mengubah corak kehidupan manusia dari *food gathering* menjadi *food producing*.

Pertambahan jumlah penduduk tidak dapat didukung bila sumber pangan hanya bergantung pada praktik perburuan dan mengumpulkan makanan yang sangat ditentukan oleh lingkungan. Berbeda dengan berburu dan meramu yang mengandalkan sumber pangan secara instan yang disediakan oleh alam, bertani memerlukan penciptaan kondisi dan teknologi yang memadai. Bertani dapat dikatakan sebagai upaya menanam modal dalam bentuk bibit. Kemampuan manusia untuk menjinakkan tanaman mendorong berkembangnya praktik pertanian yang pada gilirannya mengubah secara radikal berbagai kebiasaan lama dengan tradisi yang sama sekali baru. Situasi demikian oleh ahli akeologi Gordon Childe dengan istilah revolusi pertanian karena dianggap sebagai periode penting yang menandai tahap menentukan dalam evolusi masyarakat.

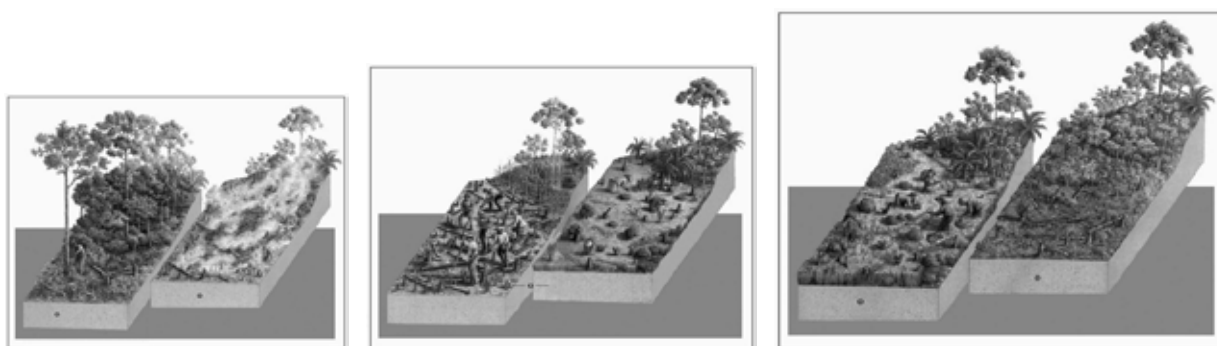
Praktik pertanian dapat juga dipandang sebagai praktik menabung karena melibatkan unsur investasi awal dalam bentuk bibit, unsur waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, dan strategi untuk mencapai hasil melalui penciptaan alat yang diperlukan. Dalam konteks itu lahan atau tanah merupakan wadahnya, yaitu wadah alamiah di tempat terbuka.

Praktik pertanian umumnya dibedakan dalam dua jenis, yaitu pertanian lahan kering yang biasanya dilakukan di tanah tegalan, kebun, dan ladang, sedangkan lahan basah yang digunakan tanah sawah. Dari segi jenis tanaman, bertani di kebun dan tegalan memiliki variasinya lebih banyak daripada di ladang, sedangkan pertanian sawah tergolong bertani dengan jenis tanaman tunggal, misalnya padi. Pertanian sistem ladang dan sawah merupakan jenis pertanian terpenting karena kedua sistem itu biasanya dipraktikkan untuk tanaman pokok. Oleh karena itu, dalam perkembangan evolusi pertanian yang sering dijadikan perhatian utama adalah kedua sistem pertanian itu, yakni sistem ladang yang dianggap sebagai pendahulu dari sistem sawah yang memang melibatkan teknologi lebih kompleks. Berdasarkan teknik pengolahannya, sistem perladangan dikenal dengan istilah *slash and burn cultivation*, sedangkan sistem sawah disebut dengan *irrigation cultivation*. Bagaimana praktik pertanian zaman prasejarah diketahui bila datanya sangat terbatas? Dengan

menggunakan analogi etnografi, yaitu praktik yang dijalani oleh masyarakat sederhana masa kini yang masih lestari. Kita dapat membuat asumsi bahwa praktik zaman dahulu juga sama.

Dalam sistem pertanian ladang, petani memilih suatu lahan di hutan yang dinilai subur. Tumbuhan yang ada sebelumnya ditebang dan dibakar sebelum di atas tanahnya ditanami jenis tanaman yang dipilih. Sesudah sekali atau dua kali dipanen, kesuburan tanah makin berkurang dan lahan tersebut akan ditinggalkan hingga tertutup tanaman hutan kembali. Setelah 10 atau 15 tahun, kesuburan mungkin telah kembali sehingga di tempat tersebut dapat dibuka lahan pertanian kembali. Sementara itu, para petani menunggu tanah yang ditinggalkan agar subur kembali. Mereka melakukan hal yang sama di wilayah lain.

Berbeda dengan perladangan yang tidak permanen dan tidak stabil, sistem sawah bersifat stabil dan tahan lama. Sekali sawah dengan sistem irigasi dibangun, sawah itu dapat ditanami bertahun-tahun bahkan berabad-abad tanpa banyak kehilangan tingkat produktivitasnya. Pertumbuhan padi basah sangat ditentukan oleh pengaturan air yang membawa zat makanan, bukan kualitas tanah. Oleh karena itu, produktivitas sawah ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan persawahan. Gambar 1 menggambarkan garis besar pertanian ladang dipraktikkan. Di Indonesia praktik pertanian ladang umumnya dikaitkan dengan kehidupan masa prasejarah, sedangkan praktik pertanian sawah dikaitkan dengan kehidupan masa sejarah. Meskipun demikian, ada bukti bahwa bahwa praktik menanam padi yang bisa juga dilakukan di lahan kering, telah dilakukan sejak awal abad Masehi, yaitu pada masa-masa mendekati bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah sekitar 2000 tahun yang lalu.



Tahap-tahap kerja dalam pengolahan pertanian ladang berpindah

Berdasarkan bukti-bukti arkeologi, jenis tanaman pokok dengan sistem ladang yang dikenal di wilayah Nusantara adalah umbi-umbian, terutama ubi jalar dan talas atau keladi. Tanaman padi baru muncul belakangan karena iklim tropis yang terlalu panas dan lembab kurang menunjang dipraktikkannya tanaman padi, kecuali beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali.

Sifat pertanian memberikan pengaruh pada tingkat produktivitasnya. Pertanian ladang biasanya dikaitkan dengan produktivitas yang rendah jika dibandingkan dengan pertanian sawah sehingga kemampuannya untuk memasok makanan lebih sedikit. Oleh karena itu, cara tersebut sering digunakan untuk menjelaskan mengapa penduduk di Jawa dan Bali lebih padat penduduknya daripada daerah-daerah Indonesia lain yang sebagian besar mempraktekan pertanian ladang.

Beternak. Praktik bertani membawa konsekuensi manusia untuk hidup menetap karena lahan pertanian harus dijaga. Kondisi itu menyebabkan manusia memiliki lebih banyak waktu luang sehingga dapat menjadi lebih produktif. Salah satunya adalah upaya menjinakan hewan. Jika pertanian merupakan upaya manusia untuk menjinakan tumbuhan liar agar manusia dapat mengendalikan pola pertumbuhannya, beternak merupakan upaya manusia untuk menjinakan binatang liar agar manusia memiliki lebih banyak peran dalam menentukan pola perilakunya.

Dalam kaitannya dengan budaya menabung, aktivitas beternak dimaknai sebagai upaya manusia untuk meningkatkan nilai produktivitas binatang untuk tujuan memenuhi kebutuhan konsumsi kalori yang bersumber dari daging. Strategi hidup itu muncul ketika manusia telah hidup menetap. Salah satu teori menyebutkan bahwa beternak hewan dimulai ketika pertumbuhan penduduk mencapai tahap tertentu sehingga manusia memerlukan pasokan bahan pangan tambahan secara teratur yang diperlukan untuk memberi makanan dalam jumlah lebih besar daripada biasanya.

Beternak hewan hanya mungkin dilakukan ketika manusia telah hidup menetap. Jenis hewan yang ditenak dipengaruhi kondisi lingkungan alam tempat hewan itu hidup. Jenis hewan yang ditenak akan berbeda-beda di lingkungan yang berlainan. Di satu tempat mungkin sapi menjadi binatang ternak yang pertama, di tempat lain kuda atau yang lain. Sumber data arkeologi dapat dijumpai di situs-situs seperti gua, tempat-tempat berteduh, dan di situs terbuka. Penelitian prasejarah di Indonesia membuktikan bahwa salah satu hewan yang sering ditemukan dalam penggalian arkeologi adalah babi dan anjing. Tulang babi dan anjing sering ditemukan bersama dengan gerabah yang menandai bahwa kedua hewan itu hidup bersama dengan manusia. Khusus hewan babi, meskipun pada awalnya merupakan hewan buruan, jenis babi tertentu lebih jinak daripada yang lain. Babi memiliki karakter sangat produktif dari segi kemampuannya berkembang biak. Data etnografi memberikan informasi bahwa di daerah-daerah tertentu, beternak babi merupakan bentuk investasi yang menguntungkan dan di beberapa tempat babi merupakan simbol kekayaan. Jenis hewan lain adalah unggas. Sebagian besar unggas

yang ditenakkan kemungkinan besar adalah ayam. Kajian arkeologi tentang hewan-hewan yang dipelihara pada masa prasejarah belum dapat memberikan informasi yang komprehensif. Namun, bukti masa sejarah, terutama ketika manusia memasuki kehidupan bernegara dan mengenal tradisi tulis, menunjukkan bahwa hewan yang ditenakkan pada masa prasejarah adalah juga hewan-hewan peliharaan.

3. Menyimpan Makanan

Menyimpan di dalam Lumbung. Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu pencapaian manusia terpenting adalah dikenalnya kegiatan pertanian. Praktik itu tidak hanya dimaksudkan untuk mengantisipasi dari kelangkaan pangan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan pada masa yang akan datang. Melalui praktik pertanian, produksi dapat melebihi kebutuhan konsumsi pada suatu saat tertentu. Kelebihan itu perlu disimpan untuk kebutuhan mendatang, baik untuk kepentingan konsumsi maupun bibit tanaman untuk musim tanam berikutnya. Salah satunya adalah dengan membangun penyimpanan yang dikenal dengan nama lumbung. Bukti adanya lumbung tidak ditemukan karena bahan bangunannya berasal dari bahan-bahan organik yang mudah hancur karena faktor cuaca. Oleh karena itu, anggapan tersebut bersifat spekulatif. Namun, berdasarkan bukti etnografi, tradisi semacam ini sangat lazim dipraktikkan dalam masyarakat sederhana di berbagai Kawasan. Masyarakat mempraktikkan pertanian ladang berpindah, misalnya dalam masyarakat Dayak Kenyah di pedalaman Kalimantan. Di dalam masyarakat yang telah mempraktikkan pertanian menetap dijumpai lebih banyak lagi lumbung karena praktik pertanian menetap memiliki potensi untuk lebih banyak menghasilkan panen.

Menyimpan Di Dalam Wadah Gerabah. “Gerabah” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut barang-barang yang terbuat dari tanah liat yang dibakar (*earthenware*). Berdasarkan hasil kajian Santoso Soegondho dalam bukunya *Tradisi Gerabah di Indonesia* (1995), dapat diketahui bahwa tradisi pembuatan gerabah

telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah. Khususnya pada masa ketika manusia telah mengenal praktik pertanian dan kehidupan menetap sekitar 4000—3000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, di wilayah-wilayah tertentu gerabah baru dikenal sekitar 990 tahun yang lalu. Tradisi bertani dan membuat gerabah dibawa oleh para penutur bahasa Austronesia yang menjadi leluhur langsung dari sebagian besar bangsa Indonesia.

Tradisi ini mencapai puncak perkembangan pada masa manusia Indonesia memasuki kehidupan yang lebih kompleks, yaitu akhir masa prasejarah yang dikenal dengan sebutan masa *paleometalik* atau zaman ketika manusia mengenal tradisi logam awal. Itu berlangsung pada awal abad Masehi. Apakah yang melandasi penciptaan gerabah? Salah satu asumsi dikemukakan bahwa pada suatu saat manusia merasakan kebutuhan persediaan bahan makanan untuk konsumsi selama waktu tertentu dalam kehidupannya.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, diciptakanlah wadah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Asumsi itu jelas menganggap bahwa gerabah pada awalnya dibuat sebagai tempat untuk menyimpan atau menempatkan bahan makanan dalam waktu tertentu. Sejak saat itu, gerabah menjadi salah satu perlengkapan kehidupan manusia yang sangat penting, terutama karena kemampuan dan kegunaannya.

Mengapa dibuat wadah-wadah dari tanah liat? Jika dilihat dari segi teknologi pembuatannya, penciptaan gerabah mencerminkan temuan manusia yang genius. Prosesnya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Bahannya terbuat dari tanah liat yang relatif mudah didapatkan. Lalu, tanah diberi air agar mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pembuatnya, kemudian dipanaskan dan dibakar dengan api. Hanya 3 elemen alam yang dibutuhkan untuk membuat gerabah itu, yakni tanah, air, api, dan sedikit pengetahuan dan keterampilan untuk membentuknya.

Kemampuan dasar untuk mengenali unsur-unsur alam dan keterampilan untuk membentuk wadah dengan mudah dapat dikuasai oleh masyarakat kebanyakan. Industri gerabah tradisional bukanlah teknologi yang sulit bahkan tergolong lebih mudah daripada teknologi yang dikenal sebelumnya, yaitu peralatan yang terbuat dari batu, kayu, atau bambu. Gerabah merupakan teknologi dengan prinsip penambahan (*additive*) dan sekaligus pengurangan sehingga memungkinkan untuk memperbaiki kesalahan tanpa membuang benda yang sudah dibentuk. Sementara itu, kesalahan dalam membuat alat batu, kayu, atau bambu tidak dapat diperbaiki dengan cara yang sama dengan teknologi gerabah. Bahan yang telah dibentuk sering harus dibuang bila bentuk yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginan.

Sebagai wadah yang terbuat dari tanah liat, gerabah relatif tahan air dan tahan panas api, sehingga gerabah dapat dipakai sebagai tempat penyimpanan (*storage vessel*) dan alat tempat keperluan memasak (*cooking vessel*). Gerabah dapat dipakai untuk menyiapkan makanan yang harus dipanaskan, terutama yang berasal dari biji-bijian seperti padi, jagung, dan gandum. Selain itu, gerabah dapat juga dipakai sebagai tempat mengasinkan atau mengasapi ikan (*curing fish*).

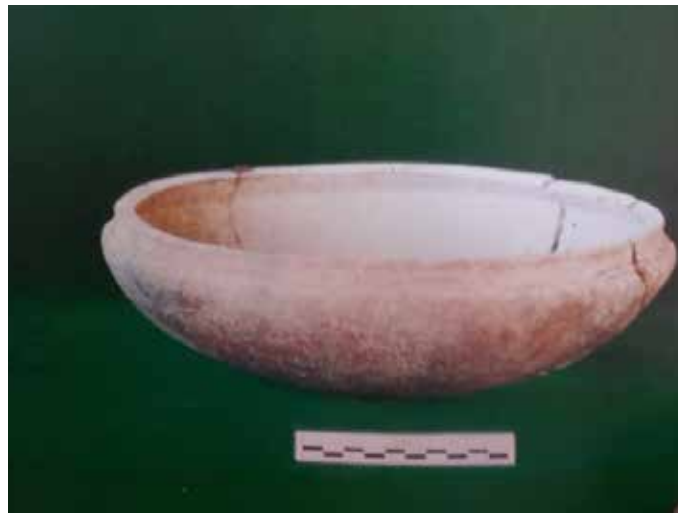
Dalam kehidupan sehari-hari gerabah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan praktis. Pada masa prasejarah, wadah gerabah juga dimanfaatkan untuk kepentingan religius, yaitu untuk bekal kubur dan untuk wadah jenazah. Sebagai wadah atau tempat menyimpan, gerabah tanah liat dari masa prasejarah Indonesia dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu seperti berikut: periuk, cawan, kendi, tempayan, dan piring.

Periuk. Wadah jenis ini paling banyak diproduksi pada masa prasejarah. Sementara itu, ukurannya juga bervariasi. Bentuknya bulat atau kadang-kadang diberi pundak yang membentuk sudut tajam. Badan utamanya bulat dengan rongga yang dalam dan bagian atas menyempit. Ukuran badan umumnya lebih tinggi daripada diameternya dan bagian mulutnya lebih sempit daripada diameter badannya. Bulatannya bisa menyerupai bola, atau lonjong seperti bulat telur. Jenis periuk terkecil tingginya sekitar 10—15 cm, periuk sedang sekitar 16—21 cm, dan yang besar bisa mencapai 22—27 cm.



Contoh bentuk-bentuk periuk dari masa prasejarah (Sugondho 1995)

Cawan. Bentuk wadah ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang bulat tanpa karinasi dan yang berkarinasi. Bulatnya bisa setengah bola atau setengah lingkaran. Cawan umumnya tidak berleher, tetapi bagian mulutnya terbuka melebar. Sebagai wadah, cawan tergolong kecil daya muatnya. Ukurannya tingginya antara 5—10 cm, sedangkan diameternya antara 10—15 cm. Cawan yang berpundak ukurannya bisa lebih besar. Diameternya bisa mencapai sekitar 15—35 cm. Cawan dengan ukuran yang lebih besar biasanya dikenal dengan sebutan pasi, sedangkan yang kecil dan berkaki disebut pedupaan (*incense burner*).



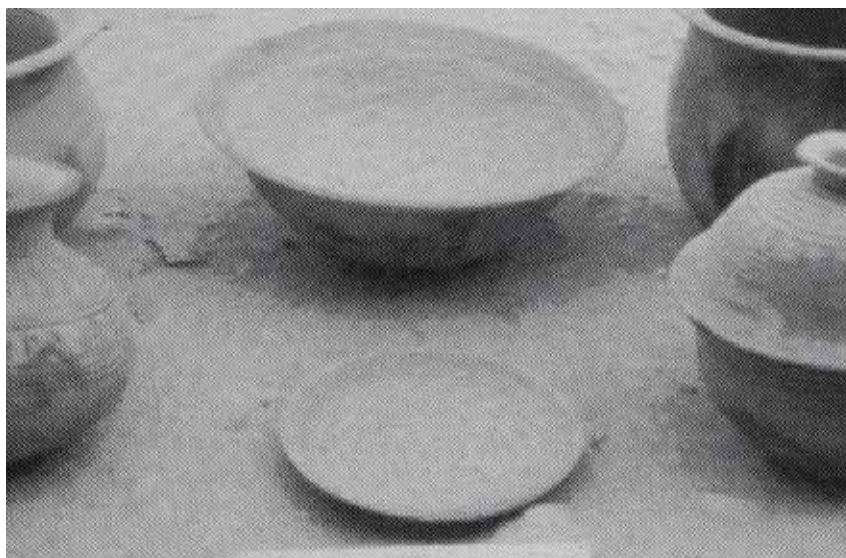
Cawan Tanpa Kaki dan Berkaki dari Masa Prasejarah Indonesia
(Sugondho 1995)

Kendi. Bentuk wadah ini memiliki dua variasi, yaitu bulat atau kadang-kadang memiliki pundak yang meruncing atau berkarinasi. Lehernya panjang dengan mulut sempit. Wadah itu ini biasanya memiliki serat, tetapi ada pula yang tidak. Pada umumnya bagian dasarnya rata atau sedikit membulat. Ukuran tinggi kendi antara 15—30 cm dan diameternya sekitar 13—28 cm, sedangkan mulut berukuran sekitar 2—6 cm dan panjang lehernya sekitar 5—20 cm.



Kendi Bercerat dan Tanpa Cerat dari Masa Prasejarah Indonesia (Sugondho 1995)

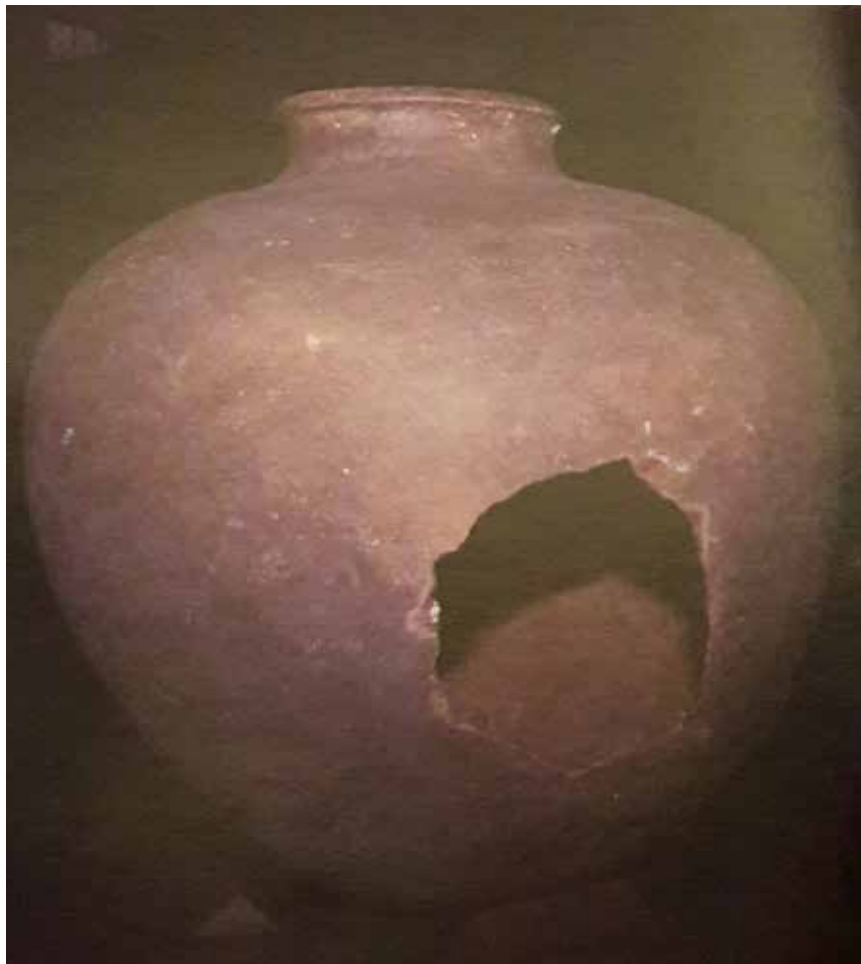
Piring. Ukuran badan piring umumnya pendek, tetapi mulutnya melebar dan terbuka. Bagian badannya hampir tidak tampak karena menyatu dengan bagian tepian dan dasarnya. Bagian dasar umumnya rata atau sedikit membulat. Ukuran tinggi sekitar 1—2 cm, sedangkan lebarnya diameternya sekitar 11—36 cm.



Piring di antara Wadah-Wadah Tanah Liat lainnya
(Sugondho 1995)

Tempayan. Wadah ini termasuk yang terbesar ukurannya di antara wadah-wadah tanah liat lainnya. Ukurannya tinggi dan lebar sehingga rongganya dalam. Orientasi mulutnya menyempit atau menutup. Wadah itu umumnya berdinding tebal sesuai dengan ukuran badannya. Ukuran tinggi bisa mencapai sekitar 40—100 cm; diameter badan sekitar 35—95 cm, dan mulutnya sekitar 20—50 cm.

Praktik “menabung” yang telah dikenal dalam zaman prasejarah sebagaimana telah diuraikan itu sebenarnya merupakan landasan awal bagi perkembangannya pada masa-masa kemudian. Dalam bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam tentang Tradisi yang Dipertahankan terdapat pada akhir bab ini.



Tempayan dari Masa Prasejarah Indonesia
(Sugondho 1995)

Masa Kerajaan Nusantara

Dalam sejarah Indonesia, munculnya kehidupan bernegara ditandai oleh munculnya struktur organisasi sosial yang kompleks yang diformalkan dalam sistem birokrasi pemerintahan. Cakupan wilayah kekuasaan tidak lagi berupa kumpulan sejumlah desa yang otonom, tetapi merupakan himpunan yang terintegrasi di bawah sistem kekuasaan yang lebih tinggi. Pengenalan tradisi tulis sebagai tanda masuknya zaman sejarah menjadi sarana untuk menegaskan keputusan penguasa yang bersifat resmi. Secara hierarkis, masyarakat dapat dipilah menjadi 2 kelompok utama, yaitu elite penguasa dan rakyat yang diperintah. Di dalam tradisi kerajaan Jawa Kuno masa Hindu Buddha, para elite penguasa menjalankan fungsi kontrol dari pusat-pusat pemerintahan yang disebut dengan istilah *pura*, *bhumi*, atau *rajya* yang berarti kota, kerajaan atau negara itu sendiri. Sementara itu, rakyat kebanyakan yang diperintah berada di desa-desa pertanian dan nelayan yang dikenal dengan sebutan *wanua* atau *thani*.

Landasan ekonomi utamanya adalah pertanian, khususnya pertanian sawah dan irigasi dalam skala yang relatif besar dan terorganisasi secara efisien. Sektor ekonomi lain yang penting adalah jasa, terutama perdagangan, baik lokal maupun antarbangsa. Mata uang menjadi sarana baru yang diperkenalkan dalam kegiatan transaksi. Ideologi negara bersumber dari agama Hindu dan Buddha yang mengakomodasi para penganut dengan latar belakang dan motif yang berbeda-beda termasuk munculnya kelompok pedagang yang memiliki dewa mereka sendiri.

1. Pertanian sebagai Landasan Ekonomi Kerajaan

a. Peran Negara dalam Ekonomi Pertanian

Gambaran tentang peran pertanian sebagai landasan ekonomi kerajaan pada masa kerajaan Indonesia kuno yang akan disajikan ini tidak mewakili seluruh kerajaan yang pernah ada di Indonesia, baik yang tumbuh pada masa pengaruh Hindu dan Buddha maupun Islam. Keterangan yang disajikan terutama diambil dari kasus Jawa Kuno yang memang memberikan informasi cukup memadai.

Sumber prasasti dari abad ke-9 dan ke-10 memberikan gambaran raja ikut terlibat dalam proses perluasan lahan sawah yang semula merupakan ladang. Pada umumnya perubahan status kebun atau ladang menjadi sawah dikaitkan dengan penetapan suatu desa menjadi sima. Perluasan itu berkaitan dengan kebutuhan institusi agama yang memerlukan pasokan ekonomi melalui intensifikasi produk pertanian. Upacara itu menandai persetujuan pejabat kerajaan terhadap upaya memperluas lahan pertanian berlandaskan teknologi baru, yaitu sistem irigasi. Seberapa banyak produksi pertanian dihasilkan dalam suatu periode tertentu belum dapat diketahui. Namun, dapat diperkirakan bahwa peningkatan produk pertanian berkaitan dengan makin luasnya lahan yang dialihkan dari nonsawah menjadi sawah.

Pada umumnya, peristiwa penetapan desa menjadi sima didahului dengan membuka sawah atau mengubah tanah nonsawah menjadi tanah sawah. Dengan demikian, penetapan sima dapat juga dipandang sebagai salah satu cara untuk memperluas lahan sawah dan sekaligus meningkatkan produksi bahan pangan utama, yaitu padi atau beras. Sawah sebagai sumber ekonomi pertanian telah disebut dalam prasasti Pihak-Kamalagi (821 M). Namun, upaya perluasan tanah sawah secara besar-besaran baru terjadi pada akhir abad ke-9, sebagaimana tercermin dalam beberapa prasasti dari masa pemerintahan Kayuwangi (855—885 M). Untuk memperoleh gambaran mengenai upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras, di bawah ini diperlihatkan tabel yang memuat keterangan usaha perluasan tanah sawah yang berlangsung selama enam tahun (876 s.d. 882 M).

Jenis tanah sebelum jadi Sawah	Luas	Prasasti	Angka Tahun
padang rumput	6 tampah	Jurungan	798 S (876)
kebun	146x33x106x46 dpa	Mamali	800 S (878)
tegalan	4 tampah	Kwak I	801 S (879)
tegalan	4 tampah	Kwak II	801 S (879)
tegalan	2 tampah	Ratawan I	803 S (881)
ladang ilalang	2 tampah	Ratawan II	803 S (881)
hutan	-	Ramwi	804 S (882)

Tabel di atas memberi keterangan bahwa dalam waktu yang relatif pendek terjadi peralihan status tanah menjadi sawah. Ladang ilalang dan hutan juga merupakan lahan yang dialihfungsikan, menunjukkan bahwa kebutuhan akan tanah sawah atau sumber pangan pokok memang besar. Mungkinkah upaya semacam itu dilakukan karena jumlah penduduk makin meningkat? Kemungkinan tersebut memang memiliki alasan karena masa pemerintahan Kayuwangi berlangsung stabil. Raja ini mungkin merupakan salah satu raja yang memerintah paling lama dalam sejarah pemerintahan di Jawa masa Hindu-Buddha, yaitu tidak kurang dari 30 tahun.



Relief Produk Pertanian di Candi Borobudur

Berbeda dengan masa Jawa Tengah yang menggunakan strategi ekstensifikasi dalam meningkatkan sumber daya pangan utama, pada masa kerajaan di Jawa Timur, upaya meningkatkan produk pertanian lebih banyak dilakukan melalui intensifikasi, terutama dengan mengembangkan infrastruktur pertanian, yaitu sarana irigasi dan pengendali air yang lebih kompleks. Produk ekonomi pertanian merupakan sumber utama pendapatan kerajaan yang dipungut dalam bentuk pajak atau upeti. Sumber sejarah memberikan keterangan bahwa pajak diambil dari hasil bumi dan usaha perdagangan.

Jenis pajaknya dapat berupa hasil bumi (biasanya beras atau padi) atau dalam bentuk lain, biasanya emas atau perak. Hal serupa juga terjadi dalam hal pemberian upeti. Prasasti Watukara I (902 M) menyebutkan bahwa persembahan dalam bentuk emas dan beras dari “setiap pintu” (*ring salawang salawang*) dilaksanakan pada bulan Jyesta dan Caitra. Pada umumnya pajak ditarik setiap tahun, khususnya sehabis musim panen, yaitu pada bulan Phalguna (Februari—Maret) dan Caitra (Maret—April). Meskipun demikian, kadang-kadang ditemukan keterangan bahwa pajak ditarik pada bulan-bulan lain, misalnya bulan Magha (Januari—Februari), Badra (Agustus—September), Asuji (September—Oktober) dan bulan Karttika (Oktober—November) sebagaimana disebutkan dalam beberapa prasasti dari abad ke-10 dan abad ke-11. Pajak tahunan mungkin sekali dibayar dalam bentuk hasil bumi, terutama padi.

b. Pengalaman Bencana dan Strategi Ketahanan Pangan (Mengawetkan dan Menyimpan)

Keadaan Geografi Indonesia secara alami memiliki karakter yang tidak stabil. Sumber data geologi dan catatan sejarah telah membuktikan bahwa bencana telah lama terjadi. Data sejarah secara sepintas memberikan informasi tentang terjadinya bencana gunung meletus. Berdasarkan analisis geologi, van Bammelen melihat adanya tanda bahwa pada masa lalu Gunung Merapi pernah meletus dalam skala yang besar. Bencana itu dianggap memiliki kontribusi pada kehancuran infrastruktur pertanian di Jawa Tengah dan sekaligus menyebabkan keruntuhan peradaban Hindu Buddha di Jawa Tengah. Kemungkinan seperti itu memiliki argumen yang kuat mengingat pada zaman modern pun, Gunung Merapi meletus berkali-kali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di Jawa Timur, Gunung Kelud juga meletus beberapa kali, di antaranya, juga ditulis dalam sumber sejarah. Ahli Geologi Sartono dan bandono dalam tulisannya “The Destruction of Majapahit from the Perspective of Geology” (1995) telah menganalisis tanda-tanda geologis di wilayah Jawa Timur di sekitar wilayah Mojokerto. Mereka menyimpulkan bahwa bencana gunung api menjadi salah satu sebab dari keruntuhan Majapahit.

Di samping gempa bumi dan gunung meletus, banjir atau kekeringan juga merupakan bentuk lain dari bencana yang mungkin sekali pernah dihadapi oleh masyarakat kuno. Data prasasti memberi informasi adanya luapan kali yang membanjiri wilayah persawahan di wilayah Jawa Timur. Kekeringan karena musim kemarau yang panjang tidak hanya menimbulkan tanaman mati dan tidak produktif, tetapi dapat juga menimbulkan

kebakaran. Wilayah Jawa Timur, misalnya, memiliki curah hujan lebih sedikit daripada Jawa Tengah maka kawasan itu lebih rentan menghadapi kekeringan. Oleh karena itu, respons teknologi terhadap kendala lingkungan yang berkaitan dengan masalah bangunan air lebih berkembang di wilayah ini daripada di Jawa Tengah.

Bencana alam bukanlah satu-satunya jenis musibah yang dihadapi oleh masyarakat pada masa lalu. Bencana lain disebabkan oleh manusia, misalnya perang. Sumber sejarah mengisahkan adanya peperangan di antara kerajaan-kerajaan. Konflik perebutan kekuasaan terjadi pada masa Mataram antara dinasti yang saling memperebutkan hegemoni di wilayah Jawa Tengah. Pada masa Kediri peperangan berlangsung lama sehingga Kerajaan Kediri yang besar dipecah menjadi dua, masing-masing berpusat di wilayah yang berbeda, satu Panjalu di pedalaman dan satunya lagi di Janggala di dekat pesisir. Kerajaan Singhasai menjadi contoh bagi kisah klasik tentang perebutan kekuasaan di antara keluarga raja yang berlangsung turun-temurun. Demikian juga masa Majapahit ditandai dengan pemberontakan oleh raja-raja bawahan. Pada masa puncak kekuatannya, Raja Majapahit, bahkan, melakukan ekspedisi militer ke wilayah luar Jawa.



Relief Padi di sawah yang Diserang Hama di Candi Borobudur

Penting untuk dikemukakan adalah bencana karena hama yang menyerang lahan pertanian. Sumber prasasti memang tidak menyebutkan kasus seperti itu, tetapi kemungkinan hal tersebut terjadi sangat besar. Pahatan relief candi Borobudur, misalnya, memberikan informasi tentang hadirnya hama tikus di sawah yang padinya sedang menguning. Selain itu, para penjaga dan anjing yang berteduh di bawah dangau di tepian sawah tidak melihat kejadian itu. Sepetik pahatan itu menggambarkan bahwa hama tikus memiliki peran dalam mengurangi sumber daya pangan.

Seluruh peristiwa bencana itu tentu memberi pengaruh terhadap perekonomian. Strategi apakah yang mungkin dikembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah semacam itu? Dari sudut ketahanan pangan, cara mengantisipasinya dapat dilakukan melalui teknologi pengolahan dan pengawetan bahan makanan dan penyimpanan hasil panen dalam lumbung. Tradisi mengolah dan mengawetkan bahan makanan telah dikenal sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Sumber prasasti Jawa kuno dari abad ke-10 menyebutkan berbagai sumber makanan yang bersumber dari tumbuhan (nabati), dan dari hewan (hewani).

Berdasarkan keterangan dari sumber prasasti dan kakawin serta data arkeologi (relief pada candi) diketahui adanya bahan makanan yang termasuk kategori pertama, yaitu beras, umbi-umbian (ubi dan talas), cabai, labu, kacang-kacangan, rempah-rempah (jahe, jamuju, sirih, kapulaga), buah-buahan (durian, rambutan, manggis, jeruk, kecapi, sukun, langsung, jambang, salak, nangka, jambu bol, wuni, mangga, dan pisang) dan jenis palem (kelapa). Di antara bahan pangan nabati di atas yang paling utama adalah beras karena bahan itu merupakan sumber makanan pokok masyarakat Jawa Kuna. Hal itu tercermin dari sumber prasasti yang menyebutkan nasi (dalam berbagai variasi) sebagai menu utama dalam upacara makan bersama dalam peristiwa penetapan daerah menjadi sima. Beras, kecuali dapat diolah sebagai nasi, juga dapat menghasilkan jenis makanan lain, di antaranya ketupat, lontong, dan berbagai jenis kue.

Minyak kelapa, minyak jarak, gula, dan bermacam-macam jenis minuman, baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol masih termasuk kategori produksi pangan nabati. Khusus mengenai jenis minuman, sumber prasasti dan kakawin menyebutkan sekitar 15 istilah menyebut minuman beralkohol dan 7 jenis minuman tidak beralkohol.

Adapun yang termasuk dalam produksi pangan hewani adalah bahan makanan yang diolah dari jenis hewan, unggas, dan ikan. Adapun hewan yang di dalam prasasti pernah disebut sebagai sumber pangan dan dikonsumsi rakyat adalah babi ternak (*celeng*), babi hutan (*wok*), kerbau (*kbo/hadangan*), kijang (*kidang*), kambing (*wdus*), sapi (*sapi*) dan kera (*wrai*). Di samping itu, yang masuk kategori unggas adalah bebek (*andah*), angsa (*angsa*), dan ayam (*ayam*). Di luar itu dikenal juga kalong (*kaluang*) dan sejenis burung (*alap-alap*).

Sementara itu, yang masuk kelompok ikan, khususnya hewan air tawar, adalah kepiting sungai (*hayuyu*), udang sungai (*hurang*), sejenis ikan (*wagalan, kawan-kawan, dlag*). Selain itu, yang termasuk ikan laut adalah kepiting laut (*getam*), cumi (*hnus*), kerang-kerangan (*iwak knas*), sejenis ikan laut (*kadiwas, layar-layar, prang, tangiri, rumahan, slar*). Di samping itu, terdapat beberapa jenis ikan yang tidak diketahui habitatnya, yaitu bijanjan, bilunglung, harang, halahala, dan kandari. Sumber prasasti juga menyebutkan beberapa jenis daging dan ikan yang diawetkan dalam bentuk dendeng (*deng*) atau rasa asin (*asin-asin*) sebelum dikonsumsi.

Respons lain terhadap bencana yang dapat memengaruhi ekonomi pertanian adalah dengan membangun lumbung padi. Keterangan sumber tertulis mengenai strategi itu sangat sedikit. Sumber kakawin dari masa Jawa Timur memberi keterangan tentang adanya lumbung-lumbung padi yang kecil di desa-desa. Tentu saja keberadaan lumbung dengan ukuran besar seharusnya dibangun juga di pusat-pusat pemerintahan yang menjadi bagian dari lumbung kerajaan.



Lumbung Ukuran Besar (Relief Candi Borobudur)

Data prasasti memberi keterangan bahwa di antara petugas pemungut pajak (*mangilala drawya haji*) terdapat petugas yang bertanggung jawab menjaga lumbung padi. Mereka itu dikenal dengan sebutan *pakalanggang* dan *pakalingking*. Kedua nama petugas tersebut mungkin merupakan salah satu kelompok dari 1000 pegawai sipil rendahan yang disebutkan dalam catatan berita Cina dari zaman dinasti Sung. Dalam catatan tersebut dikemukakan bahwa di antara tugas yang harus mereka lakukan adalah menjaga perbendaharaan kerajaan dan lumbung-lumbung padi di kota. Sementara itu, di lingkungan perdesaan juga terdapat lumbung dengan ukuran kecil sebagaimana dilukiskan dalam kakawin *Sumanasantaka*.



Lumbung Ukuran Kecil (Relief Candi Borobudur)



Kegiatan Membajak Sawah dengan Sapi (Relief Candi Borobudur)

Cukup menarik bahwa bangunan semacam lumbung itu tergambar di dalam pahatan relief candi Borobudur. Di candi itu terdapat bangunan yang mungkin sekali merupakan lumbung ukuran besar yang berdiri di atas kolom kayu atau batu yang kokoh.

Bagian kolong bangunan digunakan sebagai tempat bercengkerama. Gambar ini mirip sekali dengan bentuk lumbung tradisional yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Di samping lumbung yang besar, terdapat juga lumbung yang ukurannya lebih kecil.

Konstruksi bangunan lumbung berdiri di atas tiang-tiang sehingga menyerupai rumah panggung. Bentuk lumbung pada umumnya meniru bentuk rumah panggung. Kebiasaan itu masih berlaku di banyak daerah di Indonesia.

Strategi lain yang dikembangkan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan di masa depan adalah beternak. Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa beternak sebagai strategi meningkatkan ketahanan pangan telah dikenal pada masa prasejarah. Pada saat kehidupan makin berkembang dan jumlah penduduk makin banyak, jenis yang ditenakan makin beragam, di antaranya kerbau, sapi kambing, babi, bebek, dan ayam. Penyebutan hewan-hewan ini dijumpai dalam prasasti yang memuat keterangan tentang hewan-hewan yang dijual di pasar lokal. Sumber prasasti juga menyebutkan hitungan pajak di pasar-pasar dikenakan kepada para pedagang hewan tersebut. Tentu saja, hewan tersebut tidak seluruhnya ditenakkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari ataupun mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Hewan seperti kerbau atau sapi juga dimanfaatkan sebagai tenaga untuk membajak sawah.

2. Perniagaan dan Kehidupan Kota

Perdagangan

Data tentang perdagangan, khususnya di tingkat lokal, dapat diketahui dalam sumber prasasti. Transaksi jual-beli umumnya terjadi di pasar (*pkan*) yang berlangsung secara bergilir mengikuti sistem pertanggalan lima hari seminggu (*pancawara*). Dalam tatanan itu satu desa di pusat (sebagai desa induk) dikelilingi oleh 4 empat desa di keempat mata angin utama. Dengan mengikuti siklus pasar *pancawara*, setiap desa yang termasuk dalam sebuah panatur desa sekurang-kurangnya sekali dalam lima hari akan menjadi tempat pertukaran barang. Satu siklus perputaran itu dalam bahasa Jawa sekarang disebut dengan istilah *sepasar*.

Jika dilihat secara hierarkis, empat pasar desa-anak dalam siklus pasar *pancawara* mungkin dapat dipandang sebagai pusat pengumpulan barang pada tingkat pertama. Sementara itu, pasar desa-induk yang ada di tengah berfungsi sebagai pusat pengumpulan barang pada tingkatan yang lebih tinggi. Di tempat itu barang-barang akan ditemukan dalam jumlah dan variasi yang lebih besar daripada barang-barang yang diperjualbelikan di keempat pasar desa-anak yang mengelilinginya. Hal itulah yang menjelaskan alasan sumber prasasti dan data etnografi menegaskan bahwa transaksi jual beli paling ramai terjadi pada hari kelima, yaitu *kaliwuan*. Di atasnya lagi terdapat pasar yang lebih tinggi dengan jaringan yang lebih luas. Tatanan seperti di atas mengandung asumsi bahwa pasar *pancawara* memiliki dua tingkatan, yang pertama menyatukan empat desa-anak dan sebuah desa-induk, sedangkan tingkatan kedua yang lebih tinggi menyatukan sejumlah desa-induk (tidak diketahui jumlahnya) atau desa-anak yang berkembang ke dalam satu sistem pasar yang lebih luas.

Dapat diperkirakan bahwa salah satu lokasi yang dapat dimasukkan dalam kategori pasar *pancawarna* terletak di daerah strategis, misalnya di persimpangan jalan, baik jalan darat maupun jalan air (terutama di daerah delta sungai). Kemungkinan lain adalah di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terlalu besar.

Masih ada lagi kemungkinan adanya pasar yang lebih besar yang menjadi pusat pertukaran utama dalam sistem perekonomian kerajaan. Di Jawa, lokasi pasar jenis itu mungkin terdapat di pelabuhan-pelabuhan pantai utara, tetapi dapat pula ditemukan di daerah-daerah yang lebih ke arah hulu, yaitu di pelabuhan-pelabuhan sungai. Sumber prasasti memberikan indikasi adanya pelabuhan, baik di daerah pedalaman maupun di daerah pantai. Prasasti Kamalagyan (1037 M), misalnya, menyebutkan adanya Pelabuhan Hujung Galuh yang banyak didatangi oleh para pedagang dari pulau wilayah Nusantara (*dwipantara*) yang disebut dengan istilah *puhawang*. Ahli epigrafi de Casparis (1958) menduga tempat tersebut terletak di daerah hulu di dekat Mojokerto.

Adapun prasasti tahun 1050 yang ditemukan di dekat Tuban menyebutkan adanya usaha perbaikan pelabuhan di Kembang Putih. Adanya temuan keramik Cina pada periode itu di pengairan Tuban merupakan indikasi bahwa nama Kembang Putih mungkin mengacu

kepada nama tempat yang kemudian dikenal dengan nama Tuban. Jika hal ini benar, pada awal abad ke-11 di Jawa terdapat dua pelabuhan besar yang masing-masing terdapat di wilayah hulu dan mungkin terletak dekat dengan pusat kerajaan, dan di wilayah pantai yang merupakan pelabuhan utama kerajaan. Tempat pertama, terutama, menjalankan fungsi pertukaran barang, sedangkan tempat kedua berfungsi sebagai tempat berlabuh barang-barang yang berasal dari luar wilayah Nusantara, terutama dari Asia Selatan dan Asia Timur.

Hubungan antara kedua jenis pelabuhan tersebut tidak diketahui, tetapi dapat dikemukakan dugaan bahwa pelabuhan utama kerajaan yang terletak di hulu dapat pula menjalankan fungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang diturunkan di pelabuhan pantai. Kakawin *Negarakrtagama* menyebutkan adanya bangunan gudang dan rumah-rumah tinggal bagi para pedagang asing di sekitar pelabuhan utama Majapahit yang terletak dekat kerajaan, yaitu Bubat. Pada masa berikutnya, Pelabuhan Canggü menjalankan fungsi serupa.

Jenis komoditas yang dipertukarkan di tiap-tiap pusat di atas tidak diketahui dengan pasti. Sumber prasasti menyebutkan bahwa jenis komoditas yang umum ditemukan di pasar desa atau di pasar tingkat pertama atau tingkat kedua, di antaranya beras, kacang, sayuran, buah-buahan, ayam, telur, minyak, gula, dan makanan kecil. Di samping itu, dijual pula keperluan rumah tangga seperti atap rumah, kapur sirih, keranjang, tikar, aneka barang dari bambu dan kayu, gerabah dalam berbagai bentuk, kain, burung dan binatang liar. Beberapa jenis komoditas yang memiliki jangkauan lebih luas tampaknya dibawa oleh para pedagang yang lebih profesional, di antaranya gula kelapa, asam, garam, terasi, ikan asin, bawang merah, dan bermacam-macam bumbu. Yang termasuk juga di sini adalah buah pinang, wadah pinang, kapas, benang katun, bahan pewarna, lempeng-lempeng logam, dan barang-barang logam lain.

Binatang ternak juga diperjualkan di pasar-pasar lokal, terutama kerbau, sapi, kambing, babi, bebek dan ayam. Di pasar berjualan para perajin, di antaranya, adalah para perajin tembaga, perunggu, besi dan gerabah, masing-masing membawa hasil usahanya sendiri. Tidak diketahui secara pasti jenis komoditas seperti itu tetap mendominasi pasar di tingkatan yang lebih besar atau tidak. Secara umum, pasar di tingkat paling bawah akan didominasi oleh barang-barang yang masuk kategori bahan pangan. Sementara itu, pasar-pasar dengan tingkatan lebih tinggi akan ditandai oleh makin seringnya muncul barang yang berkaitan dengan bahan nonpangan atau peralatan, termasuk di sini adalah para penjual jasa, misalnya pembuat kerajinan permata, kawat, pot dari logam, jasa pateri, tukang batu, perajin kayu, pelukis, dan pembuat perahu.

Adapun jenis-jenis komoditas di pelabuhan utama dapat diketahui dari berita Cina. Catatan berita masa Dinasti Sung menyebutkan komoditas yang diekspor dari pelabuhan di Pulau Jawa terdiri atas beras, kapuk, gaharu, kesumba, lada, kayu sepong, kayu cendana, cengkih, pala, damar, kapur barus dan lain-lain. Di antara barang-barang tersebut diketahui berasal dari wilayah Indonesia timur, khususnya rempah-rempah dan hasil hutan. Komoditas jenis itulah yang terutama diekspor ke Cina.

Sebaliknya, dari Cina didatangkan barang-barang komoditas mewah, terutama keramik dan kain sutra ke pelabuhan di Pulau Jawa. Pola pertukaran barang semacam itu telah mantap dilakukan sesudah abad ke-11. Berita Cina dari awal abad ke-15 juga masih menyebutkan hal yang sama. Sementara itu, dari India terutama, didatangkan kain-kain dalam kualitas bagus. Perdagangan dengan India terus berlangsung hingga abad ke-15, bahkan pada masa-masa berikutnya.

Meskipun demikian, di Pulau Jawa tidak hanya dijumpai barang asing yang didatangkan dari Cina dan India, tetapi juga barang dari negeri lain di wilayah Asia Daratan, terutama Thailand dan dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu dari Jepang. Di Thailand dapat diketahui dari temuan keramik di daerah Pati, Jepara, Trowulan, Lumajang, Blitar, Malang, dan Kediri, sedangkan dari Jepang, yaitu temuan di Pati berupa mata uang logam yang berasal dari masa pemerintahan Dinasti Daghi (1126—1131). Mata uang itu ditemukan bersama-sama dengan himpunan mata uang Cina.

Hingga akhir abad ke-14 orientasi dagang Jawa adalah wilayah negeri-negeri yang terletak di sebelah barat laut Pulau Jawa, yaitu Sumatra, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Dengan demikian, komoditas Jawa terutama diekspor ke wilayah-wilayah tersebut. Sebaliknya, Pulau Jawa mendapatkan barang-barang impor juga dari wilayah-wilayah tersebut, sedangkan barang-barang dari wilayah Indonesia timur sebagian besar mungkin dibawa sendiri oleh para pedagang setempat ke pelabuhan di Pulau Jawa.

Baru sesudah memasuki abad ke-15, terutama ketika Pelabuhan Malaka menggantikan kedudukan Tuban sebagai emporium (kota besar pusat perdagangan) Asia Tenggara (sekitar tahun 1400), pedagang Jawa melakukan ekspansi langsung ke wilayah Indonesia Timur. Usaha itu dilakukan untuk mengimbangi upaya pedagang Cina yang hendak langsung mencari sendiri komoditas rempah-rempah di wilayah ini. Pada saat itu pula produksi beras dan barang-barang lain yang berasal dari Pulau Jawa diperdagangkan langsung oleh pedagangitu di wilayah Indonesia Timur. Meskipun demikian, hegemoni pedagang dari Pulau Jawa di Asia Tenggara masih terus berlangsung hingga Malaka dikuasaioleh Portugis pada tahun 1511.

3. Tradisi Menabung di Dalam Celengan

Tradisi menabung dalam arti terbatas, yaitu menyimpan uang di dalam wadahberongga yang kita kenal dengan sebutan celengan, mulai dikenal pada masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan itu mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-14. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha paling maju dalam sejarah organisasi negara kuno di Indonesia. Kerajaan ini tidak hanya mampu mengembangkan infrastruktur pertanian yang canggih dengan capaian dalam bidang irigasi, tetapi juga waduk dan tandon air dan saluran irigasi.

Majapahit juga merupakan kerajaan yang mampu menarik banyak pedagang asing untuk berniaga di pusat-pusat komersial, baik di daerah pesisir utara Jawa Timur maupun di wilayah pedalaman, termasuk di ibukota kerajaan. Kerajaan itu juga mempraktikkan penggunaan mata uang logam dalam kehidupan ekonominya, baik mata uang yang diciptakan sendiri maupun yang didatangkan dari negara lain. Capaian lain adalah diterapkannya aturan hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur berbagai persoalan.

Adanya bukti bahwa menabung uang di dalam celengan di pusat kota Majapahit merupakan indikasi upaya mengantisipasi permasalahan ekonomi tidak hanya diprakarsai oleh negara, tetapi juga muncul dari kesadaran penduduknya. Mengapa tradisi menabung dalam celengan muncul pada masyarakat Majapahit? Pertanyaan itu perlu dikemukakan karena ada asumsi bahwa tradisi itu tidak muncul secara serta-merta, tetapi karena ada prakondisi yang menyebabkan hal itu. Untuk menjawab persoalan itu, kiranya perlu terlebih dahulu dipahami aspek lain yang mendorong munculnya tradisi menabung. Setidaknya ada 3 faktor yang perlu dikemukakan mengenai hal itu, yakni (a) konsepsi masyarakat tentang harta dan kekayaan yang diekspresikan dalam perilaku, (b) penggunaan mata uang logam sebagai alat transaksi, dan (c) fungsi gerabah sebagai tempat menyimpan.

a. Konsep tentang Harta dan Kekayaan

Menabung di dalam celengan bukanlah sebuah aktivitas menyimpan benda semata, melainkan menyimpan objek yang memiliki makna ekonomi. Berpikir tentang ekonomi dapat dimaknai bentuk penghargaan pada kehidupan duniawi. Fakta ini cukup mengherankan karena dalam tradisi Hindu dan Buddha harta tidak dianggap sebagai hal yang utama. Namun, dalam kenyataan sesuatu yang bersifat duniawi memang menggoda. Bahkan, dalam kehidupan keagamaan tersedia pula ritual-ritual keagamaan yang ditujukan bagi kepentingan para penganut agama yang memiliki orientasi pada aktivitas perniagaan, atau aktivitas duniawi.

Dalam kasus itu perlu dikemukakan bahwa masa kerajaan Hindu Buddha di Jawa juga mengenal tradisi pemujaan pada dewa kekayaan, bahkan jauh sebelum kerajaan Majapahit muncul. Kalau mengingat hal itu, berkaitan dengan gagasan tentang harta dan kekayaan, kiranya perlu diuraikan keyakinan keagamaan bisa menjadi landasan bagi kelompok

masyarakat tertentu untuk sebuah keyakinan. Kelompok masyarakat meyakini bahwa harta atau kekayaan dunia merupakan sesuatu yang penting untuk diupayakan. Tokoh dewata yang sering dikaitkan dengan pemujaan semacam ini adalah Dewa Kuwera. Agar gambaran tentang pemujaan kepada dewa itu tersaji dengan utuh, di bawah ini diuraikan secara agak terperinci tulisan Rahardjo yang berjudul “Kuwera Dewa Businessman” (1990).

Dewa Kuwera dikenal dalam tradisi agama Hindu, tetapi juga dikenal dalam kepercayaan Buddha dengan nama lain, yaitu Jambhala. Agama Hindu dan Buddha umumnya menilai rendah aktivitas manusia yang berorientasi kepada pencarian kepuasan dan kesenangan duniawi. Munculnya pemujaan kepada simbol-simbol kekayaan dan kemakmuran dalam bentuk tokoh dewa cukup menarik untuk diketahui. Tokoh Kuwera ditampilkan dalam wujud yang penuh dengan simbol kemewahan. Penggambaran paling menonjol tecermin dalam tokoh Dewa Kuwera yang pertama muncul pada sekitar abad ke-8 s.d. ke-9 Masehi dalam periode kerajaan Mataram Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Tokoh itu termasuk dalam golongan “dewa kecil”, tetapi di negeri asalnya, India, Kuwera dipuja dua agama utama yang sering terlibat konflik, yaitu Hindu dan Buddha.

Kisah Dewa Kuwera itu, terutama, diceritakan dalam kitab-kitab suci agama Hindu, seperti Ramayana, Mahabharata, Varaha-purana, dan Siva-purana, tetapi dikenal juga dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Sadanamala. Sebagai tokoh populer, Kuwera dipuja sebagai dewa kekayaan dan kemakmuran. Tokoh dewa serupa itu juga dikenal dalam mitologi Yunani awal, namanya *Ploutos*. Berbeda dengan tokoh dewa utama yang biasanya dipuja oleh seluruh umat dari agama yang bersangkutan, “dewa-dewa kecil” umumnya hanya dipuja kelompok masyarakat tertentu. Kuwera pada masa lalu dipuja karena ia dianggap dewa kekayaan yang menguasai dunia harta. Kuwera sendiri sebelum masuk ke dalam sistem kepercayaan Hindu dan Buddha, dikenal sebagai kepala para setan, para raksasa, dan dunia kegelapan, tetapi kemudian diambil alih ke dalam agama Hindu dan Buddha, sebagai dewa kekayaan dan kemakmuran yang menguasai alam semesta bagian utara.

Kitab Ramayana menceritakan Kuwera sebagai anak Wisrawa karena itu disebut juga Waisrawana (putra Wisrawa). Akan tetapi, kemudian ia meninggalkan ayahnya dan mengikuti Brahma, kakeknya. Karena kesetiaannya, ia diberi anugerah berupa kehidupan dan bertakhta di Lanka sebagai ibukotanya. Kota itu semula pernah didiami oleh para raksasa, tetapi mereka kemudian berhasil disingkirkan oleh Wisnu karena berusaha melawan para dewa. Dari ibu yang lain, Kuwera memiliki empat adik tiri yang memiliki sifat berlainan, tetapi semuanya sakti. Mereka adalah Rahwana, Kumbhakarna, Wibhisana, dan seorang perempuan raksasa, yaitu Surpanaka. Rahwana kemudian tahu bahwa Lanka itu dahulu milik para raksasa yang kemudian diberikan kepada Waisrawana. Oleh karena itu, sebagai raja raksasa, ia merasa berhak memintanya kepada abang tirinya, Waisrawana. Perebutan kekuasaan abang dan adik itu akhirnya dimenangkan oleh adiknya yang ternyata lebih sakti. Sebagai akibatnya, Waisrawana harus meninggalkan Lanka, kemudian tinggal di Gunung Kailasa.

Di Gunung Kailasa, Waisrawana atau Kuwera tinggal di istana yang bersinar seperti awan yang memancarkan sinar emas. Istanaya dihiasi dengan ruang besar dari emas serta harum dengan aroma wangi-wangian. Di atas singgasana yang bersinar bagai matahari, duduklah Kuwera yang agung dengan pakaian yang dihiasi perhiasan berwarna. Oleh Brahma, kakeknya, Kuwera diberi kekuasaan atas seluruh kekayaan juga diberi kesucian dan keabadian. Gunung Kailasa juga disebut dengan nama Kubercala atau Keberadri yang berarti “bukit kubera”. Namun, kemudian tempat itu diserang Rahwana, adik tirinya yang jahat, tetapi sakti itu sehingga Kuwera akhirnya pindah ke tempat yang aman, ke bukit Gandamadana.

Di tempat itu, Kuwera tinggal bersama-sama ahli filsafat agama, dan didampingi oleh makhluk-makhluk setengah dewa, yaitu yaksa, gandharwa, sura, dan apsara. Bukit Gandamadana hutannya penuh dengan bunga yang beraneka warna; sungainya tumbuh bunga teratai keemasan; pohon yang tumbuh selalu berbuah dan berbunga, siapa pun dapat memetikinya; beberapa pohon memberi semacam cairan susu terus-menerus, sedangkan tanahnya berkelip-kelip karena ditaburi emas, berlian, dan jenis-jenis permata lainnya yang lembut.

Dalam bentuk arca, Kuwera digambarkan sebagai anak laki-laki berumur lima tahun. Perutnya buncit dan ekspresi mukanya biasanya digambarkan tenang, tetapi kadang-kadang digambarkan menyeramkan. Tutup kepalanya berupa mahkota penuh perhiasan demikian juga pakaian-pakaian yang menempel pada bagian bawah badan, tangan, dan kaki. Di tangannya, Kuwera memegang benda-benda yang menjadi identitas dirinya. Benda-benda tersebut biasanya dikenal dengan nama *gada* (pemukul), kantong harta; *matulunga* (buah jeruk) dan khususnya dalam konteks Buddhis.



Arca Kuwera
(Museum Nasional Indonesia)

Nakula (musang) memuntahkan permata dari mulutnya. Di sekeliling Kuwera terdapat juga *nidhi* (benda-benda berharga).

Gada adalah simbol pelindung. Oleh karena itu, Kuwera dianggap menjalankan fungsi “keprajuritan”, tetapi terutama berkaitan dengan perlindungan dan penjagaan harta. Kantong harta itu sendiri merupakan simbol dari kekayaan yang menjadi identitas utamanya.

Matulunga atau jeruk diduga sebagai simbol kenikmatan minuman yang sarinya dapat diambil dari buah tersebut, sedangkan *nakula* atau musang yang sedang memuntahkan permata dianggap sebagai simbol *dviyadavana*, yaitu semacam sikap hidup dermawan.

Dalam konteks Buddhisme serupa itu, Kuwera dikenal dengan nama Jambhala. *Nidhi* adalah simbol kekayaan, yang digambarkan sebagai guci atau jambangan, atau kendi yang berisi permata dan mata uang. Ciri-ciri Kuwera sendiri dianggap mencerminkan bentuk guci atau jambangan yang menjadi penanda utamanya.

Di Mathura, India Utara, pemujaan kepada Dewa Kuwera dikenal sangat luas. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan banyaknya temuan arca Kuwera, baik di dalam kota maupun di luar kota. Oleh karena itu, banyak pakar menganggap bahwa pemujaan kepada Dewa Kuwera berkaitan dengan perkembangan kegiatan dagang.



Gambar Arca Batu Jambhala
(Museum Nasional Indonesia)

Mathura ketika itu (abad ke-1 M), merupakan pusat kegiatan dagang di wilayah India. Dengan demikian, kelompok pedagang yang mungkin membentuk kesatuan- semacam gilda juga berkembang di sini. Golongan masyarakat itulah yang dalam kegiatan spekulasinya memerlukan dewa pelindung yang dapat memberikan rasa aman dan mendorong semangat mereka untuk berusaha. Di Indonesia, arca-arca Kuwera banyak ditemukan di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arca-arca tersebut terbuat dari batu, perunggu, perak, dan emas. Ukurannya pada umumnya tidak besar. Paling tinggi sekitar 128 cm (batu) dan yang terkecil tingginya hanya 5,4 cm (perak), berarti sedikit lebih pendek daripada panjang jari telunjuk orang dewasa. Di Mojokerto (Jawa Timur) ditemukan sebuah arca Kuwera dari emas yang tingginya 8,5 cm. Arca-arca tersebut sebagian besar tersimpan di museum dan koleksi pribadi yang terbuka untuk penelitian. Diduga arca-arca serupa itu masih banyak yang tersimpan sebagai koleksi pribadi yang tertutup, baik di dalam maupun luar negeri.

ditemukan di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arca-arca tersebut terbuat dari batu, perunggu, perak, dan emas. Ukurannya pada umumnya tidak besar. Paling tinggi sekitar 128 cm (batu) dan yang terkecil tingginya hanya 5,4 cm (perak), berarti sedikit lebih pendek daripada panjang jari telunjuk orang dewasa. Di Mojokerto (Jawa Timur) ditemukan sebuah arca Kuwera dari emas yang tingginya 8,5 cm. Arca-arca tersebut sebagian besar tersimpan di museum dan koleksi pribadi yang terbuka untuk penelitian. Diduga arca-arca serupa itu masih banyak yang tersimpan sebagai koleksi pribadi yang tertutup, baik di dalam maupun luar negeri.

Sesungguhnya, tidak jelas diketahui mengapa Kuwera, sebagai dewa kekayaan, digambarkan berperut gendut. Mitos mengenai alasan perutnya gendut juga tidak ada penjelasan. Ada yang menganggap bahwa perutnya yang gendut itulah simbol kemakmuran dan kekayaan karena bentuk perut serupa itu disamakan dengan bentuk guci atau jambangan yang menjadi penanda identitas Kuwera. Guci itu digambarkan sebagai tempat perhiasan dan mata uang, secara jelas mewakili simbol harta kekayaan. Wujud Kuwera dengan bentuk perut buncit serta guci-guci harta itu mungkin menjadi sumber inspirasi bagi pemilihan bentuk celengan yang baru dikenal nanti pada masa Majapahit.

Dewata lain yang dianggap sebagai pelindung para pedagang yang berlayar melalui lautan adalah Dewi Tara. Di Jawa Tengah terdapat sebuah candi besar yang dibangun untuk memuja dewi ini, yaitu Candi Kalasan yang berasal dari sekitar abad ke-8 dan ke-9. Penghargaan terhadap materi tampaknya tidak hanya tercermin dalam sistem kepercayaan keagamaan, tetapi juga dalam bentuk upaya menghimpun barang berharga dalam wadah-

wadah istimewa. Asumsi terhadap anggapan ini didasarkan atas fakta bahwa himpunan benda berharga dijumpai bertumpuk dalam wadah dalam suatu temuan yang tidak sengaja. Temuan yang paling spektakuler adalah tumpukan harta dari Desa Wonoboyo di Jawa Tengah. Benda-benda berharga itu berupa mata uang emas, perak, dan wadah-wadah berhias yang juga terbuat dari perak dan emas.

Milik siapakah benda-benda berharga ini dan untuk tujuan apa benda-benda ini tertumpuk dalam satu himpunan besar? Dari segi pemiliknya tentunya hanya bisa dihubungkan dengan golongan elite pemerintahan. Untuk kepentingan apa? Tidak ada jawabannya kecuali suatu dugaan bahwa benda itu disimpan sebagai milik pribadi atau sebagai sarana upacara yang digunakan kaum elite kerajaan.

Harta atau kekayaan tidak hanya diwakili oleh permata yang berharga, tetapi juga barang-barang lainnya, di antaranya adalah kain, baik yang biasa dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan. Hal itu tecermin dalam upacara penetapan sima. Upacara itu menggambarkan kegiatan pembagian hadiah kepada para pejabat kerajaan dari pusat hingga daerah, termasuk penduduk desa yang hadir sebagai saksi. Adapun yang memberikan hadiah adalah pejabat desa yang sebelumnya mendapat anugerah dari raja, yaitu tanah miliknya yang diubah statusnya menjadi sima, yaitu tanah yang diberi keringanan dalam pajak serta kebebasan pimpinan komunitas untuk mengelola sendiri wilayahnya.

Data prasasti dari akhir abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-10 (masa Balitung dan Sindok) mencatat bahwa bentuk hadiah (dikenal dengan sebutan *pasek-pasek*) yang paling sering disebut adalah emas (*mas*), perak (*pirak*), pakian laki-laki (*wdihan*) dan pakaian perempuan (bisa juga untuk laki-laki) yang disebut *kain* (*ken*).

Dalam bukunya yang berjudul *Patterns of Trade in Western Indonesia: Ninth through Thirteenth Centuries A.D* (1982) Christie menyebutkan berbagai jenis kain yang masuk kategori *wdihan*, yaitu sebagai berikut:

(1) *ganjar haju patra sisi*, (2) *ganjar patra sisi*, (3) *ganjar haji*, (4) *ganjar patra*, (5) *jaro haji*, (6) *jaro*, (7) *buat kling putih*, (8) *bwat pinilai*, (9) *pinilai*, (10) *bwat lwitan*, (11) *kalyaga*, (12) *pilih angsit*, (13) *rangga*, (14) *tapis*, (15) *siwakidang*, (16) *bira/wira*, (17) *jaga*, (18) *hamawaru*, (19) *takurang*, (20) *alapnya sularikuning*, (21) *ragi*, (22) *pangalih*, (23) *ambay-ambay*, (24) *lunggar*, (25) *bwat waitan*, (26) *cadar*, (27) *lwir mayang*, (28) *putih*, (29) *raja yoga*, (30) *pamodana*, (31) *ron paribu*, (32) *suswan*, (33) *prana*, (34) *sulasih*, (35) *tadahan*, (36) *syami himi-himi*.

Yang masuk dalam kategori ken/kain adalah sebagai berikut:

(1) *jaro*, (2) *kalagya*, (3) *pinilai*, (4) *bwat wetan*, (5) *bwat lor*, (6) *pangkat*, (7) *buat ingulu*, (8) *kalangpakan*, (9) *atmaraksa*, (10) *kaki*, (11) *putih*, (12) *rangga*, (13) *kalamwetan*.

Di samping barang-barang tersebut, kadang-kadang diberi juga hadiah atau pasek-pasek berupa binatang ternak, biasanya kerbau dan kambing, dan suatu pemberian lain atau semacam bekal untuk pulang yang disebut dengan istilah *pangankat panungsun*.

Jumlah pesek-pasek yang diberikan sebagai hadiah tidak sama antara satu prasasti dan prasasti lain. Meskipun demikian, terdapat pola yang umum, yaitu bahwa nilai pasek-pasek disesuaikan dengan tingkatan jabatan atau posisi sosial yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Dengan sedikit kekecualian, pejabat yang lebih tinggi akan menerima pasek-pasek dalam jumlah dan kualitas yang melebihi pejabat dengan kedudukan yang lebih rendah.

Jumlah emas yang pernah disebut dalam satu prasasti dapat mencapai lebih dari 2 kilogram sebagaimana dijumpai dalam prasasti Poh (905). Jumlah perak dapat mencapai lebih dari 2 kilogram sebagaimana dijumpai dalam prasasti Rongkap (901) dan prasasti Kasugihan (907). Jumlah *wdihan* 106 pasang dalam prasasti Poh. Adapun jumlah pejabat yang menerima hadiah bisa kurang dari 15 orang, tetapi dapat juga lebih dari 100 orang sebagaimana disebut dalam prasasti-prasasti Panggumulan (902) dengan jumlah 142 orang, Poh (905) dengan jumlah 137 orang, dan Alasantan (939) dengan jumlah 108 orang.

Ketika tradisi penetapan sima mulai menyusut, khususnya ketika memasuki abad ke-14, tradisi saling memberi hadiah muncul dalam bentuk lain, di antaranya adalah pada acara “perjalanan kerajaan” ke wilayah-wilayah bawahan. Keterangan ini dapat dijumpai dalam kakawin *Nagarakertagama*, khususnya pada bagian-bagian yang memuat kejadian yang mengiringi perjalanan rombongan Raja Hayam Wuruk ke daerah ujung timur Pulau Jawa yang ketika itu masuk wilayah kerajaan bawahan Majapahit, yaitu Lumajang. Dikisahkan, misalnya, pada saat rombongan raja sampai di pusat pemerintahan daerah atau di pusat keagamaan, biasanya diadakan upacara penghormatan pejabat setempat yang ditandai dengan pemberian hadiah kepada raja (dan mungkin pula pejabat lainnya).

Pemberian tersebut mungkin berupa hasil bumi atau ternak yang berasal dari wilayah yang bersangkutan, yang didatangkan dari Madura, atau wilayah kepulauan sebelah timurnya. Di samping itu, diselenggarakan ritual sang raja dapat bercengkerama dengan pelayan-pelayan wanita yang sengaja disediakan untuk maksud itu. Sebagai balasannya, sang raja memberikan hadiah kepada para pejabat tersebut berupa kain yang dibuat oleh para perajin di kota dan sejumlah uang, baik *picis* maupun uang emas.

Tidak hanya itu, menurut berita Cina yang menceritakan kehidupan di Jawa pada masa Majapahit, diketahui bahwa bahwa para bangsawan sangat menyukai kain mewah asal Benggala, kain sutra dan keramik dari Cina dengan pola biru-putih. Bukti di situs arkeologi menunjukkan bahwa pecahan keramik Cina memang banyak dijumpai di situs Trowulan

yang dianggap sebagai bekas ibukota Majapahit.

Di samping itu, terdapat petunjuk adanya kesukaan para bangsawan Jawa untuk keluar ibukota beserta iring-iringan rombongan dalam jumlah besar dan dilakukan secara meriah. Berita Chau Ju-kua dari abad ke-12 dan abad ke-13 tentang Sukitan dikutip dari ahli sejarah kuno Wirjosuparto sebagai bagian dari kerajaan Kadiri menyebutkan catatan sebagai berikut.

“Jika raja mengadakan perjalanan ia dinaungi oleh payung hitam atau putih, diiringi oleh lebih dari 500 pengikut yang membawa berbagai senjata jenis tombak dan pisau, dan memakai berbagai bentuk topi: ada yang berbentuk kepala harimau, menjangkan, kebau, biri-biri, unggas, gajah, singa, atau kera, dengan bendera-bendera kecil berbagai warna (hitam, merah, biru, putih, kuning) yang terbuat dari kain sutra”.

Mengenai tujuan utama kegiatan itu tidak disebutkan, Tetapi dari keterangan sepintas, yaitu “jika akan mengadakan perjalanan”, tampaknya tidak dimaksudkan untuk berperang. Kemungkinan lainnya adalah sekadar untuk melakukan arak-arakan atau kegiatan perburuan atau kedua-duanya. Kebiasaan itulah yang mengawali tradisi perjalanan keliling kerajaan pada masa Majapahit. Di dalam kitab *Negarakrtagama* pupuh 50—54, antara lain, disebutkan bahwa di sela-sela perjalanan panjang, raja melakukan perburuan di tempat yang jauh dari permukiman desa. Bersamanya terdapat para pengiring yang memiliki kedudukan berbeda-beda, para pembantu kerajaan yang bersenjata (bala) berjalan kaki, para pejabat sipil rendahan (*bhertya*), dan para pendeta (*wiku*). Adapun kendaraan yang dinaikinya (wahana) adalah, terutama, kuda di samping pedati.

Kebiasaan semacam ini tampaknya sangat berakar hingga ditiru juga oleh penguasa bawahan yang kemudian bangkit sesudah Majapahit mengalami kemunduran. Gejala ini tecermin dalam catatan Tome Pires dan pengunjung Eropa yang pertama datang ke wilayah Jawa pada awal abad ke-16. Pires, misalnya, mengatakan bahwa raja-raja Jawa yang suka pesiar dan pesta-pesta adalah juga ahli dalam berkuda dan menyukai kegiatan berburu. Selain itu, disebutkan bahwa pada saat hendak mengadakan perayaan perkawinan atau melakukan perburuan, raja mengumumkan hal itu di pusat kota. Pada saat bepergian ia diiringi oleh dua hingga tiga ribu orang yang membawa tombak berhias emas dan perak. Raja di depan kemudian disusul para selir yang naik pedati. Para istri menaiki gajah yang diberi pakaian berhias di belakangnya diikuti oleh 30 orang perempuan berjalan kaki yang susunannya menurut tingkatan statusnya. Di belakangnya adalah pejabat tinggi (*Guste Pate*) dengan tombak buruan beserta sejumlah anjing pemburu. Kebiasaan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh raja, tetapi juga penguasa-penguasa bawahannya. Pires mendengar cerita ini di kota Tuban dan melihat dengan sendiri di Sedayu.

Gambaran di atas menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Kuno sejak masa Hindu Buddha memang memiliki gaya hidup yang menyukai kesenangan dunia. Mengonsumsi harta dan kekayaan dunia telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dari pejabat kerajaan hingga rakyat.

b. Penggunaan Mata Uang Logam

Celengan yang ditemukan di bekas kota Majapahit, yaitu Trowulan, memang digunakan untuk menyimpan mata uang, khususnya mata uang logam. Di situs ini memang ditemukan mata uang Cina dalam jumlah sangat besar yang berasal dari berbagai dinasti, Sebagian dari masa Dinasti Sung, kemudian Yuan, dan terbanyak dari dinasti yang sezaman, yaitu dinasti Ming. Meskipun mata uang Cina banyak digunakan pada masa Majapahit, pengenalan mata uang sebagai alat tukar sudah dikenal jauh sebelum zaman Majapahit.

Istilah Jawa Kuna *wli* (beli) pertama diketahui dalam prasasti dari tahun 878 M dan istilah Sansekerta *wyaya* ditemukan pada tahun yang sama dari prasasti lain. Keterangan tersebut mengindikasikan adanya transaksi jual-beli, tetapi tidak diketahui semua transaksi jual beli menggunakan mata uang atau tidak sebagai sarannya. Kalau mengingat mata uang Jawa pada masa awal menggunakan logam-logam mulia (emas dan perak) yang jumlahnya tentu terbatas, sebagian transaksi mungkin tidak menggunakan mata uang, tetapi dengan menggunakan cara barter. Pada masa Jawa Kuna, mata uang yang digunakan terbuat dari bahan logam. Berdasarkan bahannya, diketahui ada 5 jenis, yaitu emas, perak, perunggu, tembaga, dan besi.

Berdasarkan keterangan dari sumber prasasti, mata uang emas digunakan untuk membayar pajak, terutama pajak hasil bumi. Misalnya disebutkan bahwa sawah seluas 6 *tampah* pajaknya adalah emas sebesar 6 *suwarna*, 7 *masa*, dan *kupang*. Istilah *tampah* mengacu pada ukuran luas tanah pada



Mata Uang Emas (persegi) dan Perak (bulat) yang Berfungsi sebagai Alat Bayar, Pajak dan Hadiah atau Persembahan (Miksic 1990)

saat itu, Sedangkan suwarna, masa, dan kupang adalah sebutan untuk nilai uang. Pajak bisa dibayar dengan menggunakan barang, tetapi juga sering dibayar dengan menggunakan, baik untuk pajak tanah, perdagangan, usaha kerajinan, maupun profesi.

Meskipun emas umumnya dipakai untuk transaksi nonjual beli, dalam kasus-kasus tertentu mata uang itu juga digunakan sebagai alat bayar, misalnya untuk membeli kerbau. Jadi, ada kemungkinan emas digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang yang bernilai tinggi. Berbeda dengan emas, perak tidak begitu diketahui fungsinya, tetapi sebagaimana emas, perak sering disebut sebagai hadiah dalam upacara penetapan sima.

Standar ukuran dan berat mata uang di Jawa telah dibakukan sejak pertengahan abad ke-9 ketika kerajaan Hindu Buddha masih berpusat di Jawa Tengah. Meskipun demikian, bentuk dan pola hias mata uang tersebut dapat berubah-ubah dari satu zaman ke zaman berikutnya. Biasanya mata uang emas dibuat persegi dan agak tipis, sedangkan mata uang perak dibuat dengan hiasan daun empat kelopak di salah satu sisinya. Mata uang emas dan perak terus berlaku sejak abad ke-9, tetapi menyusut pada abad ke-14.

Mata uang tembaga pada umumnya adalah mata uang Cina yang digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan, tetapi juga sebagai alat pembayaran pajak. Nilai mata uang Cina jauh lebih rendah daripada alat tukar lokal yang terbuat dari emas dan perak. Sejak akhir abad ke-10 dan seterusnya, mata uang tembaga Cina diimpor secara besar-besaran ke Jawa. Berita Cina yang ditulis Chau Ju-Kua pada awal abad ke-13 menyebutkan bahwa penggunaan mata uang tembaga Cina yang ditukar dengan sejumlah besar komoditas rempah-rempah. Keterangan ini memberi petunjuk bahwa mata uang tembaga pada saat itu tidak digunakan sebagai mata uang, tetapi sebagai komoditas yang dapat diperoleh melalui barter. Hasil ekskavasi di daerah Trowulan tahun 1976 s.d. 1988 menemukan mata uang tembaga Cina dari berbagai dinasti (sejak Tang), tetapi jumlah terbanyak adalah dari dinasti Sung. Berbagai gambaran di atas menjelaskan bahwa praktik penggunaan mata uang logam untuk berbagai keperluan telah dikenal jauh sebelum masa Majapahit.

c. Fungsi Gerabah sebagai Tempat Menyimpan.

Menabung di dalam celengan membutuhkan wadah yang berbeda dengan wadah jenis gerabah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bentuk celengan yang bulat itu terinspirasi dari bentuk wadah bulat yang telah lama dikembangkan dalam tradisi gerabah pada masa sebelumnya. Bentuk celengan itu mungkin saja semata-mata meniru bentuk fenomena alam yang biasa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bentuk manusia, hewan atau sekadar bola-bola biasa. Meskipun demikian, dapat saja bentuk tertentu berkaitan dengan makna yang terkandung dalam budaya menabung, misalnya bentuk guci yang menjadi simbol dewa kekayaan. Wujud-ujud guci yang berkaitan dengan kekayaan biasanya digambarkan dengan diberi hiasan di bagian mulut atau leher atau badannya.

Sejumlah relief di Candi Borobudur memiliki bentuk bulat, lonjong, dengan berbagai variasinya. Gambar-gambar guci pada relief dapat memberi informasi tentang tradisi pembuatan gerabah atau guci yang bentuknya memang seperti yang terdapat pada relief. Bahkan, beberapa guci memiliki bentuk seperti celengan karena rapat bagian atasnya.

Adapun guci-guci lainnya sering dikaitkan dengan ritual persembahan. Mengikuti konteks

penggambarannya, fungsi guci-guci itu bisa memiliki makna, baik religius maupun praktis. Tafsiran tentang fungsi guci-guci itu masih perlu dikaji secara khusus berdasarkan konteks penggambarannya.

Pentingnya informasi ini diberikan adalah untuk memahami apakah celengan Majapahit sepenuhnya memiliki fungsi praktis, yaitu fungsi ekonomi? Ataukah juga memiliki fungsi keagamaan?



**Para Wanita Membawa Wadah Gerabah di Lingkungan Istana
(Relief Candi Borobudur)**



Gambar Periuk dan Tempayan Bermotif Permata di Lingkungan Istana (Relief Candi Borobudur)



Gambar Periuk dan Tempayan Bermotif Permata di Lingkungan Istana (Relief Candi Borobudur)

d. Awal Tradisi Menabung di dalam Celengan

Menabung dalam arti menyimpan mata uang di dalam wadah berongga merupakan bentuk penyempitan makna dari tindakan menabung. Namun, konsep ini yang sekarang berlaku untuk menjelaskan yang dimaksud dengan istilah menabung. Istilah menabung dimaknai dalam konteks masa kini dapat ditelusuri dari kamus. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI, 1997) dijelaskan bahwa kata *menabung* berasal dari kata dasar *tabung* yang memiliki sejumlah arti, yaitu sebagai berikut:

1. 'bambu seruas atau lebih (untuk menaruh sesuatu)'; 'bumbung';
2. 'tempat sesuatu yang bentuknya seperti bumbung';
3. 'bis (kotak surat)';
4. 'celengan (tempat menyimpan uang)'; dan
5. 'tek silinder (dalam mesin)'.

Berkaitan dengan pembahasan tentang tradisi menabung, tiga di antaranya memiliki arti yang relevan, yaitu nomor (1)'bambu seruas atau lebih', nomor (2)'tempat sesuatu yang bentuknya seperti bumbung', dan nomor (4)'celengan atau tempat menyimpan uang'. Dari ketiga arti tersebut ada satu sifat pokok yang dimiliki oleh ketiganya, yaitu suatu benda yang memiliki ruang di dalamnya. Adapun kata *menabung* mengandung arti menyimpan sesuatu di dalam ruang yang disebut dengan tabung itu.

KBBI (1997:987) bahkan lebih khusus memberikan arti kata *menabung* sebagai suatu kegiatan 'menyimpan uang', dengan keterangan tambahan yang mengacu kepada tempat uang itu di simpan, yaitu di celengan, pos, bank dan lain-lain. Celengan, tabung bambu, ataupun bentuk-bentuk lain yang secara tradisional biasa dipakai untuk menyimpan uang memang makin terdesak oleh munculnya lembaga modern yang melayani jasa penyimpanan uang. Namun, arti paling konkret kegiatan menabung, yaitu menyimpan uang di dalam celengan, masih tetap dikenal luas dalam masyarakat Indonesia hingga kini.

Kata *celengan* itu sebenarnya sangat efisien. Kata itu mengandung 2 arti sekaligus, yaitu tempat fisik untuk menyimpan uang dan uang simpanan itu sendiri. Contoh penggunaan dalam kalimat dapat seperti berikut ini. *Jumlah celengan saya di dalam celengan itu (yang terbuat dari ruas bambu misalnya) sebanyak satu juta rupiah.* Asal kata *celengan* itu sebenarnya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Jadi, kata itu masih "misteri". Jika diambil dari kata dasar *celeng*, artinya adalah 'babi' atau 'babi liar'. Namun, celengan tidak selalu berupa babi meskipun binatang ini sering juga dijadikan model bentuk celengan, terutama celengan kuna. Cukup menarik bahwa orang Inggris mengenal pula celengan berbentuk babi yang dikenal dengan sebutan *piggy bank*.

Kata *celengan* adalah istilah Jawa yang tidak diketahui alasannya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Jawa Kuno tampaknya tidak dikenal istilah *celengan*. Kata *celeng* memang ada dan artinya adalah 'babi' atau 'babi hutan'. Di samping itu, ada kata *pacelengan* yang berarti 'tempat babi-babi dikandangkan'. Kata *celengan* mungkin baru diperkenalkan oleh orang Jawa pada masa kemudian.

Dalam kamus susunan Pigeaud yang berjudul *Javaans-Nederlands Woordenboek* dikenal sejumlah kata Jawa yang berkaitan dengan kegiatan menabung, yaitu *celengan* berarti '*spaarpot*' (tempat menabung), *dicelengi* berarti '*opgespaard*' (disimpan), dan *dicelengake* berarti '*men spaart voor iemand*' (menabungkan untuk seseorang). Bahwa kata *celengan* berasal dari kata *celeng* yang artinya 'babi' kiranya sudah jelas. Tetapi masih menjadi persoalan alasan harus istilah itu yang dipakai.

Sementara itu, celengan bisa berbentuk makhluk lain selain babi bahkan hanya sekedar bumbung. Mungkinkah arti awal kata *celengan* adalah simpanan, yaitu kekayaan. Jika asumsi itu benar, kata *celengan* memang diambil dengan sadar karena *celeng* atau *babi* dalam masyarakat masa lalu merupakan simbol kekayaan dan karena itu merupakan salah satu jenis binatang yang paling awal dipelihara oleh umat manusia. Tanda-tanda ini pun masih bisa dilacak dalam berbagai masyarakat sederhana di pedalaman Indonesia. Sementara itu, di Jawa dan Sunda masih kita kenal mitos tentang "babi ngepet" atau sebutan serupa lainnya yang dikaitkan dengan upaya mencari kekayaan secara cepat. Sekali lagi kita menemukan hubungan antara kekayaan dan menggunakan babi sebagai simbolnya.

Di bekas ibukota Majapahit, yaitu Trowulan kita menemukan banyak indikasi adanya budaya menabung dengan cara menyimpan uang logam dalam tabung wadah terakota yang kemudian kita kenal dengan sebutan celengan. Dalam kaitannya dengan praktik menyimpan uang logam dalam wadah gerabah, perlu dipahami bahwa nilai mata uang logam itu tentunya pertama-tama tidak terdapat pada bendanya secara intrinsik, tetapi pada nilai ekonomi yang disepakati terhadap setiap pecahan mata uangnya, serta fungsi mata uang itu dalam kehidupan ekonomi dan nonekonomi. Dalam kasus Trowulan, mata uang logam Cina merupakan satu-satunya jenis mata uang yang disimpan di dalam celengan.

Penggunaan mata uang logam Cina yang terbuat dari tembaga mulai diperkenalkan di Pulau Jawa sejak akhir abad ke-10 atau awal abad ke-11. Selama abad ke-11 hingga abad ke-13, Pulau Jawa merupakan salah satu mitra dagang yang penting bagi Cina dan Arab. Hal ini menjelaskan alasan mata uang Cina dibawa ke Pulau Jawa. Berita Cina juga menyebutkan bahwa mata uang Cina digunakan secara umum dalam perdagangan di Pulau Jawa. Ditemukannya celengan bersandingan dengan mata uang logam Cina dari berbagai ukuran di situs Trowulan mengindikasikan bahwa kehidupan ekonomi Majapahit telah cukup berkembang. Munculnya tradisi menabung menandai makin luasnya fungsi uang dalam masyarakat tersebut. Mata uang tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar, alat bayar, dan satuan hitung, tetapi juga sebagai alat penyimpan nilai.

Trowulan merupakan nama suatu daerah di wilayah Mojokerto dan sekaligus situs terpenting yang pernah menjadi pusat kerajaan terbesar di Pulau Jawa sebelum masa Islam, yaitu Kerajaan Majapahit. Celengan-celengan yang ditemukan di tempat ini sebagian besar tidak diketahui lokasi ditemukannya secara tepat. Sebagian besar barang itu diperoleh atau dibeli dari penduduk setempat yang mendapatkannya secara tidak sengaja. Hanya sebagian kecil diperoleh melalui penelitian dan penggalian secara sistematis. Sebagian

dari celengan tersebut kini masih dapat dilihat di Museum Situs Trowulan dan sebagian lainnya terdapat di Museum Princessehof di Leeuwarden Negeri Belanda. Selain itu, ada celengan disimpan sebagai koleksi pribadi R. Refugi di negeri yang sama.

Sejauh yang dapat diketahui, celengan Trowulan merupakan bukti tertua dari awal munculnya tradisi menabung di Jawa atau mungkin juga di Indonesia. Dari segi bahannya, seluruh celengan terbuat dari tanah liat dibakar dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Segi variasi bentuknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk manusia, bentuk binatang, dan bentuk bulatan.

Celengan Bentuk Manusia. Berdasarkan ciri-ciri fisik kepalanya, celengan tipe manusia, terutama, menggambarkan figur anak kecil, tetapi ada pula yang menggambarkan figur orang dewasa. Kini celengan tipe ini tidak ada yang utuh. Kepala sudah lepas dari bagian tubuhnya. Ukuran kepala celengan dengan figur anak kecil tidak melebihi kepalan tangan orang dewasa. Pada bagian atas salah satu kepala diberi lubang untuk memasukkan uang dengan posisi membujur, sedangkan yang lainnya melintang. Panjang lubang digunakan untuk memasukkan mata uang 3,2 cm dan 3,5 cm, sedangkan lebarnya 3,5 mm dan 4 mm. Bagian lehernya yang patah memperlihatkan bahwa celengan ini bagian badan sebagai tempat menampung mata uang yang ditabung. Karena bagian badannya hilang, kita belum tahu bagaimana bentuk utuhnya. Dalam tulisannya yang berjudul *Javanese Terracottas* (1982), H.R.A. Muller memperlihatkan sebuah fragmen badan tanpa kepalacelengan berbentuk manusia. Bentuknya menggambarkan badan manusia berperut gendut dengan sikap duduk. Kaki kanan ditekuk dengan posisi bersila dan kaki kiri tegak menempel pada



**Celengan Jenis Manusia yang
Tinggal Bagian Kepala**
(Museum Trowulan)

perutnya. Lubang untuk mata uang terdapat di bagian punggung di antara kedua bahunya. Itu menunjukkan bahwa untuk tipe manusia ada dua cara dalam menempatkan lubang untuk memasukkan mata uang, yaitu pada bagian atas kepala dan pada bagian punggung.

Celengan Bentuk Hewan. Bentuk celengan jenis ini wujudnya adalah babi atau celeng, domba, kura-kura, kuda, gajah, dan katak. Ketika penelitian dilakukan pada tahun 1990, hanya beberapa celengan yang masih dapat dijumpai di Museum Trowulan, yaitu babi (2 buah) dan gajah (1 buah).

Kedua babi tersebut masing-masing panjangnya 14 cm dan 22 cm, sedangkan lebarnya 5,5 cm dan 9 cm.



**Celengan Jenis Hewan, yaitu Babi dalam
Berbagai Sisi (Miksic 1996)**

Celengan gajah lebih kecil lagi ukurannya, yaitu panjang 9,5 cm dan lebar 6 cm. Menurut laporan Muller, ukuran celengan babi terpanjang adalah 45 cm panjang dan 31 cm tinggi. Celengan itu mungkin terbesar dari jenisnya. Di samping itu, terdapat celengan babi yang kecil, panjangnya hanya 6 cm. Celengan ini merupakan mainan anak kecil karena tempat untuk memasukkan mata uang hanya berupa goresan. Celengan jenis itu hampir semuanya dalam keadaan utuh atau kalau rusak masih mudah diketahui bentuk utuhnya. Jenis hewan yang jarang ditemukan adalah katak. Jenis kataknya adalah yang bagian perut depan dan belakang buncit.



Celengan Jenis Hewan, yaitu Gajah
(Museum Trowulan)



**Celengan Jenis Hewan,
yaitu Katak dari Trowulan**
(Damais 2012)

Celengan Bentuk Bulatan. Celengan jenis ini mungkin yang terbanyak dibuat di Trowulan. Bentuk celengan seperti ini ada yang menyebutnya dengan istilah *“ballshape”*, tetapi ada juga yang menyebut *“buah maja”*. Di antara bentuk bulatan yang berukuran besar lebih mirip dengan buah semangka. Bentuknya tidak selalu bulat seperti bola. Pada umumnya berbentuk lonjong dengan bagian atas lebih besar daripada bagian bawah, tetapi ada pula yang bulatnya agak pipih. Pada umumnya berwarna kemerahan, seperti umumnya kendi-kendi tanah liat yang dijumpai di pasar-pasar tradisional. Hiasannya berupa lingkaran konsentris mengikuti bentuk celengannya. Di antara garis-garis lingkaran tersebut dibuat hiasan ombak seperti gerak ular berjalan. Lubang untuk memasukkan mata uang biasanya terletak persis dibagian atas paling tengah, jadi di pusat lingkaran, tetapi ada juga yang letaknya agak ke pinggir. Di antara celengan jenis ini ada pula yang memiliki *“leher”*, seperti kendi air minum, tetapi dengan ukuran lebih kecil, lebih pendek, dan tertutup.



Celengan Bentuk Bola dengan Dua Model
Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya, Trowulan



Celengan Bentuk Bola dengan Dua Model
Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya, Trowulan

Ada juga celengan yang menyerupai “jambangan harta”, yaitu berupa bulatan dengan leher pendek, tetapi lebar. Bentuk celengan seperti itu mirip sekali dengan salah satu bentuk benda-benda yang menyertai penggambaran arca dewa kekayaan, yaitu Kuwera. Celengan tipe ini memiliki ukuran bervariasi. Ukuran terkecil kira-kira sebesar bola tenis dan yang terbesar sebesar bola basket. Ukuran tinggi dari yang terkecil hingga terbesar berkisar antara 3 cm hingga 30 cm, sedangkan lebar antara 9,5 cm hingga 33 cm.

Hal lain yang menarik dari celengan jenis ini adalah adanya lubang-lubang tembus di sekeliling badannya. Ukurannya sekitar 4 mm hingga 5 mm atau kira-kira selebar colokan sambungan listrik. Jumlahnya ada yang sedikit, tetapi ada juga yang banyak sehingga menyerupai pola lubang pada nanas yang baru dikupas. Jadi, bila di dalam celengan terdapat uang yang disimpan akan dapat dilihat dari luar. Ada kemungkinan lubang-lubang ini sengaja dibuat agar udara yang mengembang ketika terjadi pembakaran dapat keluar melalui lubang ini sehingga mencegah terjadinya salah bentuk (deformasi). Fungsi lainnya adalah untuk mengurangi kelembapan sehingga mata uang yang ditabung tidak mudah karatan.



**Celengan Bentuk Bola yang
Diberi Lubang-lubang Kecil**
(Laboratorium Arkeologi FIB UI)

Berdasarkan bukti-bukti temuan celengan di Trowulan sebagaimana ditunjukkan di atas, dapat dikatakan bahwa tradisi menabung dalam celengan dari tanah liat telah dikenal pada abad ke-14 atau abad ke-15. Meskipun demikian, masih dapat dipersoalkan apakah kegiatan menabung pada masyarakat Majapahit didasarkan atas motivasi yang sama dengan masyarakat masa kini, yaitu untuk menyimpan atau untuk mengumpulkan investasi sebagai antisipasi masa depan. Ataukah mempunyai motif lain? Misalnya untuk tujuan keagamaan sebagaimana dikenal di India?

Pertanyaan di atas tidak mudah dijawab mengingat sumber sejarah yang ada tidak memberikan keterangan apa pun berkaitan dengan tradisi ini. Bukti-bukti artefaktual pun belum meyakinkan benar. Hingga kini belum pernah ditemukan celengan dalam keadaan utuh yang berisi mata uang di dalamnya. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar celengan ditemukan sudah hancur atau tidak utuh.

Bila kita berasumsi bahwa celengan Trowulan memang digunakan untuk menabung, kita dapat mendugab bahwa celengan yang utuh memang belum dijual. Kemungkinan lainnya adalah sudah dibelitetapi belum diisi atau bahkan memang dibeli hanya untuk hiasan atau mainan. Meskipun kepastian mengenai dugaan tersebut belum dapat diperoleh, satu hal cukup meyakinkan bahwa sebagian celengan Majapahit memang digunakan untuk menyimpan uang logam.

Beberapa celengan yang sepertinya utuh pada bagian bawahnya (dasarnya) sudah berlubang. Lubang itu sengaja dibuat untuk mengeluarkan simpanan yang ada di dalamnya tanpa harus merusak seluruh celengan. Bukti lain yang lebih meyakinkan adalah sebuah wadah koleksi Pusat Penelitian Arkeologi yang pecah bagian atasnya, tetapi masih dapat dikenali bahwa wadah tersebut adalah celengan karena bekas lubang untuk memasukan mata uang masih tersisa sedikit. Wadah ini menjadi penting sekali artinya karena di bagian dasarsebelah dalam tertinggal sisa-sisa logam dari jenis mata uang kepeng. Dari hasil temuan celengan di kotak galian pada tahun 1990 juga memperlihatkan adanya sejumlah mata uang logam yang kedapatan berdekatan dengan temuan celengan yang sudah hancur. Bila benar mata uang tersebut semula berada di dalam celengan yang ada di dekatnya, cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa sejumlah celengan di Trowulan memang benar-benar digunakan untuk menyimpan uang.

Seberapa luas masyarakat Majapahit telah mengenal kebiasaan menabung belum bisa dikemukakan secara tegas. Hal yang sudah dapat diyakini adalah bahwa kelompok masyarakat kota ada yang sudah melakukannya. Data penggalian tahun 1990 memberikan bukti adanya dua celengan yang ditemukan berdekatan dengan mata uang logam di dalam situs yang dikenal sebagai bekas “ibukota Majapahit”. Keduanya berada di dalam ruangan dari sisa sebuah rumah tinggal yang mewakili kelompok masyarakat “bukan kelas bawah”.

Jika dilihat konteks temuan di sekelilingnya, celengan tersebut jelas tidak dipakai untuk tujuan keagamaan, tetapi untuk sarana menabung dalam keluarga. Ini menunjukkan indikasi kuat bahwa masyarakat kotalah yang paling aktif dalam kegiatan menabung. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa penduduk desa tidak mengenal adanya tradisi menabung karena produksi celengan itu tentunya tidak dibuat oleh orang kota, tetapi oleh penduduk desa atau oleh penduduk pinggir kota.

Mengenai mata uang yang disimpan di dalam celengan-celengan Trowulan, kita hanya dapat menduga berdasarkan uang-uang logam yang tersebar di wilayah ini.

Bukti arkeologi memperlihatkan bahwa mata uang logam Cina yang terdapat di Trowulan berasal dari 4 dinasti di Cina, yaitu Tang (618—762 M), Sung (960—1274), Ming (1368—1457), dan Qing (1723—1743). Di situs itu, temuan mata uang dari dinasti Sung



Mata Uang Logam Cina dalam Berbagai Ukuran
(Miksic 1995)

sangat menonjol dengan ukuran garis tengah antara 2 cm sampai 2,6 cm. Mata uang jenis inilah yang mungkin paling banyak dimasukkan ke dalam celengan.

Perlu disebutkan bahwa penggunaan mata uang Cina di Jawa tampaknya tidak terkait dengan periode tertentu. Dalam satu periode dapat digunakan mata uang dari berbagai periode dinasti. Berita Cina dari abad ke-15 menyebutkan bahwa di Jawa (Majapahit), mata uang tembaga dari dinasti-dinasti Cina digunakan sebagai alat tukar secara umum.

Dengan ditemukannya celengan berbagai variasi dalam suatu situs yang cukup luas mengindikasikan kehidupan ekonomi Majapahit telah cukup kompleks. Munculnya tradisi menabung menandai makin luasnya fungsi uang dalam masyarakat tersebut. Mata uang tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar, alat bayar, dan satuan hitung, tetapi juga sebagai alat penyimpan.

Jika dipandang dari sudut kemasyarakatan dan kebudayaan, aktivitas menabung mempunyai arti penting karena peristiwa ini menandai tumbuhnya nilai-nilai yang didasarkan pada perhitungan rasional untuk mengantisipasi masa depan. Di samping itu, tradisi tersebut juga menandai munculnya sikap bahwa upaya mengumpulkan kekayaan materi bukanlah tindakan yang tidak terpuji, tetapi justru dihargai tinggi. Suatu pandangan yang sesungguhnya melawan ide-ide keagamaan Hinduisme dan Buddhisme yang menjadi ideologi umum yang dianut masyarakat Jawa sejak abad ke-8.

Berkaitan dengan munculnya tradisi menabung pada masa Majapahit, ada satu pertanyaan lagi yang memerlukan jawaban serius, yaitu mengapa tradisi menabung munculnya pada masa Majapahit, bukan pada masa sebelumnya? Apakah alasan yang mendorong masyarakat Majapahit merasa perlu mengembangkan tradisi menabung? Dalam rumusan lain, situasi apa yang berlangsung pada masa Majapahit ketika itu sehingga mendorong munculnya kebiasaan menabung.

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan kajian yang lebih dalam dan luas. Namun, salah satu yang mungkin dapat menjelaskannya adalah bahwa mata uang logam Cina menjadi makin penting kedudukannya dalam perekonomian masyarakat, baik dari segi fungsinya (tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga untuk membayar pajak, denda dan lain-lain), maupun skala masyarakat yang menggunakannya.

Sebaliknya, pasokan mata uang logam itu dari Cina justru dihentikan. Dengan demikian, meningkatnya kebutuhan mata uang tidak diimbangi dengan penambahan produksinya. Situasi ini dapat menyebabkan meningkatnya nilai mata uang yang beredar. Dengan menyimpan mata uang, ada harapan bahwa nilai mata uang tersebut akan makin meningkat pada masa datang.

Warisan Tradisi Menabung yang Dipertahankan

1. Lapisan-lapisan Kebudayaan yang Tidak Merata

Telah disinggung sebelumnya bahwa wilayah Nusantara sangat luas. Wilayah daratan dalam bentuk pulau-pulau yang besar paling banyak dihuni, baik yang berada di Indonesia Barat, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bali maupun di sebelah timurnya, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di tempat-tempat itulah kita temukan bukti kehidupan manusia dari zaman prasejarah dengan tradisi berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka yang memang memiliki tradisi kuat dalam berlayar juga tinggal di pulau-pulau kecil tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa itu dapat diduga bahwa sebagian dari komunitas prasejarah juga tinggal di atas perairan di beberapa kawasan. Oleh karena itu, hampir di seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia mengalami zaman yang sama, yaitu zaman prasejarah. Inilah yang menjadi lapisan budaya pertama dan tertua di Indonesia.

Di atas lapisan yang relatif rata itu selanjutnya hadir lapisan budaya baru yang corak utamanya bersifat Hindu-Buddha. Namun, hanya sebagian dari wilayah Nusantara ini yang mendapat pengaruh budaya dari India. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha hanya berkembang secara penuh di Indonesia bagian barat, terutama Jawa bagian Tengah dan Timur serta beberapa bagian di Pulau Sumatra, yaitu Sumatra Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Bali.

Ke arah timur pengaruhnya makin tipis diwakili oleh sebagian wilayah Kalimantan dan beberapa titik Sulawesi. Pengaruh India tidak tampak di wilayah Maluku dan Papua. Bahkan, di tempat-tempat pengaruh budaya Hindu-Buddha itu muncul, tingkat intensitasnya juga berbeda-beda. Kerajaan-kerajaan besar hanya muncul di wilayah Barat, yaitu Sriwijaya dan Melayu di Sumatra dan Mataram, Kadiri, Singhasari, dan Majapahit di Pulau Jawa. Ke arah timur kerajaan-kerajaan yang berkembang mungkin sekali hanya kecil skala wilayah kekuasaannya. Bahkan, mungkin banyak di antara kerajaan-kerajaan kecil itu hanya muncul sekejap dan kemudian punah.

Banyak wilayah Indonesia lain tetap menjalankan tradisi prasejarah. Bahkan, dipinggiran, terdapat wilayah-wilayah pengaruh tradisi Hindu-Buddha yang penduduknya tetap mempraktikkan tradisi prasejarah. Dengan demikian, gambaran zaman Hindu-Buddha sesungguhnya bersifat sporadis. Bahkan, di banyak tempat sering ditemukan corak budaya yang samar-samar karena tradisi Hindu-Buddha dipraktikkan berdampingan atau bahkan dicampur dengan tradisi prasejarah. Itulah lapisan kedua kebudayaan Indonesia.

Lapisan ketiga adalah tradisi yang dipengaruhi oleh Islam dan kerajaan yang bercorak Islam. Jangkauan pengaruh kerajaan-kerajaan Islam ini jauh lebih luas daripada pengaruh Hindu-Buddha. Hampir semua wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari pengaruh Hindu-Buddha kemudian menjadi bagian dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam, kecuali sebagian besar wilayah di Bali.

Di luar itu pengaruh Islam meluas di wilayah Indonesia bagian timur yang sebelumnya belum tersentuh oleh pengaruh Hindu-Buddha. Meskipun demikian, wilayah Papua untuk sebagian besar bertahan dengan tradisi-tradisi lama dari zaman prasejarah. Periode kerajaan-kerajaan Islam, terutama, mengembangkan praktik perdagangan internasional yang pusatnya terutama di wilayah-wilayah pesisir atau muara sungai. Oleh karena itu, di pulau-pulau yang besar, wilayah pedalaman tetap mempertahankan tradisi sebelumnya.

Hingga menjelang datangnya bangsa Barat sesungguhnya keanekaragaman Indonesia telah tumbuh sangat kompleks sebagai akibat dari pengalaman sejarah dan proses-proses dialog antarbangsa, baik dengan masyarakat Nusantara maupun masyarakat dari luar wilayah Nusantara. Dengan masuknya pengaruh Barat, memberikan warna baru pada lapisan budaya Nusantara sebagai lapisan keempat. Cakupannya di seluruh Nusantara, terutama, di wilayah bekas pusat-pusat politik masa sebelumnya. Dengan demikian, lapisan-lapisan kebudayaan Indonesia saat ini dibentuk oleh berbagai unsur kebudayaan yang bersumber pada tradisi prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kebudayaan Barat, dan kebudayaan modern.

Meskipun saat ini tradisi Islam memengaruhi hampir seluruh wilayah

Indonesia, sisa-sisa kebudayaan lama masih tampak jelas. Kebudayaan prasejarah masih banyak dijumpai di wilayah pedalaman Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Tradisi Hindu-Buddha yang lama masih berlanjut di Bali, dan kebudayaan Islam dijumpai di sebagian besar wilayah Indonesia, tetapi menipis di bagian Indonesia Timur. Gambaran sepintas itu menunjukkan pemusatannya secara geografis. Namun, dalam kenyataan, kombinasi berbagai unsur terjadi di mana-mana akibat kontak sosial. Hal itu menimbulkan corak budaya yang sangat bervariasi.

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa akar budaya prasejarah dan intensitas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, dan Barat berbeda-beda. Itu menciptakan mozaik yang beraneka ragam di wilayah Indonesia sehingga corak budayanya juga bervariasi. Hal ini juga tercermin dalam produk budaya yang berkaitan dengan praktik pertanian dan upaya untuk memaksimalkan manfaat hasil pertanian.

Di samping dipengaruhi oleh faktor datangnya budaya luar, keanekaragaman corak budaya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam. Geografi Indonesia terdiri atas wilayah pegunungan, lembah, dan pantai yang memiliki corak flora dan fauna berbeda-beda. Di wilayah pegunungan yang biasanya berhutan lebat mempraktikkan tradisi berburu, mengumpulkan hasil hutan, dan membangun rumah panggung untuk menghindari binatang buas. Di lembah-lembah yang relatif nyaman manusia mengembangkan pertanian yang produktif, membangun lumbung, di samping mengembangkan keahlian khusus dalam di bidang kerajinan gerabah dan pertukangan.

Di wilayah pantai manusia mengembangkan tradisi berlayar, menangkap ikan dan pembuatan kapal dan perahu. Beberapa wilayah memiliki sumber batuan yang dapat digunakan untuk membangun monumen-monumen besar dan alat-alat rumah tangga. Di tempat lain bukan batu yang digunakan, tetapi tanah liat. Di wilayah lembah yang tanahnya dipengaruhi oleh lahar gunung api biasanya tercipta tanah-tanah subur yang memungkinkan pertanian sawah intensif dipraktikkan.

Di wilayah-wilayah yang memiliki sungai-sungai besar dan pesisir yang terlindung mendorong tumbuhnya pusat kehidupan kota karena akses transportasi air memungkinkan interaksi antarmanusia dari berbagai penjuru. Faktor alam lainnya adalah iklim dan curah hujan. Wilayah Indonesia secara umum berada di dekat garis khatulistiwa dengan iklim panas. Karena karakter geografi dan geomorfologi bervariasi, temperatur dan curah hujan juga berbeda-beda.

Wilayah-wilayah dengan curah hujan yang tinggi berpotensi menghadapi masalah banjir setiap tahun, sedangkan wilayah dengan curah hujan sedikit seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur membawa masalah kekeringan yang panjang. Tidak dapat dilupakan bahwa Indonesia dikenal sebagai wilayah

cincin api yang memiliki deretan gunung api yang dapat meletus kapan pun. Di samping itu, Indonesia merupakan daerah patahan yang mudah bergeser dan mengakibatkan gempa bumi dan tsunami, baik dengan skala kecil maupun besar.

Sejarah kebudayaan Indonesia yang berlapis-lapis dan sejarah alam Indonesia yang beraneka ragam membawa pengaruh dalam mengembangkan cara-cara hidup mereka. Secara umum, karakter budaya dan alam Indonesia yang bervariasi mengharuskan penduduknya untuk mengembangkan sikap kreatif dan adaptif. Corak budaya yang dikembangkan tidak saja dipengaruhi oleh warisan sejarah masa lalunya dan kontak-kontak budaya dengan masyarakat lain, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi alamnya.

2. Menabung Tradisional yang Dipertahankan

Dibawah iniditunjukkan bukti-bukti adanya kesadaran untuk mempertahankan budaya menabung secara tradisional dalam arti luas yang mencakup upaya pengawetan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan dalam lumbung dan gerabah, dan penyimpanan mata uang dalam celengan. Pengawetan bahan makanan dengan memanfaatkan sumberdaya alam merupakan warisan dari zaman prasejarah yang paling tua, yaitu sejak manusia hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Sementara itu, penyimpanan bahan makanan di lumbung diwarikan pada masa perkembangan berikutnya, yaitu ketika masyarakat Indonesia telah mengenal pertanian. Adapun tradisi menabung mata uang di dalam celengan baru dimulai pada masa Hindu-Buddha ketika manusia telah hidup dalam lingkungan kota.

Di bawah ini ditunjukkan ilustrasi mengenai tradisi-tradisi itu masih terus dipertahankan hingga masa kini. Contoh diberikan dari berbagai daerah untuk memperlihatkan variasi lokal yang berbeda-beda disebabkan oleh sifat lingkungannya yang juga berbeda-beda.

Mengawetkan Makanan

Pengawetan bahan makanan dapat dilakukan dengan mencampurkan bahan lain misalnya melalui proses fermentasi yang menyebabkan bahan makanan bertahan lebih lama, tetapi dengan mengubah tekstur dan rasa, misalnya tape. Namun, makanan jenis ini telah ada pada zaman prasejarah dan masa kerajaan belum ada buktinya. Namun asumsi dapat dipertimbangkan mengingat prosesnya relatif sederhana. Cara lain adalah melalui proses penambahan bahan lain, yaitu dikeringkan dengan akibat berubah tekstur, warna, dan rasa, misalnya ikan asin dan dendeng. Sumber prasasti dari masa Hindu-Buddha menyebutkan adanya dendeng dalam menu makanan, tetapi juga ikan yang diawetkan. Ikan awetan itu dibuat ikan asin karena tradisi pembuatan garam telah dikenal pada zaman itu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah mencampurkan berbagai unsur makanan menjadi wujud baru yang tidak tampak wujud aslinya, misalnya terasi. Awalnya tradisi kuliner yang dianggap mewakili kehidupan masyarakat biasa ini dimulai perlu ditelusuri. Namun, kita telah paham bahwa jenis makanan itu dapat bertahan hingga kini dan masuk ke dalam rumah tangga semua kelas sosial.

Jenis pengawetan lainnya adalah dengan melakukan pengeringan bahan pangan tanpa menambah unsur lain sehingga wujud dan rasanya relatif tidak banyak berubah. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kandungan air sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Ada kemungkinan bahwa dengan melakukan pengeringan, baik dengan matahari maupun dengan pemanggangan atau pembakaran akan membunuh jasad-jasad renik tertentu yang dapat mempercepat proses pembusukan. Teknik ini terutama dipraktikkan untuk mengawetkan bahan makanan utama Indonesia, yaitu padi atau bahan makanan lain seperti jagung, umbi-umbian (sekarang talas, singkong, ubi dan lain-lain), dan sayuran, seperti bawang.

Menyimpan bahan makanan

Ada dua jenis tempat atau wadah untuk menyimpan bahan makanan atau makanan yang telah lama berkembang, yaitu lumbung dan gerabah.

a. Lumbung

Suatu hal yang sangat menarik bahwa tradisi membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan padi hasil panen hingga kini masih dipraktikkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, tradisi ini masih terus berlanjut dalam masyarakat pedalaman yang jarang tersentuh oleh masyarakat luar, misalnya suku Dayak di tengah rimba Kalimantan yang masih mempraktikkan pertanian ladang berpindah. Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa lumbung-lumbung mungkin sekali merupakan warisan zaman prasejarah yang diciptakan ketika manusia mulai mempraktikkan pertanian ladang berpindah.

Kesinambungan sejarah terlihat, misalnya, dalam bentuk lumbung sebagaimana tampak dalam ukuran relief di candi Borobudur dari abad ke-9 tidak mengalami perubahan sama sekali teknik konstuksinya. Lumbung didirikan di atas kaki yang tinggi sehingga ruang kolong dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Satu-satunya yang mungkin berbeda adalah bahan untuk membuat konstruksi kolom kakinya serta atapnya yang tentunya disesuaikan dengan ketersediaan lingkungan alam masing-masing serta perkembangan teknologi bahan atap. Di bawah ini ditampilkan contoh-contoh berbagai corak bangunan lumbung dari berbagai sukubangsa suku bangsa di Indonesia.

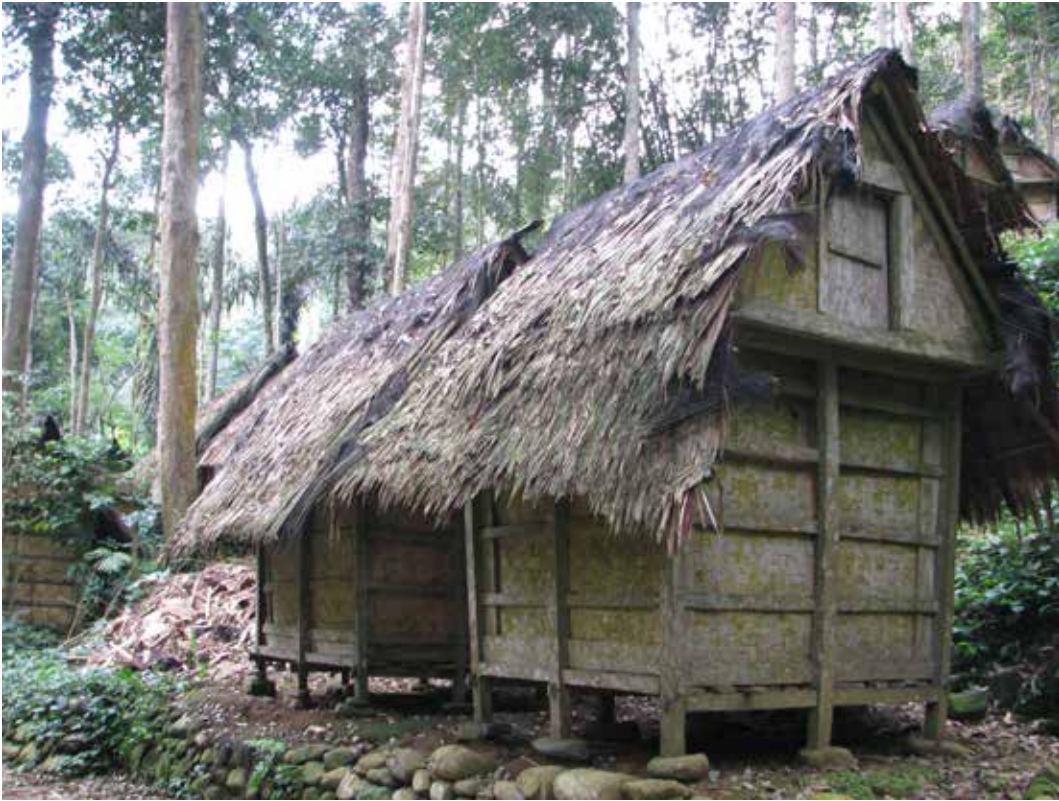


Foto lumbung di masyarakat Badui
Sumber : Cecep Eka Permana

b. Gerabah

Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa gerabah merupakan karya genius yang memiliki banyak manfaat. Berbagai manfaat ini mungkin yang menyebabkan tradisi pembuatan gerabah ini bertahan begitu lama. Gerabah tidak punah oleh perkembangan teknologi wadah modern. Dengan melihat keadaan saat ini, kita dapat mengatakan bahwa tradisi pembuatan gerabah yang telah ada sejak zaman prasejarah masih dipraktikkan di berbagai tempat di wilayah Indonesia hingga sekarang.

Pada zaman prasejarah kita menemukan situs penting tempat temuan gerabah, misalnya di Jawa Tengah (Plawangan), DKI Jakarta (Kelapa Dua, Pejaten, sepanjang sungai Ciliwung), Jawa Barat (Buni), Banten (Anyer), Bali (Gilimanuk), dan Sumba (Melolo). Selain di tempat-tempat itu, gerabah ditemukan juga di berbagai wilayah lain. Pada masa Hindu-Buddha gerabah ditemukan di situs-situs di Jawa (Trowulan, Gresik, Tuban), dan di Sumatra (Kota Cina dan Muarajambi). Selanjutnya, pada masa Islam gerabah ditemukan di situs-situs penting di Jawa Barat (Banten Lama), DKI Jakarta (Pasar Ikan), Jawa Timur (Mojokerto), dan Sulawesi Selatan (Takalar).

Kini tradisi pembuatan gerabah masih ditemukan di banyak tempat di Indonesia, misalnya di Sumatra (Air Jernih, Galo Gadang, dan Balai Talang); Jawa (Balong Mulyo, Narukan, Mayong, Bayat, dan Kasongan Mojoagung); Bali (Blah Batuh); Lombok (Panujak), Sumba (Watu Hadang); Sulawesi Utara (Pulutan); Ternate (Maregam); dan Seram (Ouw).

Beberapa contoh di bawah ini menunjukkan wadah gerabah tetap dibuat di berbagai wilayah Indonesia.

Fakta sebagaimana ditunjukkan di atas memperlihatkan bahwa tradisi pembuatan wadah ini memang tidak lekang dimakan waktu.



Proses pembuatan gerabah dengan menggunakan teknik roda putar
Sumber : Cecep Eka Permana



3. Menabung dalam Celengan

Celengan tradisional yang dibuat dari tanah liat merupakan jenis khusus dari produk tanah liat dan biasanya juga tidak disebut sebagai gerabah dalam arti barang pecah belah. Celengan dibuat dengan teknologi yang sama dengan gerabah pada umumnya, tetapi dirancang untuk fungsi yang berbeda karena dimaksudkan untuk menyimpan mata uang logam.

Celengan tradisional tidak seluruhnya terbuat dari gerabah, tetapi dapat juga dibuat dengan memanfaatkan batang bambu yang dipotong seruas-seruas atau langsung di dalam tiang rumah dari bambu. Bentuk lainnya adalah membuat celengan dengan menggunakan batok kelapa yang dibersihkan permukaannya. Kalau mengingat bahan kedua celengan itu mudah didapat dan teknik membuatnya lebih sederhana daripada celengan tanah liat, praktik membuat seperti ini telah dikenal sejak lama. Setidaknya, telah dikenal pada zaman Hindu-Buddha ketika telah digunakan mata uang koin sebagai alat tukar.



Ilustrasi Celengan Bambu zaman dulu (Koentjaraningrat, 1990)



Gambar Celengan bambu dengan Modifikasi Bahan dan Hiasan Baru (Koentjaraningrat, 1990)

Pada masa modern, kehadiran celengan tidak musnah, tetapi justru makin bervariasi baik dalam penggunaan, bahan, maupun variasi bentuknya. Celengan masa kini tidak hanya dibuat dari tanah liat, tetapi juga dengan bahan kaleng, plastik, kardus, dan kaca tembus pandang. Bentuknya pun makin bervariasi mengikuti perkembangan zaman, misalnya bentuk pesawat telepon.

a. Celengan Tabung

Celengan jenis ini mungkin sekali telah digunakan sejak waktu yang sangat lama. Kita telah mengenal bahwa pohon bambu tumbuh endemik di kawasan Nusantara. Data etnografi memberikan petunjuk bahwa bambu banyak sekali digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai barang keperluan sehari-hari, seperti memasak, membuat pagar, membuat dinding, kayu bakar, dan peralatan dapur. Celengan bambu memang makin sulit ditemukan, tetapi masih dapat ditemukan dalam beberapa dekade terakhir ini. Bentuk celengan bambu itu menginspirasi pembuatan celengan souvenir dari bahan lain.

b. Batok Kelapa Utuh

Celengan jenis ini juga masih ditemukan di beberapa wilayah di Jawa. Di kota-kota di Indonesia celengan ini dijual sebagai souvenir. Wadah celengan dari batok kelapa ada kemungkinan juga telah dikenal lama karena bahannya mudah didapat, murah harganya, dan mudah membuatnya.

c. Celengan bulat

Bentuk celengan ini mungkin sekali terinspirasi oleh celengan kuno. Berdasarkan ilustrasi yang telah ditunjukkan dalam kasus Trowulan, tampak adanya banyak kesamaan dengan Celengan Trowulan. Bentuknya bulat penuh dengan bagian kepalanya berupa bulatan meruncing seperti bunga teratai yang masih kuncup.

d. Kura-kura

Celengan bentuk kura-kura sering ditemukan karena bentuknya yang lucu. Namun celengan kura-kura jarang ditemukan pada masa lalu. Bentuk kura-kura biasanya juga dijadikan model untuk benda-benda suvenir lain, misalnya tempat abu rokok, hiasan rumah, dan liontin kalung. Ilustrasi celengan ini tampaknya dibuat dengan halus dan dibakar di dalam tungku yang tertutup sehingga warnanya bersih tanpa noda hitam karena asap.

e. Babi

Celengan bentuk hewan babi kini banyak sekali tiruannya. Sebagian memang sengaja meniru celengan babi yang ditemukan di Trowulan. Para perajin terakota di Trowulan saat ini banyak memproduksi celengan atau patung babi. Produksi yang besar tentu disebabkan oleh celengan babi digemari oleh konsumennya. Bahkan, celengan ini tampaknya menjadi ikon celengan dari Trowulan. Celengan yang tampak di gambar ilustrasi ini dikerjakan secara halus dan dibakar dalam tungku tertutup sehingga warnanya berkilap. Bentuk yang dipilih adalah anak babi yang penampilannya memang lucu.

f. Sapi

Celengan bentuk sapi merupakan model baru. Terbuat dari kayu dengan memilih bentuk sapi perah yang sebenarnya tidak banyak dternakkan di Indonesia. Jika melihat bentuk celengan ini, dapat juga digunakan sebagai mainan anak-anak.

g. Ayam Jago

Cukup menarik bahwa bangsa Indonesia lebih menyukai ayam jago daripada babi sebagai simbol budaya menabung. Memang banyak celengan dengan mengambil pilihan hewan ini, tetapi bagaimana bentuk ayam jago akhirnya menjadi pilihan perlu ditelusuri jejak-jejaknya.

Ikon Menabung

Dalam bisnis modern simbol menabung masih menggunakan tradisi lama sebagai sumber inspirasinya. Ilustrasi gambar di bawah ini menjelaskan makna mendasar budaya menabung “Financial Preparedness, protect your family by financially preparing before an emergency strikes”.

Mengapa budaya menabung secara tradisional sebagaimana ditunjukkan di atas dapat terus dipertahankan? Apakah akan tetap bisa terus bertahan menghadapi gempuran cara menabung modern? Satu-satunya jawaban yang dapat menjelaskan alasan menabung secara tradisional tetap bertahan adalah karena tradisi itu dianggap penting dan relevan hingga saat ini. Lalu nilai penting apa yang terkandung dalam tradisi menabung itu?



1. Nilai keuletan dan disiplin

Nilai ini berkaitan dengan penghargaan terhadap kerja keras yang dapat menjamin manusia untuk mempertahankan kelestarian. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa hidup itu tidak mudah sehingga perlu upaya yang sungguh-sungguh agar hidup dapat terus berlanjut. Nilai keuletan ini dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan hidup sebenarnya merupakan insting dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup. Alam mengajarkan bahwa mereka yang ulet dan memiliki daya yang kuat akan sintas (*survive*). Keuletan hanya bisa bertahan bila dipraktikkan dengan disiplin dan kerja keras.

2. Nilai kesabaran; Berkaitan dengan aspek ketahanan menderita

Makin lama seseorang dapat bertahan makin tinggi kualitas kesabarannya. Namun, kesabaran itu sendiri bukan tanpa tujuan. Kesabaran dipraktikkan dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang penting dan berharga pada masa depan yang sudah direncanakan. Pepatah Jawa sangat tepat untuk menggambarkan nilai-nilai ini, yaitu *sabar luhur wekasane* (orang yang sabar mendapatkan manfaat besar pada akhirnya).

3. Nilai perencanaan

Pada dasarnya budaya mengawetkan makanan, menyimpan bahan makanan di dalam lumbung, dan menabung di dalam celengan mempunyai nilai yang sama, yaitu adanya penghargaan terhadap upaya untuk mengantisipasi masa depan. Kondisi keuangan seseorang tidak dapat diramalkan. Dalam bahasa sekarang melakukan perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian yang dapat menimbulkan musibah, dikenal dengan istilah mitigasi atau merancang strategi untuk menghindari atau mencegah ancaman musibah.

Celengan Rusa

Bahan	: Tanah Liat
Asal	: Bali
Ukuran	: P. 27 cm L. 32 cm
No. Inc.	: 22095

Tradisi menabung merupakan salah satu tradisi lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Celengan dengan bentuk Rusa merupakan bentuk lain celengan masa lampau selain bentuk Babi yang paling sering dibuat. Celengan rusa yang terbuat dari gerabah ini memiliki ukuran serta bentuk yang cukup unik. Bentuk memanjang dari celengan dapat menampung koin lebih banyak. Secara deskriptif, warna celengan ini sebagian besar didominasi oleh warna hitam. Meskipun tidak terlalu besar, tanduk pada celengan rusa terlihat cukup kokoh. Lubang koin sendiri terdapat di punggung bagian tengah, dilengkapi dengan buntut rusa yang menjulur ke bagian tubuh rusa. Di dua bagian kaki depan terdapat bekas patahan yang sudah direstorasi.



Menabung Pada Masa Prakemerdekaan

Selama tiga setengah abad bangsa Belanda dan beberapa tahun bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris datang ke bumi Nusantara. Banyak budaya baru yang diperkenalkan, antara lain menabung yang sudah tumbuh menjadi tradisi sejak masa prasejarah. Selain itu, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara masyarakat dihadapkan pada kegiatan menabung bentuk baru. Sebelumnya, kegiatan menabung dilakukan dengan cara menyimpan benda di dalam lumbung atau tempat lainnya, serta menyimpan uang dalam *celengan*, sedangkan penyimpanan model baru itu menabung dilakukan dengan cara menyimpan uang di dalam sebuah lembaga usaha yang disebut *bank*. Masyarakat tidak lagi menyimpan atau menabung di dalam rumah, tetapi di luar rumah di sebuah gedung yang lokasinya bisa jauh dari rumah.

Menurut Ginting, kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti 'bangku'. Para bankir di Florence pada masa Renaisan melakukan transaksi dengan duduk di meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan untuk duduk sambil bekerja. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu

tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun makin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.

Arti kata *bank* diuraikan secara jelas dalam UU No. 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998. Pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *bank* adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk *simpanan* dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak". Selanjutnya, pada ayat (5), secara khusus juga dijelaskan arti kata *simpanan*. Arti kata itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, kata *tabungan* dijelaskan pada pasal yang sama pada ayat (9) bahwa makna kata *tabungan* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Lalu, bagaimana kata *bank* yang berasal dari Barat masuk ke wilayah Nusantara? Masuknya kata itu tidak terlepas dari aktivitas masyarakat Nusantara dalam perdagangan rempah-rempah, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional yang dikenal dengan istilah "*spice*

road". Kedatangan bangsa Barat, terutama Belanda, berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah. Untuk memuluskan usaha dagangnya, diperlukan kehadiran bank.

Kegiatan perdagangan pada masa VOC dan masa setelah VOC dibubarkan. Kegiatan tidak mungkin dapat berjalan lancar dan berhasil mendapatkan keuntungan besar bila tidak didukung oleh kehadiran lembaga keuangan bank. VOC dalam perjalanan selama hampir 200 tahun kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia-Belanda sampai dengan 1942, banyak bukti sejarah yang ditinggalkan, baik dalam bentuk tinggalan berupa benda (*tangible*) maupun nonbenda (*intangible*) dalam bidang perbankan. Lembaga perbankan yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat bumiputra, dengan hadirnya VOC, yang berkepentingan dalam memperlancar transaksi bisnis, telah mendirikan berbagai bank. Dengan hadirnya bank, masyarakat bumiputra yang sebelumnya hanya mengenal penyimpanan uang dengan cara menabung dalam celengan, saat itu dapat menyimpan uangnya di bank.

Bank-bank yang ada di Nusantara tidak hanya didirikan pada masa VOC atau masa pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga ada bank yang didirikan oleh bangsa lain serta bank yang sifatnya lokal. Bank-bank yang didirikan masa VOC dan Hindia Belanda, antara lain, adalah Bank van Leening (1746), Bank Courant en Bank van Leening (1752), Nederlandsche Handel Maatschappij (1824), De Javasche Bank (1828), Escompobank (1857), Nederlandsche Indische Handel Bank (1841), dan

Postspaarbank (1897). Bank yang didirikan bukan oleh orang Belanda adalah The Chartered Bank of India, Australia and China (1859), Hongkong and Shanghai Banking Corporation (1919), Yokohama Specie Bank (1919), dan Mitsui Bank (1925). Adapun bank lokal yang ada adalah Bank Vereeniging Oey Tiong Ham di Semarang (1916), Chung Hwa Sanghai Maatschapij di Medan (1913), dan Batavia Bank (1918).

Tiap-tiap bank mempunyai konsep, kebijakan, dan strategi yang berbeda dalam menjalankan usahanya. Lalu, seperti apa kegiatan menabung yang pada bank yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang? Apa bedanya dengan tradisi menabung kaum bumiputra? Untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan menabung bank-bank itu, ada baiknya diawali dengan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya bank-bank tersebut.

Menabung Masa VOC (1602-1799)

Berdirinya Perserikatan Dagang VOC

Sebagaimana disebutkan di atas, masuknya kata *bank* ke wilayah Nusantara tidak terlepas dari ramainya perdagangan rempah-rempah terutama buah pala, cengkih, dan kayu manis selain kapur barus dari Sumatra. Di samping itu, letak geografis wilayah Nusantara berada di persilangan antara benua Australia dan Asia, antara benua Afrika dan Amerika, dan dikelilingi oleh Samudra Antartika, Samudra Pasifik, dan Samudra India. Wilayah Nusantara menjadi “titik temu” hubungan antarnegara dan antarbangsa yang datang dari Timur dan Barat, Utara dan Selatan. Kedua kekuatan itu membuat Nusantara menjadi daya tarik bagi kehadiran pedagang-pedagang dari India, Cina, dan Timur Tengah untuk dijual sampai ke Eropa.

Dalam perkembangan berikutnya para penjelajah Eropa bergantian datang ke Nusantara. Hal itu terjadi karena lakunya komoditas emas dan rempah-rempah di pasar Eropa. Bangsa-bangsa Eropa penasaran ingin tahu tempat asal kedua komoditas tersebut, yang di kalangan mereka disebutnya sebagai mata dagang *gold and spices*. Kemudian selama berbulan-bulan mereka berjuang mengarungi samudra untuk mencari tempat asal kedua komoditas itu.

Pada akhirnya sumber mata dagang emas dapat mereka ketahui, yang ternyata berasal dari Afrika. Kemudian, mereka mendatangi tempat itu. Akan tetapi,

tempat asal rempah-rempah yang dikenalnya sebagai “jalur rempah” atau *spice road* tidak mereka ketahui. Untuk komoditas yang satu ini, menurut Abdurrahman (2008), mereka mengetahuinya berasal dari India atau *Indias* karena penjualnya kebanyakan berasal dari India. Selain itu, ada yang menyatakan bahwa komoditas itu berasal dari suatu tempat yang mereka sebut *as ilhas de cravo* ‘rempah-rempah yang tempatnya menjadi sasaran penjelajahan lautan’. Ini berarti bahwa di antara mereka belum mengetahui tempat mata dagang rempah-rempah yang terkenal itu.

Selain dari bangsa India, bangsa Barat juga mendapatkan barang-barang itu dari pedagang Sri Langka dan Cina. Bangsa yang berdagang sampai ke Eropa itu, menurut Abdurrahman, selama berabad-abad berhasil merahasiakan tempat asal komoditas itu, yaitu kepulauan Maluku. Dengan cara demikian pengeksport cengkeh dimonopoli oleh India, Cina, dan Sri Langka.

Strategi merahasiakan Nusantara (Maluku) sebagai sumber rempah-rempah itu pada akhirnya diketahui oleh bangsa Barat. Kemudian, mulai datanglah armada kapal penjelajah bangsa Barat di Maluku. Diawali armada kapal Portugis yang mendarat pertama di Maluku tahun 1511. Setelah dua tahun kedatangannya, Sultan Ternate memberikan hak monopoli kepada Portugis. Setelah itu mendarat kapal dagang Spanyol (1521). Hak monopoli dipindahkan ke Spanyol karena negara ini berani membayar harga cengkeh dua kali lipat dari pedagang Portugis.

Selain kedua bangsa tersebut, Belanda juga mulai menjelajah ke Nusantara untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah secara langsung. Menurut Amal (2009), penjelajah Belanda tiba di Banten 85 tahun kemudian setelah bangsa Portugis mendarat di Maluku. Di bawah komando Cornelis de Houtman, armada kapal Belanda tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Meskipun datang belakangan, Belanda berhasil mengalahkan Portugis pada tahun 1601 dan menyusul Spanyol pada tahun 1603 meninggalkan Maluku.



Persidangan awal berdirinya VOC di Amsterdam dihadiri Raja Willem V selaku Penguasa Dewan Tertinggi VOC.
Sumber : *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*. F.W Stapel 1938-1940

Bangsa Portugis sempat bercokol di Maluku selama 57 tahun, Spanyol selama 142 tahun, Inggris selama 5 tahun (1811-1816), Belanda selama 350 tahun, dan kemudian digantikan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Tiap-tiap bangsa itu memiliki kebijakan politik dan perdagangan yang berbeda-beda. Meskipun kehadiran Portugis, Spanyol, Inggris, dan Jepang relatif lebih singkat dibandingkan dengan Belanda, pengaruh sistem politik dan kebudayaannya masih membekas di masyarakat Nusantara hingga sekarang.

Dengan kepergian Portugis dan Spanyol, Belanda menjadi pemegang hak monopoli perdagangan, tidak hanya di wilayah Maluku tetapi juga mencakup seluruh Nusantara. Sesuai dengan sifat dagang, Belanda dengan segala cara dan strategi berupaya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan untung besar itu, ada dua pilihan, yaitu mampu bersaing dengan pedagang lain atau menjadi pedagang tunggal alias memonopoli. Dalam hal persaingan itu Belanda yang menang sehingga Belanda dapat memonopoli tidak hanya mata dagang rempah-rempah, tetapi juga berbagai tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan.

Perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perdagangan semakin lama semakin bertambah jumlahnya; sehingga terjadi persaingan antar-perusahaan yang tidak sehat. Untuk menyatukan beberapa perusahaan milik Belanda yang saling bersaing itu, pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk menjadikan satu perusahaan saja. Untuk itu didirikanlah Persekutuan Dagang Hindia Timur atau **Vereenigde Oost-Indische Compagnie** disingkat VOC. Perserikatan itu berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan akte pendirian dari *Staten General* (Parlemen Belanda).

Menurut sejarawan Kartodirdjo (1993), VOC didirikan atas keinginan kongsi-kongsi dagang dari Belanda yang berdatangan ke Indonesia dalam kurun waktu tahun 1595 sampai dengan 1600-an. Kongsi dagang itu berasal dari Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Zeeland, Delft, Enkhuizen, dan Hoorn. Untuk memperkuat posisi perserikatan dari berbagai kongsi itu, VOC dipimpin oleh tujuh belas anggota yang merupakan perwakilan dari kongsi-kongsi dagang, yang kemudian disebut sebagai *Heeren Zeventien* atau Tuan-tuan XVII.



Vereenigde Oost-Indische Compagnie

Logo VOC

Perkumpulan dagang VOC ternyata memiliki hak berdagang yang amat luas, tidak hanya wilayah Nusantara tetapi mulai Tanjung Harapan sampai selat Magellan, termasuk pulau-pulau Selatan Pasifik, Kepulauan Jepang, Sri Lanka dan Cina Selatan. Untuk menguasai perdagangan di Nusantara, VOC diberi hak-hak istimewa (hak *octroi*), seperti hak monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang, mengangkat dan memperhentikan pegawai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, memiliki tentara sendiri, mendirikan benteng, hingga hak-hak untuk menyatakan perang dan damai, mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa setempat, dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Selain itu, VOC juga diberi kewenangan untuk membuat undang-undang, peraturan, serta membentuk pengadilan dan mahkamah agung.

Karena besarnya hak yang dimiliki VOC mempunyai kekuasaan sebagai sebuah negara sehingga dapat memaksa para raja tunduk kepada VOC. Menurut Southworth (2015), penggunaan cara berdagang dengan kekerasan dan perang memang telah dijadikan semboyan oleh Jan Pieterszoon Coen. Dikatakan oleh Coen bahwa “Perdagangan tanpa perang dan perang tanpa perdagangan tidak dapat dipertahankan” (*Trade without war, and war without trade cannot be maintained*).

Salah satu contoh penerapan politik dagang Belanda yang berlangsung dalam bentuk tekanan dalam artian perang; dapat dilihat pada isi Surat Perjanjian Gianti tanggal 13 Februari 1755 yang mengatur wilayah kekuasaan antara pihak Belanda dan raja Pakoe Boewono VII dari Surakarta. Perjanjian itu membawa pengaruh besar terhadap tata pemerintahan di Jawa dan selanjutnya berdampak terhadap tata budaya Jawa. Penandatanganan perjanjian itu, disimpulkan oleh sejarawan Soeratman, “telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kekuasaan dan pemerintahan keraton Surakarta selama satu abad”. Penandatanganan perjanjian itu membuktikan bahwa posisi raja sebagai pemegang kekuasaan menjadi lemah.

Sebaliknya, posisi Pemerintah Hindia Belanda sangat menentukan dalam kehidupan pemerintahan kerajaan. Merosotnya kekuasaan di bidang politik itu membawa pengaruh terhadap kedudukan sosial raja. Intervensi terhadap bidang itu semakin mendalam dan terus berjalan selama pemerintahan pengganti-penggantinya, dan akhirnya pada pemerintahan PB X kekuasaan dalam bidang pengadilan sepenuhnya jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (1903). Akibat dari kebijakan Belanda itu, menurut Soeratman (2000), Sunan lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada kemegahan dengan menyelenggarakan upacara dan pesta di keraton secara besar-besaran yang cenderung meniru budaya Belanda. Di samping itu, tindakan PB X dengan sangat sering bepergian ke luar daerah, menampakkan diri di muka umum, mendatangi tokoh-tokoh daerah, hanyalah merupakan suatu usaha untuk menunjukkan wibawa dan kebesarannya.

Kenyataan seperti itu tidak hanya terjadi di Kraton Kasunanan Surakarta. Hampir di seluruh kerajaan atau kesultanan kekuasaannya dilemahkan dengan memberlakukan perjanjian dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan pengekalan penjajahan. Tidak aneh bila kehidupan rakyat menjadi sengsara dan sebaliknya kehidupan pihak penjajah penuh dengan kemewahan. Politik diskriminasi diterapkan dengan ketat sehingga kehidupan masyarakat pribumi ditindas dalam segala hal. Orang bumiputra mendapatkan berbagai macam sebutan, seperti "pribumi", "nonpribumi", "bumiputra", "inlander" yang dihadapkan dengan sebutan "indo", "asing", "Timur asing" yang memang dengan sengaja dikembangkan sebagai bagian dari politik pembagian kelas antara penduduk asli dan pendatang, dalam hal ini kaum penjajah atau bangsa asing lainnya.

Dalam dunia perdagangan, Jawa bahkan Nusantara dikuasai oleh VOC. Menurut Anthony Reid dalam bukunya yang berjudul *Southeast Asia in the Age of Commerce, 145-1680* (1993) yang dikutip oleh Leirissa (1999), "...dengan munculnya hegemoni VOC dalam bidang perdagangan di Asia Tenggara (khususnya Indonesia) beralih sama sekali ke tangan VOC". Dengan hegemoni VOC itu, perserikatan dagang ini menjadi yang terbesar di abad itu. Menurut Gaastar, di antara semua perserikatan dagang yang ada di abad ke-17 dan ke-18, Perserikatan Dagang Hindia Timur (VOC) merupakan perserikatan yang paling sukses. Tidak lama sesudah kelahirannya, badan ini berhasil menyingkirkan orang Portugis, yang satu abad sebelumnya telah membangun imperium perdagangan di Asia dan hampir menyisihkan saingan di perdagangan Asia-Eropa itu. Saingan utama VOC adalah East India Company (EIC) milik Inggris, yang didirikan di London pada tahun 1600. Hal yang sama juga dikatakan oleh Balk dkk. (2007), meskipun banyak saingan dagang, dengan struktur organisasi yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti layaknya sebuah pemerintahan, VOC menjadi usaha dagang yang sangat berhasil.

Gaastra mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari bidang pelayaran kapal, perdagangan, dan personel, dua abad kegiatan VOC menunjukkan besarnya kekayaan VOC. Angka-angka total menunjukkan pertumbuhan sangat mengesankan, baik di bidang omzet perdagangan maupun yang menyangkut jumlah kapal dan tenaga yang diangkut dengan kapal itu. Kapal-kapal yang diluncurkan menuju Asia berjumlah 4.700, di antaranya 1.700 pada abad ke-17 dan 3.000 lebih pada abad ke-18. Dalam kurun waktu 1602-1700 kapal-kapal tersebut membawa 317.000 orang ke Asia, sedangkan dari tahun 1700 sampai 1795 jumlahnya 655.000. Angka-angka di bidang perdagangan membuktikan pertumbuhan perusahaan Kompeni sesudah tahun 1700.

Jumlah pengeluaran untuk pembuatan dan perlengkapan kapal-kapal serta dana dan barang-barang yang dikirim ke Asia mencapai 370 juta gulden di tahun-tahun 1640-1700. Jumlah pengeluaran itu mengalami kenaikan secara

drastis hingga mencapai 1.608 juta gulden selama kurun waktu 1700-1795. Dalam periode yang sama, nilai beli barang-barang yang dibawa kembali dari Asia berjumlah masing-masing 205 juta gulden dan 667 juta gulden. Dalam kurun waktu tersebut pertama, hasil penjualan barang-barang itu berjumlah 577 juta gulden, sedangkan dalam periode kedua 1.633 juta gulden.

Setelah Perserikatan Dagang Hindia Timur atau VOC ini berjaya selama hampir 200 tahun dan telah mengangkat derajat bangsa Belanda di antara bangsa-bangsa Eropa, pada akhirnya harus menghadapi kebangkrutan. Selain disebabkan oleh tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengurus, dalam bulan Desember 1780 terjadi pecah perang antara negeri Belanda dengan Inggris. Dua tahun kemudian Belanda terseret ke dalam perang yang sedang berlangsung antara Perancis dengan Inggris. Akibatnya, VOC ikut terkena dampak dari terjadinya krisis keuangan yang begitu genting, mengalami defisit anggaran, dan harus membayar utang dalam jumlah yang sangat besar. VOC serta merta telah kehilangan kredibilitas sehingga perusahaan besar itu tidak dapat lagi bertahan tanpa bantuan dari luar.

Bantuan itu akhirnya datang dari pemerintah Belanda, dengan menjamin pembayaran pelunasan utang lama dan bunga utang yang baru. Hanya dengan cara itu direksi VOC dapat meneruskan perusahaan. Ketergantungan dari pemerintah ini menyebabkan direksi diperkuat. Pada awalnya operasional VOC diperpanjang sampai akhir tahun 1798 dan kemudian ditambah lagi sampai 31 Desember 1800. Akan tetapi tidak sampai pada tanggal dan tahun itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC yang telah berkibar hampir 200 tahun dibubarkan dengan hutang sebanyak 136,7 juta gulden.

Berdirinya Bank Masa VOC

1. Bank van Leening

Sebagaimana dipaparkan di atas, perjalanan VOC selama hampir 200 tahun sebagai sebuah perserikatan dagang telah berhasil mendatangkan keuntungan yang amat besar. Kebutuhan transaksi keuangan yang semakin tinggi akibat dari bisnis rempah-rempah di Nusantara telah mendorong VOC untuk mendirikan bank dan dilanjutkan di era Hindia Belanda setelah VOC dibubarkan. Meskipun kehadiran bank merupakan salah satu lembaga yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah ekonomi, perdagangan dan keuangan, berdasarkan data yang ada, VOC baru memanfaatkan jasa bank pada 1746 atau hampir 145 tahun setelah berdiri. Berdirinya Bank van Leening oleh Gubernur Baron van Imhoff pada 1746 disebut sebagai lembaga keuangan pertama yang berdiri di Nusantara. Tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang akan melakukan usaha perdagangan rempah-rempah di Batavia.

Tampaknya pendirian bank ini juga ada kaitan dengan munculnya wabah penyakit malaria di Batavia tahun 1733 dan pembunuhan besar-besaran etnis Cina pada tahun 1740. Menurut Balk dkk. (2007), timbulnya bencana penyakit dan huru-hara pembunuhan itu sangat berpengaruh pada kelancaran perdagangan dan ekonomi lokal pada waktu itu. Baron van Imhoff mencari solusi dengan memebentuk badan-badan yang akan meningkatkan dan memfasilitasi perdagangan bebas dan perdagangan di kota Batavia.

Bank van Leening berkantor di sisi timur Tijgergracht atau di diagonal seberang timur Balai Kota (*Stadhuis*) atau plaza Museum Sejarah Kota Jakarta sekarang. Bank ini melayani pinjaman kepada pedagang swasta dengan cara menjaminkan barang-barang perhiasan dari emas, perak, perhiasan lainnya, kain, linen, barang-barang rumah tangga, dan lain-lain yang memiliki nilai. Bahkan, binatang dapat juga dijaminkan. Dengan demikian, bank ini merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang pertama kali didirikan di Batavia. Modal awalnya sebesar f. 7.500.000, yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya dari swasta.

Masih menurut Balk dkk. (2007), dengan cepat bank ini berhasil menarik minat para pemegang saham. Pada bulan Januari 1758 modal bank sudah bernilai 1,351,190 rix-dolar dari 197, eksklusif Eropa, peserta. Jumlah ini digunakan untuk mengumpulkan uang di lebih dari 800 tempat dengan jumlah total 248.360 ringgit. Namun, sebagian besar dari jumlah itu, yaitu 750.000 ringgit dolar, disetorkan ke Perusahaan untuk bunga tetap sebesar 4½ persen per tahun. Pada saat itu, bank memiliki 314.627 ringgit dolar dalam bentuk tunai dan 23.781 dana lelang beredar secara luar biasa.¹⁰⁷ Akibatnya, bank

memperoleh sebagian besar dari bunga yang diterima dari uang yang telah dipinjamkan Perusahaan dan dari bunga atas hipotek. Bunga kain linen yang digadaikan juga tidak sepele, terutama untuk pengusaha Asia. Kehadiran Bank van Leening yang pertama berdiri di masa VOC telah membuka wawasan baru bahwa untuk membantu keberhasilan perdagangan telah lahir lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Meskipun bank ini tidak atau belum menerapkan sistem menabung, kehadiran bank ini menjadi embrio lahirnya sistem menabung pada masa berikutnya. Selain itu, bank inilah yang kemudian menjadi “cikal bakal” berdirinya lembaga keuangan “pegadaian” di Indonesia.

2 Bank Courant en Bank van Leening

Berkaitan dengan bank di masa VOC, Belanda pada 1 September 1752 di bawah Gubernur Jenderal Mossel mendirikan Bank van Courant dengan memasukkan Bank van Leening ke dalamnya menjadi Bank Courant en Bank van Leening. Lembaga bank yang menjadi cikal bakal perbankan nasional ini menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang.

Bank kedua yang didirikan pada masa VOC adalah Bank Courant. Bank ini didirikan pada 2 Juni 1752. Pendirian bank ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi perbankan saat itu, terutama dalam hal pertukaran dan layanan sebagai deposit dan sirkulasi bank tidak berjalan lancar. Dengan berdirinya bank ini, untuk meningkatkan efisiensi diputuskan bahwa mulai 5 September 1752 keberadaan Bank van Leening yang berdiri sebelumnya disatukan dengan Bank-courant dan diberi nama baru menjadi Bank-courant en Bank van Leening. Ini adalah upaya lain untuk membuat urusan keuangan lebih mudah bagi pengusaha sipil.

Seiring dengan kemunduran perserikatan dagang VOC, perjalanan Bank-courant en Bank van Leening selanjutnya juga ikut mengalami kemunduran. Hanya disebutkan bahwa bank ini sedang menghadapi masalah yang sangat penting. Mulai dari tanggal 12 Maret 1794 bank ini selama berminggu-minggu tidak dibuka dan selanjutnya keberadaannya tidak dapat dipertahankan lagi. Bank-courant en Bank van Leening dinyatakan bangkrut dan ditutup.

Di masa VOC dari 1602—1799 hanya dua bank yang berdiri dan dua-duanya tidak berhasil menjadi yang sukses. Meskipun demikian, kehadiran dua bank ini menjadi titik awal masyarakat bumiputra mengenal sistem penyimpanan uang dengan cara baru. Seperti yang ditulis oleh Kusuma (2014), penulis buku *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, jejak sejarah Bank van Leening dan Bank-courant tetap dicatat karena bank inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya De Javasche Bank (1827) dan kelak setelah Indonesia merdeka menjadi Bank Indonesia.

Menabung Masa Hindia Belanda (1800-1942)

Setelah Bank-courant en Bank van Leening, lima tahun kemudian perserikatan dagang VOC yang pernah berjaya hampir 200 tahun menyusul dibubarkan, yaitu pada tanggal 31 Desember 1799. Menurut Anwari (2016), dengan dibubarkannya VOC seluruh aktivitasnya diambil-alih oleh pemerintah Belanda. Seluruh tanggung jawab atas tanah jajahan Nusantara ditangani langsung oleh pemerintah Belanda.

Kehadiran Gubernur Jenderal H.W. Daendels yang memerintah dari 1807—1810, bekerja keras menata organisasi pemerintahan baru secara besar-besaran untuk dapat mengembalikan kejayaan sebagai bangsa penjajah melali VOC. Akan tetapi, usaha keras Daendels itu terhenti karena sejak tahun 1811 Pulau Jawa beralih ke tangan orang-orang Inggris di bawah Gubernur Jenderal Sir Stamford Raffles sampai dengan tahun 1816. Setelah perang melawan Perancis (Napoleon) usai, Inggris dan Belanda membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada Belanda. Sejak saat itu Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda atau Nederland Indie.

Pemerintah Hindia Belanda belum selesai dalam melakukan pemulihan (*recovery*) pasca-VOC dan persoalan perang dengan Inggris dan Prancis, di Jawa pada tahun 1825—1830 pecah Perang Diponegoro atau dikenal pula sebagai Perang Jawa. Perang lima tahun telah menelan korban harta dan jiwa yang tidak kecil di kedua belah pihak. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dengan cara tipu daya yang licik dan perang dapat diakhiri, Belanda seperti “dewa mabuk” menciptakan program baru yang bagi masyarakat bumiputra dirasakan lebih kejam daripada masa VOC.

Penerapan Sistem Tanam Paksa

Setelah VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799, pemerintah Hindia Belanda berusaha keras untuk melakukan pemulihan (*recovery*) ekonomi yang mengalami kebangkutan. Upaya itu belum membuahkan hasil maksimal karena pemerintah Hindia Belanda harus menghadapi perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Perang yang dimulai tahun 1825 itu baru dapat diakhiri setelah Pangeran Diponegoro secara licik ditangkap dan dipenjara pada tahun 1830. Perang Diponegoro atau juga disebut Perang Jawa itu telah menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Bagi pemerintah Hindia perang itu telah menghabiskan dana yang tidak kecil sehingga mengalami krisis keuangan. Menurut Simbolon (2006), Perang Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi, yaitu sekitar 20 juta *guilder*. Kondisi itu lebih diperburuk lagi dengan terjadinya Perang Belgia yang berusaha memisahkan diri dari Belanda dan berakhir dengan kemerdekaan Belgia dan menyebabkan keuangan Belanda semakin terpuruk.

Untuk mengatasi krisis keuangan yang dihadapi, pemerintah Hindia Belanda melakukan suatu kajian yang arahnya tidak jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh VOC. Jika VOC mengawali aktivitasnya dengan perdagangan rempah-rempah, dari hasil kajian pemerintah Hindia Belanda mengarah pada pemanfaatan produk pertanian dan perkebunan. Bumi Nusantara yang subur, terutama daerah Jawa, menjadi daya tarik untuk mengeksploitasi potensi pertanian dan perkebunan guna mendatangkan keuntungan yang besar dan cepat. Lahirlah kosep yang disebut dengan *Cultuurstelsel* yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa.

Menurut Kartodirdjo dan Djoko Soerjo (1991), pendekatan yang digunakan dalam penerapan Sistem Tanam Paksa adalah dengan merekatkan hubungan antara pemerintah kolonial dan para petani secara langsung dan lebih intens, terutama mengarahkan petani untuk menanam tanaman ekspor dalam jumlah yang dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengatur sistem tanam paksa dengan mengeluarkan tujuh ketentuan seperti yang dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834, Nomor 22.

Ketujuh ketentuan itu yang *pertama*, dalam hal penyediaan tanah melalui hal persetujuan bersama, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. *Kedua*, tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. *Ketiga*, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. *Keempat*, bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. *Kelima*, hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah hindia belanda; apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. *Keenam*, kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk. *Ketujuh*, penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan.



Penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1830 menghentikan peperangan lima tahun yang memperburuk kondisi keuangan pemerintah Hindia Belanda.

Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch-Indie/F.W. Stapel. Stapel, F. W. (Frederik Willem), 1879-1969

Selain ketujuh ketentuan itu, juga diberikan ketentuan wajib mengenai jenis tanaman yang diizinkan oleh pemerintah kolonial. Jenis tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanam ialah kopi, tebu, dan indigo (bahan pewarna). Adapun tanaman lain yang boleh ikut ditanam dalam skala kecil, antara lain, adalah tembakau, lada, teh, dan kayu manis. Jenis tanaman itulah yang ditanam pada seperlima bagian milik tanah penduduk.

Konsep Sistem Tanam Paksa mulai dilaksanakan ketika Johannes van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal. Dalam pelaksanaan sistem yang telah dilengkapi beberapa ketentuan seringkali dilanggar sehingga rakyat kembali menjadi korban eksploitasi seperti yang dialami pada masa VOC. Seringkali laporan ke atasan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Sistem ini telah mengeksploitasi habis-habisan tenaga rakyat dan hasil pertanian dan perkebunan di atas tanahnya. Sistem Tanam Paksa yang digagas oleh Van den Bosch telah dilaksanakan secara semena-mena, kejam, dan cenderung brutal. Rakyat bumiputra tetap dalam kemiskinan dan bahkan tidak sedikit yang meninggal karena dipaksa kerja, sementara pemerintah Hindia Belanda memetik keuntungan yang sangat besar sehingga berhasil memulihkan krisis ekonomi yang dialaminya.

Dampak lain yang patut dicatat sebagai buntut dari penerapan sistem tanam paksa ini adalah timbulnya kerja paksa atau lebih dikenal dengan sebutan “kerja rodi” bagi penduduk. Mereka dipaksa bekerja tanpa diberi upah yang layak, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Mereka dipaksa membangun jalan-jalan raya, jembatan, waduk, rumah-rumah pesanggrahan untuk pegawai pemerintah kolonial, dan benteng-benteng untuk tentara kolonial. Di samping itu, penduduk desa setempat diwajibkan memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang, dan sebagainya. Dengan demikian, penduduk dikerahkan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan untuk kepentingan pribadi pegawai-pegawai kolonial dan kepala-kepala desa itu sendiri.

Terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Pulau Jawa, sebagai daerah utama pelaksanaan sistem Tanam Paksa, telah dilakukan kajian antropologis oleh Clifford Geertz. Hasil kajian itu kemudian ditulis dalam buku yang berjudul *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (1963). Menurut Geertz yang dikutip oleh Zulkarnain dalam Jurnal INFORMASI, No. 1, XXXVII, Th. 2011, eksploitasi kolonial melalui sistem Tanam Paksa di Jawa telah melahirkan apa yang disebutnya sebagai “invulusi pertanian”, tetapi pada gilirannya justru mendatangkan kesengsaraan dan kemiskinan petani di tanah Jawa. Sistem budi daya tanaman ekspor dari kebijakan pemerintah kolonial itu telah membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi yang sangat mencolok.

Digambarkan oleh Gertz bahwa bahaya kelaparan yang parah telah melanda daerah Jawa Tengah pada tahun 1849—1850. Di Karesidenan Semarang, jumlah penduduk berkurang hingga mencapai angka 9%. Hal ini terjadi karena terjadinya tindak kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda ditambah dengan kecurangan yang justru dilakukan oleh pejabat dari kalangan bumiputra. Demikian pula dengan pemaksaan kepada petani, mereka wajib menanam tanaman ekspor, seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila tetapi dibeli dengan harga murah.

Ketimpangan antara kehidupan kaum bumiputra dan kaum penjajah bersama kaki-tangannya tidak terelakkan. Kenyataan ini telah mengundang perlawanan dari rakyat dan mengundang kritikan dari berbagai pihak. Kaum humanis maupun praktisi faham liberal menyusun serangan-serangan strategis terhadap pihak pemerintah Hindia Belanda yang telah memaksa rakyat menanam tanaman yang dikehendaki dengan harga yang sangat murah bahkan tidak jarang terjadi perampasan.

Nama-nama seperti Eduard Douwes Dekker atau Multatuli, E.S.W. Roorda van Eisinga, Baron van Hoevell, dan seorang anggota Dewan Rakyat (Raad van Indie), C. Th. Van Deventer tampil kritis membela kaum petani bumiputra. Pada akhirnya pemerintah memahami akibat buruk terjadinya berbagai penyimpangan dalam penerapan sistem tanam paksa, terutama setelah terjadi banyak peristiwa kelaparan di beberapa daerah yang banyak membawa korban kematian dan penderitaan penduduk. Mulai tahun 1860, sebagian besar tanam paksa dihapuskan dan mulai tahun 1901 Culturstelsel diakhiri.

Berkat pembelaan dari C. Th. Van Deventer terhadap nasib kaum bumiputra yang menderita akibat Sistem Tanam Paksa kemudian lahir kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Politik Etis (*Etise Politic*). Kebijakan baru ini diarahkan pada perbaikan irigasi (pengairan) untuk keperluan pertanian, mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, dan memperluas kesempatan kaum bumiputra untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kebijakan sebagai bentuk balas budi atau lebih tepat sebagai “penebus dosa” atas kekeliruan program sistem tanam paksa itu, dalam kenyataan, juga tetap membuat masyarakat bumiputra tetap menderita. Kebijakan penataan di bidang kependudukan dengan melaksanakan program transmigrasi untuk mendukung bidang pertanian dan perkebunan ternyata hanya menghasilkan pekerja-pekerja rodi. Bagi rakyat politik etis tidak jauh berbeda dengan sistem tanam paksa. Hanya pendekatan etis di bidang pendidikan dan pengajaran yang kemudian melahirkan kaum terpelajar bumiputra yang menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran berbangsa.

Kondisi Ekonomi Hindia Belanda

Sistem Tanam Paksa yang diterapkan mulai tahun 1800 telah membawa dampak positif perekonomian pemerintah Hindia Belanda. Sampai dengan dibubarkannya sistem Tanam Paksa tahun 1860, berkat keuntungan usaha yang didapat, perekonomian pemerintah Hindia Belanda semakin kuat. Bertepatan dengan berkembangnya masa Sistem Tanam Paksa yang telah mendatangkan untung besar itu, antara tahun 1750—1850 terjadi suatu perubahan dalam dunia usaha yang dikenal dengan sebutan *Revolusi Industri*. Di dalam Revolusi Industri terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, yang pada gilirannya berdampak mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia.

Seiring dengan lahirnya Revolusi Industri itu, Pemerintah Hindia Belanda mulai meninggalkan kapitalisme lama dan memasuki periode kapitalisme modern. Menurut Boek (1942), sistem perdagangan bebas mengatur hubungan-hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Demikian pula halnya dengan politik pintu terbuka di Hindia Belanda, perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan hasil-hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasaran di negeri-negeri asing daripada negeri Belanda sendiri.

Titik awal kemajuan ekonomi Hindia Belanda secara umum terjadi sesudah tahun 1905 yang dipelopori oleh industri-industri ekspor-impor. Tanpa dirasakan sebelumnya, pada tahun 1890-an investasi di sektor ekspor ini telah mulai meningkat. Seperti ditulis oleh Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (1987), sesudah penanaman karet diperkenalkan pada 1910, semua cabang produksi ekspor dan industri penunjang berkembang pula dengan pesat. Pengeboran minyak bumi yang telah mulai berjalan dalam dasawarsa terakhir abad ke-19 juga turut mendorong kemajuan kegiatan industri di Hindia Belanda.

Pada 1901 pemerintah Belanda mengumumkan kebijakan ekonomi baru, yang terutama bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri Hindia Belanda. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa kegiatan ekspor Hindia Belanda terus bergerak naik dan keadaan ini tentu mengundang banyaknya investasi yang ditanamkan di Hindia Belanda. Selama periode ini kedudukan pemerintah sebagai pemakai uang terbanyak telah digantikan oleh industri ekspor dan perusahaan-perusahaan dalam negeri.

Tabel
Nilai Ekspor dan Investasi di Hindia Belanda 1905—1939
(dalam juta Gulden)

Periode	Ekspor Hindia-Belanda	Perkiraan Investasi
1905-1914	485	71
1915-1919	1.056	151
1920-1924	1.504	265
1925-1929	1.630	263
1930-1934	680	95
1935-1939	717	74

Meskipun nilai ekspor Hindia Belanda cenderung menurun, sebelum Perang Dunia kedua, Hindia Belanda adalah koloni Belanda yang kaya raya dan menduduki tempat pertama dalam ekspor karet (kurang lebih 400 ribu ton setahun) dan tempat kedua dalam ekspor gula (rata-rata 1200 ribu ton setahun) pada akhir tahun 1930-an. Dalam periode sebelum perang dunia, terdapat tiga produk ekspor penting yang dihasilkan oleh Hindia Belanda, yaitu gula, karet, dan kopra. Masih menurut Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (1987), produksi gula di Hindia Belanda dimulai sejak tahun 1840-an, sedangkan karet baru dimulai pada tahun 1910-an, diikuti dengan produksi kopra sejak tengah 1920-an. Karet dan kopra adalah hasil dari produk perkebunan swasta yang telah dimulai pasca melemahnya praktik *cultuurstelsel* di Hindia Belanda.

Tabel
Produksi Tanaman Ekspor Hindia Belanda 1930—1940
(dalam ribuan Ton)

Tahun	Kopi	Gula	Tembakau	Teh	Karet	Kopra
1930	99.000	3.007.000	124.000	72.000	245.000	552.971
1931	110.000	2.867.000	138.000	81.400	255.000	521.736
1932	138.000	2.693.000	112.000	82.000	212.000	656.295
1933	112.000	1.399.000	97.000	75.300	288.000	688.412
1934	119.000	645.000	120.000	71.400	379.000	637.885
1935	117.000	516.000	112.000	71.500	300.000	682.229
1936	131.000	592.000	105.000	75.700	313.000	701.278
1937	138.000	1.415.000	117.000	74.600	454.000	741.465
1938	115.000	1.400.000	106.000	80.600	322.000	811.183
1939	120.000	1.576.000	103.000	83.300	383.000	838.651
1940	85.000	1.607.000	100.000	82.000	549.000	412.291

Sementara itu, menurut van Laanen (1987), sejarah sistem kredit pribumi yang melibatkan uang terkait erat dengan faktor-faktor peralihan dari pilihan masing-masing rencana, pentetrasi ekonomi uang, kelaziman barter, dan tingkat gotong-royong. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat Hindia Belanda yang secara periodik meminjam uang menjelang akhir abad ke-19. Pada masa itu penghasilan dan pengeluaran uang sangat bersifat musiman dan tidak selalu bersiklus pada bulan yang sama. Hal ini terutama berlaku di wilayah penghasil tanaman palawija, seperti jagung, singkong, ubi rambat, kacang tanah, dan kacang kedelai, yang belum banyak menghasilkan uang.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada masa itu, terungkap bahwa setelah memenuhi kebutuhan pokok dan pembayaran pajak, sedikit sekali uang yang tersisa untuk meningkatkan simpanan atau mengembangkan modal. Terang sekali pada periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 masyarakat tidak memiliki tabungan dalam bentuk uang. Biasanya simpanan yang dimiliki masyarakat berupa barang, seperti tanah, ternak, perhiasan, dan padi.

Dari sekilas gambaran tentang kondisi perekonomian pemerintah Hindia Belanda di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah penerapan sistem perdagangan masa VOC kemudian dilanjutkan dengan Sistem Tanam Paksa, perekonomian dan keuangan pemerintah Hindia semakin membaik. Sebagian besar perkebunan yang didirikan sesudah tahun 1870 merupakan objek-objek penanaman modal. Ekspor modal ke Hindia Belanda pun sangat menanjak sejak tahun 1850.

Dapat ditambahkan di sini, menurut Wiharyanto, modal Belanda diekspor juga ke negeri-negeri di luar tanah jajahannya. Modal tersebut, terutama berupa modal uang dan terdiri atas modal pinjaman (*rentier capital*), kemudian dipusatkan di bank-bank yang didirikan di Hindia Belanda. Banyak bank kolonial didirikan, pada bagian kedua abad ke-19, di antaranya sebagian dengan modal asing. Meskipun pada permulaannya bank-bank kolonial itu berfungsi sebagai lembaga kredit dan finansial, akhirnya mereka mengawasi dan menguasai perusahaan-perusahaan kolonial. Di sini kita melihat sifat dari imperialism, yaitu suatu fusi antara modal industri dan modal finansial.

Bank Masa Tanam Paksa

1. Bank Nederlandsch Handel Maatschapij (NHM)

Lahirnya Bank Nederlandsch Handel Maatschapij (NHM) mempunyai kaitan dengan sistem tanam paksa yang diarsiteki oleh Gubernur Jenderal Graf van den Bosch (1830-1833). Karena pada tahun 1799 VOC bangkrut akibat korupsi yang dilakukan hampir semua pejabatnya, didirikanlah NHM yang membeli barang-barang petani dengan harga murah. Akibat sistem ini ribuan orang dikabarkan mati karena hasil jerih payahnya dibeli dengan harga sangat murah. Begitu besarnya keutungan NHM—pengganti langsung dan pewaris VOC—hingga hampir separuh uang dari Hindia Belanda disedot ke Nederland. NHM juga memiliki Escompto Bank NV yang pada tahun 1940-an mengeluarkan surat lembaran saham yang bernilai 200 gulden dan 400 gulden.

Pada akhir abad ke-18 Masehi, VOC telah mengalami kemunduran, beberapa monopolinya di daerah telah tumbang. Pemerintah Belanda kemudian memulai penyelidikannya terhadap kondisi VOC dan mengungkap kebangkrutan, skandal, dan salah urus dalam segala bidang. Perang antara Belanda dan Inggris di wilayah Eropa pada tahun 1780-an telah berpengaruh pada merosotnya perdagangan VOC di Hindia Timur (Indonesia). Apa sebabnya? kapal-kapal VOC banyak yang dirampas oleh Inggris. Karena takut atas perampasan itu, banyak kapal dagang VOC yang mogok di pelabuhan enggan untuk berlayar sehingga kegiatan dagang pun tersendat-sendat. Pada Desember 1794—Januari 1795 negeri Belanda kembali terlibat perang melawan Perancis yang kemudian berhasil membentuk pemerintahan boneka Perancis, yang mengubah nama Republik Belanda Serikat menjadi Bataafsche Republiek.

Pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan menyusul pembubaran *Heeren XVII* di Amsterdam pada 1796 dan diganti oleh suatu dewan baru. Pada Januari 1800 VOC secara resmi diambil oleh pemerintahan Bataafsche Republiek. Menurut Hermanu (2005), pada saat itu diketahui VOC mempunyai hutang sebesar 1347 juta Gulden, yang diduga akibat lemahnya pengawasan atas tindakan korupsi para pejabat VOC. Sementara itu, kekuasaan VOC di wilayah Hindia Timur dengan segera beralih kepada Inggris. Semua kantor dagang VOC di wilayah Hindia berhasil dikuasai Inggris, kecuali Jawa dan Ternate.

Pada tahun 1811 Ratu Inggris mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pemerintahan Raffles menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan Inggris di India, yaitu sistem pajak tanah. Menurut Kartodirdjo (1988), dengan cara itu ia berharap dapat memberikan kepastian hukum dan kebebasan bagi rakyat Hindia Timur, antara lain kebebasan dalam menanam dan mengolah tanah pertaniannya serta kebebasan dalam berdagang. Namun, Raffles tidak lama bertahan di Jawa (1811–1815) karena setelah usainya perang melawan Perancis (Napoleon), Inggris, dan Belanda membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada Belanda. Hal itu menyebabkan upaya Raffles belum sempat memperlihatkan hasilnya ketika kekuasaannya telah berakhir.

Sejak peralihan kekuasaan tersebut, Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda (*Nederland Indie*) dan diperintah oleh Komisaris Jenderal (1815—1819) yang terdiri atas C.T. Elout, van der Capellen, dan Muntinghe. Tidak lama kemudian Elout digantikan oleh Buyskes. Ketiganya menjalankan pemerintahan berdasarkan *Regerings Reglement* Januari 1815 yang memberikan beberapa tugas pokok, antara lain, adalah perbaikan nasib rakyat dan perlunya mendorong kebebasan bercocok tanam dan persiapan untuk melakukan pungutan pajak tanah. Akhirnya, salah seorang dari tiga komisaris tersebut, yaitu van der Capellen, diangkat sebagai Gubernur Jenderal pada 16 Januari 1819 dan memerintah hingga 1826. Dalam masa pemerintahannya, didirikanlah perusahaan dagang *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) yang diprakarsai oleh Raja Willem I pada 28 Maret 1824. Perusahaan ini dimaksudkan untuk memperkuat daya saing perdagangan Belanda menghadapi Inggris dan memperlancar jalannya perdagangan antara negeri Belanda dan Hindia Belanda.

Pemerintahan van der Capellen tidak dapat dikatakan berhasil karena pemerintah kolonial yang ia pimpin terbukti merugi dan harus meminta pinjaman kepada negeri Belanda yang merasa terus terbebani oleh koloni sejak keruntuhan VOC. Untuk menggantikan posisi van der Capellen, Raja Willem I mengangkat Leonard Pierre Joseph Burgraaf Du Bus de Gisignies sebagai Komisaris Jenderal pada tahun 1826 hingga 1830. Pada periode kekuasaannya, untuk pertama kali pemerintah kolonial mulai menggagas pembentukan bank sirkulasi atau bank sentral.

2. *De Javasche Bank*

Adanya kesulitan keuangan di Hindia Belanda memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran di Hindia Belanda. Di Kerajaan Belanda hal itu menimbulkan munculnya gagasan pendirian bank sirkulasi untuk Hindia Belanda, tepatnya menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda, pada saat upacara penyerahan kembali Hindia Belanda dari Inggris pada tahun 1816. Demikian halnya di Batavia, Hindia Belanda, muncul desakan kuat dari kalangan pengusaha agar segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka, terutama untuk fasilitas pendanaan dan perdagangan luar negeri.

Sebagai tindak lanjut dari gagasan 1816, pada 29 Desember 1826 Raja Willem I mengirimkan Surat Kuasa No. 85 kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda untuk segera merundingkan dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pembentukan suatu bank di Jawa berdasarkan Oktroi, yaitu pemberian wewenang dan hak tunggal dari Pemerintah dengan jangka waktu. Surat kuasa Raja Willem tersebut berdasarkan laporan rahasia Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan yang diberi tugas olehnya untuk mengajukan konsep suatu Oktroi dan ketentuan-ketentuan bagi suatu bank yang akan didirikan di Jawa. Maka, dalam surat kuasa tersebut Raja Willem menguasakan kepada Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan untuk menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada Komisaris Jenderal

serta mengikutsertakan Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) dalam pendirian De Javasche Bank (DJB).

Sejak awal tahun 1800, setelah bubarnya VOC, pemerintah merasakan beratnya beban kegiatan perekonomian Hindia Belanda, termasuk kesulitan dalam pengaturan keuangan pemerintah, yang tanpa adanya bank sirkulasi harus dilakukan sendiri oleh pemerintah. Seiring dengan tuntutan waktu, pemerintah kewalahan dalam menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara bersamaan tanpa bantuan lembaga lainnya. Selain itu, dalam hubungan ekspor-impor antara Hindia Belanda dan negeri Belanda, dibutuhkan emas dan perak guna menutupi nilai defisit dalam neraca perdagangan. Kedua alat bayar itu harus selalu didatangkan dari negeri Belanda yang tentunya lebih mudah jika dilakukan melalui fasilitas perbankan.

Kondisi itulah yang akhirnya memicu gagasan pendirian bank sirkulasi untuk Hindia Belanda. Pada tahun 1816 di negeri Belanda, dalam upacara penyerahan kembali Hindia Belanda dari Inggris. Gagasan pendirian bank sirkulasi untuk wilayah koloni itu menjadi pembicaraan hangat antarpejabat Belanda. Salah seorang Komisaris Jenderal Hindia Belanda, yaitu C.T. Elout adalah salah seorang pejabat yang melontarkan gagasan itu. Pada saat yang sama, di negeri jajahan, yaitu Hindia Belanda, juga muncul desakan kuat dari kalangan pengusaha agar segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka, terutama untuk fasilitas pendanaan dan perdagangan luar negeri. Namun, gagasan itu lama menguap tanpa tindak lanjut yang jelas.

Dalam masa pemerintahan van der Capellen, Hoofd-Directie van Financien pada 10 Oktober 1820 berhasil membuat suatu konsep bank van Leening yang pada masa VOC juga pernah didirikan. Namun, sayangnya van der Capellen tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap niat pendirian bank itu. Para pengusaha di Hindia Belanda terus berupaya untuk menyusun konsep suatu bank, tetapi tak kunjung terealisasi meskipun pada 16 Juli 1823 negeri Belanda mengirimkan rancangan oktroi untuk suatu bank yang akan dinamakan de Nederlandsche oost-Indische Bank menyusul kemudian.

Baru kemudian Raja Willem I turun tangan ketika pada 1825 ia sendiri lagi-lagi mengambil inisiatif awal untuk pendirian suatu bank di Hindia Belanda. Menurut Raja, bank tersebut adalah bank swasta yang diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan persediaan mata uang di Hindia Belanda. Gayung bersambut, di Hindia Belanda, Menteri Urusan Jajahan J.C. Baud pada tahun 1826 meminta agar pimpinan Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) membantu pemerintah dalam mendirikan bank sirkulasi. Sebenarnya, NHM lebih suka jika di Batavia didirikan suatu bank (kredit) pertanian yang lebih dibutuhkan di Hindia Belanda daripada bank sirkulasi.

Pada 29 Desember 1826 Raja Willem I mengirimkan Surat Kuasa No. 85 kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda untuk segera merundingkan dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pembentukan suatu bank di Jawa berdasarkan oktroi, yaitu pemberian wewenang dan hak tunggal dari Pemerintah dengan jangka waktu. Oleh L. De

Bree disebutkan bahwa surat kuasa Raja Willem tersebut berdasarkan laporan rahasia Menteri Urusan Jajahan yang diberi tugas olehnya untuk mengajukan konsep suatu Oktroi dan ketentuan-ketentuan bagi suatu bank yang akan didirikan di Jawa. Dalam surat kuasa tersebut Raja Willem menguasakan kepada Menteri Urusan Jajahan untuk menyampaikan surat kuasa tersebut kepada Komisaris Jenderal serta mengikutsertakan NHM dalam pendirian De Javasche Bank (DJB).

Dalam Surat Keputusan Komisaris Jenderal No. 28 tertanggal 11 Desember 1827 ditetapkan Oktroi khusus bagi De Javasche Bank sebagai ketentuan dan pedoman dalam menjalankan usahanya. Oktroi tersebut berlaku selama periode tertentu dan akan terus diperbarui sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial. Oktroi pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai dengan 31 Desember 1837 dan kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838. Sesuai dengan ketentuan Oktroi pertama, modal dasar De Javasche Bank ditentukan sebesar 4 juta gulden terbagi dalam 8000 lembar saham, masing-masing bernilai 500 gulden. Nilai itu harus dipenuhi dalam bentuk emas dan perak. Modal disetor untuk tahap pertama disyaratkan sebesar 50%, yaitu 2 juta gulden. Apabila modal disetor telah mencapai 25%, yaitu 1 juta gulden, bank dapat dinyatakan berdiri dan memulai usahanya.

Setelah tercapai angka modal disetor, De Javasche Bank dinyatakan dibuka dan dapat beroperasi sebagai bank sirkulasi. Berdasarkan perkembangan itu, Komisaris Jenderal du Bus mengeluarkan Surat Keputusan No. 25 tertanggal 24 Januari 1828 yang menyatakan bahwa De Javasche Bank secara resmi telah didirikan. Surat keputusan itu disebut sebagai akta pendirian De Javasche Bank, maka tanggal 24 Januari 1828 adalah tanggal didirikannya De Javasche Bank meskipun bank baru beroperasi pada tanggal 8 April 1828.

Sesuai dengan Pasal 32 Oktroi De Javasche Bank, pada tanggal 11 Maret 1828 bank mencetak uang kertas untuk pertama kali senilai 1.120.000 gulden yang terdiri atas pecahan 1000, 500, 300, 200, 100, 50, 25. Sementara itu, untuk mengeluarkan nilai yang lebih kecil, direksi bank diwajibkan mengajukan permohonan pada gubernur jenderal yang kemudian akan dilanjutkan ke negeri Belanda. Setelah dirasa siap untuk beroperasi, pada tanggal 8 April 1828 De Javasche Bank mengumumkan kepada khalayak melalui surat kabar *Javasche Courant* No. 43 bahwa pada hari itu bank telah dinyatakan beroperasi secara resmi.

Pada periode selanjutnya De Javasche Bank mulai membuka kantor cabang di Jawa dan luar Jawa sesuai dengan kondisi perekonomian Hindia Belanda. Selanjutnya, dikatakan oleh Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (1987) bahwa beberapa dekade setelahnya di Hindia Belanda mulai bermunculan bank komersial, antara lain The Chartered Bank of India, Australia & China (1863) di Jakarta, Rotterdamsche Bank (1864) di Jakarta, Internationale Crediet & Handels Vereeniging Rotterdam (1864) di Semarang, Surabaya, dan Jakarta, Nederlandsch Indische Handelsbank (1864) di Jakarta, dan Nederlandsch Indische Escompto Mij (1857) di Jakarta.



Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) salah satu perusahaan swasta yang ikut mendirikan De Javasche Bank bank sirkulasi pertama di Hindia Belanda.

Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/v>

Dengan berkembangnya kegiatan bisnis swasta, terutama kegiatan perkebunan dan perdagangan (ekspor-impor), makin membutuhkan adanya lembaga bank di Hindia Belanda. Dapat dipastikan bahwa pada abad ke-19 tersebut bank-bank belum melakukan fungsi intermediasi secara maksimal, termasuk dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Hingga pertengahan abad, hanya De Javasche Bank yang ada sebagai satu-satunya lembaga perbankan swasta yang melayani kebutuhan kredit jangka pendek untuk sektor perdagangan swasta pada masa *cultuurstelsel*.

Pada tahun 1853 Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), yang merupakan maskapai dagang terbesar dan tertua di Hindia Belanda, memulai memberikan kredit meskipun belum dapat dikatakan terlibat dalam perbankan secara total. NHM dapat dikatakan secara total menjadi bank pada tahun 1883. Masih menurut Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, akibat terjadinya krisis dunia yang berpengaruh kepada Hindia Belanda, pada tahun 1884 sistem perbankan mulai diperbaharui secara menyeluruh. Pada saat itu landasan pengembangan sistem perbankan komersial abad ke-20 telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Memasuki tahun 1930-an, tercatat perkembangan yang mencolok bagi bank-bank di Hindia Belanda, khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan produksi tanaman ekspor Hindia Belanda.

Karena makin pesatnya kegiatan perbankan pada awal abad ke-20, mulai 1 Januari 1907 De Javasche Bank menerapkan sistem lalu-lintas giro di seluruh kantornya dan tidak lama kemudian dilaksanakan sistem kliring atau sistem perhitungan antarbank. Pada 15 Februari 1909 disepakati perjanjian tentang sistem perhitungan kliring untuk pertama kalinya di Batavia (Jakarta). Perjanjian kliring tersebut diikuti 6 bank ternama, yaitu De Javasche Bank, NHM Factory, Hongkong and Shanghai Banking Corp, Chartered Bank of India, Australia and China, dan De Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij.



De Javasche Bank, bank sirkulasi pertama di Hindia Belanda, sekarang menjadi Bank Indonesia.
 Sumber: Architecten- En Ingenieursbureau Fermont-Cyupers, Amsterdam: De Javasche Bank Batavia

3. *Postspaarbank*

Dalam kondisi perekonomian Hindia Belanda yang makin lebih baik daripada abad sebelumnya, barulah muncul bank komersial yang mulai menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Pada masa kolonial pada awal abad ke-20 ini mulai terlihat usaha mengenalkan bentuk tabungan modern kepada masyarakat Hindia Belanda. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia telah mengenal budaya menabung atau menyimpan suatu modal untuk bekal yang dapat digunakan pada waktu yang akan datang dalam bentuk tradisional, yaitu celengan dalam berbagai macam bentuknya. Perlu kita garis bawahi bahwa dua cara menabung itu, yang bersifat tradisional (celengan) dan yang bersifat modern (tabungan bank), terus berlangsung secara beriringan hingga masa sekarang.

Berdasarkan Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Postspaarbank* atau Bank Tabungan Pos, di Batavia. Dijelaskan oleh Francien van Anrooij (2014) bahwa status bank ini berada di bawah binaan *Burgerlijke Openbare Werken* (Departemen Pekerjaan Umum Sipil disingkat BOW. Semua tugas yang ditambahkan setelah tahun 1872—kecuali tugas untuk Departemen Angkatan Laut—di kemudian hari akan dialihkan ke Departement van Gouvernements-bedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) yang baru (1907).

Tujuan utamanya adalah untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung, sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan pada masyarakat. Sejak tahun 1931, peranan *Postspaarbank* dalam menghimpun dana masyarakat terus meningkat. *Postspaarbank* berusaha membungakan dana dalam bentuk surat berharga, seperti obligasi, promes. Sampai akhir tahun 1939, dana yang berhasil dihimpun berjumlah 54 juta rupiah.

Pada 1934 terbit Besluit Gubernur Jendral Hindia Belanda No. 27 tahun 1934 dengan nama *Postspaarbank Bank Ordonantie* (Stbl N.I 653 tahun 1934) yang berlaku tanggal 1 Januari 1935. Pemerintahan memberikan persekot yang dapat dikembalikan dan *Postspaarbank* telah dapat membiayai diri sendiri serta membentuk dana cadangan. Pada tahun 1940, bersamaan dengan penyerbuan Jerman ke Netherland, terjadi pengambilan dana secara besar-besaran oleh nasabah *Postspaarbank*. Sebanyak 11 juta rupiah dibayarkan pada para nasabah. Tahun 1941, kepercayaan nasabah tumbuh kembali sehingga dana yang dihimpun meningkat menjadi 58,8 juta rupiah.

Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, tentara pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda dan

Postspaarbank dibekukan. Sebagai gantinya, pemerintahan Jepang mendirikan **Tyokin Kyoku** (Tjokin Kjekoe) pada 1 April 1942. Maksudnya adalah untuk mengisi kekosongan sebab masyarakat Indonesia sudah terbiasa menabung. Setelah Indonesia merdeka, bank ini kemudian menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

4. *Algemene Volkscredietbank (AVB)*

Pada masa kolonial, selain bank-bank komersial milik bangsa Barat, terdapat juga bank rakyat yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Sejak 1904 bangsa Indonesia telah mengenal lumbung desa, bank desa, dan bank kredit rakyat (*volkscredietbank*) yang dikelola oleh Centrale Kas sebagai instansi penilik dan pembina serta sebagai pusat keuangan. Mengenai Lumbung desa, seperti yang ditulis oleh Creutzberg (1987), dibentuk di Jawa dengan modal beras yang disimpan oleh masyarakat desa. Pada masa itu uang masih sangat langka sehingga masyarakat didorong untuk mengadakan lembaga kredit dengan modal yang mereka miliki sendiri, yaitu beras. Pada masa itu fungsi bank rakyat adalah menyediakan kredit untuk kebutuhan-kebutuhan penduduk petani, pedagang, dan orang-orang yang bergerak di bidang industri. Menurut Djojohadikusumo di dalam bukunya berjudul *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (1989), sejak 1934 bank-bank rakyat berkembang menjadi *Algemene Volkscredietbank* (AVB) atau Bank Kredit Rakyat Umum yang mulai menyediakan kredit bagi golongan amtenar, kaum pensiunan, dan karyawan swasta.

Pada 1912 ada sistem kredit rakyat (*Het Volkskredietwezen*) (dimuat dalam Lembaran Negara Hindia-Belanda 1912 No. 210), sebagai Dinas pemerintah yang berada di bawah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri (*Departement van Binnenlands Bestuur*/BB). Pada bagian atas organisasi terdapat seorang penasihat dan staf. Mereka menentukan kebijakan dan mendukung para pegawai di lapangan, antara lain dengan cara membuat panduan untuk mendirikan dan mengelola berbagai lembaga kredit.

Pada tingkat lokal dan regional, bagian dinas lapangan (*buitendienst*: dari Eropa dan Indonesia) mencoba mendorong rakyat untuk membangun gudang beras atau lumbung padi (*rijstschuren*), bank desa (*dorpsbankjes*), dan bank cabang (*afdelingsbanken*). Ada penasihat yang bertugas membimbing mereka dalam mendirikan semua itu dan juga membantu dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah sehari-hari. Tugas lapangan ini diambil alih dari pegawai pemerintah Eropa dan bumiputra.



Bank Perkreditan Rakyat awal tahun 1920 an di Tegal Jawa Tengah, salah satu lembaga yang melayani tabungan masyarakat awal abad ke 20.
 Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>



Selain itu, pemerintah memutuskan untuk mendorong pembentukan lembaga kredit pertanian (*landbouwkrediet-instellingen*) atas dasar koperasi dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Para pegawai BB itu mendapatkan peran memelopori pelaksanaan pekerjaan tersebut. Namun, ternyata tugas itu terlalu membebani korps pegawai BB. Berbeda dengan harapan sebelumnya, gagasan koperasi ternyata tidak berjalan. Lagipula, untuk melaksanakan tugas itu, dibutuhkan pengetahuan khusus.

Setelah mengetahui hambatannya, pemerintah lalu memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan perencanaan yang matang. Karena ternyata dalam pelaksanaannya pemerintah yang harus berperan aktif, untuk mengoptimalkan hasilnya, dibentuklah dinas khusus. Disimpulkan oleh Francien van Anrooij (2014) di dalam buku berjudul *De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942*, ada 3 jenis lembaga kredit rakyat yang dikembangkan saat itu, yaitu sebagai berikut.

Pertama, lembaga yang mengurus gudang beras atau lumbung padi (*Rijtschuren*), seperti yang ditemukan terutama di Jawa: pada tahun 20-an. Pada puncaknya, pembangunan lumbung padi itu mencapai 6.000 buah yang dibangun. Persediaan padi dalam lumbung itu dapat digunakan pada masa kurang pangan dan dapat dijual pada waktu yang tepat bagi petani. Dengan cara begitu pula, kebebasan pembeli partikelir dibatasi. Dana cadangan dari gudang, sebagian terdiri atas bunga yang berupa uang, hasil dari beras yang dipinjamkan. Jadi, dalam operasionalnya lumbung sejalan dengan pengaturan produk (*productenhuishouding*) yang ada di masyarakat desa, tetapi pada saat yang sama usaha desa itu diperluas dengan pengaturan keuangan (*geldhuishouding*).

Kedua, lembaga “bank desa” (*dorpsbanken*) berupa bank uang, yang meminjamkan uang dengan bunga untuk pembelian benih, pupuk, peralatan pertanian kecil, pendirian usaha kecil, dan sebagainya. Pada tahun 1941 ada lebih dari 1.100 bank tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Selain masyarakat bumiputra, bank-bank tersebut juga dimanfaatkan oleh orang-orang Cina.

Ketiga, lembaga bank cabang di Jawa dan bank daerah di luar Jawa dan Madura mengelola uang para pegawai pemerintah, swasta, masyarakat bumiputra, dan dana yang dikelola oleh bank desa. Uang itu diinvestasikan dalam proyek-proyek regional untuk pertanian, perikanan, pembuatan jalan, perumahan, dan sebagainya. Pada tahun 1941 ada lebih dari 100 bank di seluruh kepulauan Nusantara.

Lembaga Kredit Rakyat tersebut bergerak, baik dalam bidang kebijakan maupun dalam bidang administratif dan teknis. Pada 1912 pemerintah juga membentuk Dinas Kas Keuangan Pusat (*Centrale Kas*) dan akta pendirian lembaga ini dituangkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1912 No. 393. Lembaga yang merupakan bagian dari Departemen BB itu bertugas memberikan saran dan mengontrol semua yang ada kaitannya dengan anggaran uang dari lembaga-lembaga kredit tersebut. Bersamaan itu, dengan modal yang diputuskan oleh pemerintah dan dengan dana hasil dari pengelolaan bank desa, bank cabang di Jawa, dan bank daerah di luar Jawa dan Madura, orang lalu tertarik untuk menciptakan proyek-proyek ekonomi besar-besaran di seluruh Nusantara. Dengan sangat cepat, aspek keuangan menjadi lebih penting daripada aspek teknis administratifnya.

Pada akhirnya pada tahun 1927 keberadaan Lembaga Kredit Rakyat (*Dienst voor het Volkskredietwezen*) menjadi bagian dari *Centrale Kas* yang dituangkan pada Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1927 No. 77. Selanjutnya, pada tahun 1934 berdasarkan Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1934 No. 82, lembaga *Centrale Kas* bergabung dengan bank cabang (*afdelingsbanken*) dan bank daerah (*gewestelijke banken*) menjadi Bank Kredit Rakyat Umum (Algemene Volkskredietbank/AVB).

AVB mendanai proyek-proyek dalam kerja samanya dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Penyuluhan Pertanian (*Landbouw-voorlichtingsdienst*). Selain itu, AVB juga mengontrol bank desa (*dorpsbanken*) dan gudang beras atau lumbung padi (*rijstschuren*). Pada tahun-tahun krisis, bank berusaha untuk lebih banyak meminjamkan uang pada pelbagai gudang beras itu untuk mencegah rakyat petani beralih meminjam uang ke pihak swasta. AVB berada di bawah komisi pengawasan dan bantuan (*commissie van toezicht en bijstand*) yang diketuai oleh direktur Departemen Urusan Ekonomi (*Departement van Economische Zaken*) yang baru didirikan pada 1934 seperti yang tercantum dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1934 No. 490. Seperti halnya lembaga layanan pemerintah lainnya, sistem kredit rakyat menawarkan kesempatan kerja kepada elite pegawai Indonesia yang baru, yang berasal dari kaum priayi rendah dan kaum menengah yang mulai bertambah.

Dengan hadirnya bank-bank rakyat tersebut, dengan sendirinya dana masyarakat Indonesia juga mulai terhimpun di dalamnya. Meskipun belum banyak jumlahnya, hal itu menunjukkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menabung, baik yang di desa maupun yang di kota, terutama untuk wilayah Jawa dan Madura. Berdasarkan data sejarah tercatat beberapa angka sebagai berikut.

Tabel Perkembangan Tabungan di Lembaga Perkreditan Rakyat
1929-1933
(dalam ribuan Gulden)

Tahun	Tabungan Orang Indonesia	Rekening Koran Orang Indonesia	Deposito Orang Indonesia	Kas Desa, Bank Desa, dll.
1929	1.361	1.256	1.380	31.840
1930	1.361	1.810	1.456	30.568
1931	1.301	1.437	1.341	37.588
1932	1.117	1.326	851	38.487
1933	1.279	1.373	606	37.126

Demikianlah gambaran sekilas mengenai usaha menabung gaya baru pada masa Hindia Belanda. Selain bank swasta yang berlomba menawarkan imbalan bunga tabungan, terdapat dua bank yang cukup dominan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Bank yang secara operasional mengenalkan cara menabung gaya baru adalah *Poostspaarbank* yang menjadi Bank Tabungan Negara dan *Algemene Volkscredietbank* yang dikenal sebagai Bank Kredit Rakyat.





Gedung Kantor Postspaarbank di Kawasan Harmoni, Jakarta
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Negara



Kantor Postspaarbank yang Sekarang Menjadi Bank Tabungan Negara di Harmoni, Jakarta



Bagian Dalam dan Suasana Kerja di Postspaarbank



Bagian Dalam dan Suasana Kerja di Postspaarbank



Bagian Dalam dan Suasana Kerja di Postspaarbank



Bank Desa (Dorpsbank), Tempat Meminjam Uang dengan Bunga.
(Sumber: Francien van Anrooij 2014. *De koloniale staat (Negara kolonial)*
1854-1942. Edisi revisi Leiden, hal. 48)

5. Sosialisasi Menabung

Sebagai sebuah cara baru dalam menabung, baik bank-bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun bank-bank yang didirikan oleh perusahaan swasta atau perorangan, gencar melakukan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk mengubah tradisi menabung yang telah berkembang berabad-abad di kalangan masyarakat bumiputra dengan cara baru, menabung di bank.

Dari berbagai data yang ditemukan diketahui bahwa peranan Postspaarbank dalam penghimpunan dana masyarakat melalui sosialisasi yang terus-menerus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Hal itu terbukti dengan makin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank. Sampai dengan akhir tahun 1939, Postspaarbank telah berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 5,4 juta rupiah, jumlah yang besar pada masa itu. Meskipun kampanye menabung di bank telah dilakukan secara gencar, dalam kenyataan kebiasaan menabung kaum bumiputra dalam bentuk celengan, lumbung, atau bentuk lainnya masih tetap berjalan, terutama di kalangan pedesaan.

Prestasi yang berhasil dicapai oleh Postspaarbank itu sebetulnya sejalan dengan kebijakan sistem desentralisasi yang dilaksanakan pada saat itu. Sejarah keberhasilan Postspaarbank akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya 4 kantor cabang Postspaarbank, masing-masing di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Selain itu, sejak awal tahun 1930-an Postspaarbank mulai meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Ada beberapa kampanye menabung dalam bentuk bukan celengan yang digunakan oleh bank-bank pada masa kolonial Belanda, antara lain adalah dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pembuatan buku tabungan menarik, dan pemberian medali atau *penning* kepada nasabah sebagai tanda keanggotaan, pemasangan iklan, dan pemasangan poster. Sebagai contoh di bawah ini ditampilkan beberapa pendekatan yang digunakan untuk menarik minat calon nasabah.

a. Bantuan Sosial

Salah satu bentuk partisipasi Postspaarbank dalam kegiatan bantuan sosial untuk masyarakat adalah pembelian mobil ambulans. Dana pembelian dikumpulkan melalui sumbangan sukarela dari nasabah. Diberitakan bahwa Postspaarbank telah membeli 50 buah mobil ambulans dari hasil pengumpulan dana 21.000 nasabah.



Salah satu dari 50 mobil Ambulans yang dibeli oleh Postspaarbank

b. Bentuk Tabungan Bukan Celengan

Jika pada zaman Kerajaan Majapahit menabung uang di dalam tempat dikenal dengan nama “celengan”, di zaman kolonial tempat menabung uang koin atau kertas dibuat dalam bentuk kotak (*box*). Kotak itu mirip dengan bentuk buku dalam format tebal sehingga disebut “book bank”. Selanjutnya, “book bank” yang berisi uang itu ditempatkan di jajaran buku-buku di dalam lemari buku. Dengan demikian, uang yang disimpan di dalam “book bank” itu akan aman dari tindak pencurian.

Kotak tabungan itu dilengkapi dengan kunci dan lubang untuk memasukkan uang koin atau kertas Postspaarbank in Nederlandsch Indie. Di bagian depan kota ada yang dicantumkan tulisan “*Bankers Utilities. co San Francisco USA Patented, July 3, 1923 Made In U.S.A.*” dan pada bagian belakang bertuliskan “*Bankers Utilities.co San Francisco USA Patented, July 3, 1923 Foreign GHTS Reserverd*”. Adanya tulisan ini menunjukkan bahwa kotak buku itu dibuat di San Fransisco, USA 3 Juli 1923 untuk kepentingan bank pada zaman Hindia Belanda.



Label yang menunjukkan bahwa “Book Bank” itu diimpor dari Amerika Serikat

Sumber: <http://www.barangtempodoeloe.com/2010/10/kotak-postspaarbank.html>





Beberapa Contoh dan Bentuk “Book Bank”

Sumber: <http://www.barangtempodoe.com/2010/10/kotak-postpaarbank.html>

Selain tempat menabung dalam bentuk buku (*book bank*), juga ada yang berbentuk mirip silinder berbahan kaleng, lengkap dengan kuncinya. Di dinding kaleng itu bertuliskan Postspaarbank in Ned. Indie- “Het Geheim van Succes”. Itu berarti ‘celengan’ dikeluarkan oleh pihak bank. Hal itu tidak sejalan dengan kampanye yang mengajak orang untuk datang ke bank. Apakah itu hanya sekadar hadiah untuk mengumpulkan uang sebelum ditabung di bank? Pada gambar ini juga ditampilkan bentuk kunci dan bagian dalam setelah kaleng tabungan ini dibuka.

Beberapa Bentuk Celengan Berikut Kunci yang Dikeluarkan Postspaarbank

Sumber: (<https://www.kaskus.co.id/thread/581fbd8a582b2e08508b4567/box-uang-koin-postspaarbank-in-nederlandsch-indie-antik-langka-dgn-isi/>)





Berikut ini adalah beberapa contoh buku Simpanan Postspaarbank in Nederlandsch-Indie, yaitu atas nama R.B. Soejanto, Kantor Cabang Simpang, Surabaya dan Tan Sian Lie, Kantor Cabang Jakarta; dari Kantor Cabang Soekaboemi Nomer 13257 nama Jazir Marzoeki dengan cap stempel per tanggal 6 April 1940 dan satu lagi nama Immanoeel Simandjuntak.

KANTOR	NOMOR
SB. T 2 (SIMPANG)	5379 N

Tanggal penutupan *14/11/40*

NAMA *R. B. Soejanto*

NAMA KETIL

NAMA SUAMI
DIANDA

Rekening ini dibuat dengan penutupan penutupan lain.

KANTOR	NOMOR
TJABANG STR. DJAKARTA	108725 N

Tanggal penutupan *20/11/1951*

NAMA *Tan Sian Lie*

NAMA KETIL

NAMA SUAMI
DIANDA

Rekening ini dibuat dengan penutupan penutupan lain.

Sumber: (<https://www.kaskus.co.id/thread/581fbd8a582b2e08508b4567/box-uang-koin-postspaarbank-in-nederlandsch-indie-antik-langka-dgn-isi/>)





Sumber: http://europeana.nialloleary.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F2021657%2F101072__1_2_&repid=1



Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Boekje_van_de_Postspaarbank_met_inlichtingen_TMnr_6116-6.jpg

6. Iklan yang Pernah Digunakan

Beberapa berita dan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh bank-bank komersial digencarkan dengan maksud menarik minat masyarakat untuk menabung di bank. Berikut beberapa gambar iklan yang terbit pada periode tersebut:

The image shows three separate advertisements from a 1936 newspaper. The leftmost ad is for N.V. Batavia-Bank, established in 1918, with branches in Batavia and Groot Batavia. The middle ad is for 'TJIN TJOE Obat Batok', featuring a clock and a hand, advertising a 5-minute cure for various ailments. The rightmost ad is for 'KAUW TJOO SAN', a traditional Chinese medicine shop, listing various medicines and their benefits.

Sumber: Koran Kebangsaan, 29 Juni 1936

The image is a large advertisement for POSTSPAARBANK, dated 7 October 1937. It features a central illustration of a soldier in uniform standing next to a box, with a large hand placing a coin into the box. The text is in Indonesian and Dutch. The Dutch text at the top reads 'POSTSPAARBANK' and 'DITANGGOENG OLEH PEMERINTAH'. Below the illustration, it says 'POSTSPAARBANK, ditanggoeng aman sekali dan mendapat restorasi.' The Indonesian text on the left lists various financial products and their prices, such as 'Kwaliteit contract A f 7,50 per picol' and 'Kwaliteit contract B f 25,50 per picol'. The bottom right section is titled 'Kakar Radio' and mentions 'Djoemahat 8 October 1937, MAVRO Golfingte 87 97 meter'.

Sumber: Koran Djawa Tengah 7 Oktober 1937

Dari dua iklan layanan masyarakat tersebut terlihat bahwa bank memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menabung dengan dua cara, yaitu memberi janji adanya bunga bank dan jaminan keselamatan uang yang mereka tabung. Postspaarbank menekankan dalam iklannya bahwa uang tabungan masyarakat dijamin oleh pemerintah dan “ditanggoeng aman sekali dan mendapat rente”. Selain itu, dalam contoh Postspaarbank, bank juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menabung dengan menggunakan isu atau permasalahan yang kerap dialami oleh masyarakat pada periode tersebut.

Berikut ini ditampilkan gambar iklan dari Postspaarbank yang dimuat di koran *Djawa Tengah* pada tahun 1937. Yang dijadikan sasaran ketiga gambar iklan ini berbeda-beda. Gambar pertama ditujukan kepada orang yang gemar membelanjakan uangnya untuk perhiasan emas, perak intan, dsb. Kedua ditujukan kepada orang yang gemar berjudi. Ketiga ditujukan kepada kaum perempuan yang gemar berbelanja. Secara berurutan iklan keterangan tentang isi iklan tersebut adalah sebagai berikut:

Sumber: Koran *Djawa Tengah* 19 Agustus 1937

1. Di dalam iklan pertama ditulis “Emas dan intan itu memang baik buat perhiasan badan. Tetapi mudah sekali mendatangkan mara bahaya bagi diri Tuan. Baiklah uang Tuan disimpan di Postspaarbank, daripada dibelikan emas dan intan yang tak seberapa gunanya”.

Dalam iklan ini, bank memberi pilihan kepada masyarakat bahwa menyimpan uang di bank adalah pilihan paling aman agar uang tersimpan aman dan nilainya terus bertambah karena adanya bunga simpanan. Masyarakat diberi semacam peringatan bahwa menggunakan uang untuk belanja perhiasan memiliki risiko hilang karena tindakan kriminal yang mungkin kerap terjadi pada masa itu.



Sumber: Koran Djawa Tengah 19 Agustus 1937

2. Di dalam iklan kedua ditulis *"Berjudi, plesir itu semua membuat khianat. Baiklah uang Tuan disimpan ke Postspaarbank, supaya Tuan mendapat kesenangan kelak"*. Melalui iklan ini, bank memberi nasihat kepada masyarakat agar menggunakan uangnya untuk kegiatan yang bermanfaat, yaitu menyimpannya di bank dalam bentuk tabungan. Bank menganjurkan kepada masyarakat bahwa kebiasaan berjudi atau hura-hura menghamburkan uang hanya akan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat.



Sumber: Koran Djawa Tengah 19 Agustus 1937

3. Di dalam iklan ketiga ditulis *"Perempuan yang bodoh, senang membeli ini itu yang tak seberapa gunanya. Kalau habis bulan, habis uang, masih banyak rekening yang belum dibayar. Hatinya susah, hidupnya tidak senang, sebab kebanyakan utang, sedang uang simpanan tak ada. Mulailah sekarang menyimpan uang ke Postspaarbank supaya terhindar dari kesusahan itu"*. Dalam iklan ini, bank menyindir kaum perempuan, yang mungkin pada masa itu memiliki peran utama dalam mengelola keuangan keluarga, agar tidak berperilaku boros, berhati-hati dalam menggunakan uang. Bank memberi anjuran bahwa menyimpan uang di bank dapat membantu kaum hawa mengelola keuangan keluarga dengan baik.

4. Poster yang pernah digunakan

Ada beberapa contoh iklan gerakan menabung dalam bentuk poster. Di bawah ini adalah contoh iklan yang dibuat oleh Postspaarbank yang diberi judul "**Iklan Tabungan untuk Kees**" yang dibuat tahun 1939. Poster ini berisi dua kelompok gambar ditambah keterangan dengan tiga kalimat.

1. Kalimat pertama berbunyi "*Hoe Kees sparen leerde*" yang artinya "*Bagaimana Kees belajar untuk menyelamatkan diri*", terletak di bagian tengah.
2. Kalimat kedua berbunyi "*Hier wisten zij nog niet wat sparen was!*" yang artinya "*Di sini mereka baru tahu, apa yang menyelamatkan!*".
3. Kalimat ketiga berbunyi "*Nu weten zij het!*" yang artinya "*Sekarang mereka tahu itu!*"

Hier wisten zij nog niet



wat Sparen was!

Hoe Kees sparen leerde.



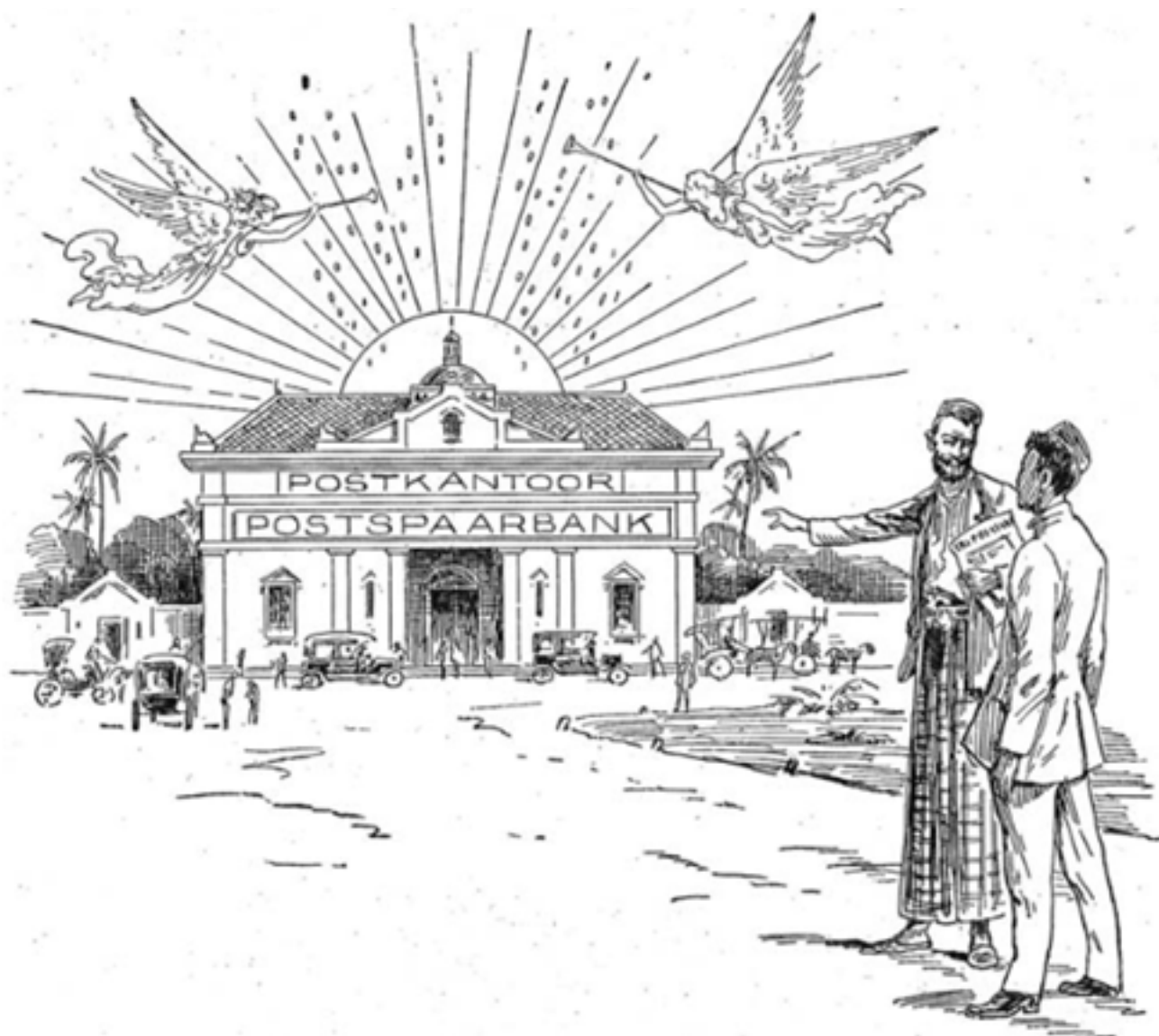
Nu weten zij het!

LANDSDRUKKERIJ — 1937 — BATAVIA

Selanjutnya, iklan dalam bentuk poster berikut ini juga dibuat tahun 1939. Iklan ini berisi ajakan Postspaarbank Nederlandsch-Indie kepada masyarakat untuk menabung. Kata-kata yang digunakan di dalam poster ini memberikan gambaran tentang bahasa Melayu pada saat itu. Kata “celengan” dari bahasa Jawa di dalam poster ini ditulis “*dengan mentjelenken wang kau terloepoet dari kesoeshan*”.



<https://i.pinimg.com/originals/07/d7/3d/07d73da5f953652c44201d4fa25b55fa.jpg>



Berhématlah kalau maoe selamat!

Poster di atas ini menggambarkan dua orang berdiri di depan kantor Post Kantor Postspaarbank yang besinar dan di depannya ada sejumlah mobil. Yang satu pakai sarung sambil tangannya menunjuk gedung yang seolah-olah mengatakan "*Berhematlah kalau maoe selamat!*" kepada orang kedua. Sementara itu, di atas gedung melayang-layang terbang dua "malaikat meniup serunai" menyambut kedatangan penabung laksana jalan menuju surga.



Dimana tempat menjimpan wang jang paling aman ?

Dizaman ini tidak lagi; dalam peti, dalam tiang roemah, dalam kaki ba-lai-balai, dalam tanah dikolong tempat tidoer, dalam kasoer, dalam bantal, dalam . . .

Dizaman koeno boléh djadi tempat itoe balk, tetapi dizaman modern ini, tidak aman lagi.

Dengan moedah bisa dirampas atau ditjoeri orang; bisa roesak oléh api kebakaran atau oléh air bandjir dll. Tempat menjimpan wang jang pa-ling aman ialah di POSTSPAARBANK

Menerima wang simpanan moelai dari f0,25

Poster yang satu ini berisi jawaban atas pertanyaan “Di mana tempat menyimpan uang yang paling aman?” Jawabannya menggunakan kalimat yang cukup panjang dengan ilustrasi seorang ibu menyimpan uangnya di tiang bambu rumahnya. Tempat menyimpan uang yang paling aman ialah di Postspaarbank. Bank akan menerima simpanan mulai f0,25.



Poster berikut ini juga menarik menampilkan orang tua bernama Ibrahim. Karena Bapak Ibrahim rajin menabung, makin tua makin senang yang digambarkan sedang tertawa lebar tanpa gigi. Sebab, sejak mudanya sudah mulai menyimpan uangnya di Postspaarbank dan kini sudah cukup tabungannya”.



Selain menggunakan bahasa Melayu, iklan Postspaarbank juga ada yang menggunakan bahasa Jawa. Iklan di atas ini dengan ilustrasi penari wayang wong (orang). Kalimat yang ditulis berbunyi “Pésta, karaméjan, bioscoop, wajang wong poeniko sadaja amborosi. Arto prajogi kasimpen wonten ing “Postspaarbank” soepados sepoehipoen sampoen nadang kamblaratan”. Terjemahannya adalah ‘Pesta, pertunjukan, bioskop, wayang orang itu semua adalah pemborosan. Uang lebih baik disimpan di “Postspaarbank” supaya di hari tua tidak menderita kemiskinan’.

AUTOSPAREN

*Wie zijn leven wil voorrijken,
doet dat meestal graag door geld:
macht en voorpoed zijn begrippen,
die men in contanten telt;
nu de rijke vrouwen op zijn,
moet de doorsnee-burgerman
heel zijn lange leven sparen
voor een droge boterham.*

*Om dien spaarzin aan te kweeken
rijdt nu door Batavia
'n ophaal-auto van de Spaarbank
als de nieuwste varia.....
Spaarde men voor kort slechts afjal
voor de stedsche vuilnisbelt,
nu wordt zelfs het „slijh der narde“
ook al met een bus besteld!*

*Als die auto langs komt sniven,
is de buurt compleet paraat
om vanachter kree's te spieden,
waár zij goud en zilver laadt.....
Heet je financiële standing,
heel je aanzien en crediet
worden naar het feit beoordeeld:
„Ben je aboné of niet?“*

*Dit is pas de eerste schrede
naar een wijder perspectief:
straks gebruikt men auto-treinen
voor ons aller spaar-gerief.
Tóch ontstaat zoo automatisch
door dit sympathiek gebaar
't nieuwe werkwoord der voldoening
in den zin..... „JK auto-spaar“!!!*

Pietje Pelikaan.

Sementara itu, iklan di atas ini menggunakan bahasa Belanda. Iklan ini berisi ajakan menabung di Postspaarbanc sekaligus juga untuk penjual mobil sedan VW. Dengan tulisan “POSTSPAARBANK” di atas mobil yang berkeling kota-kota dengan sendirinya nama bank itu menjadi dikenal oleh rakyat banyak.

5. Medali sebagai tanda keanggotaan

Banyak cara dilakukan oleh Postspaarbank untuk dapat menarik minat masyarakat agar menabung. Salah satunya adalah dengan medali, yang sekaligus juga sebagai tanda kepemilikan rekening Postspaarbank. Medali itu berdiameter 3 cm. Di sisi belakang medali tercetak kode cabang bank dan nomor rekening nasabah, misalnya dengan kode pada bagian belakang K. 114 - No. 262 - SB dan satu berkode SC-No.270-K 121.



Sebagai simpulan, gambaran mengenai kegiatan menabung di Nusantara pada masa kolonial Belanda dikelompokkan menjadi dua masa, yaitu masa perserikatan dagang VOC dari 1602 hingga 1799 dan masa berdirinya Bank van Leening 1746 atau hampir 145 tahun lamanya baik di kalangan orang-orang Eropa maupun kalangan bumiputra masih aktif menabung secara konvensional. Demikian pula dengan didirikannya Bankcourant en Bank van Leening pada 1752, menabung secara konvensional itu masih berjalan. Kalangan bumiputra menggunakan celengan dan lumbung atau bentuk lainnya, sedangkan kalangan orang Eropa menggunakan “*book bank*” atau bentuk lainnya.

Di Eropa selain bank sebagai lembaga tabungan, juga dikenal cara menabung dalam bentuk “celengan”, seperti di Nusantara. Di Barat masyarakat mulai mengenal celengan yang disebutnya “*piggy bank*” atau “*pigg bank*”, yaitu kotak uang atau koin dalam bentuk seperti anak babi yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk menyimpan uang sejak abad ke-18. Menurut *Merriam-Webster Dictionary* dan *Oxford English Dictionary*, celengan berasal dari *pygg*, semacam tanah liat. Mereka mengatakan bahwa “*bank pygg*” berkembang pada abad ke-18 yang pada dasarnya sama dengan celengan. Itu berarti bahwa di Barat, termasuk Belanda, masyarakatnya juga mengenal “celengan” sama dengan yang berkembang di masa Kerajaan Majapahit.

Ketika memasuki masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800, bank-bank mulai bermunculan, seperti Bank Nederlandsch Handel Maatschapij (NHM), De Javasch Bank (DJB) Postspaarbank, dan Algemene Volkscredietbank (AVB). Meskipun bank-bank tersebut telah dengan gencar mengampanyekan gemar menabung di bank, cara-cara menabung konvensional juga tetap berjalan. Postspaarbank memang merupakan bank tabungan dan Bank AVB sebagai bank kredit rakyat, tetapi pemerintah Hindia Belanda justru menempatkan cara menabung kaum bumiputra melalui celengan dan lumbung sebagai potensi untuk mengembangkan bank-bank tersebut. Celengan menjadi semacam masa persiapan untuk menabung di bank dengan cara memasukkan uang ke dalam celengan sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi bukit, sesuai dengan pepatah yang berkembang di kalangan kaum bumiputra.

Menabung Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Jepang Masuk

Jepang adalah negara di benua Asia yang mempunyai cita-cita membangun imperium di benua Asia. Langkah pertama yang mengejutkan dunia, pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang sebuah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbor dengan menjatuhkan bom. Pecahlah perang Pasifik. Ketika mendengar serangan Jepang ke pelabuhan itu, Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, langsung menanggapi dan menyatakan perang terhadap Jepang. Setelah menghancurkan Pearl Harbor, Jepang bergerak ke Selatan. Jepang masuk ke wilayah Nusantara melalui Tarakan, Kalimantan Timur (10 Januari 1942). Dari Tarakan ke Selatan Jepang menguasai Balikpapan (13 Januari 1942), terus ke Pontianak (2 Februari 1942) dan Martapura (10 Februari 1942). Pada hari itu juga lapangan terbang Banjarmasin dikuasai. Dalam waktu yang relatif singkat (1 bulan) seluruh Pulau Kalimantan dapat direbut dari kekuasaan Belanda.

Untuk Pulau Sumatra, daerah yang pertama ditaklukkan adalah Palembang. Dalam tempo dua hari Palembang jatuh ke tangan Jepang (16 Februari 1942). Pintu menuju Pulau Jawa menjadi terbuka. Jepang berhasil mendarat di Jawa di tiga tempat, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan Jawa Barat, dan di Kragan Jawa Tengah (1 Maret 1942). Selanjutnya, giliran kota Batavia dapat ditembus (5 Maret 1942)

dan Buitenzorg berhasil diduduki. Menurut Kartodirdjo (1976), peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa Jepang selama melakukan pertempuran di wilayah Indonesia adalah menyerahnya pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Dengan penyerahan kekuasaan itu, Jepang mengambil alih seluruh aktivitas pemerintahan Hindia Belanda, termasuk dalam bidang perdagangan, keuangan, dan perbankan.

Dalam tempo sekitar 56 hari Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda. Sejak itu Belanda yang telah menguasai wilayah Nusantara selama berabad-abad menyerahkan wilayah itu kepada Jepang. Langkah setelah berkuasa, Jepang membentuk pemerintahan militer yang disebut *Gunseikanbu*, membagi wilayah pemerintahan, membentuk lembaga departemen, dan merekrut pegawai. Ketika membandingkan antara sistem pemerintahan Belanda dan Jepang, Kartodirdjo (1976) mengatakan “berbeda dengan bentuk pemerintahan Hindia Belanda yang hanya terdiri satu pemerintahan bersifat sipil, Jepang membentuk pemerintahan militer pendudukan”.

Sejak saat itu, berakhirilah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan kemaharajaan Jepang. Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda, yang hanya ada satu pemerintahan sipil, pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu (1) pemerintahan militer angkatan darat (Tentara Kedua Puluh Lima) untuk Sumatra dengan pusat di Bukittinggi; (2) pemerintahan militer angkatan darat (Tentara Keenam Belas) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta; dan (3) pemerintahan militer angkatan laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.

Mengenai pembagian wilayah Nusantara masa pendudukan militer Jepang, di dalam majalah *Pandji Poestaka* (1942) disebutkan dibagi menjadi 3: (1) Tentara XVI di Pulau Jawa dan Madura dengan Batavia dijadikan pusat pemerintahan dan diganti namanya menjadi Jakarta; (2) Tentara XXV di Pulau Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi; dan (3) Armada Selatan II di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat dengan pusatnya di Makassar. Bentuk pemerintahan militer sifatnya sementara dan pembentukannya itu didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Pasal 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam Belas pada tanggal 7 Maret 1942. Dalam pasal itu, antara lain, berbunyi “*Balatentara Nipon melangsungkan Pemerintah Militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang sentausa dengan segera*”.

Sementara itu, menurut Arief (1997), wilayah bekas jajahan Belanda dibagi atas dua bagian, yaitu (1) wilayah Jawa dan Sumatra di bawah kekuasaan Pemerintah Militer Angkatan Darat (*Rikugun*); dan (2) wilayah Kalimantan dan wilayah Indonesia timur di bawah Pemerintah Angkatan Laut atau *Kaigun*. Untuk menjalankan roda pemerintahan baru itu, pemerintah Jepang menetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) mengusahakan agar mendapatkan dukungan rakyat dan mempertahankan ketertiban; (2) memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada; dan (3) meletakkan dasar agar wilayah yang diduduki dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta menguatkan kemampuan berperang di wilayah selatan.

Baru beberapa bulan pemerintahan militer sementara berjalan, keluar Undang-Undang No. 27 Tahun 1942 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1942 tentang Aturan Pemerintahan *Syū* dan *Tokubetsu Syi* (Pemandangan, 16/3/1942). Pemerintahan *syū* kekuasaannya sama dengan gubernur, tetapi luas wilayah kekuasaannya sama dengan karesidenan. Di Jawa ada 17 buah pemerintahan *syū* dan di Sumatra 10 buah. Sementara itu, bentuk pemerintahan *tokubetsu syi* adalah sebuah kotapraja istimewa atau daerah khusus. Yang dinilai memenuhi syarat untuk dijadikan *tokubetsu syi* adalah kota Batavia dengan nama Batavia Tokubetsu Syicō. Adapun untuk wilayah pemerintahan ketiga, yaitu Armada Selatan Kedua, diberi nama *minseifu* dan *minseibu*. Pemerintahan *minseifu* berpusat di Makassar dan pemerintahan *minseifu* berkedudukan di Kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Dengan keluarnya kedua undang-undang itu, sifat pemerintahan militer berubah ke pemerintahan sipil.

Penataan lembaga pemerintahan

Pada periode pendudukan Jepang ini posisi gubernur jenderal (pada masa Hindia Belanda) dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu ada di tangannya dipegang oleh panglima tentara Jepang. Di Jawa Panglima Tentara Keenam Belas di Jawa yang pertama adalah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Segera setelah berkuasa, Jepang menyusun pemerintahan militer di Jawa yang merombak susunan birokrasi dengan seperangkat aturan yang sifatnya "menjepangkan" Hindia Belanda.

OENDANG - OENDANG No. 44.

OSAMU, SEIREI No. 13.
(Diterbitkan oleh "Dome").

Tentang membeberkas bank-bank memisah dan menjajabari Oendang, oendang No. 9 "Tentang penentuan pembajaran utang-piutang".

Pasal 1.
Panglima Besar Balatentara Dai Nippon memberi perintah, supaya "Da Jawa Bank", "Nederlandsche Handel Maatschappij N.V.", "Nederlandsche Indische Handelsbank N.V.", "Nederlandsch-Indische Handels Maatschappij N.V.", dan "Batavia Bank N.V." dihapuskan.

Tap-tap bank yang terbeber pada ayat diatas yang terletak di Djawa harus mulai bekerja menjabarkan utang-piutangnya pada tanggal 20, bulan 10, tahun 2602.

Meskipun bank-bank yang terbeber dalam ayat 1 telah dihapuskan, tap-tap bank itu dianggap masih berkesan bekerja terus, tetapi semua-tata tertib menjabarkan utang-piutangnya itu.

Pasal 2.
Panglima Besar Balatentara Dai Nippon memberi perintah, supaya tap-tap bank "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.", "The Chartered Bank of India, Australia and China Ltd.", "Bank of China" dan "Oversea Chinese Banking Corporation Ltd." yang terletak di Djawa menjajabari utang-piutangnya.

Penjabaran utang - piutang yang dihapuskan dalam pasal 2 ayat 1 itu harus mulai dikerjakan pada tp. 20, bulan 10, tahun 2602.

Tap-tap bank yang terbeber dalam pasal 2 ayat 1 itu dianggap masih berkesan bekerja terus, tetapi semua-tata tertib menjabarkan utang-piutangnya itu.

Pasal 3.

tahun 2602 harus dilayani menurut tempo yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian, ketjapat hutang yang mengenai pasal 3.

Pasal 4.
Segala hutang yang mengenai Oendang-oendang No. 9, tanggal 11, bulan 6, tahun 2602, telah dihapuskan, karena

Pasal 5.
Peraturan tentang menjabar utang-piutang yang telah ditetapkan tempo yang lain-lain yang sudah ditetapkan sebelum tanggal 20, bulan 10, tahun 2602 masih tetap berlaku untuk semua sebelum atas pada tanggal 20, bulan 10, tahun 2602.

Aturan Tambahan.
Oendang - oendang ini mulai berlaku pada hari diterbitkannya.
Batavia, tanggal 20, bulan 10, tahun 2602.

**PANGLIMA
BESAR BALATENTARA
DAI NIPPON.**

Keterangan Pemerintah

Tentang Ekwidasi dan penjabaran utang-piutang tentang penentuan pembajaran hutang.

Taklaka Balatentara Nippon mochi pemerintah dihapuskan Djawa, maka untuk menjajabari hutang-piutang dihapuskan ekonomi, Pemerintah telah mengadakan aturan tentang penentuan pembajaran hutang dan penentuan bank - bank. Dalam waktu selama ini, oleh karena semua yang giat dari Pemerintah, lapangan ekonomi itu tentram kembali dan telah tumbuh dari luka-luka peperangan, sehingga sekarang kegiatan kemudajaan dihapuskan itu.

dalam oendang-oendang no. 1 segala utang terbeber harus dengan utang yang dihapuskan oleh Pemerintah Balatentara adalah dihapuskan sebagai utang yg sja dihapuskan. Dengan ini perutusan: semua utang itu tidak ada hutang-piutangnya dan hutang-piutangnya dengan Dai Nippon Bank menjabarkan hutang-piutang. Utang itu ditetapkan diperintahkan dan diperintahkan oleh Pemerintah Dai Nippon tentara. Oleh sebab itu, semua penjabaran hutang-piutang yang mengenai utang-piutang yang terbeber harus dengan hutang-piutang yang dihapuskan (H daka).

Sumber: Soeara Asia, 21 Oktober 1962

Akibat aksi bumi-hangus pemerintah Hindia Belanda, objek-objek penting yang sebagian besar terdiri atas alat-alat produksi menjadi hancur. Oleh karena itu, pada awal pendudukan Jepang hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh. Kehidupan ekonomi Hindia Belanda telah berubah dari ekonomi normal menjadi ekonomi perang. Menghadapi hal ini, pemerintah pendudukan Jepang segera mengambil alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi.

Menurut Marwati (1993), Djoned Poesponegoro langkah pertama yang diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah melakukan rehabilitasi prasarana ekonomi, seperti jembatan, alat-alat transportasi, dan telekomunikasi yang bersifat fisik. Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap kegiatan ekonomi dikeluarkan. Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang dan barang-barang sitaan milik musuh diperketat. Untuk mencegah meningkatnya harga barang dan timbulnya pelbagai manipulasi di daerah-daerah, pemerintah pendudukan Jepang juga mengeluarkan paket peraturan pengendalian harga dan hukuman yang berat bagi pelanggarnya.

Jepang benar-benar menyiapkan Hindia Belanda bagi pusat kekuasaannya di Asia Tenggara. Sumatra dan daerah luar Jawa dijadikan tumpuan sumber daya alam, sedangkan Jawa dijadikan pusat administrasi. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan di Hindia Belanda, sosial, politik, ekonomi, dan perbankan tidak ada yang luput dari penguasaan tentara pendudukan Jepang di Hindia Belanda.

Pada tanggal 8 Maret 1942 diumumkan bahwa Pemerintah Pendudukan Militer Angkatan Darat Jepang di Indonesia yang dinamakan ***Gunseikanbu*** membetuk tujuh departemen (Bu), yaitu (1) Soomubu, departemen yang mengurus urusan umum; (2) Sang-yobu, departemen yang mengurus urusan perekonomian; (3) Zaimubu, departemen yang mengurus urusan keuangan; (4) Shidobu, departemen yang mengurus urusan kehakiman; (5) Keimubu, departemen yang mengurus urusan kepolisian; (6) Kotsubu, departemen yang mengurus urusan lalu-lintas; dan (6) Sendenbu, departemen yang mengurus urusan propaganda.

Lembaga *Sendenbu* mempunyai 3 seksi, yaitu (1) seksi administrasi; (2) seksi berita dan pers; dan (3) seksi propaganda. Lembaga itu dipimpin oleh orang Jepang, yaitu Kolonel Machida, mulai bulan Agustus 1942 sampai dengan Oktober 1943, didampingi oleh orang bumiputra.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Departemen Sendenbu, kemudian dibentuk organisasi-organisasi (*domei*) yang berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Kolonel Machida. Sendenbu dibagi ke dalam beberapa Jawatan, yaitu (1) Hosokanri Kyoku atau jawatan radio dibentuk Oktober 1942; (2) Jawa Shinbunkai, yang mengurus persuratkabaran, dibentuk pada bulan Desember 1942; (3) Eiga Haikyusha, yang mengurus peredaran film, dibentuk pada bulan Desember 1942; dan (4) Keimin Bunka Shidosho atau pusat kebudayaan dibentuk tanggal 1 April 1943. Lembaga itulah yang dimanfaatkan untuk mendukung program propaganda karena dinilai memiliki potensi untuk dijadikan alat propaganda yang efektif, termasuk menyukseskan proganda gemar menabung.

Pendekatan yang digunakan adalah melalui diplomasi bermatra budaya dengan mengangkat berbagai budaya tradisional. Pendekatan itu menjadi pilihan strategi dan kebijakan politik yang berhasil mendekati rakyat Indonesia. Harapannya adalah agar kedatangannya mendapat dukungan rakyat. Dengan berbagai semboyan dan pendekatan yang penuh janji, Jepang berhasil menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia. Pendekatan itu juga diterapkan dalam pengisian jabatan. Hampir seluruh lembaga yang dibentuk oleh Jepang unsur pimpinan dalam struktur organisasi termasuk bidang-bidang dalam organisasi Keimin Bunka Sidosho didampingi oleh seniman dan budayawan bumiputra.

Bidang-bidang dalam Keimin Bunka Sidosho, seperti 1) Bidang Kesusasteraan, dipimpin oleh Rintaro Tekada, pendampingnya adalah Armijn Pane dan Usmar Ismail; 2) Bidang Lukisan dan Ukiran dipimpin oleh T. Kono, tanpa ada pendamping; 3) Bidang Musik dipimpin oleh N. Iida, dengan pendamping Cornel Simandjuntak; 4) Bidang Sandiwara dan Tari menari, dipimpin oleh K. Yasuda, pendamping tidak ada; 5) Bidang Film dipimpin oleh Sōichi Ōya yang merangkap sebagai Ketua Keimin Bunka Sidosho. Pendamping-pendamping itu untuk urusan perfilman adalah R.M. Soetarto, Rd Arifin, Rustam Sutan Palindih, dan Inu Perbatasari, sedangkan sandiwara Dr. Huyung, D. Djajakoesoema, dan Soerjosoemanto.

Dengan strategi seperti itu, Jepang mengharapkan program propaganda yang dilancarkan melalui lembaga yang ada Sendenbu akan mencapai hasil optimal. Dalam hal ini termasuk propaganda yang berkaitan dengan bank, yaitu propaganda gemar menabung.

Kebijakan Perbankan

Sebelumnya, dalam menghadapi serbuan Jepang ke Pasifik, pihak sekutu pernah membentuk suatu komando gabungan bernama *American British Dutch Australian Command* (ABDACOM) yang markas besarnya ada di Lembang, dekat Bandung. Panglimanya adalah Jenderal Sir Archibald Wavell. Sementara itu, Letnan Jenderal H. Ter Poorten diangkat sebagai panglima tentara Hindia Belanda (KNIL). ABDACOM ini hanya berfungsi dari 15 Januari sampai dengan 25 Februari 1942. Pada akhir Februari 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh, telah mengunjungi ke Bandung disertai oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Pada saat itu digambarkan bahwa Hotel Homann dan Preanger penuh dengan pejabat tinggi Hindia Belanda yang mengunjungi ke Bandung.

Selanjutnya, pertempuran-pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Pada 1 Maret 1942 Tentara Keenam Belas Jepang berhasil mendarat di tiga wilayah sekaligus, yakni Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Tengah). Setelah pendaratan itu, ibu kota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan sebagai kota terbuka yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Segera setelah jatuhnya kota Batavia ke tangan mereka, tentara ekspedisi Jepang langsung bergerak ke selatan dan berhasil menduduki Buitenzorg (Bogor).

Seperti ditulis oleh Marwati (1993), beberapa hari kemudian, setelah usaha penyerangan ke Bandung (kota pertahanan pemerintahan Hindia Belanda), tepatnya 8 Maret 1942 terjadi penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, atas nama Angkatan Perang Serikat di Hindia Belanda. Tentara ekspedisi Jepang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan Hindia Belanda tersebut terjadi di Kalijati, Jawa Barat. Setelah itu, mereka menjadikan Jakarta sebagai markas besar Pasukan Tentara XVI.

Perbankan merupakan salah satu unsur penggerak perekonomian Hindia Belanda; sebelum Jepang datang. Pada masa itu bank-bank milik asing, terutama Belanda dan Inggris, telah berkembang dengan baik di Hindia Belanda. Kondisi itu berubah setelah Jepang berkuasa. Tidak beberapa lama setelah memantapkan kekuasaannya, Jepang segera mengambil tindakan likuidasi terhadap bank-bank bekas milik musuh tersebut. Awalnya pada tanggal 4 Maret 1942 direksi bank-bank di Hindia Belanda yang dikumpulkan di Bandung secara terpaksa harus menandatangani dan mengeluarkan suatu pernyataan bahwa seluruh bank Belanda dan semua asetnya, tanpa kecuali, harus diserahkan kepada tentara pendudukan Jepang.

Sebelum likuidasi itu dilakukan, bank-bank Belanda masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tanggungannya. Berkaitan dengan itu, pada 11 April 1942 diumumkanlah suatu moratorium bank, yaitu penundaan pembayaran tanggungan bank berdasarkan Undang-Undang No. 9/1942. Berdasarkan *Report of The President of The Java Bank* (1948), kebijakan likuidasi bank-bank ini juga berlaku bagi bank-bank Inggris dan beberapa bank Cina di Hindia Belanda. Dilaporkan juga bahwa tindakan likuidasi itu juga dilakukan terhadap bank-bank Belanda dan Inggris di Sumatra. Namun, sesuai dengan pembagian wilayah perangnya, perintah likuidasi di wilayah tersebut dikeluarkan oleh Panglima Balatentara Jepang di Singapura. Untuk bank-bank di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur lainnya, perintah likuidasi dikeluarkan oleh Kementerian Angkatan Laut di Tokyo, sedangkan di Jawa perintah likuidasi bank langsung dikeluarkan secara khusus oleh Panglima Besar Balatentara Dai Nippon di Jawa.

Setelah beberapa lama, tindakan likuidasi atas bank-bank milik musuh di Jawa baru benar-benar dilakukan oleh tentara pendudukan Jepang secara resmi pada 20 Oktober 1942 berdasarkan Undang-Undang No. 44/1942. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa DJB, bank-bank Belanda, dan bank-bank asing lainnya resmi dibubarkan. Meskipun demikian, bank-bank tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan utang-utangnya sampai batas waktu 20 November 1942. Selain DJB, bank-bank Belanda yang dilikuidasi adalah Nederlandsche Handel Maatschappij, Nederlandsch Indische Handelsbank, Escompto, dan Batavia Bank. Sementara itu, bank-bank Inggris dan Cina yang dilikuidasi adalah The Chartered Bank of India, The Hongkong and Shanghai Corporation Ltd., dan Overseas Chinese Banking Corporation Ltd.

Dengan ditutupnya bank-bank tersebut dan agar perekonomian dan keuangan dapat lebih dikendalikan, fungsi perbankan segera diambil alih oleh bank-bank Jepang yang pada waktu sebelumnya telah ada di Hindia Belanda, tetapi kemudian ditutup oleh Pemerintah Hindia Belanda karena pecahnya perang antara Belanda dan Jepang. Bank yang didirikan masa Hindia Belanda yang tidak dilikuidasi oleh tentara pendudukan Jepang dan tetap dipertahankan sebagai bank penyimpanan uang yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah **Postspaarbank**, hanya diubah namanya menjadi **Bank Tjokin Kjekoe**.

Selain itu, pemerintah tentara pendudukan Jepang mulai membuka bank-bank Jepang pada 10 Mei 1942. Menurut *Asia Raya* (10 dan 20 Mei 2602), bank-bank Nippon mulai beroperasi di Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang, sedangkan di Surabaya bank-bank Nippon baru beroperasi pada tanggal 20 Mei. Nama bank-bank tersebut, antara lain, adalah Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, dan Kana Ginko. Bank-bank tersebut

langsung berada di bawah kendali penguasa tentara Jepang dan melakukan kegiatan perbankan dalam penyimpanan deposito, simpan-pinjam, dan pekerjaan lainnya yang diizinkan oleh penguasa tentara Jepang.

Berbeda dengan bank-bank Belanda lainnya, De Algemeene Volkscredietbank (AVB) tidak ikut dilikuidasi oleh tentara pendudukan Jepang. Bank rakyat yang banyak bergerak di bidang perkreditan desa-desa ini usahanya dialihkan dan dilanjutkan oleh Syomin Ginko yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang berdasarkan Undang-Undang No. 39 tentang Pembukaan Syomin Ginko (Bank Rakyat). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa di Jawa Syomin Ginko mulai beroperasi sejak 3 Oktober 1942.

Menurut *Report of The President of The Java Bank* (1948), untuk menggantikan De Javasche Bank, pada April 1943 pemerintah pendudukan Jepang mendirikan **Nanpo Kaihatsu Ginko** yang bertugas sebagai bank sirkulasi di Jawa selama masa pendudukan. Sementara itu, menurut Marwati, semua bank Jepang yang beroperasi di Hindia Belanda pada saat itu berada di bawah supervisi Nanpo Kaihatsu Ginko (Perbendaharaan untuk Kemajauan Wilayah Selatan). Selain itu, tugas utama dari Nanpo Kaihatsu Ginko adalah sebagai likuidator yang terdiri atas orang-orang Jepang yang dibantu oleh Staf dan tenaga tata-usaha bank-bank bersangkutan. Menurut Hartono (1976), tugas panitia likuidator adalah sebagai berikut.

- Panitia menyelesaikan tagihan bank-bank yang ada. Usaha ini tidak mendatangkan hasil sebagaimana telah dibayangkan sebelumnya.
- Panitia membayar kembali kepada kreditur-kreditur; membayar kepada pemegang rekening yang bukan musuh sebesar 30%. Bagi yang tidak mau dan tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut, jumlah-jumlah yang seharusnya dibayarkan dipindahkan kepada Nanpo Kaihatsu Ginko.
- Panitia—menyelesaikan simpanan tertutup dan *safe-loketten*. Simpanan tertutup dan *safe-loketten* yang tidak langsung berguna untuk Balatentara Jepang akan dikembalikan kepada pemilik. Namun dalam kenyataannya, kalimat “tidak langsung berguna” tersebut ternyata sangat elastis. Dalam praktiknya banyak barang simpanan yang hilang atau diganti dengan semacam tanda memiliki tagihan-tagihan terhadap Nanpo Kaihatsu Ginko. Dalam kenyataan, tanda-tanda tersebut tidak mempunyai nilai sama sekali.

Propaganda Indonesia Gemar Menabung

Setelah dibentuk Sendenbu, sebagai departemen yang membidangi urusan propaganda, Sendenbu dibantu dengan dibentuknya jawatan-jawatan Hosokanri Kyoku atau jawatan radio, Jawa Shinbunkai yang mengurus persurat-kabaran, Eiga Haikyusha yang mengurus peredaran film, dan Keimin Bunka Shidosho atau pusat kebudayaan. Untuk jawatan Keimin Bunka Shidosho, jawatan itu dilengkapi dengan lembaga-lembaga yang mengurus kesusasteraan, lukisan dan ukiran, musik, sandiwara dan tari, serta film.

Seluruh komponen lembaga itu dikerahkan untuk melaksanakan berbagai macam propaganda, termasuk propaganda menabung pada **Postspaarbank** atau Bank Tjokin Kjekoe. Sebagaimana diberitakan, pada Mei 1942 pemerintah pendudukan Jepang memerintahkan direksi Postspaarbank untuk mendata nasabahnya yang berada di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terus menabung di Postspaarbank. Seperti yang tertulis dalam majalah Djawa Baroe (Juni 1943), *“Goena mentjapai kemenangan terachir dalam peperangan Asia Timoer Raya sedapatdapatnja hendaklah kita menghematkan belandja kehidoepan sehari-hari, Sebaliknja haroeslah kita giat bekerdja dan radjin menaboeng oeang”*.

Untuk mendapatkan gambaran tentang propaganda menabung masa pendudukan Jepang, di bawah ini ditampilkan beberapa contoh propaganda melalui lembaga-lembaga yang ada di Sendenbu dengan media yang berbeda-beda sebagai berikut.

1. Media surat kabar

Dalam satu tulisan yang menarik di surat kabar *Soeara Asia* (29 Oktober 1942), pemerintah pendudukan Jepang memberikan gambaran tentang alasan mengapa masyarakat harus menyimpan uangnya dalam bank. Bunyi kutipan agak panjang sebagai berikut:

“Jadi orang harus menyimpan uangnya pada suatu tempat yang seaman-amannya. Kantor-kantor bank, biasanya tidak mau menerima uang simpanan berkecil-kecil. Jadi orang harus memilih suatu bank simpanan, yang teristimewa didirikan untuk menerima simpanan berkecil-kecil. Di Indonesia ini masih sedikit bilangannya bank simpanan daerah kepunyaan partikelir. Tetapi lain dari itu ada suatu badan umum yang dengan bantuan pemerintah Dai Nippon dapat diadakan dimana-dimana tempat, untuk memenuhi keperluan yang dibicarakan tadi, ialah Yubin Chokin diselenggarakan Chokin Kyoku.

Pemerintah Dai Nippon menjamin sepenuhnya keamanan uang yang disimpan dalam Yubin Chokin dan diberikannya pula bunga patut bagi uang simpanan itu, ialah 2,4% bagi uang simpanan yang berjumlah sampai 3000 gulden, dan 1,5% bagi uang simpanan yang melebihi 3000 gulden tetapi dibawah 5000 gulden dalam setahun. Dengan pasti kami dapat mengatakan bahwa pikiran atau pendapat (bahwa jika menyimpan uang lambat laun perputaran uang akan terhalang) serupa itu, salah semata-mata, dan mempunyai alasan yang rapuh lapuk.

Sekali –kali tidaklah benar, bahwa makin lama makin dikit perputaran uang. Boleh jadi pendapat serupa itu benar apabila orang menyimpan uangnya dalam rumahnya atau menyembunyikannya di dalam kasur atau atau di dalam bantal, sebagaimana diperbuat oleh orang-orang kaya dalam cerita kuno. Dalam hal penyimpanan serupa itu tentu pendapat atau bantahan orang tadi pada tempatnya. Uang simpanan serupa itu boleh dikatakan modal mati. Lain halnya dengan uang simpanan dalam bank simpanan, sebab uang simpanan itu tidak tinggal tersimpan saja dalam lemari besi.

Pendeknya orang tidak usah takut yang uang itu akan sedikit sekali tinggal dalam perputarannya, apabila semua orang menyimpankan uangnya dalam Yubin Chokin. Uang yang perlu dijalankan tentu akan dimasukkan dalam perputaran juga. Tentu sekali orang tidak akan menyimpankan semua uangnya dalam bank simpanan, sebab menyimpan serupa itu akan membawa bahaya kelaparan bagi penyimpannya sendiri. Menyimpan itu hendaknya janganlah terasa bagi kita sebagai beban, tetapi harus selaku kesenangan. Kesenangan karena menyimpan, itulah yang dapat mengantarkan kita kepada yang kita maksudkan.

Sebagai penutup kami menganjurkan: Marilah kita bersama-sama memajukan masyarakat Indonesia dalam hal kemauan menyimpan, agar kita dapat menyusul bangsa-bangsa lain yang telah maju dalam menyimpan uang. Jika orang sejak kecilnya, membiasakan menyimpan uang, boleh jadi tidak akan kedengaran lagi keluhan kesah yang mengatakan: Saya tidak mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian, sebab saya tidak mempunyai uang persediaan untuk mengerjakan ini dan itu.”

Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menganjurkan masyarakat untuk hidup berhemat dengan cara menabung. Hal itu mereka kaitkan dengan kemampuan untuk mengurus sendiri yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikut ini adalah kutipan propaganda hidup hemat tersebut:

“Pada zaman yang lampau, di waktu bangsa Barat masih memegang kekuasaan di Asia, sering kita dengar ucapan-ucapan yang merendahkan, bahwa bangsa Timur itu tidak dapat mengatur sendiri rumah tangganya dengan baik, oleh karena penghidupannya masih selalu boros katanya. Sekarang zaman sedang mengalami perubahan-perubahan yang besar. Sejak tanggal 8 bulan 12 tahun yang lalu dengan titah Kerajaan oleh Balatentara Dai Nippon dirobokkanlah kekuasaan Inggris, Amerika dan Belanda dan mulailah zaman baru, zaman kemakmuran bersama-sama, zaman Pembangunan Asia raya! Kerajaan Dai Nippon, Kerajaan Bangsa Asia telah lama memperlihatkan kepada dunia, bahwa bangsa Timur pun dapat mengatur negerinya dengan baik, bahwa bangsa Timur tidak kalah dengan bangsa Barat, bahkan lebih sempurna.

Balatentara Dai Nippon telah melepaskan berbagai-bagai negeri Asia dari genggaman Inggris, Amerika, dan Belanda dan bermaksud akan membangunkan Asia Raya. Bangsa-bangsa Asia sekarang berwajib dan harus sanggup mengikuti zaman baru ini, harus sanggup memperlihatkan bahwa mereka dapat mengatur juga rukah tangganya sendiri dengan rapi. Dan istimewa harus dapat memecahkan sendiri soal perekonomiannya.

Bangsa-bangsa Asia harus dapat memberi bahan-bahan untuk mendirikan bank-bank yang besar, sebab bank-bank itu adalah pusat-pusat keuangan dan perekonomian. Dai Nippon telah lama memberi contoh, bahwa juga bangsa-bangsa Timur sanggup mengatur bank-bank yang besar, seperti Mitsui-Bank, Taiwan Bank, Yokohama Specie Bank dan lain-lainnya yang semuanya berdiri tegak dan telah membuka pula kembali cabang-cabangnya di seluruh Asia Selatan. Yang banyak dikenal sejak dulu oleh bangsa Indonesia ialah Bank Tabungan Pos (Tyokin Kyoku) dan Bank Rakyat (Syomin Ginko) yang bekerja seperti sedia kala lagi dan terus ditanggung oleh pemerintah.

Seperti diberitakan di *Asia Raya* (27 Desember 2602), “Sekarang dengan kedatangannya Balatentara Dai Nippon zaman berubah! Bangsa-bangsa Asia dibangun, dilindungi, dipimpin supaya mendapat tempatnya juga yang terhormat di atas dunia ini. Bangsa-bangsa Asia berwajib membantu peperangan sekarang ini sampai akhirnya kemenangan kita dapat. Salah satu syarat yang penting ialah menyokong meneguhkan kedudukan ekonomi masing-masing. Istimewa di dalam masa pancaroba ini bangsa-bangsa Asia harus sanggup mengatur penghidupannya secara hemat dan sederhana! Supaya bank-bank sebagai pusat keuangan dan perekonomian dapat berdiri subur buat selama-lamanya. Jika segala lapisan dari bangsa Asia berusaha sekuat-kuat tenaganya di masa peperangan ini, niscaya kemenangan akhirnya akan tercapai! Kemenangan untuk pembangunan Asia Raya!”

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, tercatat jumlah penabung bangsa Indonesia di Bank Tabungan Pos (posisi akhir tahun 1938) sebanyak 342 ribu orang dengan jumlah uang simpanan sebesar 14 juta rupiah. Jumlah itu hanya setengah persen dari jumlah penduduk Indonesia (Jawa dan Madura) dan masih lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan jumlah penabung bangsa asing. Pada 1944 setelah kondisi politik dan perekonomian mulai berlangsung stabil, pemerintah pendudukan Jepang makin aktif menggerakkan masyarakat Indonesia untuk menabung. Selain bank swasta mengadakan program simpanan berbunga sebagaimana periode sebelumnya, pemerintah pendudukan Jepang juga mengerahkan masyarakat agar menyimpan dananya ke Tjokin Kjekoe.

2. Media majalah

Di majalah *Djawa Baroe*, Juli 1944 dimuat sebuah cerita pendek (cerpen) yang berisi propaganda tentang menabung. Propaganda menabung itu berjudul “Nasehat Jang Bermanfa’at”. Cerpen itu berisi nasihat yang antara lain berbunyi “*Ingat, kang Sastro oeang ini djangan dibelikan barang jang tidak sangat perloe. Ingat, sekarang kita dalam peperangan jang hebat; hidoep sederhana dan hemat haroes mendjadi tjara hidoep kita. Ingat djoega, djalan dari kantor ini sampai roemahmoe djaoeh sekali, dan moengkin ada orang pendjahat merampas oeangmoe. Maka dari itoe djanganlah ragoe-ragoe, pergilah teroes kekantor pos, simpanlah oeangmoe disana. Djikalau kamoe memerloekan oeang, sewaktoe-waktoe bisa diambil kembali.*”

3. Media seni musik

Jepang mempropagandakan menabung dengan lagu atau nyanyian. Menurut Kurasawa (1993), ada dua jenis lagu yang sering diajarkan dan diperdengarkan, yaitu lagu-lagu berbahasa Jepang dan lagu-lagu propaganda dalam bahasa Melayu (Indonesia). Lagu-lagu berbahasa Melayu yang dimaksud tersebut adalah lagu gubahan, baik dari bahasa Jepang maupun lagu yang memang diciptakan di Indonesia. Salah satu lagu berbahasa Melayu dimuat di majalah *Djawa Baroe* (1 April 1945) dalam bentuk not balok beserta teks liriknya. Lagu itu berjudul **Menaboeng**. Bentuk not balok dan teks liriknya sebagai berikut.

MENABOENG

Toea moeda di garis belakang-kang
 Dari kota sampai ke desa
 Ikoet serentak berjoeang perang
 Dengan menaboeng sekoeat tenaga

Ref.:

Menaboeng, menaboeng segera
 Seroean Bangsa, panggilan Noesa.

Selama moeda radjin menaboeng-boeng
 Hemat tjermat senantiasa
 Datangnja toea beroleh oentoeng
 Hidoep merdeka, sentosa kaya

Ref.:

Menaboeng, menaboeng segera
 Seroean Bangsa, panggilan Noesa.

Pradjurit moeka angkat sendjata-ta
 Hantjoer moesoeh sampai binasa
 Pradjoeit belakang koempoelkan harta
 Membantoe 'saha menoedjoe djaja

Ref.:

Menaboeng, menaboeng segera
 Seroean Bangsa, panggilan Noesa.

-MENABOENG-

LAGOE MENABOENG OEA!

1. Toea dan moeda garis belakang. Dari kota sampai desa, Ikoet serentak berjoeang-perang. Dengan menaboeng koet tenaga.
2. Selama moeda ra menaboeng. Hemat tjermat senantiasa, Datangnja toea beroleh oentoeng. Hidoep merdeka, to-a dan kaya.
3. Pradjoeit moeka kat sendjata, Hantjoer moesoeh pai binasa, Pradjoeit belakang menghimpun harta. Membantoe oesaha menoedjoe djaja.

Oelangan:
 Menaboeng, menabo segera
 Seroean Bangsa, Pangilan Noesa.

PEROESARIAAN MINJAK WANGI
 "A. A. ABID" Djakarta
 Miyahk Dini 87 B
 Ada media:
 Babi Minjak Wangi dari beberapa majam, Air Kelonjo, Minjak Ramboet, Pomade, Air Wangi, dll.

DJAWA BAROE (7)
 Terbit pada 1 April 1945.
 (Terbit 12 a. reboen, 1945, 1 dan 13)
 Pemimpin penerbit S. Hingaguti
 Harga satu f 0.20
 (Dibayar lebih dahulu)
 Penerbit DJAWA SINBUN SYA
 Yamato Basi Kita Dini 8, Dkt. JAWA BAROE

ジャワバルウ (第七号)
 昭和二十年四月一日発行
 発行所 東京市豊島区西池袋二丁目一
 番 三十三号 新井 隆 啓
 電話 二二二二
 (フマキヤビル内)
 昭和二十年四月一日発行
 ジャワバルウ 第七号

Sumber: Djawa Baroe No. 8 Tahun 2605

Dari lirik lagu tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada lirik bait 1 dan 3 tentara pendudukan Jepang memberikan seruan bahwa menabung sama dengan berperang meski tidak berada di medan pertempuran. Adapun pada lirik bait 2 terdapat nasihat pada pemuda untuk menabung dan hidup cermat agar mendapat keuntungan di hari tua, yaitu menjadi orang merdeka, sentosa, dan kaya.

4. Media seni rupa

Selain melalui lagu, tentara pendudukan Jepang juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti menabung dalam kehidupan mereka dalam bentuk gambar dan tulisan seperti komik. Dalam majalah *Djawa Baroe* No. 21 tahun 2604 dimuat hasil sayembara penulisan bergambar dengan tema menabung. Sayembara tersebut diadakan oleh Banjoemas Shuuchoo bagian *Senden* (propaganda) di Purwokerto. Sayembara tersebut bertujuan memberikan pendidikan menabung kepada masyarakat melalui cara yang dapat dengan mudah mereka pahami, yaitu tulisan dan gambar.

Berikut ini adalah berapa cuplikan gambar dan narasi karangan yang diperoleh dari sayembara tersebut.

Gambar tersebut mengisahkan Dokter Hoesni yang baru lulus dari Ika Daigaku sedang berjabat tangan dengan ayahnya dan mengucapkan terima kasih karena telah membiayai sekolahnya hingga lulus menjadi seorang dokter. *"Tindakan ayah terhadap aku yang telah melaksanakan idam-idamanku akan aku teruskan pula kelak kepada anak-anak ku"*, begitu kata Dokter Husni. Dari gambar dan narasi yang berjudul *Tjita-Tjita Terhadap Anak*, terdapat nasihat bahwa orang tua harus mempersiapkan pendidikan anaknya mulai si anak masih dalam buaian. Bagaimana cara mempersiapkannya? Antara lain melalui menabung.



Sumber : *Djawa Baroe* No 21 Tahun 2604



Sumber : Djawa Baroe No 21 Tahun 2604

Dalam tulisan dengan judul *Kebakaran* dikisahkan rumah Toean Rachman yang terbakar sehingga membuat anak dan istrinya menjadi panik karena tidak tau akan tinggal di mana? Dengan tenang Toean Rachman berkata kepada anak dan istrinya, “*Djangan takoet, sebentar lagi akoe pergi ke Chokin Kyoku mengambil oeang simpanan kita*”. Dalam tulisan itu masyarakat mendapat informasi tentang manfaat menabung, yaitu selain uang simpanan aman dan tidak ikut terbakar, si penabung juga mendapatkan asuransi kebakaran dari Chokin Kyoku.

Tulisan berikutnya berjudul *Toekang Betja* yang mengisahkan betapa gembiranya seorang tukang becak yang dapat memiliki becaknya sendiri dengan cara menabung. Karena mengingat pendapatan tukang becak yang relatif kecil, sebenarnya susah dibayangkan jika harga becak yang mahal dapat ia miliki. Akan tetapi, dengan cara menabung tukang becak yang cerdas itu akhirnya dapat memiliki becaknya sendiri.

Gambar berikutnya menunjukkan rekaan rakyat Indonesia yang ramai-ramai mengantre di Chokin Kyoku untuk menabung. Dalam tulisan berjudul *Indonesia di Masa Datang* itu, antara lain, dituliskan “Bangsa Indonesia diberi pula kesempatan oleh Dai Nippon untuk ikut serta menyusun pemerintahan negeri. Indonesia yang gilang gemilang bersemangat teguh, dimana rakyatnya bekerja giat di dalam usaha, pandai hidup berhemat dan mempunyai buku simpanan di Chokin Kyoku. Itulah Indonesia di masa datang”. Dalam tulisan singkat itu juga dinyatakan semboyan menabung rakyat Indonesia, yaitu “Menaboeng Goena Diri dan Negeri”.

Masih dalam majalah *Djawa Baroe* (No. 21/2604), juga terlihat bagaimana upaya pemerintah pendudukan Jepang dalam mengubah pola menabung masyarakat agar beralih dari celengan menjadi tabungan dalam bank. Dari gambaran kartun tersebut dapat disimpulkan bahwa kebiasaan menabung dalam celengan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya sistem perbankan, tetap dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan menabung di bank.



Sumber : *Djawa Baroe* No 21 Tahun 2604

Untuk menabung di bank, masyarakat tidak perlu meninggalkan kebiasaan menabung dalam bentuk celengan. Dengan demikian, tidak ada kebiasaan yang harus ditinggalkan oleh masyarakat ketika mereka disarankan memulai kebiasaan baru, yaitu menabung dalam bank. Celengan dan tabungan dapat disinergikan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan, yaitu memiliki simpanan uang untuk bekal di hari depan.

Giatnya pemerintah pendudukan Jepang dalam menghimpun dana masyarakat Indonesia untuk mendukung kegiatan perangnya juga terlihat dalam program Prangko Taboengan Pos. Program ini ditujukan untuk masyarakat umum dan terutama anak-anak dan pelajar yang memiliki dana terbatas untuk ditabungkan di Chokin Kyoku. Pada masa itu bank hanya menerima setoran simpanan sebesar 25 sen atau lebih dalam satu kali waktu. Program Prangko Taboengan Pos ditetapkan hanya berlaku di Jawa dan Madura. Prangko tabungan yang dikeluarkan oleh Chokin Kyoku hanya satu macam dengan harga 0,05 (5 sen) dan hanya dijual oleh Chokin Kyoku atau kantor pos. Nantinya, jika dianggap perlu, prangko juga akan dijual melalui kantor pemerintah lainnya. Prangko tersebut hanya digunakan untuk menabung dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lainnya.



Sumber : Djawa Baroe No 21 Tahun 2604

Lalu, bagaimana cara masyarakat menabung melalui program Prangko Taboengan Pos? Penabung meminta kartu tabungan pos dari Chokin Kyoku atau kantor pos dan kemudian menempelkan prangko-prangko yang sudah dibeli seharga 5 Sen. Kartu tabungan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat yang ingin menabung melalui prangko. Jika jumlah prangko yang ditempel dalam kartu tabungan telah penuh (sejumlah 20 prangko), penabung dapat membawanya ke Chokin Kyoku atau kantor pos supaya jumlah harga prangko dapat dicatat dalam buku simpanan pos. Demikian kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang kepada masyarakat supaya tergerak untuk menyimpan uangnya dalam tabungan yang dikelola oleh bank atau instansi milik pemerintah.



Sumber : Djawa Baroe No 21 Tahun 2604

Lalu, bagaimana jaminan keamanan uang masyarakat yang mereka tabung dalam bank? Terkait hal ini belum ditemukan data dan fakta yang menunjukkan kebijakan tersebut. Pendudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung dalam waktu singkat, yaitu 3,5 tahun. Kekuasaan mereka berakhir, tidak lama setelah mereka mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II menghadapi negara-negara sekutu.

5. Media radio

Seperti ditulis oleh Kurasawa (1993), radio merupakan alat propaganda yang efektif. Stasiun pemancar radio tinggalan Belanda dimanfaatkan untuk menyampaikan berita dan propaganda. Stasiun radio sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah dan pada tanggal 1 Oktober 1942 dibentuk lembaga dengan nama Jawa Hoso Kanriyoku (Biro Pengawasan Siaran Jawa) di bawah Sendenbu. Melalui Jawa Hoso Kanriyoku dengan delapan stasiun pemancar lokal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Semarang, Surabaya dan Malang, propaganda menabung di Chokin Kyoku secara terus-menerus dikumandangkan.

6. Media film

Selain menggunakan beberapa media seperti disebut di atas, untuk menyebarkan propaganda menabung, Jepang juga memanfaatkan media film. Menurut Kurasawa, melalui pemutaran gambar dan ucapan yang bergerak (audio visual), masyarakat yang masih berpendidikan rendah banyak tertarik dan mudah menangkap isi propaganda. Cara itu dinilai efektif karena dapat menjangkau rakyat pedesaan yang buta huruf, seperti halnya radio. Pada bulan Oktober 1942, dibentuklah sebuah organisasi sementara untuk menjalankan kebijakan perfilman dengan nama Jawa Eiga Kōsha atau Java Motion Picture Corporation.

Nama-nama lembaga yang aktif membantu propaganda Jepang, menurut Kurasawa, adalah sebagai berikut:

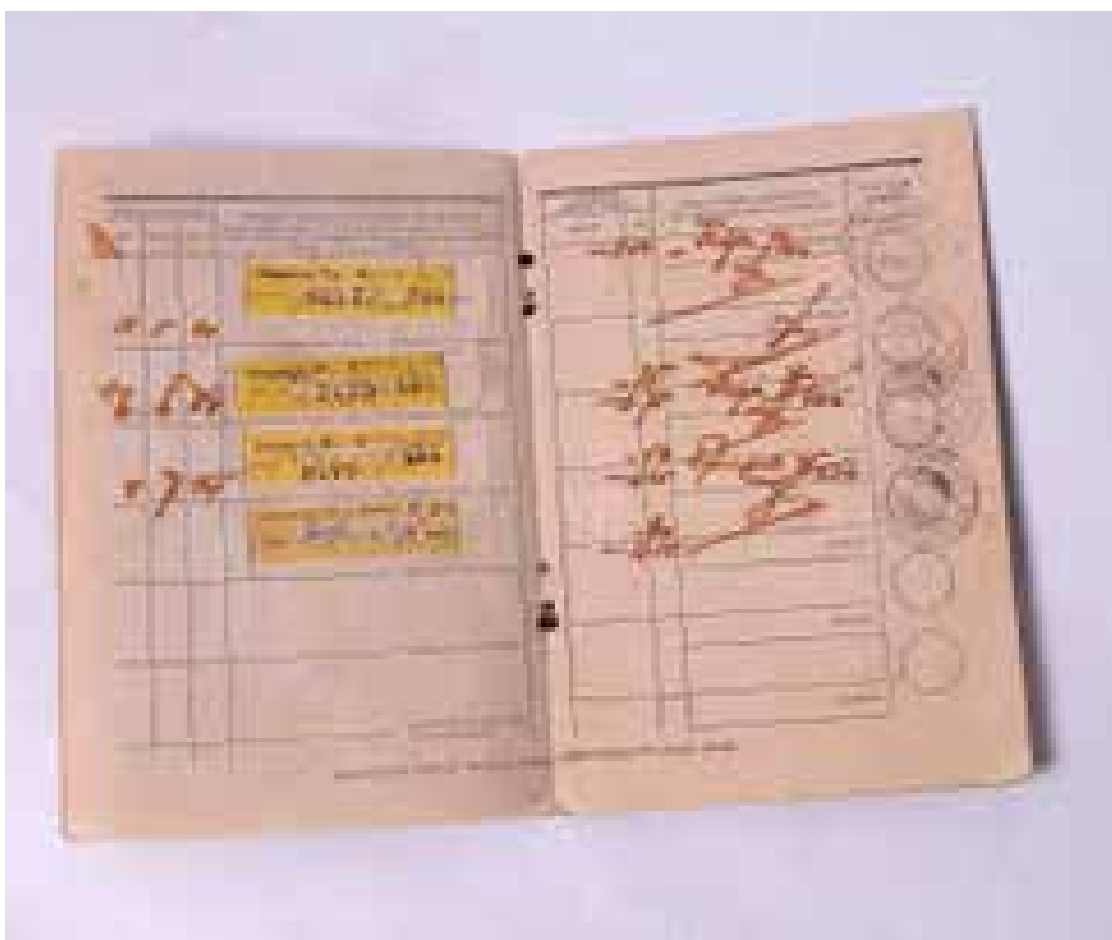
Name of Propaganda Organization		
name of organization	date of establishment	function
Jawa Shinbunkai (Java Newspaper Corporation)	Dec. 1942	publishing newspapers (management was trusted to Asahi Shinbun)
Dōmei News Agency		reporting
Jawa Hōsō Kanrikyoku (Java Broadcasting Superintendent Bureau)	Oct. 1942	domestic broadcasting (management was trusted to N.H.K., Japan Broadcasting Corporation)
Jawa Engeki Kyōkai (Java Theatrical Play Association)		making of theatrical plays
Nihon Eigasha or Nichiei (Japan Motion Picture Company)	April 1943	producing movies
Eiga Haikyōsha or Eihai (Motion Picture Distributing Company)	April 1943	distributing movies

Berikut ini ditampilkan bentuk buku tabungan Tabungan Pos dari Chokin Kyoku pada masa Jepang. Jika masa Hindia Belanda nasabah Postspaarbank dilengkapi dengan medali tanda anggota, pada zaman Jepang tidak ada lagi.

Dari gambaran sekilas mengenai menabung, masa pendudukan Jepang berupaya keras menanamkan gemar menabung kepada rakyat bumiputra. Di lingkungan adat Jepang, gemar menabung juga sudah lama dikenal. Selain itu, Jepang memiliki peribahasa yang berbunyi *“Chiri mo tsumoreba yama to nam”*, yang artinya *“debu pun kalau menumpuk menjadi gunung”*. Suatu pekerjaan yang dilakukan secara teratur akan berhasil. Sama dengan menabung, mulai sedikit asal dilakukan terus-menerus tabungan itu menjadi makin besar. Berbeda dengan di Nusantara, cara menabung di Jepang dilakukan dengan cara mencatat, yang disebut *kakeibo*.



Sumber : worthpoint.com





家計簿

KAKEI
BO

THE JAPANESE
ART OF SAVING
MONEY

FUMIKO CHIBA

Start your journey
to a calmer, richer



Apa yang dimaksud dengan *kakeibo*? Seorang penulis bernama Fumiko Chiba menulis buku berjudul *Kakeibo: The Japanese Art of Saving Money*. Buku tersebut membahas soal *kakeibo*. Konsepnya sederhana, setiap awal bulan atau saat Anda baru gaji, Anda merencanakan uang yang akan Anda habiskan sebulan ke depan. Dibuatlah rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu: 1) pengeluaran dasar sehari-hari (makan, transportasi, kos/kontrak/cicilan rumah); 2) pengeluaran sekunder (pakaian, *hang out*); 3) budaya (buku, nonton); dan 4) pengeluaran ekstra (membeli kado atau ke bengkel).

Kata kunci keberhasilannya adalah pada disiplin dalam pengeluaran. Jika perlu, disiapkan uang tunai dan bagi uang tersebut dalam amplop yang berbeda untuk setiap kategori. Lalu, catat setiap detail pengeluaran Anda setiap hari dalam sebuah buku. Pada akhir bulan, hitung pengeluaran Anda. Lihat pos mana yang berhasil Anda hemat, pos yang ternyata mengeluarkan uang lebih daripada yang Anda anggarkan, hal tak berguna apa yang Anda beli, dan buat perencanaan yang lebih matang pada bulan mendatang. Jika waktu sebulan terlalu lama untuk menganalisis, Anda bisa melakukan *review* setiap akhir pekan agar Anda bisa mengarahkan pengeluaran dengan benar. Seni menabung ala Jepang ini sudah dikenal sejak tahun 1904 oleh jurnalis wanita yang bernama Makoto Hani. (Sumber: <https://womantalk.com/life-hacks/articles/kakeibo-teknik-simpel-dari-jepang-untuk-mengatur-keuangan-xeWV4>).

Menurut hasil penelitian Irianti (2014), respons terhadap propaganda menabung selama masa pendudukan Jepang adalah jumlah nasabah meningkat jika dibandingkan pada masa Belanda. Meskipun demikian, jumlah uang yang terkumpul tidak lebih banyak jika dibandingkan pada masa pendudukan Belanda. Berbagai dugaan muncul berkenaan dengan hal tersebut. Mulai alasan latar belakang kondisi ekonomi selama perang hingga porsi nasabah yang ketika masa pendudukan Belanda lebih didominasi oleh bangsa Eropa dengan jumlah dana lebih banyak jika dibandingkan dengan pribumi.

Terlepas dari itu semua, propaganda menabung yang gencar dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang memiliki dampak yang terlihat dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Dampak tersebut di antaranya adalah makin meningkatnya jumlah penabung lembaga keuangan formal, terutama kantor pos dengan golongan penabung yang lebih bervariasi pula. Informasi mengenai menabung juga menjalar hingga level golongan masyarakat bawah. Berbagai cara menabung di dalam kondisi ekonomi tersulit pun dikenal oleh masyarakat berbagai kalangan. Dari sini akan bisa dilihat apakah terjadi perubahan pola penyimpanan uang akibat propaganda gerakan menabung Jepang selama pendudukan.



Koleksi: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Menabung Pada Masa Kemerdekaan

Menabung Mengisi Kemerdekaan

Pada 1944 kekuatan Jepang di Pasifik secara bertahap telah berhasil dihalau oleh Amerika dan pasukan sekutu sehingga pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sejak saat itu, beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia terjadi dengan cepat. Pendudukan Jepang berakhir dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, perjuangan kemerdekaan RI tidak berhenti begitu saja. Bahkan, Proklamasi telah menjadi semacam tonggak awal yang sesungguhnya bagi perjuangan RI untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai negara merdeka.

Pada tanggal 14 September 1945, pasukan sekutu untuk pertama kali tiba di Indonesia dengan tujuan menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran, melucuti tentara Jepang dan memulangkan kembali ke negerinya, menegakkan ketertiban, dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian menyerahkan

kepada pemerintahan sipil. Setelah itu, mereka menghimpun keterangan tentang penjahat perang yang akan dibawa ke hadapan pengadilan sekutu. Ternyata, kedatangan pasukan sekutu tersebut telah ditumpangi oleh para petinggi *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) dan serdadu-serdadu Belanda. Mereka dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda meskipun dalam kenyataan di atas wilayah Hindia Belanda, telah diproklamasikan Kemerdekaan RI.

Di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya beberapa tentara NICA

berusaha untuk memancing kerusuhan atau melakukan provokasi agar terjadi kontak senjata dengan beberapa laskar perjuangan (organisasi militer non-TNI). Walaupun pasukan sekutu telah mengakui Republik Indonesia secara *de facto* pada 1 Oktober 1945 dan berusaha untuk bertindak netral, pihak NICA (Belanda) justru belum mengakui Kemerdekaan RI dan bertindak seolah-olah Pemerintahan RI tidak pernah ada di wilayah bekas Hindia Belanda. Pada saat itu di wilayah yang sama, yaitu wilayah Indonesia (bekas wilayah Hindia Belanda), terdapat dua kekuasaan yang memerintah, yaitu Pemerintah RI dan Pemerintah NICA.

Sumber: Soeara Asia, 21 Oktober 1962

Dualisme Sistem Perbankan

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, RI telah mempunyai landasan negara berupa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam UUD itulah dibuat segala aturan kehidupan bernegara, termasuk dalam hal ekonomi dan keuangan. Rupanya para pendiri bangsa ini telah menyadari akan pentingnya suatu bank sirkulasi (kemudian menjadi bank sentral) yang akan mengatur keuangan negara. Oleh karena itu, mereka memaktubkan hal tersebut dalam UUD 1945. Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut.

“.....Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.”

Pencantuman nama Bank Indonesia dalam penjelasan UUD 1945 ini adalah landasan yang kuat bagi kehadiran dan peran strategis Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.

Namun, untuk mewujudkan amanat UUD itu tidaklah mudah, terutama pada zaman peperangan penuh ketidakpastian. Jangankan mewujudkan bank sentral yang permanen, untuk mewujudkan eksistensi pemerintahannya saja Indonesia harus berjuang mati-matian. Yang patut diapresiasi adalah bahwa dalam kesempatan itu para pendiri bangsa ini masih berkesempatan memikirkan bagaimana cara untuk mendirikan bank sentral. Ada yang berpendapat sebaiknya Indonesia segera mendirikan suatu bank negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank umum. Ada pula yang berpendapat sebaiknya tidak usah membuat bank negara baru, tetapi tinggal menunggu waktu perang usai. Nantinya De Javasche Bank yang telah eksis sekian lama sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda akan diambil alih dan dijadikan bank sirkulasi milik RI.

Sebagai usaha awal untuk mendirikan bank negara, pemerintah terlebih dahulu mendirikan suatu yayasan karena rupanya untuk mendirikan bank negara diperlukan undang-undang yang belum tentu dapat diterbitkan oleh Pemerintah RI dalam waktu singkat. Pada tanggal 19 Oktober 1945 pemerintah mendirikan yayasan yang diberi nama Poesat Bank Indonesia. Yayasan itu diberi wewenang oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum yang memberikan kredit, mengeluarkan obligasi, menerima simpanan giro, deposito, dan tabungan, serta memberikan informasi dan penerangan dalam bidang ekonomi.



Sumber: Merdeka, 5 Oktober 1945



Gedung kantor Poesat Bank Indonesia di Menteng Raya no. 23 Jakarta, cirkla bakal Bank Negara Indonesia, bank sirkulasi pertama milik bangsa Indonesia.

Sumber: Melangkah ke Depan dengan Kearifan Masa Lalu: Bank BNI 50 Tahun Emas. Swadharma Bhakti Nagara. PT BNI, 1996

Beberapa bulan kemudian, setelah dirasa siap untuk mendirikan suatu bank negara, melalui Perpu No. 2 Tahun 1946 tentang pembentukan Bank Negara Indonesia, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sentral/sirkulasi yang pertama milik RI. Peresmian bank negara ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946 yang dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI Mohammad Hatta. Di kota tersebut BNI untuk pertama kali menggunakan gedung bekas De Javasche Bank yang pada saat itu belum beroperasi kembali. Lalu bagaimana dengan nasib yayasan Pusat Bank Indonesia? Rupanya yayasan itu telah dileburkan ke dalam BNI, yayasan itulah yang sesungguhnya telah menjelma menjadi BNI. Hal itu terungkap dalam kawat yang dikirimkan BNI Yogya pada 19 Agustus 1946 kepada Gubernur, yakni sebagai berikut.

“Diberitahoekan bahwa Poesat Bank Indonesia mendjelma mendjadi Bank Negara Indonesia pada tanggal 17 agoestoes j.l. dan segala oeroesan Poesat Bank dilandjoetkan oleh Bank Negara titik nomor kawat Bank Negara dimoelai dengan nomor satoe titik BNI Jogja.”

Jika di dalam wilayah RI didirikan BNI sebagai bank sentral/sirkulasi, di dalam wilayah yang dikuasai oleh NICA, De Javasche Bank juga mulai beroperasi kembali. Dengan demikian, pada periode perang ini seiring dengan adanya dua pemerintahan di wilayah Indonesia, juga terdapat dua sistem perbankan yang bekerja dalam dua wilayah kerja yang berbeda.

Pada 10 Oktober 1945 NICA telah memperoleh akses ke kantor-kantor pusat bank Jepang di Jakarta. Ternyata, mereka mendapati kondisi perbankan setelah pendudukan Jepang tidak separah seperti yang dibayangkan sebelumnya. Secara umum, bank-bank Belanda menyatakan bahwa kerugian yang diderita selama pendudukan Jepang tidak membuat mereka lumpuh. Oleh karena itu, mereka merasa mampu untuk kembali beroperasi dan menjalankan fungsinya seperti sedia kala. Selanjutnya, pada 2 Januari 1946 Gubernur Jenderal secara resmi mengizinkan De Javasche Bank dan bank-bank Belanda lainnya untuk mulai membuka kantor-kantornya seiring dengan perkembangan wilayah yang telah diduduki oleh Belanda. Dengan demikian, keputusan tersebut telah mencabut keputusan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1944 tentang larangan kegiatan perbankan di Hindia Belanda.

Segera setelah itu, semua bank besar milik Belanda seperti Nedelandsch Handel Maatschappij (NHM), Nederlandsch Indische Handels Bank (NIHB), dan Escomptobank beroperasi kembali seperti sebelumnya. Selain bank-bank Belanda tersebut bank milik Inggris juga diberi kesempatan untuk beroperasi kembali, yaitu The Chartered Bank of India, Australia and China dan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Bank-bank asing lainnya yang juga turut beroperasi kembali adalah Overseas Chinese Banking Corporation dan Bank of China. Selain bank-bank tersebut terdapat beberapa bank lokal yang beroperasi di wilayah pendudukan Belanda, yaitu NV Bank Vereeniging Oei Tiong Ham (1906) dibuka kembali di Semarang, Bank Timur NV (1949) di Semarang, Chung Hwa Shangieh Maatschappij di Medan, dan NV Batavia Bank (1918) dibuka kembali di Jakarta dan diubah menjadi Bank Jakarta dan Bank Boemi IMA.

Kondisi Ekonomi dan Keuangan

Selama masa tahun 1945—1949 perkembangan perekonomian Indonesia sangat menyedihkan. Semua indikator makroekonomi dengan tiada kecualinya jelas menunjukkan betapa dalamnya perekonomian telah jatuh. Hal itu ditandai dengan turunnya produksi secara hebat karena hancurnya sebagian besar alat produksi, defisit neraca perdagangan yang besar selama beberapa tahun, defisit anggaran belanja pemerintah, baik Pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah NICA.

Keduanya mempunyai pengeluaran yang sangat besar dalam bidang militer karena peperangan yang terus terjadi antara keduanya. Situasi moneter makin gawat karena terus bertambahnya volume uang yang sangat meningkatkan permintaan barang tanpa diimbangi dengan perluasan secara proporsional pada sisi penawaran. Akibatnya, inflasi makin parah. Keadaan ekonomi dan moneter yang benar-benar sangat memprihatinkan terdapat di daerah yang diduduki NICA dan yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia (Oey Beng To, 1991:1—44).

Selama periode 1945—1949, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun NICA tidak dapat menyusun anggaran belanja masing-masing dengan baik. Dalam masa ketegangan politis antara kedua pemerintah dan bentrokan peperangan antara kedua kekuatan militer meningkat, dapatlah dimengerti bahwa administrasi keuangan negara dengan terpaksa ditelantarkan. Namun, penyusunan dilakukan sesudah lewatnya tahun-tahun yang bersangkutan. Anggaran belanja tahun 1947, 1948, dan 1949 berhasil disusun oleh NICA. Dalam rentang waktu tersebut, NICA telah melakukan *deficit financing* untuk membiayai pengeluarannya dengan jalan mengadakan pinjaman dari De Javasche Bank di samping menciptakan uang kertas Pemerintah, dan penempatan kertas perbendaharaan meskipun kecil jumlahnya.

Dari tahun 1945 hingga 1949 utang lancar NICA bertambah, yaitu meningkat dari 347 juta gulden pada tahun 1945 menjadi 2.859 juta gulden pada tahun 1949. Nantinya utang lancar dalam negeri sebesar 2.859 juta gulden itulah yang dialihkan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 (Oey Beng To, 1991:24).

Cara pembiayaan yang ditempuh NICA tersebut agak berbeda dengan pembiayaan pada masa sebelum perang. Sebelum terjadinya Perang Dunia II, kedua pembiayaan defisit anggaran belanja, terutama, ditampung di Negeri Belanda, dalam bentuk kredit jangka pendek dari Pemerintah Belanda, yang pada waktunya dikonsolidasikan dalam utang jangka panjang. Tidak demikian halnya sesudah Perang Dunia II, sebagian besar defisit anggaran belanja dibiayai dengan utang dari De Javasche Bank. Dari jumlah utang lancar itu De Javasche Bank adalah pemberi utang terbanyak, yaitu sebesar 1.352 juta gulden pada tahun 1949.

Kebijakan di bidang keuangan negara di daerah yang dikuasai Republik Indonesia selama 1945—1949 tidak banyak berbeda dengan kebijakan yang ditempuh di daerah pendudukan Belanda. Pemerintah Republik Indonesia juga melakukan *deficit financing* dengan mencetak ORI. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran perang, pencetakan ORI juga terus meningkat. Pada akhir tahun 1949 jumlah ORI dan ORIDA yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp6 miliar (*Sikap*, 12 Maret 1949). Dengan demikian, *deficit financing* sebagai cara termudah untuk membiayai peperangan telah dijalankan oleh kedua pemerintahan, baik NICA maupun Pemerintah Republik Indonesia.

Kebijakan demikian telah menyebabkan volume uang beredar meluap sampai tingkat yang tinggi. Keadaan moneter menunjukkan perkembangan yang makin lama makin mengkhawatirkan. Volume uang beredar telah bertambah sampai tingkat yang sangat tinggi. Pada akhir tahun 1949 di daerah yang dikuasai oleh Republik, volume uang beredar berjumlah Rp6 miliar, sedangkan di daerah pendudukan Belanda berjumlah Rp3,7 miliar.

Kalau jumlah tersebut dibandingkan dengan volume uang beredar sebelum pecah Perang Dunia Kedua, angka menunjukkan sejumlah 420 juta gulden pada bulan Maret 1938. Peredaran demikian besarnya pada tahun 1949 sudah jelas mencerminkan perkembangan jumlah uang beredar yang cukup tinggi di kedua daerah tersebut, yakni seluruh wilayah Hindia Belanda, atau wilayah RI dan NICA. Akibatnya, keadaan ekonomi sangat kacau, *hiperinflasi* menimpa perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal berdirinya RI, peredaran uang pendudukan Jepang tak bisa dikendalikan. Salah satu sebabnya adalah karena negara RI pada saat itu belum mempunyai mata uang yang dapat menggantikan mata uang pendudukan Jepang. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku lagi di wilayah Indonesia. Pada saat itu pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia baru mempunyai uangnya sendiri (untuk menggantikan uang Jepang) pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas baru dengan nama Oeang Republik Indonesia atau yang disingkat ORI.

Sementara itu, NICA yang datang kembali ke wilayah Indonesia justru telah siap dengan mata uangnya sendiri. Sejak bulan Desember 1942 dalam pengungsian di London, pemerintahan sipil Hindia Belanda telah mempersiapkan pencetakan uang Nederlandsch Indie dalam 9 pecahan, mulai 50 sen sampai 100 gulden (meskipun pencetakan uang 5 Gulden ke atas oleh pemerintah, sebenarnya bertentangan dengan *bank wet* 1922 yang memberikan hak tunggal pencetakan uang kertas 5 gulden ke atas). Uang kertas itulah yang kemudian terkenal dengan nama “uang NICA” yang dicetak oleh American Bank Note Company.



Oeang Republik Indonesia dikenal dengan ORI uang kertas pertama yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia seajack 1946.
 Sumber : Katalog Uang Kertas Indonesia 1782 - 1996. Sugiana Handjaja dkk. Jakarta: Yayasan Tridaya Warga Kejaksanaan, 1996

Dengan demikian, pada periode ini terdapat dua wilayah peredaran uang yang berbeda, yaitu wilayah yang dikuasai oleh NICA telah beredar uang kertas De Javasche Bank, uang kertas, dan logam Pemerintah Hindia Belanda, juga uang NICA. Sementara itu, di wilayah yang dikuasai oleh RI terdapat pula mata uang ORI-ORIDA yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Terdapatnya berbagai jenis mata uang yang beredar dalam masyarakat yang berbeda-beda nilai tukarnya menyebabkan situasi moneter menjadi sangat ruwet dan membingungkan. Akibat jumlah uang beredar yang terus bertambah, kedua wilayah pemerintahan yang berbeda itu masing-masing mengalami inflasi.

Di daerah pendudukan Belanda merajalelanya inflasi sedikit banyak dapat dikurangi dengan adanya distribusi barang-barang. Walaupun demikian, harga barang-barang yang ditempatkan di bawah “pengawasan” masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum perang, yaitu kurang lebih 650%. Di pasar bebas Jakarta tingkat harga barang-barang makanan pada Oktober 1947 diperkirakan 200% dari tingkat harga barang-barang yang diawasi, sedangkan barang-barang lain harga bebasnya ditaksir antara 300—500% dari harga yang diawasi.

Sementara itu, kebijakan ekonomi moneter di daerah yang dikuasai Republik Indonesia terpaksa bersifat pasif, yaitu memberikan akomodasi kepada keperluan politik dan militer serta mengusahakan jaminan minimal bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Pada saat itu tidak ada kemungkinan bagi pemerintah RI untuk mendapatkan pemasukan dari sektor perdagangan, mengingat blokade yang dilakukan oleh NICA terhadap RI. Tindakan blokade ini dimulai pada bulan November 1945 dengan cara menutup semua pintu keluar-masuk perdagangan ke wilayah yang dikuasai RI. Dengan cara itu, Belanda berharap negara Indonesia akan ambruk dengan sendirinya karena hantaman ekonomi (Marwati, 1993: 173—174).

Rupanya dalam kondisi revolusi dan perjuangan, tidaklah mudah bagi pemerintahan yang baru lahir untuk menempuh suatu kebijakan moneter yang secara sistematis dan menyeluruh diarahkan kepada stabilitas sambil meningkatkan produksi. Dalam UUD 1945 Pasal 23 dan 33 telah diatur kebijakan ekonomi dan moneter, tetapi itu hanyalah peraturan yang bersifat ideal. Situasi perang kemerdekaan menyebabkan sulitnya Pemerintah untuk melaksanakan yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949

Selain menghasilkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), KMB juga menghasilkan persetujuan keuangan dan perekonomian. Isinya, antara lain, menetapkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk merundingkan hal-hal tertentu mengenai kebijakan yang fundamental dalam bidang ekonomi-keuangan dengan pihak Belanda. Perundingan itu harus diadakan terlebih dahulu walaupun tidak diperlukan adanya persetujuan.

Pada hakikatnya persetujuan ekonomi-keuangan membatasi kebebasan Pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan, misalnya, dalam perubahan nilai tukar antara rupiah dan gulden, penentuan kebijakan devisa, pemberian kredit bank sirkulasi kepada Pemerintah RI. Bahkan, pengangkatan presiden dan direktur bank sirkulasi hanya dapat dilakukan setelah diadakan perundingan dengan Pemerintah Belanda. Dalam KMB itulah disepakati pula bahwa yang ditunjuk sebagai bank sirkulasi untuk RIS adalah De Javasche Bank, sedangkan Bank Negara Indonesia (BNI) ditugasi sebagai bank pembangunan.

Dalam naskah Persetujuan Keuangan dan Perekonomian KMB bagian B tentang Perhubungan Keuangan Pasal 19 dinyatakan sebagai berikut.

Ayat 1: "Selama Republik Indonesia Serikat berhutang pada Nederland--termasuk djuga djaminan jang diberikan oleh Nederland

mengenai hutang Indonesia--, maka Republik Indonesia Serikat akan bermusjawarat lebih dahulu dengan Nederland, baik djika bermaksud ia hendak mengubah Undang-Undang Mata Uang dan Undnag-Undang De Javasche Bank jang berlaku pada saat penjerahan kedaulatan, baik djika bermaksud ia hendak membuat Undang-Undang Mata Uang baru dan Undang-Undang Bank Sirkulasi baru, maupun djika sekiranya bermaksud ia hendak mengubah pula kudian Undang-Undang tersebut. Lagi pula, selama hutang-piutang tersebut di atas belum selesai, maka Republik Indonesia Serikat pada umumnja akan bermusjawarat lebih dahulu, djika dipertimbangkannja tindakan penting-penting di lapangan mata uang dan keuangan, sekadar tersangkut padanja kepentingan Nederland.”

Ayat 3: “ Republik Indonesia Serikat akan bermusjawaratlah lebih dahulu dengan pasal mengangkat dan memperhentikan president dan direktur-direktur bank sirkulasi dan pasal bank sirkulasi memberi kredit kepada Pemerintah ialah sampai saat Undang-Undang Bank sirkulasi yang baru mulai berlaku.”

Berdasarkan persetujuan semacam itu, banyak yang berpendapat bahwa penunjukan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi hanyalah langkah Belanda untuk mengamankan piutang Pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Oleh karena itu, dalam keadaan semangat nasionalisme yang menggelora, terlebih setelah bubarnya RIS hanya beberapa bulan setelah KMB, muncul desakan untuk segera menasionalisasikan De Javasche Bank.

Perbankan dan Tabungan Masyarakat

Perkembangan bank dan tabungan di Indonesia secara praktis baru dapat dilihat perkembangannya setelah KMB tahun 1949. Sejak 1 Juli 1953 De Javasche Bank berubah nama menjadi Bank Indonesia dan berfungsi sebagai bank sentral Republik Indonesia. Setelah itu, fungsi perbankan nasional mulai pulih dan berkembang secara bertahap dalam suasana ekonomi politik Indonesia yang belum kuat dan stabil. Pada awal tahun 1950-an dalam struktur perbankan nasional terdapat beberapa bank sebagai berikut:

1. bank pemerintah, antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Pos, dan Bank Industri Negara (BIN);
2. bank swasta nasional, antara lain Bank Surakarta, Bank Nasional, Bank Dagang Nasional Indonesia, dan beberapa belas bank lainnya yang terhimpun dalam Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia (Perbana) sejak 1952;

3. bank asing terdiri atas bank-bank Belanda, yaitu Nationale Handelsbank NV, Escomptobank NV, dan Nederlandsche Handel Maatschappij NV; bank-bank asing lainnya, yaitu The Chartered Bank Ltd, Overseas Chinese Banking Corp, The Hongkong dan Shanghai Banking Corp, dan Bank of China.

Sementara itu, perkembangan tabungan, dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1951 (pada waktu itu masih bernama De Javasche Bank) dituliskan sebagai berikut.

“Keadaan yang kini terdapat di Indonesia ialah bahwa Pemerintah belum dapat menarik tabungan penduduk dengan mengeluarkan pinjaman negara atas dasar sukarela. Untuk menerangkan keadaan ini harus ditinjau berbagai sebab. Pertama-tama luas mutlak dari tabungan-tabungan tidak besar. Kedua, anak negeri tidak biasa menabung dengan maksud meminjamkan uang ini kepada Negara; di kalangan luas masih belum terdapat pengertian yang perlu tentang tehnik keuangan. Berbagai pendapat tentang bunga pun merupakan halangan dalam hal ini. Sebab ketiga ialah bahwa badan-badan pembunga seperti bank-bank tabungan, pertanggungan jiwa dan pensiun, serta yayasan-yayasan sosial, masih berada dalam permulaan perkembangannya, sedangkan justru golongan inilah yang memegang peranan dalam pembiayaan pemerintah dalam jangka panjang.”

Berikut besarnya dana tabungan yang tersimpan di bank-bank tabungan pada periode 1938—1959.

Tabel
Jumlah Dana Tabungan Pada Bank-bank Tabungan (1938—1949)
dalam ribuan Rupiah

Tahun	Bank Tabungan Pos	Bank-bank tabungan swasta	Jumlah
1938	52.928	18.217	71.145
1939	54.414	18.186	72.600
1940	50.607	15.941	66.548
1946	52.220	tak diketahui	tak diketahui
1947	52.883	14.802	67.685
1948	74.376	16.784	91.160
1949	85.337	20.069	105.406

Sumber: De Javasche Bank: Laporan Tahun Pembukuan 1950-1959, Djakarta: G. Colff and Co

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah tabungan pada masa pendudukan Jepang tidak tercatat oleh De Javasche Bank, yang pada masa itu dilikuidasi dan peranannya diganti oleh bank sentral bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Meskipun pada masa kolonial hingga zaman perang kemerdekaan 1945—1949 jumlah tabungan di Bank Tabungan Pos terus bertambah dari tahun ke tahun, puncaknya pada 1949 mencapai Rp85.337.000,00. Jumlah itu sempat menurun pada tahun 1950 menjadi Rp50.030.000,00, tetapi terus bertambah pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel
Jumlah Dana Tabungan Pada Bank-bank Tabungan (1950—1959)
dalam ribuan Rupiah

1950	50.030	11.918	61.948
1951	65.311	11.840	77.151
1952	91.034	13.001	104.035
1953	122.842	18.448	141.290
1954	158.910	21.227	180.137
1955	188.710	25.182	213.892
1956	225.035	34.180	259.215
1957	295.988	43.293	339.281
1958	375.180	48.239	423.419
1959	479.668	56.250	535.918

Sumber: De Javasche Bank: Laporan Tahun Pembukuan 1950 – 1959, Djakarta: G. Colff and Co

Meningkatnya jumlah tabungan pada Bank Tabungan Pos periode 1950-an, antara lain, disebabkan oleh pembukaan kantor cabang bank tabungan yang baru. Pada tahun 1953 Bank Tabungan Pos memiliki 739 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terus bertambah menjadi 899 kantor cabang pada 1959. Adapun jumlah buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Pos hingga akhir 1959 telah mencapai 1.627.787 buku. Kenaikan jumlah tabungan itu, sebenarnya belum seberapa besar jika diperhitungkan dengan jumlah rakyat Indonesia pada periode 1950-an. Dapat dikatakan bahwa pada masa itu rakyat Indonesia belum ada keinginan menabung. Semangat menabung yang cukup besar terlihat dalam lingkungan tentara dan polisi juga kalangan pedagang yang terlihat memiliki jumlah tabungan yang besar meski belum stabil posisinya.

SAJEMBARA Rp. 50.000.—

P.T. BANK SILIWANGI

BAGIAN TABUNGAN
DIJAKARTA — SURABAYA
„MENGAPA ANDA MENABUNG DI BANK
SILIWANGI ?”

DENGAN HADIAH* :

2 Hadiah Pertama : Sebuah Mesin jahit listrik merk „ORIENT” á Rp. 12.750,—	Rp. 25.500 —
2 Hadiah ke-II : Sebuah Radio merk „MAESTRO” á Rp. 7.400,—	„ 14.800.—
2 Hadiah ke-III: Sebuah Djam tangan bertanggal merk „TITONI” á Rp. 2.500,—	„ 5.000.—
20 Hadiah Hiburan : Sebuah Vulpen „PILOT” á Rp. 235,—	„ 4.700.—
26 (Duapuluh enam) Hadiah dengan jumlah	Rp. 50.000,—

Sajembara ini tetap ditutup tanggal 25 Djuli 1959.
Para pemenang akan diumumkan tanggal
15 AGUSTUS 1959.

A.2074



N.V. BANK RAYA

Djalan Kapi No. 11 — Djakarta-Kota.

PENGUMUMAN

Dengan ini kami maklumkan, bahwa Penarikan Undian **TABUNGAN BERHADIAH**, khusus untuk para penabung Tabungan bulan **OKTOBER** dan **NOPEMBER 1958**, akan diselenggarakan :

Pada hari	: S E N E N .
Tanggal	: 8 DESEMBER 1958 .
D j a m	: 11 SELANG .
Bertempat	: Di Kantor Tuan Notaris E. FONDAAG, D.J. Mangga Besar No. 1 F. G (Setelah N.Y. OLIMO) Djakarta-Kota.

Sesuai dengan Surat Keputusan J.M. Menteri Sosial No. S.R. 14-348, tertanggal 20 Djuli 1958.
Hasil keroh akan diserahkan kepada Perguruan „TARBIATUL MUTA-ALIMIN, Kotajaya Djakarta.

HADIAH* NIA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Hadiah I, sebanyak	1 hadiah, masing*	Rp. 4000,—	=	Rp. 4000,—
II, „	5 hadiah, „	Rp. 1000,—	=	Rp. 5000,—
III, „	50 hadiah, „	Rp. 250,—	=	Rp. 12500,—
IV, „	75 hadiah, „	Rp. 100,—	=	Rp. 7500,—
J u m l a h :	130 hadiah,		Rp. 28500,—	

Keterangan : Pemenang Hadiah I (pertama) disamping menerima hadiah Tabungannya, menerima pula Tambahan Hadiah sebesar Tahun Baru 1959 dari Bank, masing* sebesar Rp. 100,—
Djakarta, 1 Desember 1958.

Sementara itu, pada tahun yang sama, ada beberapa bank swasta yang menerima tabungan dari masyarakat, meskipun baru ada 6 bank swasta yang dianggap paling dominan menguasai pasar. Jumlah tabungan di bank swasta ini juga terlihat terus naik dari tahun ke tahun. Pada periode ini beberapa bank swasta telah memiliki program tabungan berhadiah seperti terlihat dari iklan di bawah ini.

Program tabungan berhadiah yang diusahakan oleh bank-bank swasta di Indonesia telah dimulai pada akhir 1950-an. Perbankan swasta berusaha menarik dana masyarakat dan menumbuhkan minat menabung melalui janji hadiah berhadiah. Selain hadiah uang tabungan, perbankan juga menggunakan barang konsumsi yang dapat dikatakan modern pada masa itu sebagai hadiah seperti, mesin jahit listrik, radio bermerek, jam tangan, dan pulpen berharga mahal. Semua barang yang dijanjikan sebagai hadiah itu, tampak sedang menjadi tren yang diminati oleh para penabung dewasa, laki-laki atau perempuan.

Pada periode tahun 1960-an, Indonesia memasuki sistem ekonomi yang terpimpin. Pemerintah berusaha mengarahkan perkembangan usaha perbankan untuk mendukung program pemerintah, yang pada masa itu dikenal dengan Pembangunan Semesta Berencana. Bank Tabungan Pos pada periode ini yang berubah nama menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) bersama dengan perbankan swasta menerima dana simpanan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan simpanan biasa. Jumlah gabungan dana simpanan pada bank-bank tersebut adalah sebagai berikut: Rp1.061.088,00 (1961), Rp1.315.306,00 (1962), Rp2.447.920.000,00 (1963), Rp3.130.429.000,00 (1964), dan Rp3.931.179.000,00 (1965).

Secara umum, pada periode ini perkembangan tabungan terhambat karena naiknya angka inflasi sepanjang tahun dan reorganisasi sistem perbankan yang dilakukan sejak tahun 1965. Pada akhir periode pemerintahan Presiden Soekarno (1966—1967) Bank Tabungan Negara hanya memiliki 7 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara itu, bank tabungan swasta berjumlah 14 kantor pusat dan 14 kantor cabang. Jumlah kantor bank swasta itu menurun pada 1967 menjadi 12 kantor pusat dan 10 kantor cabang.

Sukaduka Menabung Zaman Soekarno

Dekade pertama, sejak bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 adalah dekade percobaan demokrasi dan ekonomi (M.C. Ricklefs, 2005). Sistem parlementer menyebabkan kabinet yang memerintah berganti-ganti sehingga berpengaruh pada tidak stabilnya kebijakan ekonomi yang diterapkan. Pada periode 1950-an ada dua kebijakan ekonomi pemerintah memberi dampak yang kurang menggembirakan, baik bagi para penabung di bank maupun penabung yang menyimpannya dalam celengan di rumah, yaitu (1) kebijakan Gunting Sjafruddin (1950) dan (2) Sanering (1959).

Pada awal tahun 1950 jumlah ekspansi uang beredar sangat berlebihan. Posisinya mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Berdasarkan indeks tahun 1938 yang pada saat itu menjadi patokan terjadinya keseimbangan moneter, Pemerintah memperhitungkan seharusnya uang beredar hanya sekitar Rp 2,5 miliar atau enam kali lipat dari posisi tahun 1938, yaitu sebesar Rp420 juta. Lalu bagaimana cara mengatasi kelebihan uang beredar itu?

Pemerintah berinisiatif mengambil tindakan mengurangi jumlah uang beredar sampai setengah dari jumlah yang ada. Pada masa itu, Pemerintah RI belum mampu mencari sumber pembiayaan dari kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Awalnya pada 11 Maret 1950 Pemerintah menetapkan sistem sertifikat devisa sebagai usaha untuk memperbaiki neraca pembayaran negara. Kebijakan itu bertujuan mendongkrak kegiatan ekspor dan menekan kegiatan impor dengan harapan rangsangan terhadap kegiatan ekspor itu dapat menguntungkan para petani yang banyak mempunyai andil dalam menghasilkan produk ekspor.

Tidak lama setelah kebijakan dalam perdagangan itu, pada 18 Maret 1950 pemerintah menetapkan kebijakan mengurangi jumlah uang beredar yang disebut dengan kebijakan *pembersihan moneter* dan kemudian dikenal sebagai *Gunting Sjafruddin*. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena Menteri Keuangan, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, mengambil keputusan untuk memotong uang kertas NICA—dikenal dengan uang merah—dan uang kertas De Javasche Bank menjadi dua bagian dengan menggunakan gunting. Uang kertas yang digunting adalah pecahan lima rupiah ke atas, sedangkan pecahan dua setengah rupiah dan yang lebih kecil lagi serta uang ORI tidak digunting.



Sumber: Bank notes and Coins From Indonesia. Yayasan Supersemar dan Perum Peruri, 1991

Pengguntingan uang kertas menjadi kanan dan kiri itu mulai dilaksanakan pada pukul delapan malam tanggal 19 Maret 1950. Bagian kanan uang kertas yang digunting itu dapat ditukarkan dengan Obligasi Republik Indonesia 1950 yang berlaku sebagai pinjaman Pemerintah dengan bunga 3% setahun. Penerbitan obligasi yang juga dikenal dengan nama Obligasi Pinjaman Darurat 1950 itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. PU/2 tanggal 19 Maret 1950.

Bagian kiri uang kertas di atas pecahan f2,50 diakui sebagai alat pembayaran yang sah sehingga nilai uang yang berlaku hanya separuh dari nilai nominalnya. Bagian kiri uang dapat ditukar dengan uang baru yang diterbitkan oleh De Javasche Bank dengan pecahan 2,5 rupiah, 1 rupiah, dan 0,5 rupiah. Penukaran itu dibatasi hingga 16 April 1950. Setelah tanggal itu, bagian kiri uang tersebut tidak akan berlaku lagi.

Selain pengguntingan uang kertas, Pemerintah RI juga melakukan pemotongan terhadap simpanan pada bank dan surat perbendaharaan. Bank diwajibkan memindahkan setengah dari simpanan itu kepada suatu rekening khusus yang diberi nama Pendaftaran Pinjaman Negara 3% 1950 yang hanya dapat digunakan untuk membeli obligasi negara yang telah dikeluarkan. Itulah kebijakan yang berimbas langsung bagi para penabung ketika separuh jumlah uang simpanan mereka secara paksa harus dikonversi dalam bentuk Obligasi Republik Indonesia 1950, sama dengan bagian kanan uang kertas.

Kebijakan Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada bulan Maret 1950 berhasil mengurangi jumlah uang kartal sekitar Rp1,6 miliar. Sementara itu, posisi uang beredar dapat ditekan menjadi sebesar Rp4,3 miliar pada akhir tahun 1950 atau meningkat 19,8% dari akhir tahun 1949. Seandainya pemerintah tidak melakukan tindakan moneter tersebut, diprediksi akan terjadi ekspansi jumlah uang beredar sekitar 64,7%.

Dalam pelaksanaan pengguntingan uang itu juga tidak luput dari beberapa peristiwa yang merugikan masyarakat umum. Pada saat itu, jaringan komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas sehingga informasi kebijakan pengguntingan itu tak menjangkau warga masyarakat yang tinggal di pelosok perdesaan. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum warga yang pergi ke wilayah pelosok untuk menukarkan uang kertas pecahan lima rupiah mereka dengan uang pecahan yang lebih kecil. Akibatnya, banyak warga perdesaan yang menjadi korban perilaku curang seperti itu. Selain warga perdesaan, para pedagang kelontong di kota pun banyak yang menderita kerugian karena salah memperhitungkan dampak yang timbul dari pengguntingan itu.

Selanjutnya, pada akhir tahun 1950-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah, tingginya pertumbuhan uang beredar, laju inflasi yang berkepanjangan, dan membengkaknya defisit keuangan negara terus terjadi sepanjang tahun. Posisi uang beredar pada akhir 1958 tercatat sebesar Rp19,6 miliar dan meningkat 53% sehingga menjadi Rp29,9 miliar pada 31 Maret 1959. Laju inflasi pada 1959 masih terbilang cukup tinggi, yakni 26% dan meningkat lagi menjadi 38% pada tahun 1960. Defisit keuangan negara pada 1959 dan 1960 masing-masing sebesar Rp 13.324 juta dan Rp2.569 juta jika dibandingkan dengan Rp9.434 juta pada tahun 1958 (Laporan Tahunan Bank Indonesia 1959—1960).

Untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak menggembirakan itu, pada 25 Agustus 1959 Pemerintah melakukan reformasi kebijakan moneter yang dikenal dengan sebutan Konsolidasi Juanda. Disebut dengan nama itu karena pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah pemerintahan di bawah Perdana Menteri Juanda. Tindakan yang diambil, antara lain, adalah (*Merdeka*, Rabu 26 Agustus 1959):

1. sanering atau penurunan nilai mata uang; semua uang kertas Rp500,00 dan Rp1.000,00 menjadi Rp50,00 dan Rp100,00.
2. pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank (giro dan deposito) sebesar 90% dari jumlah simpanan di atas Rp25.000,00 dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh Pemerintah.

Kebijakan sanering itu memang membawa beberapa pengaruh bagi kondisi keuangan negara. Untuk sementara waktu, jumlah uang beredar berkurang dan pemerintah memperoleh keuntungan sebesar Rp8.521 juta. Keuntungan itu digunakan untuk membayar utang uang muka dari Bank Indonesia sehingga dapat mengurangi kerugian kas pemerintah. Dalam sanering 1959 itu uang kertas yang ditetapkan mengalami penurunan nilainya mulai pukul 6 pagi tanggal 25 Agustus 1959 adalah

1. uang kertas Bank Indonesia seri hewan (tanpa tanda tahun) pecahan Rp500,00 dan Rp1000,00;
2. uang kertas Bank Indonesia emisi tahun 1952 pecahan Rp500,00 dan Rp1000,00;
3. uang kertas De Javasche Bank emisi tahun 1946 pecahan Rp500,00.



Uang Kertas Bank Indonesia Seri Hewan Pecahan 500 rupiah dan Uang Kertas De Javasche Bank 500 gulden (rupiah) emisi 1946

Uang kertas tersebut tetap merupakan alat pembayaran yang sah sampai saatnya digantikan dengan uang kertas lainnya. Bank Indonesia menarik dari peredaran uang kertas pecahan 500 dan 1000 sejak 28 September 1959 dan kesempatan penukaran sampai tanggal 31 Desember 1959. Jadi, uang itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah terhapus mulai 1 Januari 1960. Uang yang digunakan untuk penukaran adalah uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp5,00 hingga Rp100,00 dari seri hewan dan emisi tahun 1952.

Dampak kebijakan Konsolidasi Juanda 25 Agustus 1959 bagi dunia perbankan adalah bank-bank mengalami kesulitan likuiditas karena pembekuan simpanan saldo bank. Sebagai dampaknya, bank tidak bisa memberikan kredit kepada perusahaan untuk kegiatan ekspor, impor, produksi, dan distribusi. Akibatnya, kenaikan harga barang dan biaya hidup masih terjadi pada akhir 1959. Selain itu, para penabung juga tidak dapat mencairkan semua tabungannya hingga periode yang ditentukan. Masyarakat awam banyak yang bingung dan kecewa karena penurunan nilai uang yang mereka miliki dan bekunya sejumlah uang tabungan mereka. Dampak Sanering 1959 tampaknya lebih dahsyat daripada kebijakan Gunting Sjafruddin yang terjadi pada awal periode 1950 an.

Menurut berita harian *Merdeka*, 26 Agustus 1959, pasar-pasar di Jakarta sepi, banyak pedagang yang menahan diri untuk melepas barang dagangannya. Sebaliknya pengunjung pasar juga hanya datang ke pasar untuk memantau harga barang. Diberitakan juga, rombongan mobil mewah beriringan menuju arah luar kota Jakarta untuk membeli buah-buahan atau berbagai barang dengan menggunakan pecahan ribuan dan lima ratusan. Sebagaimana terjadi pada tahun 1950, banyak masyarakat di daerah pedalaman yang terlambat mengetahui keputusan pemerintah yang mendadak itu. Pada koran yang sama dikabarkan juga beberapa warga luar Jawa yang baru tiba di Jakarta pada 25 Agustus 1959 banyak menderita kerugian karena uang ribuan dan lima ratusan mereka berkurang nilainya dalam sekejap.

Menabung Mendukung Pembangunan

Pada 28 Juli 1966 pemerintah mengesahkan terbentuknya Kabinet Ampera (25 Juli 1966—17 Oktober 1967) yang dipimpin oleh Letjen Soeharto sebagai ketua presidium kabinet. Dalam susunan kabinet yang baru ini, tidak lagi kita jumpai pos urusan bank sentral di dalamnya. Artinya, sejak berlakunya kabinet Ampera itu, kedudukan gubernur bank sentral kembali berada di luar kabinet dan tentunya tidak lagi merangkap sebagai menteri urusan bank sentral, seperti sebelum masa terpimpin.

Setelah berdirinya Kabinet Ampera, pemerintah kemudian mengukuhkan Radius Prawiro sebagai Gubernur Bank Negara Indonesia (Bank Tunggal) pada 15 Agustus 1966. Pada saat pelantikan Gubernur Bank Negara Indonesia, Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam sambutannya antara lain mengatakan sebagai berikut ini.

“Dengan gembira saya melihat bahwa di dalam Kabinet Ampera yang sekarang ini Gubernur Bank Negara Indonesia tidak termasuk sebagai anggota Kabinet, bahkan tidak diberikan pangkat Menteri. Yang demikian itu berarti bahwa Gubernur Bank Negara Indonesia beserta Bank Negara Indonesia yang dipimpin olehnya tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan. Akan tetapi secara independen berdiri di samping Pemerintah Republik Indonesia di dalam bidang ekonomi dan keuangan.”

Demikianlah akhirnya, kedudukan bank sentral untuk sementara waktu telah dapat dipulihkan kembali. Meskipun belum tuntas seluruhnya, pemulihan itu cukup berarti bagi bank sentral agar kembali bebas tanpa tekanan dalam menilai dan mengoreksi tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Bahkan, pada saat itu bank sentral diharapkan dapat segera memberikan dukungan yang berpengaruh bagi pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Sementara itu, sambil menunggu proses perumusan undang-undang perbankan yang baru, pada 1966 secara *de facto* telah ditetapkan bahwa seluruh bank pemerintah kembali menjalankan usahanya sesuai dengan undang-undang lama yang menetapkan pendirian tiap-tiap bank. Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem bank tunggal secara praktis telah berakhir.

Perumusan Undang-Undang Baru

Pada Sidang Umum IV MPRS di Jakarta pada 20 Juni—5 Juli 1966 telah dihasilkan berbagai keputusan penting sebagai langkah pokok dalam usaha mengadakan koreksi total terhadap jalannya pemerintahan sebelumnya. Dalam bidang perbaikan ekonomi dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Dalam Bab VII Pasal 55 Tap tersebut telah ditetapkan bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan harus segera ditetapkan undang-undang pokok perbankan dan bank sentral yang baru. Dengan undang-undang baru tersebut, diharapkan bank sentral dan perbankan mempunyai arahan yang jelas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Dalam perumusan undang-undang baru tentang bank sentral dan perbankan, Pemerintah telah meminta bantuan pemikiran dan saran dari bank sentral. Keterlibatan bank sentral dalam perumusan undang-undang perbankan ini merupakan bagian dari peran aktif bank sentral dalam Program Stabilisasi /Rehabilitasi Ekonomi yang dicanangkan oleh Kabinet Ampera. Berkaitan dengan itu, pada 24 Oktober 1966, BNI Unit I telah membentuk Panitia *Adhoc* untuk menampung masalah Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi yang diketuai oleh Rachmat Saleh.

Pada awal 1967 pemerintah telah menyampaikan kepada DPRGR 8 Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU tentang Pokok-Pokok Perbankan, tentang Bank Sentral dan enam RUU tentang pendirian Bank-Bank Pemerintah. Pada akhir 1967 RUU tentang Pokok-Pokok Perbankan telah dapat diselesaikan. RUU tersebut kemudian disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang, yaitu UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 01/M/IV/1/1968 tertanggal 10 Januari 1968 undang-undang tersebut dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 1968.

Pada 1968 pembahasan mengenai RUU lainnya terus dilanjutkan dan akhirnya pada Desember 1968 semua RUU tersebut dapat diselesaikan dan telah disahkan pula oleh Presiden menjadi undang-undang yaitu

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia (BNI) 1946.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (BDN).
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (BBD).
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (BTN).
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI).
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Eksim).

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 600/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968 undang-undang tersebut di atas ditetapkan saat mulai berlakunya, yaitu pada 31 Desember 1968. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, bank-bank pemerintah yang sebelumnya merupakan unit-unit yang tergabung dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia, sejak 31 Desember 1968 masing-masing menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri berlandaskan undang-undangnya masing-masing. Bank sentral tidak lagi menggunakan nama Bank Negara Indonesia Unit I, tetapi kembali seperti semula menggunakan nama Bank Indonesia (*Kompas*, 23 Desember 1968).

Ketika menjelaskan tentang perubahan ini, Radius Prawiro, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan bahwa tindakan pengakhiran integrasi tersebut dilakukan dalam rangka menyingkirkan instansi perbankan. Karena bank pemerintah telah mempunyai undang-undang sendiri, serta mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya, pengawasan bank (*spend of control management*) akan menjadi lebih baik. Selain itu, kebijakan ini sekaligus akan menghilangkan kesalahpahaman masyarakat, baik dalam maupun luar negeri yang kerap kali mengacaukan tugas BNI unit yang satu dengan unit yang lain (*Kompas*, 31 Desember 1968).

26 RADHAB 1391 H — RADHAB 1393 — HALAMAN 4

TABUNGAN BERHADIAH 1969
HASIL PENARIKAN UNDIAN
BULANAN KE-XIII DJULI 1971
UNTUK WILAJAH DJAWA BARAT

Hasil penarikan undian bulanan ke-XIII Tabungan Berhadiah 1969 periode bulan Djuli 1971 yang diadakan pada hari Rabu tanggal 15 September 1971 di Kantor Bank Indonesia Djalan Braga No. 72 Bandung dibawah penilikan Notaris Pengganti Jujun Somantri adalah :

SERI	NOMOR KARTU TABUNGAN	BANK	HADIAH (Dalam Rupiah)
A	033741	BANK RAKJAT INDONESIA	875,—
B	020052	BANK NEGARA INDONESIA.1916	800,—
C	032649	BANK RAKJAT INDONESIA	3.200,—
D	030561	BANK RAKJAT INDONESIA	6.730,—
E	019540	BANK RAKJAT INDONESIA	8.240,—
F	013778	BANK BUMI DAYA	12.000,—
G	013582	BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA	4.400,—
H	025252	BANK BUMI DAYA	I. 89.700,—
	013225	BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA	II. 45.000,—

Hadiah dapat diambil pada Bank-nja masing-masing mulai tanggal 18 September 1971.
Hadiah yang tidak diambil dalam waktu 3 (tiga) bulan dibatalkan dan akan ditambahkan untuk hadiah pada undian yang akan ditarik kemudian.—

Bandung, 15 September 1971
PEMIMPIN TJABANG BANK INDONESIA

Sumber: Pikiran Rakyat, 16 September 1971

Tabungan Berhadiah 1969—1970

Sebagai bagian dari upaya memerangi hiperinflasi, Gubernur Bank Indonesia mengambil inisiatif menetapkan kebijakan untuk menarik dana masyarakat ke dalam perbankan untuk menahan laju pertumbuhan uang beredar. Dalam hal itu Bank Indonesia memperkenalkan Program Deposito Inpres 1968 berbunga tinggi dan bersubsidi. Upaya selanjutnya adalah memperkenalkan *skim* Tabungan Berhadiah 1969 yang dijanjikan dengan suku bunga yang relatif tinggi dan berhadiah agar masyarakat yang berpenghasilan relatif rendah pun diharapkan dapat menabung. Itu adalah program pertama pemerintahan Orde Baru dalam mengusahakan tabungan bagi masyarakat Indonesia.

TABEL 16 — POSISI NOMINAL TABUNGAN BERHADIAH
(dalam ribuan Rupiah)

Wilayah	Posisi akhir Triwulan				
	I/1969	II/1969	III/1969	IV/1969	I/1970
Djakarta Raya	35.787	74.823	147.158,5	222.676,5	390.688,5
Sumatra Utara	—	—	13.759,—	17.297,5	61.012,—
Djawa Barat	—	—	33.844,5	39.378,—	65.224,5
Djawa Tengah	—	—	6.642,—	27.502,5	89.223,—
Djawa Timur	—	—	17.932,—	58.180,5	239.301,—
Sumatra Selatan	—	—	4.032,—	6.043,5	8.122,5
D j u m l a h :	35.787	74.823	223.368,—	371.078,5	853.571,5

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 1969 –1970

Pada 1 Februari 1969 bank-bank pemerintah, yaitu BRI, Bank Eksim, BNI 1946, BBD, BDN, dan BTN, serta beberapa bank umum swasta nasional mengeluarkan program Tabungan Berhadiah 1969. Awalnya program tersebut hanya diselenggarakan untuk daerah ibu kota Jakarta, tetapi kemudian sejak 1 Juli 1969 diselenggarakan juga di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Berikut ini adalah jumlah dana tabungan yang berhasil dihimpun melalui program tersebut.

Awalnya suku bunga Tabungan Berhadiah 1969 sedikit lebih tinggi daripada suku bunga deposito berjangka, yaitu 2,5%, 3%, dan 3,5% sebulan masing-masing untuk tabungan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Suku bunga yang relatif tinggi dan pemberian janji hadiah bertujuan untuk menumbuhkan hasrat menabung masyarakat Indonesia yang masih berpenghasilan rendah. Selanjutnya pada 1 Maret 1971 suku bunga Tabungan Berhadiah 1969 turun menjadi satu koma seperempat persen untuk tabungan 3 bulan, satu koma tiga perempat persen sebulan untuk tabungan 6 bulan, dan dua seperempat persen sebulan untuk tabungan 12 bulan. Pada akhir Maret 1971 jumlah Tabungan Berhadiah 1969 menurut posisi nominal mencapai Rp1.441 juta atau 69% lebih besar dibandingkan dengan Rp583,6 juta pada akhir Maret 1970. Perkembangan Tabungan Berhadiah 1969 pada periode 1970—1971 tercatat sebagai berikut:

TABEL 15 — POSISI NOMINAL TABUNGAN BERHADIAH
(dalam ribuan Rupiah)

Wilajah	Posisi achir triwulan				
	1970				1971
	I	II	III	IV	I
Djakarta Raya	390.688,50	506.134,50	589.674,—	715.476,—	868.020,—
Sumatra Utara	61.012,—	75.436,—	78.111,—	83.892,—	83.892,—
Djawa Barat	65.224,50	86.295,—	80.310,—	110.916,—	141.015,—
Djawa Tengah	89.223,—	103.998,—	120.352,50	141.210,—	139.278,—
Djawa Timur	239.301,—	198.424,50	206.307,—	193.236,—	197.782,50
Sulawesi Selatan	8.122,50	8.946,—	9.442,50	7.326,—	11.001,—
	853.571,50	979.234,—	1.084.197,—	1.252.056,—	1.440.988,50

*) Angka sementara.

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 1970 -1971

Program Tabungan Berhadiah 1969 akhirnya dihentikan pada 1 Agustus 1971 karena pemerintah membuat program baru untuk tabungan masyarakat, yaitu tabungan pembangunan nasional (tabanas) dan tabungan asuransi berjangka (taska) yang dianggap sebagai cara lebih baik untuk menyalurkan simpanan masyarakat melalui perbankan. Selama periode 1971—1972, angka angsuran Tabungan Berhadiah 1969 terus naik hingga turun setelah program tersebut dihentikan. Catatan angka-angka tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 12 – ANGSURAN TABUNGAN BERHADIAH
(dalam ribuan Rupiah)

W i l a y a h	1 9 7 1				1972
	I	II	III	IV	I
Djakarta Raya	396.392	440.894	494.331	416.321	205.890
Sumatra Utara	52.458	44.034	34.859	27.704	13.332
Djawa Barat	73.450	99.072	114.387	95.794	47.602
Djawa Tengah	64.207	75.696	79.000	55.798	19.213
Djawa Ti mur	83.168	99.062	127.527	136.217	60.878
Sulawesi Selatan	4.380	5.623	5.180	4.538	2.489
	674.055	764.381	855.284	736.372	349.404

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 1971 –1972



Buku Tabungan periode 1960 an.
Sumber: Istimewa (kopeks penulis)

Menabung untuk Berhaji

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk pertama kali pemerintah menghimpun dana masyarakat melalui tabungan haji. Program ini tentu saja bermaksud untuk menggali sumber dana baru dalam membiayai pembangunan ekonomi. Di samping itu, program itu sekaligus memupuk semangat masyarakat dalam menabung untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ibadah haji. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 tahun 1969 penyelenggaraan haji dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah. Beberapa peraturan dalam Keppres tersebut, antara lain, menyebutkan seperti berikut.

1. Penyetoran di muka ongkos naik haji atas dasar biaya kapal laut dek dilakukan pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
2. Besaran kuota haji ditetapkan dua tahun sebelum keberangkatan para jamaah haji yang pembagiannya diatur oleh Departemen Agama, yaitu Direktorat Jenderal Urusan Haji.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti Keppres itu, Bank Indonesia menunjuk Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946 dan seluruh kantor cabang kedua bank tersebut di seluruh wilayah Indonesia sebagai penerima setoran ongkos naik haji. Selain dua bank tersebut, PN Pos dan juga Giro ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk membantu penerimaan ongkos naik haji karena juga memiliki jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Belakangan pada tengah 1970 an pemerintah juga menunjuk Bank Eksim (Ekspor Impor) untuk menerima setoran tabungan ONH di wilayah Irian Jaya (Papua).

Pada 1970-an dana yang dihimpun oleh Pemerintah melalui ongkos naik haji (ONH) cukup besar jumlahnya meskipun dana tabungan itu bersifat sementara, bank penerima masih dapat menggunakannya sebagai salah satu sumber dana bagi kegiatan bank. Berikut jumlah besaran ONH yang ditetapkan pemerintah pada lima tahun pertama dalam periode 1970-an.

Sementara itu, jumlah setoran ONH yang diterima oleh bank penerima tercatat perkembangan angkanya sebagai berikut: sampai akhir Maret 1971 setoran ONH untuk musim haji 1970—1971 mencapai Rp4,8 miliar dengan jumlah calon jemaah haji 14.046 orang. Penerimaan setoran ONH terus naik dari Rp7,2 miliar (1971—1972) menjadi Rp 8,6 miliar (1972—1973), menjadi Rp 17, 1 miliar (1973—1974), dan menjadi Rp 38,2 miliar pada akhir Maret 1975. Jumlah calon jemaah haji juga terus meningkat setiap tahun dari 22 ribu orang (1971—1972), menjadi 39 ribu orang (1973—1974), dan meningkat menjadi 66 ribu orang pada akhir Maret 1975.

Tabel
Besaran Ongkos Naik Haji (ONH) Periode 1970—1975

Musim Haji	Ongkos Naik Haji per orang	
	Kapal laut	Pesawat terbang
1970-1971	Rp 336.000,00	-
1971-1972	Rp 320.000,00	Rp 370.000,00
1972-1973	Rp 380.000,00	Rp 402.000,00
1973-1974	Rp 424.000,00	Rp.446.000,00
1974-1975	Rp 556.000,00	Rp 560.000,00

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 1970 – 1975

Hingga pertengahan paruh kedua periode 1970-an, jumlah penerimaan setoran ONH terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah calon jemaah haji. Sampai akhirnya pada musim haji 1978—1979 jumlah setoran ONH naik menjadi Rp59 miliar (naik 7% persen dari tahun sebelumnya), tetapi jumlah calon jemaah haji pada periode itu turun hingga 45% menjadi hanya kurang dari 40 ribu jemaah. Hal itu terjadi karena sejak devaluasi rupiah pada tanggal 15 November 1978, Pemerintah telah menaikkan ONH dari Rp766 ribu menjadi Rp1 juta 490 ribu. Akibatnya banyak orang yang segan untuk berhaji mengingat biaya ONH yang meningkat hampir dua kali lipat.

Pada periode berikutnya, kegiatan menabung untuk berhaji ini terus dilanjutkan oleh pemerintah bersama dengan bank penerima setoran ONH yang kemudian melibatkan beberapa bank pemerintah lainnya. Program tabungan ONH terus dikembangkan melalui berbagai tawaran mekanisme menabung yang makin bervariasi, dengan imbalan diskon jumlah ONH, potongan jumlah cicilan, dan lain-lain yang dianggap dapat menarik minat masyarakat untuk berhaji dengan cara menabung.

**Yayasan Dana Tabungan
Haji Dan Pembangunan**

Jalan H.A. Selim 52A (atas)
Jakarta

Pimpinan Bp. H. Syafruddin Prawiranegara S.H. MEM-
BANTU ANDA UNTUK MENUNAIKAN RUKUN ISLAM KE-
LIMA DENGAN JALAN MENABUNG.

CALON2 HAJI/Penabung2 Yayasan Dana Tabungan
Haji untuk Muslim Haji tahun 1974//75 :

1. Sdr. Ach. Mukri alias	Sidosermo
Ach. Mufti.	Wonokromo.
2. Sdr. Muh. bin Hamzah.	Jln. Pemuda 21
3. Ny. Sarifah Zahro	Muntiran.
4. Sdr. E.S. Hardjosuwondo	Jln. Komud. Supadio
5. Ny. Titi Kalsum.	no. 23B, Bandung
6. Sdr. Madani b.h. Meli.	Pejatan, Ps. Minggu
7. Ny. Patimah bt. Tolang	Pejatan, Ps. Minggu
8. Moh. b. Daud.	Sei Jelawat (Kal-Bar)
9. Ny. Sa'dah	Sei Jelawat (Kal-Bar)
10. Ny. Syukur b. Abubakar.	Kotatengah Batuhampar
	Kabupaten 50 Kota.

(Nama2 dari Calon2 Haji lain akan menyusul).



Salah satu contoh usaha menghimpun dana tabungan haji yang dilakukan oleh yayasan non pemerintah.
Sumber: Kompas, 16 September 1974

Menabung untuk Mendukung Pembangunan

Dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, Pemerintah Orde Baru pada periode 1970 an mencanangkan beberapa program mendasar. Program itu diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Agar dapat menjadi perhatian utama dan pengetahuan bersama bagi seluruh rakyat, gambaran program Pemerintah itu disematkan dalam uang logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Berikut gambaran uang logam tersebut.



Sumber: koleksi penulis



Sumber: koleksi penulis

Pada 1971 Bank Indonesia menerbitkan uang logam pecahan Rp10,00 dengan gambar padi dan kapas bertuliskan *Tingkatkan Produksi Sandang Pangan*. Selanjutnya, pada 1974 Bank Indonesia kembali menerbitkan dua pecahan uang logam, yaitu pecahan Rp5,00 bertuliskan *Keluarga Berencana Menuju Kesejahteraan Rakyat* dan pecahan Rp10,00 bertuliskan *Menabung untuk Menunjang Pembangunan*. Dua pecahan uang logam yang menggambarkan Program Keluarga Berencana dan Tabungan ini kemudian diterbitkan lagi pada 1979 dengan bahan dan ukuran yang berbeda.

Sementara itu, pelaksanaan agenda pembangunan nasional memerlukan usaha-usaha penambahan dana atau dengan mobilisasi tabungan. Dari data ekonomi pada periode itu, pemerintah menyimpulkan bahwa tingkat tabungan masyarakat Indonesia masih minim untuk dapat mendukung peningkatan pendanaan pembangunan nasional. Untuk bisa memulai suatu pembangunan nasional, diperlukan jumlah tabungan 20,7% dari produk nasional bruto. Tabungan adalah masalah vital, khususnya tabungan dalam negeri. Pembangunan ekonomi tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan menggantungkan pada pinjaman/bantuan modal luar negeri (*Kompas*, 7 September 1971).

Dalam kondisi demikian muncul gagasan dari bank sentral untuk menyelenggarakan Gerakan Tabungan Nasional (GTN) atau *Savings-Drive 1971* yang bertujuan meningkatkan gairah menabung dan mengarahkan segenap lapisan masyarakat untuk menabung. Untuk itu, perlu dicarikan cara baru menabung yang melengkapi cara menabung yang telah ada sebelumnya, yang dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

1. bagi penabung: bersifat menarik dan mengandung unsur edukatif.
2. bagi lembaga penyelenggara tabungan, yaitu bank: pada satu sisi bersifat tidak merugikan diri sendiri dari segi *cost of money* dan pada sisi lain dapat menjadi pendorong ke arah peningkatan kegiatan dalam usaha pengumpulan dana tabungan.
3. bagi pembangunan: bermanfaat untuk pembangunan karena mengingat kedua faktor tersebut.

Dalam rangka *savings drive* atau GTN secara berencana, pada tahun 1971 berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia diadakan dua bentuk tabungan, yaitu sebagai berikut:

1. tabungan pembangunan nasional (tabanas) dan
2. tabungan asuransi berjangka (taska).

Lembaga penyelenggara tabungan ini adalah bank-bank umum, seperti bank pemerintah, yaitu BDN, BBD, BEI, BNI 1946, BRI; dan bank swasta nasional yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh pemerintah, Bank Niaga, Bank Perniagaan Indonesia, Bank Merdeka, dan Bank Amerta.

Persiapan program GTN hanya dilakukan sekitar 5 bulan sebelum dimulai secara resmi. Dalam rapat tanggal 8 April 1971 antara Gubernur Bank Indonesia dan direksi bank dan lembaga keuangan berhasil dibentuk tim kerja yang disebut *Tim Saving Drive 1971*. Tugas tim tersebut, antara lain, melakukan persiapan teknis dan memberikan laporan perkembangannya kepada Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia mengoordinasi bank pemerintah dan bank swasta di seluruh Indonesia guna melaksanakan gerakan tabungan dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 23 Juli 1971 Gubernur Bank Indonesia berkirim surat memohon bantuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar membantu Bank Indonesia dalam pengerahan guru dan murid sekolah ke dalam gerakan tabungan nasional. Bantuan tersebut, antara lain, berupa penyebaran alat penerangan bagi suksesnya GTN, termasuk menciptakan dan mengajarkan lagu tabanas dan taska, mengarahkan murid sekolah dalam kampanye GTN dan memberi penerangan mengenai pentingnya tabungan bagi pembangunan nasional.

Gerakan 'Tabanas' Dan 'Taska' Dimulai Tanggal 20 Agustus 1971 Ini.

Djakarta, 19 Agustus (Kompas) — Merupakan di jalan pikiran yang logis, apabila "pembangunan" diasosiasikan dengan pembangunan proyek. Tetapi sering orang tidak segera memikirkan, dari mana biaya untuk pembangunan itu. Demikian Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Widjono Nitisastro menjawab wawancara dengan TVRI, bersama dengan Gubernur Bank Sentral Drs. Radinus Prastowo, hari Kamis malam yang lalu.

di-
er-
ig-
sat
ini
ma
eri
di-
re-
ari

Biaya harus diperoleh, dikumpulkan, dan pengumpulan biaya untuk pembangunan ini lah yang disebut menabung, kata Ketua Bappenas itu selanjutnya pada malam men diulang dimulainya gerakan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabung-an Anak-anak Berjangka (Taska). Dan siapa yang membangun, diolah pula yang harus menabung.

Pemerintah, kata Prof. Wi-

atau mengumpulkan dana pembangunan dari pajak, termasuk pajak keuntungan PNI. Dan dikalangan masyarakat, perusahaan menjabarkan sebagai keuntungannya untuk investasi seterusnya, sedangkan perorangan atau keluarga menjabarkan penghasilannya untuk dititipkan pada lembaga keuangan.

(Berlanjut ke hal VIII kol 6-7)

PENGALAMAN PAHIT BAGI "DOLLAR JANG MAHA KUASA"

Djakarta, 19 Agustus (Kompas). — Seorang wisatawan Amerika Serikat yang baru saja dari Jakarta dengan pengalaman pahit dan menyedihkan di Hotel In donesia. Meskipun ia baru datang di Jakarta dengan kura ke-nya sudah, namun permasalahannya tetap ada. Bagaimana pun ia pengalamannya pahit dan menyedihkan, pada malam ini dollar-nya "mahakuasa".

Peristiwa yang dialami oleh



PEWISATA PELAJAR TELADAN — Presiden Soekarno dan Ibu Mahu sedang menerima 50 orang p-
mudi pelajar teladan dari 26 propinsi. Mereka datang ke Jakarta untuk mengikuti pembinaan di
dara puncak pada upacara kemerdekaan RI. (Fotokan: Pada kesempatan itu Presiden Soekarno dan
menjelaskan pengalaman serta memberikan pelajaran kepada masing-masing berupa foto Presiden, serta set-
dan sebuah buku tentang Presiden "Geri Pahlawan Sang Perintis" yang ditulis oleh H. R. Ronggo. Di
dan upacara kemerdekaan ini antara lain di-
khusus di-
Jakarta, 19 Agustus.



penjertaan
anda
dalam

TABANAS dan TASKA

PELITA PASTI SUKSES

BANK BANK PENJELANGGARA:

1. Bank Bumi Daya	7. PT. Bank Amerta
2. Bank Dagang Negara	8. PT. Bank Merdeka
3. Bank Ekspor Impor Indonesia	9. PT. Bank Niaga
4. Bank Negara Indonesia 1946	10. PT. Bank Peningkatan Indonesia
5. Bank Rakyat Indonesia	11. Bank Swasta Nasional lainnya
6. Bank Tabungan Negara	setelah mendapat ijin Bank Indonesia

siap melayani anda

Sumber: Kompas, 20 Agustus 1971 dan Pikiran Rakyat, 9 Oktober 1971

Selanjutnya, pada 9 Agustus 1971 Direksi Bank Indonesia memberitahukan kepada direksi bank-bank bahwa kampanye tabanas dan taska secara resmi akan dimulai pada tanggal 20 Agustus 1971. Pemberitahuan dilakukan melalui konferensi pers oleh Gubernur Bank Indonesia bersama-sama dengan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Di tingkat daerah, konferensi pers dilakukan oleh gubernur kepala daerah/bupati. Isi pengumuman tersebut juga menjadi bagian dari pidato Presiden Suharto pada 16 Agustus 1971 di depan DPRGR.

Pada tanggal yang sama, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan semua gubernur kepala daerah dan bupati/walikota kepala daerah seluruh Indonesia untuk menyukseskan GTN, yaitu dengan mengadakan pidato, wawancara, dan penerangan kepada masyarakat. Dukungan dari para kepala daerah juga perlu diberikan dengan memberikan izin dan fasilitas untuk penempelan poster dan spanduk di kantor-kantor pemerintah. GTN resmi dimulai pada 20 Agustus 1971 dengan mengambil sasaran strategis di kalangan generasi muda yang kemudian meluas ke kelompok lainnya.

Malam sebelum diberlakukannya tabanas dan taska, dalam wawancara bersama Gubernur Bank Indonesia di TVRI, Ketua Bappenas, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, menjelaskan latar belakang program tabungan nasional. Menurutnya, pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah membutuhkan biaya yang harus diperoleh dengan cara mengumpulkannya. Proses itulah yang disebut dengan menabung. Pemerintah menabung atau mengumpulkan dana pembangunan dari cukai, bea masuk, pajak, dan keuntungan perusahaan negara. Sementara di kalangan masyarakat, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk investasi selanjutnya. Sementara itu, masyarakat perseorangan atau keluarga menyisihkan penghasilan untuk dititipkan pada lembaga-lembaga keuangan (*Kompas*, 21 Agustus 1971).

Dalam kesempatan lain Widjojo menerangkan bahwa berbeda dengan deposito berjangka yang hanya dinikmati oleh lapisan masyarakat tertentu, yaitu masyarakat kota yang memiliki kemampuan menyimpan dana besar. Oleh karena itu, cara penabungan (tabanas) sangat mudah sehingga setiap orang dapat ikut serta. Anak-anak sekolah dan anak-anak di bawah umur (dengan bantuan orang tuanya) sangat diharapkan untuk ikut menabung. Para ibu rumah tangga juga diharapkan mengerahkan seluruh keluarganya untuk berpartisipasi dalam GTN. Kemudahan cara menabung di tabanas juga memungkinkan orang yang tinggal di pelosok desa terpencil ikut serta menabung (*Kompas*, 23 Agustus 1971).

Berbeda dengan tabungan sebelumnya, tabanas adalah tabungan bebas dalam arti tidak terikat jangka waktu tertentu dan bersifat edukatif. Tabungan itu bertujuan mendidik seluruh lapisan masyarakat ke arah bank *mindedness*, khususnya kebiasaan menabung (*saving mindedness*). Tabanas memiliki persyaratan sebagai berikut.

1. Penyetoran dapat dilakukan setiap waktu. Setoran pertama ditetapkan sekurang-kurangnya Rp50,00 dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp25,00.

2. Pengambilan kembali dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali dalam sebulan. Pengambilan pertama hanya dapat dilakukan setelah setoran tersebut mengendap di bank sekurang-kurangnya selama jangka waktu sebulan.
3. Suku bunga tabanas besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan untuk tahun 1971 ditetapkan sebesar 18% setahun.
4. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun takwim sekali. Bunga yang tidak diambil pada waktunya dicatat/ditambah bukukan pada saldo tabungan.
5. Penabung mendapat keuntungan dengan diberi imbalan tambahan kepada penabung, yaitu sebagai berikut.
 - Hadiah berupa uang dilakukan melalui undian yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di hadapan Notaris.
 - Besarnya dana yang disediakan untuk hadiah tiap-tiap undian ditetapkan 1% dari saldo tabungan yang memenuhi syarat undian. Hadiah berupa uang disediakan berbeda-beda untuk hadiah I sampai V, dan ada hadiah hiburan. Undian dilakukan setiap bulan Januari dan Juli.
 - Penabung bebas dari pajak kekayaan atas pokok tabungan, pendapatan atas bunga, serta bea meterai.
 - Bebas pengusutan asal usul uang tabungan untuk keperluan perpajakan.
6. Tabungan dijamin oleh Bank Indonesia dapat digunakan sebagai jaminan kredit.



Kampanye Gerakan Tabungan Nasional (GTN) di daerah Lampung periode akhir 1970 an.
Sumber: Koleksi Bagian Arsip Bank Indonesia

Khusus untuk tabanas dapat dipekerjakan pihak ketiga sebagai kolektor misalnya pejabat pamong praja dan guru sekolah dengan ketentuan: kolektor benar-benar pihak ketiga yang membantu menarik masyarakat aktif menabung. Kolektor diberi imbalan berupa uang jasa yang jumlahnya ditetapkan setinggi-tingginya 1% dari jumlah setoran pertama. Para kolektor tidak diperkenankan untuk langsung menerima jumlah uang tabungan sehingga berarti kolektor hanya ditugasi untuk menarik calon-calon penabung (*Kompas*, 7 September 1971).

Dalam acara wawancara yang sama, Radius Prawiro, Gubernur Bank Indonesia, menambahkan penjelasan bahwa gerakan menabung yang dimulai pada tanggal 20 Agustus 1971 dibuat untuk dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat. Tabanas dan taska adalah gerakan menabung pertama kali yang dilancarkan secara meluas di seluruh pelosok tanah air. Radius mengatakan bahwa ikut serta dalam tabanas dan taska ibarat memasukkan es mambo tanpa gula dan aroma ke dalam kulkas. Gula dan aroma akan diberikan oleh sang kulkas, yaitu bank yang melayani tabanas-taska (*Kompas*, 21 dan 23 Agustus 1971).

Menurut Radius Prawiro, GTN bermaksud untuk menggali potensi tabungan dari segenap lapisan masyarakat di Indonesia. Menurutnya, tabanas dan taska bertujuan untuk mengarahkan dana yang dimiliki masyarakat untuk hal yang produktif. Cara itu dilakukan dengan mengurangi sebagian dana konsumsi masyarakat dan mengubahnya menjadi dana tabungan yang bisa diikutsertakan ke dalam produksi dalam pembangunan jangka panjang ekonomi Indonesia. Dikatakan juga bahwa berdasarkan program tabungan dan deposito sebelumnya, pada akhir 1960-an berhasil dikumpulkan dana masyarakat sejumlah Rp81 miliar sehingga pada periode ini usaha menghimpun tabungan makin ditingkatkan. Sasaran gerakan tabungan nasional adalah segenap lapisan masyarakat dari kota sampai ke desa, juga anak sekolah yang memperoleh uang saku dari orang tuanya.

Radius Prawiro juga menjelaskan bahwa tabanas juga bertujuan mendidik masyarakat agar percaya terhadap stabilitas nilai rupiah agar masyarakat memilih menyimpan rupiah bukan menyimpan USD. Setiap bulan masyarakat diminta agar memindahkan keinginan yang bersifat konsumtif ke arah usaha produktif dengan cara menabung sebagian dari penghasilan, terutama bagian yang bisa disisihkan (*Haluan*, 26 Agustus 1971).

Sementara itu, taska (tabungan asuransi berjangka) di samping merupakan sarana pemupukan dana guna pembangunan nasional, juga merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi. Tujuan utama mengaitkan tabungan dengan asuransi adalah memberikan jaminan kepada penabung bahwa jumlah uang yang direncanakan akan diterima pada akhir jangka waktu tabungan yang telah ditentukan dapat diperoleh dalam jumlah yang penuh (*face amount*) walaupun penabung meninggal dunia. Dengan demikian, rencana penabung untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan kebutuhannya dapat dilaksanakan secara pasti walaupun penabung belum berhasil menyetor sepenuhnya jumlah tabungan yang menjadi kewajibannya.

Taska memiliki ketentuan umum sebagai berikut.

1. Penabung adalah perseorangan yang telah menyatakan kesanggupannya serta kesediannya untuk menabung tiap bulan secara teratur, sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam kartu taska dan dilakukan untuk jangka waktu 12 bulan.
2. Yang dapat ikut serta dalam taska adalah mereka yang berumur 5 tahun ke atas dan tidak lebih dari 55 tahun. Satu bulan setelah menyelesaikan angsuran bulanannya yang terakhir, penabung akan menerima nilai nominal dari tabungannya.
3. Penabung yang tidak membayar angsuran 2 bulan takwim berturut-turut akan kehilangan haknya sebagai penabung taska.

Untuk menjamin tercapainya cita-cita penabung, bank mengasuransikan risiko (jika penabung meninggal dunia) sebesar nilai nominal dikurangi jumlah angsuran yang sudah harus dibayar. Dalam hal ini bank membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi. Pembayaran kembali terhadap taska sebelum jangka waktu tabungan berakhir dapat terjadi/dilakukan karena

1. penabung meninggal dunia
2. penabung tidak meneruskan pembayaran angsuran bulanan



Sumber: Kompas, 21 Agustus 1971

Jenis taska ada 3 macam, yaitu Seri A dengan nominal Rp1.300,00, Seri B nominal Rp3.250,00, dan seri C dengan nominal yang merupakan kelipatan bulat dari jenis taska tersebut. Angsuran untuk tiap-tiap jenis adalah Rp100,00 untuk seri A; Rp 250,00 untuk Seri B, dan sebesar kelipatan bulat dari Seri A atau Seri B, untuk Seri C. Bunga Taska sebesar 12% setahun atau 1% sebulan. Tiap penabung dapat mengambil taska dengan maksimum nilai nominal sebesar Rp130.000,00. Para penabung pasti akan memperoleh jumlah yang ingin ditabung meskipun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam masa periode tabungan, seperti penabung meninggal dunia (*Kompas*, 7 September 1971).

Dalam menanggapi program tabanas dan taska awalnya ada semacam keraguan dari masyarakat. Mereka mempertanyakan bagaimana rakyat yang masih berpenghasilan rendah, kadang untuk biaya makan saja tidak cukup, tetapi malah diminta untuk menabung? Pemerintah melalui Ketua Bappenas menjawab bahwa rakyat memang masih berpenghasilan rendah, tetapi mereka memiliki cara sendiri untuk menyisihkan uang yang memang tidak harus ditabung, tetapi digunakan untuk membeli emas perhiasan yang dapat mereka gunakan sekaligus sebagai simpanan. Di desa-desa, banyak ibu dan anak-anak perempuan menggunakan perhiasan emas pada saat lebaran, pesta perkawinan, dan acara lainnya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat mampu menyisihkan uangnya untuk menabung, hanya bentuknya masih terpaku pada emas perhiasan (*Kompas*, 26 Agustus 1971).

Selain itu, keraguan masyarakat dalam menabung juga muncul karena program menabung itu diterbitkan di tengah kondisi ekonomi internasional yang sedang mengalami krisis dan menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD). Untuk itu, sebagian masyarakat memiliki pertimbangan mana yang lebih untung menyimpan USD atau menabung Rupiah dalam bank?

Untuk menanggapi keraguan itu, pemerintah melalui beberapa tulisan di media cetak menjelaskan bahwa menabung melalui tabanas dan taska adalah tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan. Jika pemerintah tidak berhasil menghimpun dana pembangunan, seluruh kegiatan ekonomi akan makin lesu. Pemerintah menjelaskan bahwa menyimpan USD untuk mendapatkan keuntungan pada saat terjadi devaluasi adalah tindakan yang keliru dan membahayakan bagi perekonomian negara. Begitu juga dengan menyimpan emas, merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Hanya bangsa terbelakang di dunia yang menyimpan emas perhiasan sebagai tabungan. Di negara maju tabungan selalu disimpan di bank. Hanya orang kaya yang memakai perhiasan dari emas dan berlian.



Sumber: Kompas, 23 Agustus 1971

Seiring dengan gerakan menabung tersebut, Pemerintah mengurangi konsumsi barang impor. Harga barang impor akan meningkat pada masa krisis ekonomi sehingga masyarakat cenderung kurang berminat membeli barang impor. Dalam kondisi itu, uang yang dimiliki oleh golongan kaya berpotensi untuk dialihkan ke tabungan di bank. Dengan demikian, gerakan menabung ini juga diharapkan dapat mengurangi kebiasaan masyarakat untuk membeli barang impor.

Pada masa itu, untuk menanggapi fenomena maraknya barang impor yang masuk ke Indonesia, Ketua Bappenas pada saat itu mengatakan bahwa ada yang salah dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Jumlah barang impor (barang sekunder) yang masuk ke pasaran Indonesia banyak dan beraneka ragam. Barang-barang itu laku dibeli oleh orang Indonesia. Ketua Bappenas berharap dengan menggiatkan gerakan menabung dan mengurangi impor barang, pola konsumsi masyarakat Indonesia dapat diperbaiki. Mereka akan lebih memilih barang kebutuhan primer produksi dalam negeri dan menabung sisa uang yang mereka miliki.

Lalu, bagaimana usaha jajaran birokrasi dalam mendukung tabanas dan taska? Gambaran ringkas tentang peran birokrasi di daerah dalam penyelenggaraan tabanas dan taska dapat terlihat dari Gubernur Jawa Barat Solihin dalam forum sosialisasi GTN. Gubernur Solihin menyatakan bahwa cara menabung dengan membeli perhiasan atau menyimpan di bawah bantal, sudah tidak pada tempatnya lagi, sebab tabungan semacam itu bersifat mati (statis) dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. “Marilah kita bersama-sama menabung, walaupun masing-masing sedikit tapi apabila dikumpulkan akan menjadi besar dan berarti sebagai modal untuk diarahkan pada usaha-usaha yang produktif”, begitu kata Gubernur Solihin.

Gubernur Solihin juga mengajak masyarakat untuk belajar membiasakan diri hidup berhemat dan melalui GTN masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui tabungan yang terjamin dan menghasilkan balas jasa, berupa bunga tabungan. Dengan GTN, masyarakat diajak menghidupkan kembali kebiasaan leluhur, yaitu menabung untuk menanggulangi kesulitan yang mungkin terjadi pada masa depan (*Pikiran Rakyat*, 21 Agustus 1971).

Sementara itu, pada tanggal 20 Agustus 1971, Gubernur Jawa Timur Mohammad Noer bersama pejabat-pejabat Muspida Provinsi Jawa Timur menandai dimulainya gerakan tabanas dan taska di daerahnya. Mereka memberi contoh kepada masyarakat dengan mencatatkan diri mereka sebagai penabung. Hal itu dilakukan sesaat sesudah Gubernur Jawa Timur dan Pimpinan Bank Indonesia Cabang Surabaya memberikan penjelasan mengenai tabanas dan taska di hadapan para bupati dan walikota di Jawa Timur (*Pikiran Rakyat*, 24 September 1971).



Sumber: Pikiran Rakyat, 21 Agustus 1971

Perkembangan Tabanas dan Taska 1970-an

Tabanas dan taska sebenarnya hanya merupakan variasi dari gerakan yang bertujuan menarik rupiah dari peredaran yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah dalam kebijakan moneter, seperti deposito berjangka, tabungan berhadiah, dan sertifikat Bank Indonesia, untuk menjamin stabilitas moneter dan untuk membentuk dana bagi investasi pembangunan.

Sebelumnya, pemerintah pada akhir 1960-an melalui deposito berjangka berusaha mengelola uang panas (*hot money* atau uang yang tersedia untuk berspekulasi) yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Uang itu diarahkan kepada penciptaan kredit investasi tanpa mengganggu stabilitas perekonomian yang telah dicapai. Melalui Gerakan Tabungan Nasional (GTN), penghimpunan dana masyarakat terutama berupa tabanas dan taska meningkat cukup tinggi. Peningkatan dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penabung dan nilai tabungan. Selain itu, salah satu tanda keberhasilan GTN sebagai gerakan pendidikan dan penyadaran masyarakat adalah tertanamnya kebiasaan menabung di semua lapisan masyarakat secara perlahan, tetapi pasti. Bahkan, pada masa itu istilah “tabanas” identik dengan pengertian menabung secara umum.

Pada awal pelaksanaan tabanas dan taska, bank penyelenggara tabungan di daerah merasa kewalahan melayani masyarakat untuk menabung, karena persediaan buku tabungan yang menipis. Pemerintah telah menyiapkan puluhan ribu buku tabungan, tetapi di luar dugaan kebutuhan buku tabanas terus bertambah. Antusias sambutan masyarakat dan pemerintah daerah dapat kita cermati dalam beberapa berita di bawah ini.

1. “Tunawisma dan tunakarya di kabupaten Ngawi, Jawa Timur ikut mensukseskan program tabungan nasional. Kurang lebih 13 KK dan 9 orang bujangan dari kalangan tunawisma dan tunakarya telah dihimpun tabungannya oleh Dinas Sosial Daerah. Rata-rata setiap hari mereka menabung antara Rp 10,00 sampai Rp 50,00 per orang. Uang yang dikumpulkan dari mereka telah ditabung dalam Tabanas dengan menggunakan nama Dinas Sosial Kabupaten Ngawi (*Kompas*, 14 Oktober 1971).”
2. “Para calon pengikut pemilihan Lurah di daerah Klaten, Jawa Tengah, pertama kali harus tercatat namanya sebagai penabung Taska atau Tabanas. Selain lurah, semua peserta pelamar pamong desa juga harus mengikuti gerakan tabungan. Instruksi ini menyebabkan gerakan Tabanas-Taska menjadi sangat populer di daerah Klaten, karena dari 401 kelurahan di daerah itu 130 diantaranya akan segera

melakukan pemilihan kepala desa. Pemilihan ini dilakukan untuk menggantikan para care-taker paong desa yang sejak peristiwa 30 September 1965 dijabat oleh para care-taker tanpa memakai prosedur pemilihan (*Kompas*, 27 September 1971)."

Setahun setelah dilaksanakannya tabanas dan taska, pada tanggal 20 Agustus 1972 Gubernur Bank Indonesia dalam siaran TVRI menyatakan bahwa sampai hari itu jumlah modal yang terkumpul di seluruh Indonesia melalui tabanas dan taska telah mencapai Rp18,5 miliar. Itu berarti modal yang terkumpul sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sejumlah Rp18 miliar sampai dengan akhir tahun 1972. Modal sebesar itu merupakan dana dari dua juta penabung yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya dari DKI Jakarta sebanyak 260.000 penabung dari 4,6 juta penduduknya. Penabung dari Jawa Timur sebanyak 606.000 orang. Capaian menarik terlihat dari Kota Kediri, yang walaupun industrinya belum semaju Jakarta, 60% penduduknya adalah penabung tabanas dan taska.

Perkembangan itu adalah salah satu bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sekaligus upaya dalam membantu pembangunan ekonomi di dalam negeri. Dengan terkumpulnya dana sebanyak itu, pemerintah Orde Baru bisa memberikan kredit untuk mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Gubernur Bank Indonesia memberi contoh usaha pompa di desa-desa dengan kredit bank yang memungkinkan peningkatan produktivitas daerah pertanian dan para petani. Selain itu, dengan adanya kredit, perusahaan kecil yang sebelumnya menggunakan alat sederhana, dapat memanfaatkan mesin modern dan menghasilkan produk yang lebih banyak. Dalam hal itu, tidak hanya pengusaha yang diuntungkan, tapi juga masyarakat luas dengan terbukanya lapangan kerja yang makin luas

Perkembangan tabanas dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan ditinjau dari jumlah penabung dan jumlah uang yang ditabung. Sementara itu, jumlah penabung dan jumlah uang yang ditabung pada taska menunjukkan penurunan pada Laporan Bank Indonesia, yaitu pada tahun 1971 terdapat 887.206 penabung terdiri atas 867.239 penabung tabanas dan 19.967 penabung taska. Jumlah uang yang ditabung Rp5.028 juta terdiri atas Rp4.992 juta tabanas dan Rp36 juta taska. Tiga tahun kemudian, yaitu pada periode Januari sampai dengan 15 Juni 1974 jumlah penabungnya meningkat menjadi 3.160.619 orang, yang terdiri atas 3.150.075 penabung tabanas dan 10.544 penabung taska. Jumlah uang yang ditabung pada periode itu juga melonjak menjadi Rp37.710 juta, terdiri atas Rp37.089 juta dalam bentuk tabanas dan Rp81 juta dalam bentuk taska. Demikian perkembangan tabanas dan taska dalam rentang waktu dari 1971—1980.

TABEL 15 – TABANAS DAN TASKA
(dalam jutaan Rupiah)

Tahun/Bulan	TABANAS		TASKA		Jumlah	
	Penabung ¹⁾	Posisi	Penabung ¹⁾	Posisi	Penabung ¹⁾	Posisi
1971 : Desember	867.239	4.992	19.967	35	887.206	5.027
1972 : Desember	2.388.778	25.574	17.870	99	2.406.648	25.673
1973 : Desember	2.862.264	32.486	11.784	84	2.874.048	32.570
1974 : Desember	3.550.463	43.942	8.742	74	3.559.205	44.016
1975 : Desember	4.110.872	70.130	9.349	115	4.120.221	70.245
1976 : Maret	4.325.387	81.873	10.288	127	4.335.675	82.000
Juni	4.663.625	90.225	10.628	151	4.674.253	90.376
September	5.171.102	98.672	11.101	157	5.182.203	98.829
Desember	5.429.981	109.147	10.836	158	5.440.817	109.305
1977 : Maret	6.566.385	123.115	10.402	187	6.576.787	123.302
Juni	6.695.269	135.642	9.060	158	6.704.329	135.800
September	6.871.073	143.473	8.727	151	6.879.800	143.624
Desember	6.864.401	153.591	8.735	138	6.873.136	153.729
1978 : Maret	6.960.491	169.165	7.911	123	6.968.402	169.288
Juni	7.230.267	181.005	7.499	123	7.237.766	181.128
September	7.307.178	188.596	6.600	126	7.313.778	188.722
15 November	7.429.086	195.826	6.863	127	7.435.949	195.953
Desember	7.458.963	191.462	6.873	120	7.465.836	191.582
1979 : Maret	7.600.382	199.954	6.296	117	7.606.678	200.071
Juni	7.693.490	202.792	5.939	122	7.699.429	202.914
September	7.835.935	196.656	5.545	125	7.841.480	196.781
Desember	7.987.864	212.219	6.052	113	7.993.916	212.332
1980 : Januari	8.031.941	222.519	5.624	109	8.037.565	222.628
Februari	8.160.463	231.181	5.605	110	8.166.068	231.291
Maret	8.293.844	237.186	5.544	118	8.299.388	237.304

¹⁾Dalam satuan penabung

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia 1980-1981

Ketika pertama kali diumumkan, bunga tabanas setahun sebesar 18% atau rata-rata 1,5% per bulan, sedangkan taska sebesar 15% setahun atau rata-rata 1,25% per bulan. Mulai tanggal 31 Mei 1972 suku bunga tabanas 18% setahun tidak berubah untuk tabungan Rp100 ribu pertama. Suku bunga untuk saldo di atas Rp100 ribu adalah 12% setahun. Mulai tanggal 12 April 1973 suku bunga tabanas 15% setahun untuk saldo tabungan Rp100 ribu yang pertama. Suku bunga untuk saldo di atas Rp100 ribu adalah 9%. Mulai tanggal 9 April 1974 suku bunga Tabanas itu mendapat perubahan lagi. Perubahan suku bunga Tabanas kali ini merupakan salah satu kebijaksanaan antiinflasi. Untuk saldo tabungan Rp200 ribu yang pertama suku bunga Tabanas ditetapkan 18% setahun, sedangkan untuk saldo tabungan di atas Rp200 ribu suku bunganya 9% setahun (*Kompas*, 6 Juli 1974).

Jika dilihat dari perkembangannya selama tiga tahun pertama, tampaknya minat menabung masyarakat terhadap tabanas lebih besar jika dibandingkan dengan minat menabung terhadap taska. Kurangnya minat terhadap taska dapat dilihat dari perbandingan posisi tabanas dan taska pada tahun 1974. Sampai akhir Juni 1974 jumlah penabung tabanas adalah 3.165.393 orang dengan jumlah tabungan Rp36,831 miliar, sedangkan penabung taska hanya 9.813 orang dengan tabungan Rp80 juta. Oleh karena itu, pada tahun 1974 pemerintah membentuk tim untuk meneliti upaya untuk menggairahkan masyarakat menabung pada taska dan memperbaiki sistem pengundian tabanas.

Pelajar, Pramuka, dan Pegawai Ikut Menabung

Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah terus memperluas jangkauan penabung usia muda, terutama para pelajar dan Pramuka, dan kepada para pegawai negeri. Pada tanggal 22 Februari 1974 Ketua Kwartir Nasional Pramuka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang juga sebagai Wakil Presiden RI pada saat itu, hadir dalam penandatanganan piagam kerja sama pelaksanaan Program Peningkatan Gerakan Tabungan Pemuda, Pelajar, dan Pramuka (Perata P3) di kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Piagam ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Syarif Thayeb, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Rachmat Saleh, sebagai tanda diluncurkannya tabungan pelajar dan Pramuka dikenal dengan tapelpram.

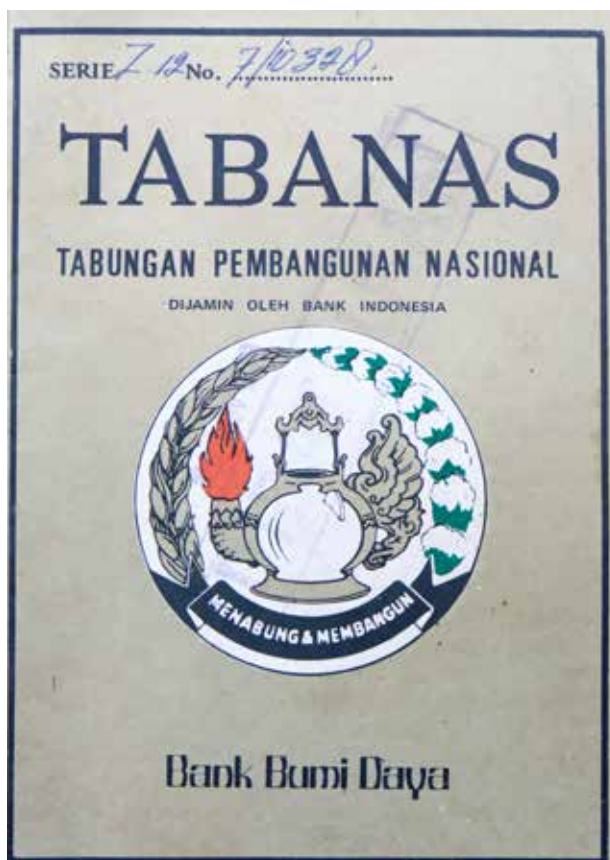
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden menyerukan kepada seluruh pembina Pramuka agar mereka tekun mengusahakan seluruh anggota Pramuka memiliki tabungan. Dalam usaha itu diharapkan para pembina bekerja sama dengan pemerintah daerah. Adapun Menteri Pendidikan mengatakan akan menanamkan kesadaran menabung kepada seluruh pelajar Indonesia melalui perwakilan dan lembaga pendidikan. Menurut Menteri, menabung bukan saja bersifat ekonomi, melainkan juga bersifat edukatif. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia dalam kesempatan itu mengajak semua bank untuk turut aktif memberi penerangan kepada masyarakat tentang menabung (*Kompas*, 23 Februari 1974).

Tapelpram secara resmi diselenggarakan melalui pengumuman Direktur Bank Indonesia, J. Sereh, dalam jumpa pers hari ulang tahun tabungan nasional ke-3 pada tanggal 20 Agustus 1974. Bank Indonesia mengumumkan bahwa sejak tanggal 20 Agustus 1974 pelajar dan Pramuka Indonesia dapat menabung langsung kepada guru kelas dan pembina Pramuka. Dari tabungan itu, para pelajar akan memperoleh buku tabungan pelajar dan Pramuka (buku tapelpram). Tabungan itu dirancang lebih spesifik daripada tabungan tabanas dan taska yang ditujukan kepada masyarakat luas, baik pemilik dana kecil maupun jutawan dari seluruh lapisan masyarakat.

Tapelpram adalah tabungan khusus pelajar dan Pramuka sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang ditabung adalah sisa uang jajan pelajar dan Pramuka sehari-hari. Dalam tapelpram peranan kolektor yang diemban oleh guru dan pembina Pramuka menjadi sangat penting, menggantikan kantor bank penyelenggara yang belum berada di pelosok daerah Indonesia. Sebelumnya, penabung kerap harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai bank sehingga kadang-kadang ongkos yang dikeluarkan lebih besar daripada uang yang akan ditabung. Dengan tapelpram, kendala semacam itu dapat teratasi.

Selain itu, tapelpram diharapkan dapat meningkatkan jumlah penabung sehingga dana yang diperoleh untuk pembangunan akan meningkat. Menurut Bank Indonesia, jumlah penabung di bank pada tahun 1974 belum mencapai 3 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Adapun jumlah anggota Pramuka se-Indonesia ditaksir kurang lebih 10 juta orang dan jumlah anak usia sekolah (7—13 tahun) sebanyak 23,2 juta orang. Dari jumlah 23,2 juta orang tersebut 13,2 juta sudah tertampung di sekolah dan Pramuka. Oleh karena itu, pemerintah berharap jumlah penabung dapat ditingkatkan

dengan memanfaatkan potensi dari jumlah pelajar dan Pramuka. Sementara itu, terkait dengan penyaluran dana tabungan, masyarakat berharap bahwa dana yang terkumpul dari tapelpram dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan pada bidang pendidikan, seperti investasi gedung sekolah, peralatan sekolah, dan bantuan dana pendidikan untuk pelajar yang tak mampu (*Kompas*, 7 September 1974).



Selanjutnya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Perata P3 yang telah berjalan setahun sebelumnya, pada tanggal 17 Februari 1975, Gubernur Bank Indonesia melantik Dewan Koordinasi dan Pembina Gerakan Tabungan Nasional (Dekop GTN) Pusat di kantor Bank Indonesia. Pengurus Pusat Dekop GTN diketuai oleh J.A. Sereh yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia, sedangkan Wakil Ketua adalah Dr. Washington P. Napitulu, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, sekretaris dan beberapa anggota pengurus Dekop GTN berasal dari direktur-direktur bank pemerintah dan perusahaan asuransi. Dalam pelantikan itu, Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa Dekop GTN sebagai pelaksana Perata P-3 bertugas mengadakan koordinasi dan mewujudkan ketentuan dalam piagam kerja sama; memikirkan cara pelaksanaan program Gerakan Tabungan Nasional; mencari solusi untuk permasalahan yang akan muncul; dan memberi saran dalam rangka menyempurnakan GTN (*Kompas*, 18 Agustus, 1975).

Setelah membidik pelajar dan Pramuka, GTN diarahkan kepada ceruk pegawai negeri yang juga cukup banyak jumlahnya. Pada 1 April 1976 pemerintah menyelenggarakan tabungan pegawai yang diikuti 1,8 juta pegawai negeri di seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Pegawai negeri akan menabungkan sebagian gajinya ke dalam tabanas secara sukarela, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketua Dekop GTN, J.A. Sereh, berpendapat bahwa jajaran pegawai negeri memiliki potensi yang besar, baik secara kuantitas maupun potensi keuangan yang dapat diarahkan untuk membiayai pembangunan melalui menabung. Selama ini, memang banyak pegawai negeri yang telah mengikuti program tabanas dan taska, tetapi pemerintah melihat perlu dilakukan perhatian khusus untuk melibatkan pegawai negeri dalam GTN.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan menabung pegawai dilakukan secara kolektif di setiap departemen, instansi, atau lembaga pemerintah. Pegawai penabung akan memiliki buku tabungan pegawai atas namanya masing-masing dan tercatat pada bank penyelenggara meskipun menabungnya dilakukan secara kolektif. Dalam setiap departemen akan dibentuk unit yang dipimpin seorang koordinator yang akan mengurus administrasi kegiatan menabung para pegawai. Koordinator akan melakukan pemotongan gaji pegawai secara rutin tiap bulan yang besarnya telah disepakati oleh tiap-tiap pegawai.

Pada setiap akhir bulan, para pegawai harus menyerahkan buku tabungannya untuk keperluan pencatatan di bank penyelenggara. Nantinya, buku tersebut akan dikembalikan kepada pegawai. Untuk itu, para pegawai dapat melakukan pengambilan tabungan satu kali dalam sebulan, atau dua kali apabila diperlukan atas seizin koordinator. Tabungan pegawai sama persis dengan tabanas dan diselenggarakan oleh bank yang sama. Menurut J.A. Sereh, meskipun gaji pegawai negeri setiap bulan telah banyak dipotong, pemotongan tersebut diharapkan tidak membebani pegawai karena bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Lagi pula, uang tabungan yang dipotong secara otomatis dari gaji mereka tidak akan hilang, tetapi tersimpan aman dalam bank dan terus berkembang nilainya (*Kompas*, 2 April 1976).

Menabung di Era Deregulasi Ekonomi

Pada tahun 1980 program tabungan tabanas dan taska, yang termasuk di dalamnya tabungan pemuda, pelajar, dan Pramuka, serta tabungan pegawai terus berkembang pesat. Penyebab perkembangan yang pesat itu adalah dilakukannya promosi yang terus menerus diperbaikinya pelayanan melalui penyempurnaan tata usaha, dan ditambahkan bank penyelenggara. Pada akhir tahun laporan (1980—1981) bank penyelenggara tabanas dan taska berjumlah 29 bank, yang terdiri atas 6 bank pemerintah, 15 bank umum swasta nasional, dan 8 bank pembangunan daerah. Dalam tahun 1981—1982 diberlakukan sistem pelayanan tunggal dan mekanisasi penatausahaan tabanas bagi semua bank penyelenggara. Sementara itu, bank penyelenggara tabanas dan taska telah ditambah menjadi 37 bank penyelenggara, yang terdiri atas 6 bank pemerintah, 11 bank pembangunan daerah, dan 20 bank umum swasta nasional.

Ketika jambore nasional pada tahun 1981 diterbitkan tabanas jambore nasional khusus untuk peserta jambore nasional yang datang dari seluruh Indonesia. Kelebihan tabanas jambore nasional adalah saldo tabungan dapat ditarik meskipun setoran pertama belum mengendap selama sebulan. Tabanas tersebut dapat dilanjutkan ke dalam bentuk tabanas umum atau tapelpram pada bank yang sama atau bank lainnya di tempat peserta jambore nasional berdomisili dan bunganya dapat diperhitungkan atau dibayarkan pada bank lainnya.



Spanduk Tabanas dan Taska pada salah satu kantor cabang Bank Indonesia periode 1980-an.
Sumber: Koleksi Bagian Arsip Bank Indonesia

Dalam rentang lima tahun (1980—1985) GTN melalui tabanas dan taska terlihat hasil yang menggembirakan. Pada 1980 jumlah penabung mencapai 8.879.000 orang dengan nilai tabungan Rp292 miliar. Pada 1985 jumlah penabung meningkat menjadi 13.222.000 orang dan nilai tabungan meningkat menjadi Rp726 miliar. Dalam kurun waktu yang sama jumlah bank penyelenggara tabanas dan taska telah bertambah dari 27 bank menjadi 63 bank, yang terdiri atas 6 bank pemerintah, 39 bank swasta nasional, dan 18 bank pembangunan daerah. Peningkatan jumlah bank penyelenggara tabanas dan taska erat kaitannya dengan keikutsertaan bank-bank umum swasta nasional dan bank-bank pembangunan daerah dalam gerakan tabungan (*Kompas*, 3 Oktober 1985).

Selanjutnya, jumlah penabung dari nilai tabungan pada periode 1987—1988 terus meningkat. Hal itu dapat dilihat dari nilai tabungan pada periode tersebut yang meningkat 35,4% dari periode sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.485 miliar, jumlah penabung meningkat 10,9%, dari jumlah penabung periode sebelumnya, yaitu menjadi 22.666 ribu penabung. Peningkatan itu, antara lain, disebabkan oleh Paket Kebijakan yang diluncurkan pada tanggal 27 Oktober (Pakto) 1988 yang memberikan keleluasaan kepada semua bank untuk menyelenggarakan berbagai bentuk tabungan. Sebagai hasil dari kebijakan itu, terdapat 53 bank yang menyelenggarakan berbagai jenis tabungan baru.

Sementara itu, jumlah penabung tabanas dan taska hingga akhir September 1989 mencapai 20,3 juta orang atau 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan nilai tabungan Rp 1.682 miliar. Pada akhir 1971 ketika program baru dimulai beberapa bulan, tercatat sebanyak 887.000 orang penabung atau 0,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan nilai tabungan Rp5 miliar. Peningkatan jumlah penabung itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dari semua lapisan untuk menabung telah bertambah. Hal itu merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak antarinstansi pemerintah yang tergabung dalam Dekop GTN, yang terdiri atas Bank Indonesia, Depdikbud, Deppen, Depdagri, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka beserta seluruh jajaran di pusat dan daerah (*Kompas*, 20 Desember 1989).

Pada tahun berikutnya, yaitu periode 1989—1990, akibat maraknya penyelenggaraan program tabungan oleh bank-bank, jumlah seluruh tabungan menunjukkan peningkatan sehingga nilai tabungan tercatat sebesar Rp6.864 miliar atau meningkat 176,2% dari jumlah pada tabungan periode sebelumnya. Peningkatan itu terutama terjadi pada kelompok bank swasta

Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK)

BULAN 'TERIMA KASIH' BERHADIAH Rp.10.000.000,-

Pers Indonesia, termasuk juga Tempo sadar bahwa modal utama paling berharga adalah dipercaya pembacanya. TEMPO pun menjadi besar karena dukungan pembaca. Sebagai rasa terima kasih, kami ingin membagikan kegembiraan kepada pembaca, dengan hadiah-hadiah yang enak dan perlu!

HADIAH:

2 hadiah I, Tabanas sebesar @ Rp. 1.000.000,-
5 hadiah II, Tabanas sebesar @ Rp. 500.000,-
25 hadiah III, Tabanas sebesar @ Rp. 100.000,-
60 hadiah IV, Tabanas sebesar @ Rp. 50.000,-
serta ribuan T-shirt dan payung eksklusif Tempo.

AGT 0002A © MATAHARI INC.



2. Kumpulkan 3 buah potongan seperti itu, dari TEMPO edisi No. 29, 30, 31, 32 dan 33 (Edisi September-Oktober 1988).

3. Tempelkan pada kartu pos, dan masukkan ke kotak-kotak yang telah tersedia di agen-agen TEMPO yang memasang tanda 'Bulan Terima Kasih Berhadiah', selambat-lambatnya

15 Oktober 1988.

Jangan lupa tuliskan nama, alamat dan nomor KTP Anda.

4. Kartu-kartu pos tersebut akan diundi pada tanggal 22 Oktober 1988. di agen-agen Tempo yang bersangkutan, untuk mendapatkan 2.500 pemenang T-shirt dan 2.500 pemenang payung Tempo. Nama-nama pemenangnya akan diumumkan di agen-agen Tempo tersebut dan selebaran.

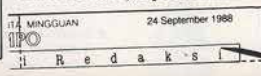
5. Kartu pos-kartu pos yang belum beruntung akan diundi lagi di depan

notaris untuk merebutkan

hadiah Tabanas Rp. 10 juta, pada tanggal 24 Oktober 1988. Dan nama-nama pemenang nya akan diumumkan di Majalah Tempo tanggal 29 Oktober 1988.

CARANYA:

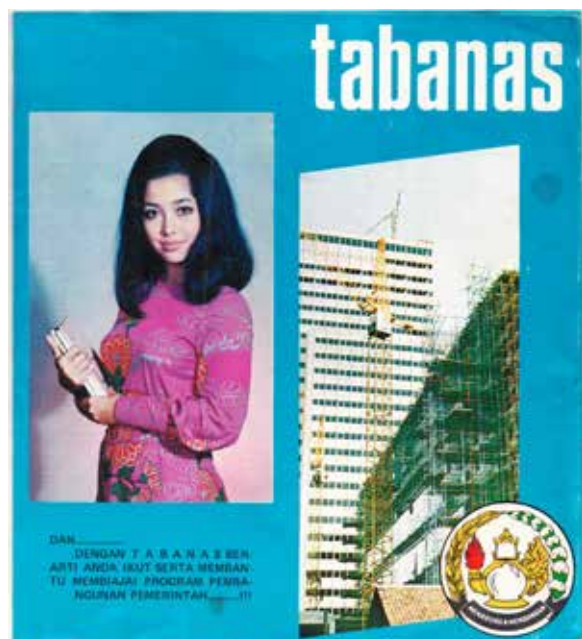
1. Guntinglah tanggal edisi (di bagian kanan atas pada halaman "Surat Dari Redaksi") seperti contoh.



TEMPO
Enak dibaca dan perlu

Iklan Berhadiah Tabanas pada periode akhir 1980 an.

Sumber: Majalah Tempo September 1988



Pamflet Iklan Tabanas dan Taska periode 1980 an diterbitkan Bank Indonesia.
 Sumber: Istimewa (koleksi penulis)

nasional. Di bawah ini terlampir perkembangan menabung selama dekade 1980-an menurut laporan Bank Indonesia.

Hingga pertengahan tahun 1990-an tabungan berhadiah makin marak diselenggarakan oleh perbankan nasional. Dunia perbankan yang sebelumnya terlihat elitis, pada tahun-tahun itu tampil seperti toko serba ada; bersifat terbuka; dan memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi masyarakat. Nasabah dipikat oleh berbagai program tabungan berhadiah yang menggiurkan, misalnya pada akhir 1980-an sejumlah bank dalam bentuk grup secara bersama-sama menyelenggarakan tabungan berhadiah dengan total hadiah yang cukup fantastis pada masa itu, yaitu Rp500 juta. Sejak 1 Mei 1989, Lippo Bank dan Bank Central Asia (BCA) bersama 7 bank swasta lainnya meluncurkan Tabungan Hari Depan (Tahapan), sedangkan Bank Internasional Indonesia (BII) bersama 19 bank lainnya turut menyelenggarakan Tabungan Kesejahteraan Rakyat.

Persaingan diantara kedua kelompok bank ini sempat menjadi perdebatan di kalangan Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) karena dikawatirkan akan mematikan aktivitas bank-bank kecil yang hanya memiliki permodalan terbatas. Pada saat itu parlemen (Komisi VII DPR), membela program tabungan berhadiah kedua kelompok bank besar itu dengan mengatakan bahwa pola tabungan berhadiah Rp 500 juta itu adalah cara yang positif dan efektif dalam menghimpun dana masyarakat (*Kompas*, 12 Juli 1989). Berikut ini salah satu rekaman media tentang persaingan antara tabungan Tahapan dan Kesra.

Lalu, bagaimana nasib tabanas dan taska di tengah persaingan tabungan-tabungan berhadiah perbankan nasional? Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, melalui Pakto 1988 telah ditetapkan landasan untuk memberi kebebasan kepada perbankan untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito, serta tata cara penyelenggaraannya. Meskipun dengan kebebasan tersebut kreativitas bank-bank sudah mulai tampak, daya kreasi perbankan masih belum dapat berkembang secara optimal. Kendala terjadi karena ketentuan mengenai penangguhan pengenaan pajak atas bunga bagi para penabung kecil belum berlaku sama bagi semua jenis tabungan. Selain itu, kriteria untuk pemberian penangguhan pajak kurang memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi bank-bank untuk bersaing secara sehat dengan menciptakan produk tabungan yang berbeda sesuai dengan preferensi masyarakat.

Penangguhan pengenaan pajak pendapatan bunga bagi para penabung kecil sangat diperlukan dalam rangka memasyarakatkan kebiasaan menabung. Khususnya penabung berpenghasilan rendah guna mendukung pembangunan secara berkesinambungan. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana cara pengguhan pengenaan pajak tersebut agar tetap memberikan ruang gerak yang luas bagi bank-bank dalam bersaing secara sehat dengan menciptakan produk tabungan yang beraneka ragam.

Pada waktu itu, penangguhan pengenaan pajak pendapatan bunga diberikan kepada tabungan pembangunan nasional (tabanas), tabungan asuransi berjangka (taska), tabungan naik haji (TNH) dan tabungan uang muka kredit pemilikan rumah (TUM-KPR) dan tabungan kecil yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan tabanas yaitu bersaldo minimum Rp10.000,00 ke bawah. Bunga tertinggi yang dibayarkan adalah 15% setahun; perhitungan bunga didasarkan atas saldo terendah; frekuensi penarikan tabungan sebanyak-banyaknya 6 kali dalam sebulan; dan penarikan tabungan tidak dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.

Kriteria pembatasan, seperti pembatasan suku bunga tertinggi 15% setahun; perhitungan bunga yang didasarkan pada saldo terendah setiap bulan; dan frekuensi penarikan sebanyak-banyaknya 6 kali dalam sebulan merupakan pembatasan ruang gerak bagi perbankan untuk bersaing secara sehat. Karena fasilitas penangguhan pengenaan pajak merupakan daya tarik yang kuat bagi penabung kecil, bank-bank pada umumnya memilih mengikuti kriteria yang membatasi ruang gerak tersebut. Akibatnya, persaingan hanya terbatas pada ragam pemberian hadiah sehingga cenderung menjadi kurang sehat.

Sehubungan dengan hal itu, kriteria penangguhan pajak bagi penabung kecil perlu lebih disederhanakan dengan memberikan perlakuan yang sama bagi semua jenis produk tabungan. Dengan itu tercipta ruang gerak yang lebih besar bagi bank-bank untuk bersaing secara sehat. Untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk lebih mendorong penabung kecil untuk menabung, pendapatan bunga yang diperoleh dari tabungan kecil masih ditangguhkan pengenaan pajaknya. Adapun kriteria tabungan kecil yang masih ditangguhkan pengenaan pajak atas bunganya adalah tabungan yang saldo tertingginya dalam satu bulan tidak melebihi Rp5 juta. Ketentuan ini berlaku untuk tiap-tiap penabung secara individual.
2. Setoran lunas ONH tetap dibebaskan dari pajak karena setoran ONH tersebut bukan tabungan dan manfaat yang diperoleh bukanlah bunga.
3. Untuk menghindari peseorangan memecah tabungannya, pada saat mulai menabung, nasabah diharuskan menandatangani pernyataan bahwa keseluruhan simpanannya di bank tidak melebihi Rp5 juta.
4. Penabung yang memiliki tabungan dengan nilai nominal di atas Rp5 juta, bank akan memotong langsung uang tabungan tersebut sebesar 15% untuk pajak bunga. Akan tetapi, pemotongan pajak tersebut dapat dikembalikan Ditjen Pajak. Caranya adalah dengan mengisi SPT apabila pendapatan bunga tabungan setelah ditambah dengan penghasilan lainnya masih berada di bawah pendapatan tidak kena pajak.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta Keputusan Menteri Keuangan No.1308/KMK.04/1989 tentang Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka. Selain itu, juga Sertifikat Deposito serta Saldo Tabungan Tertinggi yang Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan yang keduanya dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1989.

Untuk melengkapi kebijakan tersebut, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.22/63/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.22/133/UPG tertanggal 1 Desember 1989 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh tiap-tiap bank. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia tidak mengatur lagi ketentuan mengenai tabanas, taska, dan tapelpram. Dengan demikian, bank penyelenggara tabanas dan taska bebas untuk menetapkan sendiri nama tabungan, cara pelayanan, dan kriteria tabungan, seperti suku bunga dan frekuensi pengambilan. Ketentuan

mengenai jaminan Bank Indonesia terhadap tabanas dan taska dicabut. Demikian pula, ketentuan mengenai deposito pada bank pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/7/KEP/DIR tanggal 1 Juni 1983 dicabut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.22/65/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989.

Untuk membudayakan kebiasaan menabung perlu dilakukan proses pendidikan menabung di seluruh lapisan masyarakat. Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.22/134/UPG, keduanya tanggal 1 Desember 1989 membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Menabung (FKPM) yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Gerakan Pramuka, Perbankan dan Bank Indonesia. Selain sebagai anggota, Bank Indonesia merangkap sebagai koordinator.

Tugas FKPM adalah (1) mengadakan pertemuan dan konsultasi secara berkala, (2) menetapkan langkah-langkah yang berkaitan dengan usaha pendidikan menabung dalam rangka meningkatkan pengerahan dana masyarakat, (3) melaksanakan kerja sama dan koordinasi yang efektif antar instansi yang terkait, dan (4) merumuskan program kerja yang diperlukan untuk lebih meningkatkan pendidikan menabung. Dengan dibentuknya FKPM, kegiatan pendidikan menabung yang selama itu dilakukan oleh Dewan Koordinasi dan Pembinaan Gerakan Tabungan Nasional (Dekop GTN) dilanjutkan oleh FKPM.

Satu-satunya bank swasta nasional yang masih menggunakan nama tabanas sebagai nama produk tabungan untuk anak-anak adalah BCA. Pada tanggal 23 Juli 1991 bertepatan dengan Hari Anak Nasional, BCA meluncurkan program Tabanas BCA. Meski, secara bisnis menyelenggarakan Tabanas tidak lagi menguntungkan, BCA tetap mengadakan tabungan untuk pangsa pelajar SD dan SMP yang dianggap sebagai *future market*. BCA ingin mengenalkan diri secara simpatik kepada generasi muda dengan harapan memperoleh suatu kesan yang baik, yang akan terbawa hingga mereka dewasa. Dalam program ini BCA aktif berkeliling sekolah dengan menggunakan mobil beratribut menarik. Untuk menarik minat anak-anak, BCA tidak menggunakan imbalan undian, tetapi hadiah langsung.

Bagi BCA, program Tabanas BCA adalah pelaksanaan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan bank untuk ikut mengenalkan dunia perbankan

kepada generasi muda, yang kelak akan menjadi kebutuhan atau bagian dari aktivitas ekonomi mereka. Berkat usaha promosi yang gencar, terutama melalui *sponsorship* acara anak-anak, tabanas BCA menjadi cukup populer di kalangan anak-anak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Padang. Karena popularitasnya, kata tabanas BCA berkonotasi sebagai tabungan anak-anak sekolah, bukan lagi tabungan pembangunan nasional. Konon, selain meraih simpati anak-anak melalui Tabanas, BCA juga memanfaatkan orang tua anak-anak dengan menjadikan mereka nasabah BCA dan menggunakan produk BCA lainnya. Pada periode ini, selain BCA, beberapa bank swasta lain juga memiliki produk tabungan untuk anak-anak, misalnya Bank Lippo dengan produk tabungan Lippo Junior yang juga cukup menarik perhatian generasi muda.



Sumber: Info BCA Tahun 1991.

Menabung Secara Syariah

Pada 1 November 1991 Pemerintah bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank itu merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip Syariah Islam dalam kegiatannya. BMI yang juga diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan menawarkan beberapa produk perbankan syariah, antara lain tabungan mudarabah. Produk tabungan ini adalah simpanan pemilik pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian tertentu yang disepakati dalam perjanjian.

Penyimpan dana tabungan diberikan hak untuk memperoleh bagian pendapatan bank dengan nisbah nilai persentase tertentu (misalnya 50%) untuk penyimpanan dana dan nilai prosentase tertentu (misalnya 50%) untuk bank yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan pendapatan bank. Karena pada tabungan dimungkinkan adanya mutasi, variabel besarnya dana yang disimpan diperhitungkan menurut saldo rata-ratanya atau dengan metode lain. Dalam lingkup tabungan mudarabah, bank mengembangkan produk seperti tabungan mudarabah untuk ibadah dan muamalah.

Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih awam akan praktik perbankan syariah. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa sistem operasional perbankan syariah tidak berbeda dengan bank umum konvensional. Padahal, tentu saja sistem dan konsep perbankan syariah sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem dan konsep bank konvensional. Jika bank konvensional menerapkan sistem bunga atas tabungan atau pinjaman, perbankan syariah menggunakan istilah margin.

Perbankan syariah menitikberatkan landasan operasionalnya pada prinsip syariah Islam. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas, dan bunga dalam berbagai bentuk dilarang. Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil. Bank konvensional mendasari operasional pada prinsip uang sebagai komoditas yang dipertahankan dan bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang sudah ditetapkan di muka. Sebagai contoh sederhana, setiap akad atas pinjaman dana melalui syariah bersifat tetap nilainya sampai akhir pelunasan. Tidak seperti bank konvensional, nilai pinjaman bisa bertambah jika ada perubahan penetapan bunga berjalan.

Krisis ekonomi tahun 1997—1998 yang melanda Indonesia sempat merontokkan bank-bank konvensional yang sebelumnya dikenal ketangguh-

annya. Para bankir sempat heran mengapa Bank Muamalat Indonesia (BMI) bisa bertahan dari krisis? Terinspirasi dengan ketangguhan BMI dalam menghadapi krisis ekonomi moneter, pemerintah menginisiasi berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan bank syariah kedua di Indonesia. BSM merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kebetulan terimbas krisis ekonomi moneter 1997—1998.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal itu ditunjukkan dari total aset perbankan syariah pada tahun 2002 sebesar Rp4,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp4,6 triliun pada tahun 2003. Jumlah kantor bank syariah pun terus bertambah. Pada tahun 2004 terdapat dua bank umum syariah, yaitu BMI dan BSM dengan jumlah kantor mencapai 161 unit yang tersebar di 20 provinsi. Padahal, dari tahun 1992 hingga tahun 1998 hanya ada satu bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muammalat Indonesia (BMI).

Selanjutnya, setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jaringan perbankan syariah pada bulan Oktober 2011 meningkat menjadi 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah, dan 154 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan demikian, total jaringan kantor yang ada adalah sebanyak 2017 kantor. Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia telah menjangkau masyarakat Indonesia di lebih dari 120 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 2008 hingga sekarang, perbankan syariah tengah gencar mempromosikan diri sebagai bank untuk masyarakat semua golongan. Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada masyarakat muslim, tetapi juga pada masyarakat nonmuslim. Upaya untuk mengubah perspektif semacam itu banyak dilakukan, baik melalui kegiatan pameran perbankan syariah maupun promosi sinergi melalui bank umum yang sejenis.

Sementara itu, volume usaha perbankan syariah juga terus meningkat. Total aset per Oktober 2011 telah mencapai Rp127,19 triliun. Jika ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp3,35 triliun, total aset perbankan syariah mencapai Rp130,5 triliun. Adapun *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih sekitar 3,8% dan masih bertahan pada angka 5% menurut data terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2015. Hingga kini, OJK masih terus mengupayakan berbagai cara untuk menggenjot jumlah nasabah perbankan syariah. Menurut OJK, hingga saat ini jumlah nasabah bank syariah masih di bawah 10 juta. Oleh karena itu, potensi peningkatan jumlah nasabah perbankan syariah masih sangat besar.

Menabung di Penghujung Orde Baru

Selanjutnya, karena produk tabungan makin menarik dan bervariasi serta meningkatnya promosi tabungan yang dilakukan perbankan nasional, pada periode 1995—1996 pertumbuhan tabungan meningkat 25,1% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode itu pemerintah melalui FKPM juga aktif menyelenggarakan Pekan Tabungan Nasional (Kantanas) yang diadakan setiap tahun sejak tahun 1992. Meskipun pertumbuhannya membaik, nilai tabungan Kantanas masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai deposito berjangka yang lebih disukai oleh masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada periode 1990- an, peranan tabungan terhadap seluruh dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan adalah sebagai berikut: 12,5% (1991), 18,3% (1992), 23,7% (1993), 26,1% (1994), 23,8% (1995), dan 22,9% (1996). Selain itu, dari simpanan masyarakat tersebut, simpanan milik perseorangan tetap mempunyai peranan terbesar, diikuti oleh perusahaan swasta dan perusahaan negara.

Dalam kondisi fondasi ekonomi yang dianggap kuat meskipun nantinya akan runtuh dalam sekejap diterpa krisis, Pemerintah masih terus gencar mendorong kegiatan menabung di kalangan masyarakat. Upaya itu diimplementasikan pemerintah dengan cara, misalnya pada tahun 1995 Presiden Soeharto menugasi Bank BNI 46 membantu gerakan menabung keluarga

sejahtera yang akan dimulai pada bulan Oktober. Pemerintah berupaya mengefektifkan ekonomi keluarga dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa dengan menabung.

Selain itu, di tingkat perdesaan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Presiden meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menganjurkan setiap kepala keluarga di desa agar giat menabung. Dalam kaitannya dengan imbauan itu, BNI 46 diminta untuk mengeluarkan produk baru, yaitu tabungan keluarga sejahtera yang ditujukan untuk keluarga prasejahtera di desa. Dalam program itu, BKKBN mengajak para konglomerat yang diharapkan bisa memancing minat menabung, memberikan tabungan pertama. Melalui program tabungan itu, pemerintah juga meminta para konglomerat untuk menjadi semacam bapak asuh bagi keluarga pra sejahtera di desa (*Kompas*, 14 September 1995).

Selanjutnya, pada tanggal 2 September 1995, Presiden Soeharto didampingi Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, membuka acara Pekan Tabungan Nasional (Kantanas) 1995 dan mencanangkan Tahun Gemar Menabung Pelajar Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan penjelasan mengenai mengapa masyarakat harus rajin menabung. Pemerintah berharap melalui menabung akan dapat mewujudkan



Presiden Soeharto dalam suatu temuwicara bersama anak-anak Indonesia.

Sumber: <http://www.hmsoeharto.id>

kemandirian bangsa. Agar dapat terus membangun, penerimaan dari sumber dalam negeri harus tumbuh dan bangsa Indonesia harus memiliki tabungan agar dapat membangun secara mandiri. Pada masa itu, selain masalah kemandirian yang hendak dicapai, penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan karena makin sulitnya memperoleh pinjaman luar negeri akibat dari banyaknya negara berkembang lain yang juga mencari pinjaman.

Dalam kesempatan yang sama Presiden juga menyinggung isu yang timbul di kalangan masyarakat, bahwa seakan-akan pemerintah mengajak masyarakat menabung sebanyak-banyaknya dan kemudian uang itu dipakai mengangsur utang luar negeri. Presiden Soeharto minta masyarakat tidak terpengaruh berbagai isu yang mengatakan bahwa tabungan mereka akan dipakai untuk membayar utang luar negeri. Di hadapan 54 pelajar penabung teladan dari seluruh Indonesia, Presiden meyakinkan bahwa tabungan masyarakat benar-benar untuk membangun. Utang luar negeri akan dibayar dengan dana yang berasal dari nilai tambah hasil pinjaman biasa. "Pinjaman-pinjaman itu akan dipakai membiayai pembangunan berbagai proyek yang kemudian menghasilkan nilai tambah," begitu kata Presiden dalam forum Kantanas di Balai Sidang Jakarta.

Lebih lanjut kepada pelajar SD, SLTP, dan SLTA yang hadir pada sesi temu wicara, Presiden mengatakan bahwa pemerintah memiliki sekitar 180 BUMN yang nilai asetnya Rp359 triliun atau sekitar 179 miliar dolar AS. Bila rakyat sudah tidak mau meminjam dari luar negeri, sebagian kecil aset itu bisa saja dijual. Dicontohkan, jika sepertiga saja aset itu dijual, sudah terkumpul hampir 60 miliar dolar AS. Menurut Kepala Negara, jika pinjaman luar negeri yang tiap tahunnya sekitar lima miliar dolar ingin dihapuskan, dana 60 miliar itu cukup untuk mengganti pinjaman selama 12 tahun. Presiden sekali lagi menekankan, "Jadi, tabungan tidak digunakan untuk membayar utang, tetapi untuk benar-benar membangun. Kita harus membangun karena masih ada yang miskin. Kita telah berusaha memerangi kemiskinan, tetapi toh belum bisa keseluruhan selama 25 tahun. Masih ada 13,7 persen, kurang lebih 26 juta rakyat kita yang masih miskin" (*Kompas*, 3 September 1995).

Ciri khas dari Presiden Soeharto dalam setiap temu wicara bersama masyarakat Indonesia adalah keakraban yang ia bangun melalui perbincangan dengan beberapa orang yang hadir. Hal itu dapat diamati sebagaimana terlihat dalam dialog Presiden dengan para pelajar penabung teladan berikut ini.

Presiden

“Tabungannya sudah berapa?” tanya Presiden kepada Lia dari Yogyakarta, kelas VI SD.

“Uang jajannya berapa sehari dan yang ditabung berapa?”

“Yang Rp 100 untuk beli apa?”

“Cukup permen, tetapi menabung ya. Jadi tidak bisa beli minuman, karena hanya seratus. Tetapi Rp 100 di Yogya kan masih bisa untuk beli karak (kerupuk). Masih bisa toh? Di sana kan masih mudah jajanan. Saya tahu, karena saya kan dari sana. Pernah diambil?” (Maksudnya tabungannya pernah diambil atau belum).

Presiden

“(Kepada siswa yang lain) Siapa namanya?”

“Sekolahnya sudah kelas berapa?”

“Sudah punya tabungan berapa sekarang?”

“Wah, itu barangkali dari uang saku juga?”

“Sebagian dari uang saku, mungkin sebagian dari hadiah ulang tahun dari orangtua. Ulang tahun dapat hadiah dan ditabung kan. Hadiahnya banyak?”

Bagus, lantas pernah diambil uang tabungannya itu?”

“Untuk apa uang tabungan diambil?” “

“Oh, untuk membiayai les Bahasa Inggris, seperti kursus begitu?”

Presiden

(Ganti siswa lainnya yang ditanya oleh Presiden.) Sekarang dari Timtim? Siapa namanya.”

“Sekolah di mana? “

“Umur?”

“Punya tabungan?”

“Wah terlalu banyak yang diambil. Itu dari uang saku?”

“Mahasiswa? Bagus juga. Anak SMA memberi les pada mahasiswa. Masukkan di bank, kalau di bank lebih aman, Saya ucapkan selamat.”

Lia (penabung teladan)

“Rp 431.000.”

“Rp 300, yang ditabung Rp 200.”

“Ya untuk beli permen.”

“Belum.”

Ina (penabung teladan)

“Ina, Pak.”

“Kelas tiga SMP di Medan.”

“Sudah sekitar satu juta, Pak.”

“Sebagian iya, Pak.”

“Ehh.” “

“Iya, Pak.”

“Untuk tambah biaya les pelajaran Bahasa Inggris.”

Felis (penabung teladan)

“Felis Berty, dipanggil Tony.”

“Sekolah Menengah Umum Paulus VI, Dili, kelas III.”

“17 tahun.” “

“Dulunya Rp 217.300 lebih, lalu diambil untuk biaya sekolah. Sekarang tinggal Rp 27.000 saja, Pak.”

“Dari hasil saya memberi les Bahasa Inggris pada anak SMP, SMA, dan mahasiswa.”

Pada tahun 1996, satu tahun menjelang krisis ekonomi dan moneter, dalam pembukaan Kantanas ke-5 di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1996, Gubernur Bank Indonesia, J. Soedradjad Djiwandono, menegaskan bahwa motivasi untuk menabung bagi masyarakat tidak bisa datang sendiri, tetapi diperlukan pembinaan, terutama generasi muda yang harus dididik hidup berhemat untuk memobilisasi dana untuk pembangunan. Menurut Soedradjad, kebiasaan gemar menabung harus dibina sejak dini, terutama pada anak didik dan Pramuka, seperti melalui Pekan Tabungan Nasional (Kantanas) itu. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah melalui Gubernur Bank Indonesia menekankan bahwa gerakan menabung terkait erat dengan upaya memperkuat kemampuan pendanaan pembangunan.

Pada kesempatan itu Soedradjad mengulas kembali, bahwa gerakan menabung sebenarnya telah dimulai tahun 1971 dengan diperkenalkannya berbagai jenis tabungan, seperti tabanas dan taska. Sementara itu, Kantanas yang dimulai 1992 merupakan konsentrasi gemar menabung yang ditanamkan pada pelajar dan Pramuka. Pada waktu itu, menurutnya iklim menabung telah tertata dengan baik. Disebutkan, sejak Pakto 1988, dari 111 bank dengan cabangnya sebanyak 2.500 kantor bank, kini telah menjadi 240 bank dengan 6.500 cabang. Jenis tabungan pada tahun 1990 hanya ada 60 macam produk tabungan, dan pada 1996 telah menjadi 280 macam produk tabungan.

Dalam pidatonya, Soedradjad juga mengatakan bahwa pembangunan tidak bisa lepas dari upaya mobilisasi dana sendiri. Misalnya dari rencana investasi selama Pelita VI sebesar Rp 815 triliun, 70 persen di antaranya diharapkan dari masyarakat. Meskipun pembiayaan dan tabungan pemerintah setiap tahun bertambah, tapi menurut hitungan Bank Indonesia jumlahnya masih kurang. Karena itu diperlukan tabungan masyarakat yang lebih besar. Gubernur Bank Indonesia itu menyebutkan rasio pengeluaran investasi dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar 28,5 persen, sedangkan rasio tabungan terhadap PDB hanya 25,5 persen. Kesenjangan antara investasi dan tabungan ini dipenuhi dengan penanaman modal asing (PMA) dan pinjaman luar negeri. Dalam proses tinggal landas pembangunan ekonomi, makin lama perekonomian Indonesia harus makin mandiri. Oleh karena itu, diperlukan tabungan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian itu (*Kompas*, 12 Agustus 1996).

Demikian perkembangan dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan dalam periode 1990-an, termasuk dana tabungan masyarakat.

**Tabel Penghimpunan Dana Menurut Jenis
Periode 1991—1999**

Jenis Simpanan	Posisi Dana dalam Triliunan Rupiah									
	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999		
Giro	21,4	25,5	31,9	20,5	19,7	57,4	108,7	107,2		
Rupiah	17,0	20,5	24,0	16,0	9,4	42,6	64,1	60,0		
Valas	4,4	5,0	7,9	4,5	10,3	14,3	44,6	47,2		
Deposito Berjangka	56,8	64,6	74,4	55,7	128,4	163,6	272,1	412,8		
Rupiah	38,9	42,9	48,5	37,8	91,9	119,2	178,0	303,0		
Valas	17,9	21,7	25,9	17,9	36,5	44,3	94,1	109,8		
Tabungan	17,5	28,0	37,6	23,1	51,2	66,3	72,1	79,5		
Total	95,7	118,1	143,9	100,0	223,7	286,9	452,9	599,5		
Rupiah	73,4	91,4	110,1	77,6	176,8	228,2	314,2	442,5		
Valas	22,3	26,7	33,8	22,4	46,9	58,7	138,7	157,0		

Diolah dari: Laporan Tahunan Bank Indonesia 1990 - 1999



“Buku Tabungan bank-bank swasta di Indonesia periode 1990 an yang memfasilitasi penabung dari semua kalangan masyarakat”

Sumber: Koleksi Museum Mandiri di Jakarta

Dalam kondisi krisis ekonomi moneter periode 1997—1998 dana masyarakat yang dihimpun di dalam bank, termasuk tabungan terus meningkat, yaitu dari Rp66,3 triliun pada tahun 1996/1997 menjadi Rp72,1 triliun pada tahun 1997/1998, dan meningkat lagi menjadi Rp79,5 triliun pada tahun 1998/1999.

Sebagaimana kita ketahui, krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 secara eksternal adalah dampak lanjutan dari krisis moneter yang terjadi di Thailand. Sejak bulan Februari 1997, nilai tukar mata uang Thailand (baht) terus merosot terhadap dolar Amerika. Dari sana lah kemudian krisis moneter itu terus menjalar ke negara-negara lain di kawasan Asia. Setelah merobohkan Thailand, krisis melanda Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Philipina, dan terus bergerak merobohkan rupiah di Indonesia.

Pada bulan Juli 1997 nilai rupiah merosot tajam terhadap dolar Amerika dan kondisi itu terus terjadi sepanjang tahun. Bahkan pada tanggal 22 Januari 1998 nilai tukar rupiah mencapai Rp16.000,00 per 1 dolar Amerika. Dalam kondisi nilai tukar yang terus merosot itu banyak bank yang mulai mengalami kesulitan likuiditas, terutama bank-bank yang mempunyai pinjaman dalam mata uang asing dan pinjaman itu tidak dilindungi dengan mekanisme *hedging* (lindung nilai). Suatu mekanisme yang menjamin suatu nilai kurs untuk penukaran suatu mata uang di kemudian hari sama dengan nilai kurs yang berlaku pada saat kontrak dilakukan (Mintohardjo, 2001).

Pada saat datangnya krisis moneter itu, barulah disadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat pada masa 1990-an telah ditopang oleh sektor swasta yang ternyata banyak bergantung kepada investasi asing berupa pinjaman jangka pendek yang sebagian besar tidak dilindung nilai. Dengan hantaman badai krisis itu dalam sekejap runtuhlah sendi perekonomian Indonesia yang sebelumnya disebut-sebut sebagai *Macan Asia*. Bahkan, ada pula yang menyebut Indonesia sebagai *The Asian Miracle*. Namun, semua pujian itu sirna terkena amukan badai krisis moneter pada tahun 1997.

Pada akhir Agustus 1997 tercatat 20 bank mengalami saldo debit. Dalam perdagangan internasional, beberapa bank memiliki sejumlah L/C yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi memenuhi kewajiban mereka. Mereka terpaksa meminta bantuan likuiditas dari Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai *lender of the last resort*. Kondisi perbankan di tanah air makin genting, bak telur di ujung tanduk karena kepercayaan masyarakat terus menguap. Masyarakat mulai mengamankan simpanannya dan terus menarik dananya dari bank yang kesulitan likuiditas.

Pada masa krisis ekonomi moneter 1997—1998, dana masyarakat yang tersimpan tidak hilang atau dibekukan sebagaimana yang pernah terjadi pada periode sebelumnya pada tahun 1950-an. Pada tahun 1997—1998 pemerintah menunjuk beberapa bank sebagai bank pembayar dana para nasabah bank yang dibekukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dampak krisis pada penabung adalah beralihnya dana bank dari bank swasta ke bank pembayar, terutama bank persero milik negara, yang relatif masih cukup dipercaya oleh masyarakat.



Gambaran antrian masyarakat menarik uang simpanannya pada suatu bank swasta nasional di Jakarta.
Sumber: Istimewa



Sumber: Museum Nasional

Masa Depan Budaya Menabung

Menabung Pascareformasi

Setelah masa reformasi, kesadaran menabung di kalangan masyarakat terus digerakkan pemerintah daerah, seperti di Jawa Timur. Pada tanggal 20 Mei 2003 Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, mencanangkan Gerakan Sadar Menabung di Gedung Grahadi, Surabaya, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh mantan Menteri Negara Kependudukan, Haryono Soeyono, Gubernur menyatakan bahwa telah disediakan dana sebesar Rp1 miliar untuk Gerakan Sadar Menabung di Jawa Timur. Haryono Soeyono, selaku Ketua Himpunan Pramuka Wreda (Hiprada), mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) untuk menyosialisasikan Gerakan Sadar Menabung di Jawa Timur. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat berdampak terhadap tercapainya target 200.000 penabung pada 2003 di Jawa Timur.

Sasaran gerakan tersebut adalah seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama ditujukan bagi siswa SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) dan SMU (sekolah menengah umum). Dana sebesar 1 miliar rupiah itu merupakan dana pancangan agar siswa dapat aktif dan kreatif ikut serta dalam program menabung. Caranya, setiap anak yang mengajak serta seorang rekannya untuk menjadi nasabah akan diberi

buku tabungan yang sudah terisi saldo Rp10.000,00. Dalam pelaksanaannya dana pancingan sebesar Rp1miliar itu akan digunakan untuk memancing 100.000 nasabah. Maka, dipastikan target nasabah sebanyak 200.000 orang tahun 2003 itu terdiri atas 100.000 nasabah yang memperoleh dana pancingan dan 100.000 sisanya penabung biasa, tanpa dana pancingan.

Pada saat pencairan Gerakan Sadar Menabung yang dihadiri oleh siswa sekolah di Surabaya, jumlah nasabah yang terkumpul sudah mencapai 1.000 orang. Dengan keyakinan bahwa jumlah nasabah akan terus membengkak, Hiprada berencana menggandeng Bank Jatim untuk mengelola sumber daya lain. Gerakan Sadar Menabung itu merupakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan siswa di masa mendatang. Dengan ketersediaan dana, siswa siap menghadapi kemungkinan yang berkaitan dengan masa depan, termasuk kemungkinan untuk bekerja mandiri akibat tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan sekolah (*Kompas*, 21 Mei 2003).

Sementara itu, pada tingkat nasional, meskipun belum terdapat suatu gerakan menabung dalam skala nasional secara konkret kesadaran menabung masih terlihat diupayakan dalam ranah gagasan sebagaimana terlihat dalam lokakarya (*workshop*) dan pameran *Keberagaman Menabung Masyarakat Indonesia* di Keraton Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2004. Pada kesempatan itu, Dr. Meutia F. Swasono, Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, mengatakan bahwa salah satu penyebab utama terjebaknya bangsa

Indonesia dalam jerat utang adalah lunturnya semangat menabung bangsa oleh budaya konsumerisme. Padahal, kebiasaan menabung punya tradisi panjang dalam sejarah nasional Indonesia. Menurut putri Bung Hatta itu, untuk keluar dari jerat utang itu, kebiasaan menabung harus dihidupkan kembali dalam masyarakat Indonesia. Kebiasaan menabung itu mulai luntur ketika budaya konsumerisme melanda bangsa kita. Pada masa sekarang banyak masyarakat menjadi bersifat boros, tidak gemar menabung, dan bersifat hedonistik. Menurut Meutia, masyarakat yang berciri seperti itu akan mudah terpicat pada pilihan untuk berutang. Tradisi menabung tidak saja perlu dilestarikan, tetapi perlu juga dikembangkan dalam tataran prinsip menabung itu sendiri.

Meutia menjelaskan bahwa merosotnya semangat menabung menandakan bahwa masyarakat tidak lagi peduli akan masa depan yang memerlukan modal untuk membentuk akhlak yang produktif dan kreatif. Oleh karena itu, ketika perkembangan nilai uang sudah demikian cepat sehingga menabung dengan celengan sudah dirasakan kurang efektif, prinsip menabung tetap harus dimiliki oleh masyarakat sekarang, terutama bagi anak-anak. Mereka tetap harus ditumbuhkan kesadaran menabungnya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Sebaiknya segera dikembangkan lagi jenis-jenis tabungan anak-anak di sekolah melalui kantor pos, bank desa, atau bank setempat.

Meutia juga berpendapat agar prinsip tradisi menabung dikembangkan, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi jangka pendek dengan jalan

pintas. Menurutnya, akhlak menabung harus sampai pada konsep untuk menjaga tanah air, melindungi dari kerusakan akibat eksploitasi yang berlebihan, serta mendorong bangsa untuk memiliki modal sosial dan modal ekonomi sendiri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kata sambutannya mengajak masyarakat untuk berkaca pada budaya hemat masyarakat Cina. Ia mengutip ungkapan mantan pemimpin Cina Deng Xiaoping yang mengatakan bahwa bagi bangsa Cina, menjadi kaya secara terhormat bukanlah dosa. Menurut Sultan, jika mengkaji pergulatan politik dan sosial di negeri Cina yang penuh kekalutan, telah membentuk sikap praktis yang keras yang disarikan dalam sistem nilai untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi sesulit apa pun. Kerasnya hidup itu melahirkan sikap superhemat sebagai bentuk pertahanan hidup dengan disiplin menabung yang bahkan tidak masuk akal yang didukung oleh kemampuan bekerja. Lebih lanjut Sultan mengatakan bahwa menabung dapat mengubah sikap dan perilaku generasi muda dari pola konsumtif ke arah pola produktif yang berorientasi masa depan. Perubahan sikap dan perilaku generasi muda, akan berakumulasi menjadi sebuah gerakan dahsyat dalam memupuk tabungan nasional yang pada akhirnya dapat menjadi investasi nasional (*Kompas*, 27 Juli 2004).

Sementara itu, Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, antropolog dari Universitas Gadjah Mada, ketika berbicara dalam lokakarya (*workshop*) “Keberagaman Menabung Masyarakat Indonesia” yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan dan Wisata Republik Indonesia di Benteng Vredeburg Yogyakarta, 27 Juli 2004, menilai dewasa ini terjadi paradoks menabung dengan iming-iming hadiah belanja yang diselenggarakan oleh perbankan. Penyebabnya, antara lain, adalah karena adanya reduksi makna menabung oleh bank, yaitu yang semula bersifat spiritual dan sosial menjadi hanya bersifat ekonomi semata. Menurut Ahimsa, di satu sisi, menabung bertujuan untuk penghematan, tetapi di sisi lain bank menawarkan iming-iming imbalan yang pada akhirnya bersifat konsumtif.

Paradoks lainnya yang terjadi dalam pola menabung saat ini adalah nilai tambah materi dari undian. Menurut Ahimsa undian dapat mendorong orang berkhayal memperoleh sesuatu dalam waktu cepat dan dengan cara yang mudah padahal, menabung merupakan upaya untuk mencapai sesuatu lewat proses yang lama dan menuntut kesabaran. Ada nilai-nilai yang bertabrakan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi paradoks-paradoks ini diusulkan agar perbankan memilih cara berpromosi yang lebih mendidik untuk ikut bertanggung jawab terhadap pembentukan sikap masyarakat, misalnya, dengan memberikan beasiswa, bukan memberikan hadiah barang konsumtif kepada nasabah (*Kompas*, 28 Juli 2004).

Pada masa pesatnya perkembangan perbankan dengan menggunakan berbagai macam teknologi layanan digital, di Indonesia masih terdapat sekelompok masyarakat yang tetap menabung dengan cara tradisional. Selain itu, juga masih ditemui sekelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga perbankan nasional. Berikut dua kutipan di *Kompas*, 11 November 2006 dan *Kompas*, 30 November 2009 yang menggambarkan fenomena semacam itu.

“Gaya Menabung Sopir di Kota Bandung: Setiap tutup bulan, para sopir membongkar pintu mobil depan. Mereka mencari koin-koin yang dikumpulkan selama sebulan untuk membayar keperluan bulanan seperti iuran sekolah anak. Demi kemajuan anak-anaknya pula, Dani, seperti para sopir lainnya, punya trik jitu dalam menabung. Kalau orang biasanya menabung di bank, celengan ayam, sarung bantal, bawah kasur, dan lainnya, para sopir punya gaya menabung unik. “Kalau ada penumpang membayar dengan koin Rp 1.000, langsung saya cemplungkan ke dalam celah antara pintu dan kaca mobil sebagai tabungan,” tuturnya. Dalam sehari kadang ia mendapatkan tiga koin. Kadang sama sekali tak dapat. Ia pilih koin Rp 1.000 karena nilainya paling besar di antara uang koin, dan uang itu tidak akan rusak. Menabung di celah pintu mobil berisiko kemasukan air jika ada hujan lebat. Namun, keuntungannya, penabung akan malas membongkarnya untuk mengambil uang tersebut. “Kalau menabung di celengan rumah, godaan untuk memecahkannya gampang. Sementara menabung di celah pintu mobil sangat merepotkan,” ujarnya. Dani dan para sopir lain biasanya membongkar pintu mobil setiap akhir bulan. Uang yang terkumpul cukup banyak, mencapai Rp 80.000-Rp 100.000. Mereka biasa menggunakannya untuk membayar iuran sekolah anak-anak. Jika suatu hari bertemu sopir sedang membongkar pintu mobil, mungkin mereka adalah salah satu orang yang sedang membongkar “celengan”-nya.”

Kisah berikutnya:

“Dicari Bank Untuk Rakyat Kecil: Menabung, tetapi malah buntung. Begitu nasib ratusan warga Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, dan Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Uang mereka yang diperkirakan berjumlah Rp 1 miliar hilang karena penyelenggara arisan “paket Lebaran” kabur. Ana (40) kini hanya bisa menyesali mengapa ia menjadi pengumpul uang arisan milik 20 orang, yang sebagian besar teman kerja suaminya yang menjadi buruh harian di pergudangan Sunter, Jakarta Utara. Akibatnya, hingga saat ini teman-teman suaminya menagih uang kepadanya. “Susah tidur. Tiap hari orang minta uangnya. Pulang kampung juga enggak tenang. Nanti si Nur datang, siapa tahu uangnya dibagi,” kata Ana, warga RT 10 RW 09 Krukut. Nur yang dimaksud Ana adalah Nurhasanah, warga Jalan Hanura 6, Kelurahan Tanah Sereal, yang menjadi bandar arisan. Sejak akhir Agustus lalu, Nur kabur membawa uang milik nasabah arisan bernama “paket

Lebaran” itu. Ida juga kecewa. Sudah lima tahun ia ikut paket Lebaran yang bernilai Rp 300.000 per paket. Ia ikut tiga paket (Rp 900.000). Untuk itu, ia harus menyetor uang Rp 315.000 yang diangsur selama 45 minggu atau Rp 7.000 per minggu. “Selama lima tahun, setiap awal puasa saya terima uang Rp 900.000 dan sembako isi Indomie, sirup, gula. Uang buat beli baju baru dan pulang kampung ke Mauk, Tangerang,” katanya.”

“Tiba-tiba, Agustus lalu, Nur kabur. Di tengah pelarian, Nur sempat membayar seperempat dari uang warga. Setelah itu ia tak berkabar lagi. Kerugian lebih besar dan tragis dialami Ny Nuryati (50). Warga RT 08 RW 09 Kelurahan Krukut ini kehilangan uang jutaan rupiah. Uang tabungannya sebagai tukang cuci pakaian bertahun-tahun, plus uang milik peserta arisan lain yang setiap bulan menitipkan membayar kepadanya, lenyap. Uang warga yang ia kumpulkan per minggu selama 10 bulan untuk disetorkan kepada Nurhasanah berjumlah sekitar Rp 40 juta. Ketika Nur lenyap, nasabah langsung minta pertanggungjawabannya. Perempuan yang tinggal di kampung amat padat penghuninya itu hanya bisa menangis meraung-raung. Lebaran menjadi saat istimewa bagi sebagian besar warga. Untuk mendapatkan uang pembeli kebutuhan puasa dan Lebaran, warga berupaya keras menabung. Minimnya penghasilan warga yang menjadi pemulung, penjual sayur, buruh cuci baju, atau pengojek membuat mereka hanya mampu menabung sejumlah Rp 7.000 sampai Rp 14.000 per minggu. Entah siapa pemilik ide awal, sejak bertahun-tahun lalu muncul paket Lebaran uang, bahan kebutuhan pokok, atau daging di kawasan Kota serta tempat lain, seperti Bekasi dan Surabaya. Penyelenggaranya adalah warga perseorangan yang biasanya memberikan iming-iming pemberian bonus bingkisan bahan pokok bagi nasabah. “Tadinya sih enggak mau ikutan, tapi waktu lihat banyak tetangga bawa paket sembako, saya pengen juga ikut paket Lebaran. Eh, malah ketipu,” kata Iyah, warga RT 04 RW 15, Kelurahan Tanah Sereal. Semakin banyak warga tertarik ikut paket Lebaran. Setahun-dua tahun paket berjalan lancar. Saat masuk tahun kelima atau keenam, ketika peserta paket mencapai ratusan orang, penyelenggara menghilang. Dua tahun lalu, Nu, warga Krukut, penyelenggara paket Lebaran, juga menghilang. Agustus lalu Nurhasanah menyusul kabur. Warga gigit jari. Kondisi ini memperlihatkan warga kalangan bawah tak tersentuh layanan perbankan. Aparat pemerintah bahkan tak melihat ada kebutuhan semacam koperasi bagi warganya. “Warga saya malu kalau menabung cuma Rp 10.000 ke bank, sedangkan di sini belum ada koperasi,” tutur Ketua RW 15 Tanah Sereal Sholeh Assegaf. Akibatnya, ketika ada orang mau menyimpan uang mereka, warga berduyun-duyun mendatanginya. Mereka bahkan rela membayar Rp 15.000 per paket agar bisa menabung.”

Gerakan Indonesia Menabung

Ketika memasuki era global, kerja sama antarbank tidak terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga merambah jaringan perbankan internasional. Pada bulan November 2009 Bank Tabungan Negara (BTN) dan Institut Bank-Bank Tabungan Dunia yang dikenal dengan *World Saving's Bank Institute* (WSBI) menjalin kerja sama dalam program peningkatan jumlah penabung dari masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Program itu membantu masyarakat berpenghasilan rendah membangun stabilitas keuangan keluarga dan sebagai salah satu penopang ekonomi nasional Indonesia.

WSBI memilih Bank BTN setelah melalui serangkaian penilaian proposal dalam kompetisi internasional yang mengangkat tema peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada 10 bank dari berbagai negara yang terpilih dalam program WSBI itu, antara lain Indonesia, Kenya, Tanzania, Uganda, Afrika Selatan, Burkina Faso, Lesotho, Maroko, El Salvador, dan Vietnam. Semua bank anggota WSBI yang terpilih umumnya punya jaringan operasional yang luas dan berpengalaman dalam melayani masyarakat bawah.

Riset Bank Dunia menunjukkan bahwa mobilisasi tabungan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk keluar dari kemiskinan. Terlepas dari nilai simpanannya, tabungan itu ini

dapat dimanfaatkan untuk berjaga-jaga dari kebutuhan tidak terduga, persiapan pendidikan, dan pembangunan stabilitas keuangan dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Banyak anggota WSBI yang tertarik ikut dalam kegiatan ini. Beberapa di antaranya akan berupaya mengurangi biaya tabungan secara signifikan, misalnya melalui peningkatan sistem teknologi informasi (*Kompas*, 2 November 2009).



Iklan Pencanangan Gerakan Indonesia Menabung.
Sumber: Kompas, Februari 2010

Selaras dengan perkembangan tersebut, di Indonesia pada tanggal 20 Februari 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Indonesia Menabung yang ditandai dengan peluncuran produk TabunganKu. Produk itu merupakan tabungan perseorangan tanpa biaya administrasi yang diterbitkan bersama oleh 70 bank umum dan 910 Bank Perkreditan Rakyat serta BPR Syariah. Produk TabunganKu hanya mensyaratkan nasabah memberikan setoran awal sejumlah Rp10.000,00 di BPR atau BPR Syariah, serta setoran awal Rp20.000,00 jika membuka TabunganKu di bank umum. Selanjutnya, penabung tidak dikenai biaya administrasi (*Kompas*, 21 Februari 2010).

Dalam pencanangan gerakan tersebut di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Presiden SBY menjelaskan bahwa produk TabungaKu memiliki dua aspek, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berpenghasilan

rendah sekaligus meningkatkan keadilan karena pembangunan untuk semua, inklusif, adil, dan merata. Presiden juga mengingatkan bahwa tabungan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tak terduga dan merencanakan pengeluaran bagi kepentingan rumah tangga. Bagi negara, kegemaran masyarakat menabung akan meningkatkan tabungan domestik yang akan mendorong penyaluran kredit dan lebih kuat menggerakkan perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan bahwa perbankan menyadari pentingnya menggali sumber pendanaan domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, selama ini, potensi tabungan domestik belum tergali secara sistematis karena, antara lain, terdapat kendala administratif dan sosiopsikologis yang memberatkan masyarakat menengah-bawah untuk menabung di bank.

Selama ini, pada tabungan konvensional, jika saldo tabungan di bawah dua juta rupiah, biaya administrasi justru akan mengurangi nilai tabungan. Selain itu, rata-rata setoran awal yang disyaratkan bank umumnya di atas Rp100,00 ribu. Masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki simpanan dalam jumlah besar akhirnya enggan menabung daripada uangnya habis begitu saja. Animo masyarakat untuk menabung makin berkurang karena sebagian besar bank juga mensyaratkan saldo minimum yang besar saat pembukaan rekening, yang mencapai Rp 500,00 ribu.

Selain itu, Darmin Nasution juga mengatakan bahwa Gerakan Indonesia Menabung juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya menabung sekaligus mengurangi budaya konsumtif yang kurang berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Harapan yang disampaikan oleh Presiden dan Gubernur Bank Indonesia mengingatkan kita kepada harapan yang sama dari pemerintah Orde Baru saat meluncurkan Tabanas dan Taska pada periode tahun 1970-an.

Pada periode tahun 2009—2010, berdasarkan keterangan Bank Indonesia, dari 135 juta penduduk Indonesia yang berusia dewasa, sekitar 80 juta penduduk belum mempunyai tabungan. TabunganKu ditargetkan menjangkau sekitar 48 juta penabung tambahan, terutama golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Diharapkan jika gerakan tersebut dapat menggaet 40 juta penabung baru dengan rata-rata saldo Rp 100 ribu, terdapat tambahan tabungan dalam negeri sebesar Rp4 triliun. Oleh karena itu, pemerintah meminta kalangan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang juga ingin menabung.



Sumber : Kompas, Februari 2010

Secara lebih detail, TabunganKu atau TabunganKu iB memiliki beberapa karakter sebagai berikut.

1. TabunganKu adalah tabungan perseorangan untuk semua masyarakat Indonesia. Satu orang hanya diperkenankan memiliki 1 rekening di 1 bank untuk produk yang sama, kecuali orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwaliannya sesuai dengan kartu keluarga yang bersangkutan.
2. TabunganKu dapat dibuka di 70 bank yang ada di Indonesia, baik bank umum, bank umum syariah, unit usaha syariah, maupun di lebih dari 700 BPR dan BPR syariah. Masyarakat hanya datang ke bank dengan membawa identitas diri (KTP/SIM) dan uang setoran awal Rp10,00 ribu untuk BPR/BPR Syariah atau Rp20,00 ribu di bank umum. Pembukaan TabunganKu untuk anak-anak yang masih di bawah perwalian ditemani orang tuanya dan menggunakan identitas diri orang tuanya serta dilengkapi dengan kartu keluarga.
3. Dengan membuka TabunganKu, nasabah bisa mendapatkan tabungan yang bebas biaya administrasi, aman, dan dapat bunga atau bonus hadiah atau bagi hasil mudarabah.

4. Jika nasabah memiliki saldo sampai dengan Rp500.000,00, bunga yang diberikan sebesar 0 persen. Jika nasabah memiliki saldo di atas Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00, bunga yang diberikan sebesar 0,25 persen. Jika saldo di atas Rp1 juta, bunga diberikan sebesar 1 persen.
5. Apabila membuka TabunganKu di bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan skema *wadiah*, penabung akan mendapatkan bonus dengan equivalent rate maksimum 1 persen. Apabila membuka TabunganKu di BPR, penabung akan mendapatkan bunga maksimum 4 persen. Demikian halnya apabila membuka TabunganKu di BPR Syariah, penabung akan mendapatkan bonus atau bagi hasil dengan *equivalent rate* maksimum 4 persen. Skema syariah yang digunakan adalah akad wadiah atau mudarabah.
6. Uang yang terkumpul dalam TabunganKu hanya dapat ditarik di kantor bank tempat nasabah membuka rekening begitu juga jika hendak menutup *rekening*. Jika ingin menutup rekeningnya, nasabah bisa menarik uang yang disimpan dalam TabunganKu dengan menyisakan sebesar Rp20.000,00 untuk biaya penutupan rekening.
7. Bunga atau bonus TabunganKu lebih rendah jika dibandingkan dengan produk tabungan lainnya karena TabunganKu bebas biaya administrasi serta syarat jumlah setoran awal sangat rendah. Dengan TabunganKu, nasabah dapat menabung dengan tidak dikenai biaya administrasi.
8. Dana nasabah yang disimpan di TabunganKu tidak akan berkurang jumlahnya dan bebas potongan/biaya dengan syarat nasabah memenuhi persyaratan/fitur yang telah ditentukan bank.

Setelah dua tahun diadakan, TabunganKu berhasil menjaring 1.967 juta nasabah dengan total simpanan Rp2,008 triliun. Provinsi dengan jumlah simpanan terbanyak TabunganKu adalah Jawa Timur, yakni Rp349,56 miliar dengan 360.627 nasabah. Menurut Bank Indonesia, pencapaian itu masih di bawah harapan pemerintah. Harapannya adalah TabunganKu bisa mencapai Rp50 triliun dengan melibatkan nasabah jutaan orang. Sementara itu, hingga tahun 2011, Bank Dunia mencatat sekitar 50 juta rakyat Indonesia tidak memiliki akses formal ke lembaga keuangan, termasuk bank.



Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) yang diluncurkan OJK pada 2015.
Sumber: www.ojk.go.id

Menabung sebagai Budaya Produktif

Pada tanggal 14 Juni 2015 pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Simpanan Pelajar (Simpel), yaitu produk tabungan anak yang didesain khusus untuk kalangan pelajar. Simpel adalah salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini. Inklusi keuangan adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan. Program tabungan anak itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Tabungan Sempel diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Melalui Sempel, anak-anak mendapatkan pengalaman belajar untuk membangun budaya gemar menabung dan melatih mengelola keuangan mereka sendiri. Sebagai produk simpanan khusus untuk pelajar, nasabah tabungan ini bisa saja mulai anak usia dini hingga pelajar sekolah menengah atas dan sekolah sederajatnya. Dalam pidatonya saat meluncurkan Tabungan Sempel, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar anak-anak Indonesia mulai mengenal perencanaan keuangan sejak dini. Selain itu, diharapkan anak-anak Indonesia mulai tertarik mengenal perbankan melalui produk tabungan sehingga akan muncul generasi melek keuangan yang menjadikan kebiasaan menabung bukanlah kewajiban, melainkan berkembang menjadi bagian dari gaya hidup.

Tabungan Sempel diselenggarakan melalui bank umum dan bank syariah. Saat pertama kali diperkenalkan ke masyarakat tabungan Sempel didukung oleh 8 bank umum konvensional dan 6 bank umum syariah. Kedelapan bank umum konvensional tersebut yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, Bank Permata, Bank BJB, dan Bank Jatim. Sementara itu, untuk Sempel dengan sistem syariah diselenggarakan oleh Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, dan Bank Panin Syariah. Pada awalnya program ini dilakukan secara berkelanjutan dengan target 16 kota di Indonesia sampai akhir 2015, yaitu Jakarta, Serang, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan 7 kota di Jawa Timur.

Adapun yang membedakan antara tabungan Sempel pada bank konvensional dan bank syariah adalah sebagai berikut.

Fitur	Bank Konvensional	Bank Syariah
Nama produk	Simpel	SimPel iB
Mata uang	Rupiah (IDR)	Rupiah (IDR)
Akad	-	Mudharabah (bagi hasil) atau Wadi'ah (bonus)
Nama rekening	Nama siswa	Nama siswa
Setoran awal	Rp5.000,00	Rp1.000,00
Setoran selanjutnya	Minimum Rp1.000,00	Minimum Rp1.000,00
Biaya administrasi	-	-
Saldo minimum	Rp5.000,00	Rp1.000,00
Saldo maksimum	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi
Bunga / Bagi hasil	Tidak diberikan (diganti dengan program reward)	Tidak dibatasi
Biaya penutupan rekening	Rp 5.000,00	Rp1.000,00
Rekening tidak aktif	Rekening tidak bertransaksi 12 bulan berturut turut	Rekening tidak bertransaksi 12 bulan berturut turut
Biaya penalti saat berstatus Dormant	Rp1.000,00 per bulan	Rp1.000,00 per bulan
Penutupan rekening otomatis	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp5.000,00, rekening dapat ditutup secara otomatis oleh sistem dengan biaya penutupan saldo sebesar sisa saldo.	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp1.000,00, rekening dapat ditutup secara otomatis oleh sistem dengan biaya penutupan saldo sebesar sisa saldo.
Penarikan penyetoran dan pindah buku	Dilayani di sekolah dan semua chanel bank sesuai dengan kebijakan bank. Transaksi dilakukan secara luring (offline) diserahkan kepada kebijakan tiap-tiap bank	Dilayani di sekolah dan semua chanel bank sesuai dengan kebijakan bank. Transaksi dilakukan secara luring (offline) diserahkan kepada kebijakan masing masing bank
Frekuensi tarik tunai	Penarikan maksimal 2 kali per bulan. Penarikan lebih dari 2 kali per bulan sesuai dengan ketentuan bank	Tidak dibatasi
Nominal tarik tunai	Maksimal Rp250.000,00 kecuali saat tutup rekening penarikan di atas Rp250.000,00 sesuai dengan ketentuan bank	Maksimal Rp500.000,00 per hari kecuali saat tutup buku

Melalui program tabungan Simpanan Pelajar ini, diharapkan anak-anak Indonesia mulai dari pelajar pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah ke atas dan yang sederajat dapat merencanakan keuangan sejak dini. Diharapkan pada masa mendatang akan muncul generasi yang lebih sadar keuangan sehingga angka inklusi keuangan nasional dapat meningkat. Hal itu dapat dilihat dengan makin banyaknya jumlah masyarakat mendapatkan layanan dan informasi keuangan formal dengan mudah.

Tabungan Simpel dikenalkan perbankan melalui kerja sama dengan pihak sekolah, melalui fasilitas bank bergerak (*mobile banking*) dan langsung kepada nasabah yang datang ke bank. Adapun fitur pendukung yang dimiliki oleh Simpel, antara lain, bukti kepemilikan rekening, fasilitas *E-Banking*, dan untuk jangka panjang diharapkan menjadi media penyaluran dana Program Indonesia Pintar.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014—2019 menyelenggarakan tabungan Simpel dengan maksud menjadikannya sebagai sarana penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) karena SimPel/SimPel iB ini memiliki karakteristik yang spesifik, seperti nama siswa yang tercatat sebagai pemilik rekening dan tercantum pada buku tabungan.

Adapun Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan, misalnya dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana PIP diberikan berbeda-beda untuk setiap tingkat pendidikan. Setiap semester, pelajar SD menerima bantuan Rp225 ribu, siswa SMP sejumlah Rp375 ribu, dan siswa SMA/SMK masing-masing sejumlah Rp500 ribu. Dana PIP tersebut disalurkan melalui tabungan Simpel yang dimiliki tiap-tiap pelajar.

Anjuran untuk menabung terus disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Pada peringatan Hari Menabung Sedunia 31 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo sekali lagi mengimbau masyarakat mengedepankan budaya produktif, antara lain, dengan menabung dan berinvestasi. Melalui tabungan dan investasi, roda perekonomian dapat bergerak sehingga menopang pertumbuhan ekonomi. Presiden juga mengatakan bahwa tantangan bersama bangsa Indonesia adalah menjadikan 250 juta jiwa penduduk Indonesia sebagai kekuatan yang produktif. Melalui tabungan dan investasi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi bangsa dapat diukur. Makin tinggi tingkat tabungan dan investasi masyarakat, makin banyak pula dana yang dapat disalurkan untuk menggerakkan sektor riil. Untuk itu, menabung dan berinvestasi perlu terus didorong karena potensinya masih besar.

Pada tahun 2016 itu, rasio tabungan terhadap produk domestik bruto

(PDB) per kapita masih sangat rendah, yaitu 20 persen. Kepemilikan rekening masih sebatas 19 persen dari total penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun atau lebih. Sementara itu, menurut catatan pemerintah, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang bisa menjadi target potensial penghimpunan dana. Dari kelompok pelajar saja potensinya 44 juta siswa, sedangkan dari kelompok pemuda dan mahasiswa sekitar 55 juta orang.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum terakses lembaga keuangan formal. Pada 2014, berdasarkan data Bank Dunia, masyarakat yang terakses lembaga keuangan formal 36,1 persen. Selain itu, rasio tabungan nasional ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan, terutama menutup kesenjangan antara tabungan dan berinvestasi. Akibatnya, kebutuhan pembiayaan ini harus dipenuhi dari luar negeri berupa utang dan sumber lain.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 279 bank yang menjadi peserta program Simpel. Jumlah rekening tabungan khusus siswa sekolah ini mencapai 8.045.226 dengan nilai Rp1,63 triliun. Adapun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara pihak perbankan dan sekolah sebanyak 199.819 PKS. Melalui program tabungan Simpel ini, diharapkan anak-anak Indonesia, mulai dari pelajar PAUD hingga SMU/ sederajat dapat merencanakan keuangan sejak dini. Dengan demikian, pada masa mendatang akan lahir generasi yang lebih sadar keuangan dan pada akhirnya angka inklusi keuangan nasional, dapat meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat mendapatkan layanan dan informasi keuangan resmi dengan mudah.

Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai berikut.

“Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.”

Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, tetapi terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

Berkaitan dengan pengembangan keuangan inklusif di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan guna mengembangkan keuangan inklusif di Indonesia. Pertama, menyederhanakan sistem atau *simplifying*

system, kedua menyederhanakan izin. Jika dua hal tersebut bisa dilakukan, niscaya akan mempercepat inklusi keuangan yang diharapkan oleh pemerintah. Presiden juga mengatakan perluasan inklusi keuangan sangat diperlukan untuk memudahkan seluruh rakyat Indonesia mengakses perbankan dan menggunakan jasa keuangan. Pemerintah ingin semua orang bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.

Untuk mewujudkan keuangan inklusif, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelenggarakan dua program inklusi keuangan secara terpisah, yaitu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diselenggarakan BI sejak Juli 2014 dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang diselenggarakan OJK sejak Maret 2015.

LKD diselenggarakan oleh BI untuk memudahkan dan memastikan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui LKD, BI mengajak masyarakat yang belum bersentuhan dengan bank agar bisa terlibat dalam sistem transaksi keuangan. LKD sebenarnya adalah kelanjutan dari uji coba *branchless banking* yang sebelumnya dilakukan oleh BI pada Mei 2013. Uji coba *branchless banking* dilakukan dengan memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi terhadap penggunaan telepon genggam. Perusahaan telekomunikasi pun dipilih sebagai rekan kerja sama. LKD merupakan aktivitas pelayanan berbentuk jasa pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kantor nonfisk non-fisik. Dengan kata lain layanan ini bertumpu pada teknologi seperti telepon seluler, website dan jasa pihak ketiga (agen). LKD dapat juga diartikan sebagai transaksi tanpa uang kertas atau koin. Target utama program layanan ini adalah masyarakat yang belum mengetahui atau belum memiliki akses perbankan (*unbankable*).

Dengan berjalannya dua program inklusi keuangan tersebut, masyarakat terkadang mempertanyakan perbedaan antara program LKD dari BI dan Laku Pandai dari OJK. Pasalnya, keduanya sama-sama bertujuan menyentuh penduduk di wilayah terpencil. Selain itu, keduanya juga menggunakan agen sebagai perantara. Bank Indonesia menjelaskan bahwa LKD fokus untuk masyarakat kelas bawah untuk menerima bantuan sosial dan menyediakan fasilitas transaksi pembayaran. Sementara itu, Laku Pandai fokus pada akses masyarakat untuk membuka tabungan di bank. Kendati keduanya memiliki perbedaan dalam menjangkau penduduk di wilayah terpencil, pada akhirnya kedua program ini memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memberi kesempatan masyarakat membuka tabungan di bank.

Dualisme sistem pelayanan LKD dan Laku Pandai, pada akhirnya harus segera diharmonisasi agar dapat bersinergi satu sama lain. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah memasang target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019 yang harus diwujudkan secara bersama oleh pemerintah, khususnya OJK dan BI. Kedua otoritas moneter dan keuangan negara tersebut, pada saat ini tengah menyiapkan terobosan baru, yaitu mengintegrasikan LKD dan Laku Pandai, terutama pada tingkatan keagenan dan produk sehingga mempercepat inklusi keuangan nasional.

Celengan Anak Ikan

Bahan : Tanah Liat
Asal : Plered, Purwakarta, Jawa Barat
Ukuran : P. 22 cm L. 7 cm Tbl. 9 cm
No. Inv : 27688a

Celengan anak ikan mas merupakan salah satu bentuk variasi hewan dalam air. Bentuk anak ikan mas yang unik memberikan daya tarik tersendiri untuk menabung bagi anak-anak. Celengan anak ikan mas ini terbuat dari tanah liat serta dihiasi dengan warna hitam di bagian kepala dan mata, sedangkan di bagian sirip, punggung, badan serta ekor dihiasi dengan warna hitam merah kekuning-kuningan juga warna putih perak. Celengan ini diperoleh pada tahun 1968. Bentuk bulatan memanjang untuk memasukkan koin terdapat disamping bagian sirip.



Simpulan

Sementara itu, Laku Pandai adalah program yang diselenggarakan oleh OJK dengan tujuan untuk menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank). Laku Pandai menggunakan konsep sederhana, yaitu dengan memilih dan melatih nasabah yang dipilih oleh bank pelaksana Laku Pandai menjadi agen-agen penyedia layanan. Agen juga dibekali cara-cara memberikan pemahaman untuk menabung dan bertransaksi. Dengan demikian, kegigihan agen diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat di pelosok yang tak terjangkau jaringan bank untuk memanfaatkan layanan keuangan (keuangan inklusif).

Makna Menabung

Buku ini memuat gambaran budaya menabung dalam arti luas, bukan sekadar menyimpan uang ke dalam tabung kosong, atau menyimpan uang di dalam lembaga perbankan, melainkan menempatkan uang dalam arti yang lebih mendasar. Maksudnya adalah semua kegiatan yang dilandasi oleh motif untuk mengatasi masalah hidup membutuhkan perencanaan yang baik untuk mengatasinya. Sumber masalah hidup itu diperoleh dari pengalaman masa lalu, baik yang sangat jauh maupun yang dekat dan didasari oleh bayangan masa depan yang lebih baik. Untuk mengikuti pandangan itu, setiap tindakan menabung memiliki aspek pengorbanan yang membutuhkan ongkos yang harus dibayar sebagai modal investasinya. Oleh karena itu, kegiatan menabung dapat mencakup upaya yang lebih luas, yaitu mengawetkan bahan pangan agar memiliki ketahanan lebih lama dan tetap layak dikonsumsi; menciptakan budaya bertani agar sumber pangan liar dapat dikendalikan untuk memberi hasil panen lebih banyak; menciptakan lumbung pangan untuk mengantisipasi kebutuhan dan mengantisipasi musibah pada masa depan; menciptakan wadah-wadah untuk menyimpan bahan makanan dan mengawetkannya dengan cara memasak. Makna

menabung dalam arti yang mendasar itu sesungguhnya tidak ada bedanya dengan yang lazim kita kenal dengan *menabung* saat ini. Maksud menabung saat ini adalah menyimpan uang, baik dalam celengan maupun menabung di lembaga keuangan, seperti bank. Dengan memahami makna menabung tersebut, aktivitas menabung sesungguhnya merupakan bagian kebutuhan dasar manusia yang memiliki sejarah panjang yang berlangsung sejak masa prasejarah hingga masa kini.

Tahapan Penting dalam Sejarah Budaya Menabung

Pengalaman manusia melakukan kegiatan menabung dalam arti luas dapat dikatakan seumur sejarah kehidupan manusia. Perilaku penting pertama yang dapat dikaitkan dengan budaya menabung adalah upaya melakukan pengawetan bahan (makanan) mentah yang diketahui hanya memiliki jangka waktu pendek jika dikonsumsi secara alami. Pengawetan bahan pangan pada awalnya dilakukan melalui proses pemanasan secara alami, yaitu dengan memanfaatkan panas matahari. Ketika manusia menciptakan api, pemanasan lebih mudah dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan itu manusia tidak lagi tergantung pada sumber alam berupa matahari. Pemanasan dengan menjemur di terik matahari dan dengan membakarnya dengan api merupakan cara tertua yang dikenal manusia ketika kehidupan manusia berada pada taraf perkembangan paling awal. Pada masa perkembangan berikutnya aktivitas menabung adalah upaya untuk meningkatkan hasil produksi yang dilakukan dengan cara menanam bibit tanaman liar menjadi bibit budi daya. Itu dirancang agar kebutuhan pangan manusia tidak hanya tergantung pada kebaikan alam yang kadang-kadang menunjukkan sifat sebaliknya. Kegiatan bertani itu sendiri berkembang dalam dua tahapan, yaitu tahap pertanian ladang berpindah dan pertanian sawah beririgasi. Dari sudut produktivitasnya, praktik pertanian jenis pertama memberikan hasil yang lebih sedikit daripada yang

kedua sehingga kedua-duanya memiliki potensi untuk menghasilkan surplus pangan dengan skala yang berbeda.

Ketika manusia memasuki tahap kehidupan bernegara, praktik pertanian melibatkan lahan yang lebih luas dengan intervensi negara sebagai lembaga control. Itu dilakukan untuk mengorganisasikan praktik pertanian lintas desa yang sebelumnya bersifat otonom. Melalui kontrol negara dalam membangun sarana irigasi, potensi hasil produksi sawah meningkat yang memungkinkan kerajaan-kerajaan kuno membangun monumen-monumen besar. Meskipun demikian, musibah bencana berupa hama tanaman atau bahkan gunung meletus yang terjadi sewaktu-waktu dapat menghancurkan seluruh investasi dan produksi pangan utama. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan itu masyarakat menciptakan tempat-tempat untuk menyimpan hasil panen, baik untuk mengantisipasi agar tidak kekurangan bahan pangan di masa depan, maupun untuk menyimpan bibit untuk musim tanam berikutnya. Sebelum dimasukkan ke dalam lumbung pun, bahan pangan itu, terutama padi, sudah diawetkan lebih dahulu melalui pengawetan dengan pemanfaatan panas matahari.

Upaya menciptakan sarana untuk penyimpanan lain yang menyertai tradisi bertani adalah dengan membuat wadah-wadah dari tanah liat yang dikenal dengan gerabah. Jenis ciptaan ini termasuk karya utama yang dibuat secara efisien karena bahannya mudah diperoleh dan manfaatnya sangat luas. Wadah-wadah berupa peralatan sehari-hari itu tidak hanya digunakan sebagai tempat menyimpan berbagai bahan pangan, tetapi juga sebagai sarana memasak, memindahkan barang, menjadi bekal kubur, dan menjadi wadah tanaman hias.

Tahapan penting lain yang menandai pencapaian dalam budaya menabung adalah ketika manusia memasuki kehidupan bernegara yang ditandai oleh berkembangnya kota-kota yang diwarnai aktivitas perdagangan yang menonjol. Aktivitas itu mendapatkan penguatan melalui sistem ritual keagamaan yang diciptakan untuk melindungi para pedagang. Transaksi perdagangan meningkat efisiensi dengan digunakannya mata uang yang dijadikan sebagai media untuk tukar-menukar. Mata uang itu menjadi bertambah penting peranannya ketika diperlakukan sebagai wujud atau simbol kekayaan itu sendiri. Melalui kesepakatan nilai intrinsik, mata uang bisa lebih tinggi daripada barang yang lain yang dipertukarkan dalam transaksi dagang. Sejak saat itulah, tradisi menabung, dalam arti khusus, mulai dikenal terutama menabung dalam arti menyimpan mata uang di dalam wadah yang kini dikenal dengan nama celengan. Menabung di dalam celengan ini mula-mula dikenal pada masa Majapahit sekitar di abad ke-14 dan ke-15 Masehi.

Bersama dengan tradisi lain, yaitu mengawetkan bahan pangan dan menyimpan bahan pangan dalam lumbung dan di dalam wadah-wadah tembikar. Menabung dalam arti luas itu terus berlanjut pada masa kerajaan-kerajaan Islam dan bahkan terus dipertahankan hingga kini.

Dengan hadirnya bangsa Eropa yang pengaruhnya mulai terasa sejak awal abad ke-17, banyak budaya baru yang diperkenalkan, antara lain cara menabung yang sudah tumbuh menjadi tradisi sejak masa prasejarah dan masa pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tradisi menabung dalam arti khusus berawal dengan dikenalnya lumbung sebagai sarana penyimpanan hasil panen. Setelah itu, muncul kegiatan menabung bentuk baru, yaitu menabung di dalam sebuah lembaga usaha yang disebut “bank”. Menabung tidak lagi dengan cara menaruh di dalam wadah celengan, bumbung, atau dengan cara menyimpan hasil pertanian dan perkebunan dalam lumbung, tetapi dalam bentuk buku tabungan yang berisi catatan uang yang kita setor ke sebuah lembaga bank.

Meskipun pemerintah Hindia Belanda mengenalkan bentuk baru dalam menabung, cara menabung tradisional oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak dihilangkan sama sekali. Bahkan, sebelum mendirikan bank pertama, yaitu Bank van Leening pada tahun 1746, Pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan menabung dalam wadah yang bentuknya berbeda dengan celengan. Celengan itu berbentuk buku yang disebut dengan book bank atau tabung yang terbuat dari kaleng. Itu berarti selama hampir 200 tahun tinggal di bumi Nusantara, Belanda ikut menerapkan cara menabung seperti yang dilakukan oleh kaum bumiputra. Di Barat mulai dikenal celengan yang disebutnya piggy bank atau pigg bank, yaitu kotak uang atau koin yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk menyimpan uang. Celengan itu berbentuk anak babi sudah digunakan pada abad ke-18. Mereka menyatakan bahwa bank pygg yang berkembang pada abad ke-18 pada dasarnya sama dengan celengan. Itu berarti bahwa di Barat, termasuk Belanda, juga mengenal “celengan” sama dengan yang berkembang pada masa Kerajaan Majapahit.

Bank pertama didirikan oleh pemerintahan kolonial VOC atas inisiatif Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff pada tahun 1746, yaitu Bank van Leening. Pada awalnya bank itu mempunyai tujuan yang berlawanan dengan tujuan menabung yang sudah dikenal masyarakat bumiputra. Bank bukan mengajarkan bagaimana menabung di bank, melainkan sebaliknya bank memberikan pinjaman kepada orang-orang yang akan melakukan usaha perdagangan rempah-rempah di Batavia. Akan tetapi, kehadiran bank itu menjadi embrio lahirnya sistem menabung pada masa-masa berikutnya.

Selain itu, bank inilah yang kemudian menjadi “cikal bakal” berdirinya lembaga keuangan “pegadaian” di Indonesia.

Setelah itu, pada tahun 1752 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Mossel didirikan Bank van Courant dan Bank van Leening disatukan menjadi Bank Courant en Bank van Leening. Lembaga bank itu yang menjadi cikal bakal perbankan nasional menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang. Kedua bank itulah yang didirikan Belanda sampai dengan VOC bubar pada tahun 1799. Setelah VOC dibubarkan, tahun 1800—1942 kolonial Belanda mendirikan pemerintahan baru dengan nama Hindia Belanda. Muncullah Bank Nederlandsche Handel Maatschapij (1824), De Javasche Bank (1828), Escompobank (1857), Nederlandshe Indische Handel Bank (1841), dan Postspaarbank (1897). Bank yang terakhir itulah yang kemudian berubah nama menjadi Chokin Kyoku pada zaman Jepang dan sekarang menjadi Bank Tabungan Negara.

Meskipun Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan berbagai macam bank sebagai tempat menabung bentuk baru, sampai dengan Belanda dikalahkan Jepang pada tahun 1942 atau selama hampir 145 tahun, keberadaan celengan dan lumbung masih tetap berjalan. Bahkan, sampai tahun 20-an keberadaan lumbung dijadikan lembaga yang bertugas mengurus gudang beras atau lumbung padi (*Rijstschuren*). Persediaan padi dalam lumbung itu dapat digunakan pada masa kurang pangan dan dapat dijual pada waktu yang tepat bagi petani. Dengan cara begitu pula, kebebasan para tengkulak dapat dibatasi.

Selain Belanda tetap menjaga keberadaan lumbung, juga dibentuk lembaga “Bank Desa” (*Dorpsbanken*) berupa bank uang yang meminjamkan uang dengan bunga untuk pembelian benih, pupuk, peralatan pertanian kecil, pendirian usaha kecil, dan sebagainya. ...(Pemerintah)? tidak hanya menganjurkan menabung di lembaga tempat menabung, tetapi dapat melakukan cara atau metode masyarakat dalam menabung secara manual, seperti menyimpan perhiasan dan menyimpan uang di rumah.

Pada masa penjajahan Jepang yang hanya sekitar 3,5 tahun, tradisi menabung di kalangan bumiputra mengalami kemuduran yang serius. Hal itu terjadi karena kehidupan perekonomian masa itu secara umum sangat buruk. Sistem perekonomian Jepang memaksa rakyat dijadikan romusa. Petani harus bekerja, tetapi hasil pertanian dan perkebunannya dirampas oleh Jepang. Hal itulah yang menyebabkan rakyat mengalami kesengsaraan luar biasa. Tradisi menabung dalam celengan terpukul karena rakyat dalam keadaan miskin, tidak mempunyai sisa penghasilan yang dapat ditabung, demikian pula halnya dengan tradisi menyimpan sisa hasil panen padi di lumbung. Lumbung mereka kosong termasuk lumbung desa desa.

Sebaliknya, Jepang sangat gencar mempropagandakan menabung di bank. Beberapa lembaga keuangan yang ada, seperti Bank Chokin Kyoku dan kantor pos dijadikan tempat penghimpunan dana masyarakat. Propaganda menabung yang dilancarkan melalui media surat kabar, majalah, seni, radio dan film membuahkan hasil. Masyarakat makin mengenal bank dan jumlah penabungnya meningkat hingga ke desa-desa. Penabungnya tidak terbatas pada pengusaha dan pejabat, tetapi hingga pedagang, petani, buruh, dan tukang becak.

Dalam setiap periode sejarah yang kita paparkan dalam buku ini dapat kita lihat suatu benang merah tradisi menabung masyarakat Indonesia yang beriringan dengan usaha pemerintah untuk memanfaatkan tradisi tersebut demi kepentingan pembangunan atau agenda lainnya yang terkait dengan kesejahteraan nasional. Potensi ekonomi dari tradisi menabung masyarakat sudah diidentifikasi oleh pemerintah, sejak zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang, hingga pemerintahan masa Indonesia merdeka yang terus berkesinambungan hingga saat ini. Upaya harmonisasi kebiasaan menabung secara mandiri melalui media celengan dan yang serupa dengan sistem tabungan modern diselenggarakan oleh perbankan terus dapat kita cermati sepanjang periode sejarah dari masa ke masa.

Usaha pemerintah yang paling besar dalam menggerakkan masyarakat untuk menabung secara nasional terjadi pada saat pemerintahan Orde Baru pada periode tahun 1970-an. Pada masa itu pemerintah mulai menyadari bahwa potensi dana yang dimiliki masyarakat dapat dihimpun dalam tabungan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pembangunan. Tabanas dan Taska yang diluncurkan pada 20 Agustus 1971 adalah salah satu produk tabungan paling monumental yang pernah ada di Indonesia dan bertahan kurang lebih dua dekade, lebih sari separuh masa pemerintahan Orde Baru.

Pada masa itu terlihat dengan jelas bagaimana upaya pemerintah menggerakkan semua lapisan masyarakat untuk menabung dalam Tabanas dan Taska, suatu pos keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah secara langsung. Hampir semua otoritas pemerintah di pusat dan birokrasi daerah turun tangan untuk mengkampanyekan kegiatan menabung dalam bank, bukan dalam bentuk celengan atau simpanan lainnya di rumah secara mandiri. Pada masa itu pemerintahan Orde Baru memiliki jargon bahwa menabung memiliki fungsi mendidik masyarakat agar ikut mendukung pembangunan, percaya terhadap ketangguhan ekonomi negara, dan memerangi budaya konsumerisme, terutama kegandrungan terhadap barang-barang impor yang bersifat kebutuhan sekunder atau tersier.

Terkait dengan kepercayaan terhadap ketangguhan ekonomi negara, pada masa pemerintahan sebelumnya terdapat peristiwa ekonomi politik yang berdampak merugikan bagi masyarakat penabung di Indonesia. Terutama dalam Kebijakan Sanering 1959, pembekuan sebagian simpanan tabungan yang dimiliki masyarakat dalam bank, dan pemangkasan nilai mata uang Rupiah hingga turun 90 persen dari nilai sebelumnya, telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat untuk menyimpan aset mereka dalam bentuk uang. Pada titik ini aset yang bersifat benda non-uang seperti logam mulia, tanah dan bangunan, bahan-bahan pokok, dan benda-benda mewah lainnya, menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan nilai aset yang mereka miliki. Pemerintah Orde Baru, memulihkan trauma tersebut melalui stabilitas ekonomi, yang antara lain terwujud dalam jaminan uang tabungan bank yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam Tabanas dan Taska dinyatakan bahwa uang tabungan itu dijamin oleh Bank Indonesia.

Pada masa akhir Orde Baru, ketika mulai terbukti bahwa bangunan ekonomi Indonesia ternyata berdiri di atas fondasi ekonomi yang rapuh, masyarakat Indonesia telah masuk dalam kancah sistem menabung yang beragam. Menabung di bank menjadi salah satu komoditas perbankan nasional untuk menggerakkan fungsi intermediasi di tengah persaingan yang sangat ketat. Upaya membangkitkan “dana di bawah bantal” menjadi urusan persaingan antar bank dengan berbagai produk tabungan berhadiah yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Fenomena menabung dengan iming-iming hadiah semacam ini, terus berlangsung hingga sekarang, dan nilai menabung semakin bergeser dari fungsi dan nilainya yang semula. Menabung yang seharusnya memberikan ajaran kesabaran, menahan diri untuk tidak berlaku konsumtif (nilai hemat dan disiplin), menyiapkan bekal untuk masa depan mulai dari masa sekarang (perencanaan), dan kesadaran untuk berinvestasi pada nilai baik, perlahan mulai berganti.

Program tabungan berhadiah uang berjumlah besar atau barang-barang mewah yang ditawarkan bank-bank pada saat ini adalah pereduksian makna menabung yang dilakukan oleh dunia perbankan. Menabung yang semula memiliki spiritual dan sosial berubah hanya bernilai ekonomi semata. Menabung di bank pada saat ini, memiliki paradoks karena bertujuan hemat pada satu sisi dan bersifat konsumtif pada sisi lain. Selain itu, hadiah mewah dan fantastis yang menggiurkan bagi penabung mendorong orang berkhayal memperoleh sesuatu dalam waktu cepat dan dengan cara mudah. Padahal menabung merupakan upaya untuk mencapai sesuatu lewat proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran.

Kondisi tabung-menabung yang ditawarkan oleh perbankan dengan sejumlah paradoks yang terdapat di dalamnya, pada periode mutakhir akhirnya

berdampak kepada keengganan masyarakat untuk memiliki tabungan di bank. Pada beberapa contoh kasus, meski dunia perbankan semakin modern, toh masih ada sekelompok masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional dalam menabung. Pada sisi lain, pemerintah melihat bahwa hingga saat ini belum semua masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia tersentuh oleh layanan bank, yang pada titik tertentu dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam mengakselerasi perekonomian hingga merata ke seluruh Indonesia.

Mulanya pada 20 Februari 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Indonesia Menabung yang ditandai dengan peluncuran produk TabunganKu, sebuah produk tabungan perseorangan tanpa biaya administrasi yang diterbitkan bersama oleh perbankan nasional. Semangat dari program ini adalah bahwa semua masyarakat Indonesia harus merasakan pembangunan secara adil, merata, dan inklusif, antara lain dapat mengakses layanan perbankan.

Kendala biaya administrasi tabungan bank yang selama ini bisa menggerus nilai tabungan, terutama dengan nilai di bawah Rp 2 juta, dan persyaratan saldo minimum yang besar saat pembukaan rekening, mencapai Rp 500 ribu, berusaha diatasi melalui TabungaKu. Melalui TabunganKu, kita dapat menyaksikan bagaimana harapan-harapan yang pernah ada pada masa Orde Baru saat meluncurkan Tabanas dan Taska pada periode 1970 an, mulai muncul kembali. Gubernur Bank Sentral mengatakan bahwa Gerakan Indonesia Menabung juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya menabung sekaligus mengurangi budaya konsumtif yang kurang berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional.

Pada periode pemerintahan selanjutnya, usaha menggerakkan masyarakat untuk menabung kembali digaungkan seiring dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Berkaitan dengan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan guna mengembangkan keuangan inklusif di Indonesia. Pertama, menyederhanakan sistem atau *simplifying system*, kedua menyederhanakan izin. Jika dua hal tersebut bisa dilakukan, niscaya akan mempercepat inklusi keuangan yang diharapkan oleh pemerintah. Presiden juga mengatakan perluasan inklusi keuangan sangat diperlukan untuk memudahkan seluruh rakyat Indonesia mengakses perbankan dan menggunakan jasa keuangan. Pemerintah ingin semua orang bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.

Pada 14 Juni 2015 pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Simpanan Pelajar (Simpel), yaitu produk tabungan anak yang didesain khusus untuk kalangan pelajar. Simpel adalah salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini.

Jika kita merujuk kepada sejarah tabung menabung, Simpel hampir sama dengan program tabungan Tapelpram yang diluncurkan pemerintah pada 1974, tabungan yang membidik ceruk anak usia sekolah. Pada masa itu, pemerintah mendidik anak-anak usia sekolah untuk dapat menyisihkan uang jajannya dalam tabungan sebagai simpanan yang dapat bermanfaat di kelak kemudian hari. Pada 1990 an juga muncul Tabanas BCA yang juga mendorong anak-anak menjadi penabung pemula sebagai *market future* untuk BCA di masa yang akan datang.

Tabungan Simpel diterbitkan dengan tujuan yang kurang lebih sama dengan tabungan anak-anak sebelumnya. Simpel diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Melalui Simpel, anak-anak mendapatkan pengalaman belajar untuk membangun budaya gemar menabung dan melatih mengelola keuangan mereka sendiri. Sebagai produk simpanan khusus untuk pelajar, nasabah tabungan ini bisa saja mulai dari anak usia dini hingga pelajar sekolah menengah atas dan sekolah sederajatnya.

Nilai Budaya Menabung yang Masih Relevan

Menabung secara tradisional dalam arti mengawetkan, maupun menyimpan dalam wadah fisik dalam kenyataan dapat terus hidup dan bertahan sangat lama. Demikian pula menabung dalam arti modern melalui lembaga perbankan juga terus bertahan. Mengapa dapat terjadi seperti demikian? Jawaban yang pasti adalah karena dianggap relevan dipraktekan di setiap zaman. Setiap warisan yang dianggap relevan tentu dipertahankan karena dianggap memiliki nilai penting bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu adalah sikap-sikap yang menghargai pentingnya arti keuletan, kesabaran, disiplin, hemat dan perencanaan. Seluruh nilai-nilai itu merupakan nilai dasar yang memiliki kontribusi dalam upaya melestarikan kehidupan. Bentuk-bentuk aktivitas menabung dapat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, juga bentuk-bentuk fisik serta konsep yang melatar belakanginya, namun nilai-nilai dasar itu tetap relevan hingga kini.

Masa Depan Menabung

Apakah tradisi menabung secara tradisional masih memiliki masa depan? Bukti-bukti yang telah ditunjukkan dalam uraian buku ini memastikan bahwa tradisi ini dapat bertahan. Bahkan ketika sistem teknologi modern dan sistem perbankan modern telah berkembang pesat seperti sekarang ini. Kehadiran teknologi baru dan sistem menabung modern memang mengancam cara-cara menabung secara tradisional, tetapi yang mengalami ancaman hanyalah aspek wujud fisik. Bahan-bahan untuk membuat semua sarana pengawetan dan penyimpanan dapat berubah-ubah atau diganti dengan bahan baru. Dalam hal bentuk wadah celengan, variasinya justru bisa semakin berkembang, termasuk memanfaatkan pintu mobil sebagai sarana untuk menabung. Demikian pula sosok celengan juga bisa berwujud macam-macam benda yang menandai setiap perubahan zaman.

Bagaimana dengan menabung secara modern melalui bank? Dalam pidatonya saat meluncurkan Tabungan Simpel, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar anak-anak Indonesia mulai mengenal perencanaan keuangan sejak dini dan mulai tertarik mengenal perbankan melalui produk tabungan. Sehingga di masa yang akan datang muncul generasi sadar keuangan dan menjadikan kebiasaan menabung bukanlah kewajiban tetapi bagian dari gaya hidup. Untuk itu tabungan harus tampil dengan format yang sesuai dengan karakter gaya hidup generasi zaman sekarang. Simpel dan tidak ribet!

Adapun dalam upaya mewujudkan agar semua orang bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan OJK menggagas dua program inklusi keuangan, yaitu Layanan Keuangan Digital (2004) dan Laku Pandai (2005). Keduanya dengan menggunakan agen-agen layanan memberikan kemudahan bagi masyarakat di pelosok tanah air yang belum terjangkau secara fisik oleh bank.

Sekali lagi, peranan agen-agen layanan LKD dan Laku Pandai tersebut, mengingatkan kita kepada guru sekolah dan pembina Pramuka yang juga pernah digunakan tenaganya untuk menghimpun tabungan Tapelpram. Hebatnya pada masa sekarang, agen-agen layanan itu tidak sebatas hanya para guru sekolah yang menjadi agen tabungan Simpel di daerah-daerah, tapi juga para penjaga warung di pasar, ibu rumah tangga, dan sejumlah profesi informal lainnya, dengan menggunakan teknologi digital tampil sebagai bank berjalan di desa-desa atau di pelosok wilayah yang jauh dari kantor bank.

Melihat fenomena perkembangan menabung pada masyarakat zaman sekarang dan bagaimana kuatnya dorongan pemerintah untuk terus mewujudkan terciptanya keuangan inklusif yang adil dan merata, kiranya kita memiliki suatu optimisme yang besar akan lestarnya budaya menabung di Indonesia, baik secara modern maupun tradisional. Kedua sistem atau cara menabung itu dapat terus hidup secara harmonis saling berdampingan menjadi kebutuhan atau bahkan gaya hidup masyarakat Indonesia. Gempuran budaya konsumtif dan godaan berbagai program finansial yang spekulatif tapi menggiurkan, niscaya dapat diatasi atau paling tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menabung demi bekal di masa depan.

Melihat paparan dalam buku ini, dapat kita simpulkan bahwa menabung dengan cara tradisional dengan menggunakan celengan adalah bentuk pembelajaran pertama yang diterima oleh anak-anak Indonesia dari orang

tua mereka. Dengan demikian celengan tidak akan lekang oleh waktu, ia adalah “bahasa ibu” yang pertama diterima oleh generasi sekarang tentang bagaimana hidup dengan nilai-nilai hemat, disiplin, sabar, dan cermat dalam mempersiapkan atau mewujudkan apa yang mereka impikan di masa yang akan datang? Maka selanjutnya, dengan fondasi pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebajikan dalam celengan, niscaya mereka akan siap dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, produktif dan sekaligus bijaksana dalam mengelola keuangan dengan menggunakan sistem finansial yang akan terus berinovasi tanpa henti.

Celengan Buaya

Bahan : Tanah Liat
Asal : Plered, Purwakarta, Jawa Barat
Ukuran : P. 34 cm L. 27 cm
No. Inv : 27686 a

Celengan replika dari hewan buaya ini terbuat dari tanah liat, memiliki warna merah kekuning-kuningan. Pada bagian atas celengan dihiasi dengan dominasi warna putih, hitam dan perak. Lubang memanjang untuk memasukkan koin pada celengan buaya terdapat pada punggung bagian atas. Celengan Buaya ini diperoleh pada tahun 1968. Namun celengan yang terbuat dari tanah liat tersebut saat ini sudah jarang di temui.



Sumber: Museum Nasional

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrachman, P. R. (2008). *Bunga Angin Portugis di Nusantara*. Jakarta.
- Adnan, A. M. (2009). *Portugis dan Spanyol di Maluku*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ali, A. (1995). *Liku-Liku Sejarah Perbankan Indonesia: Memoar Abdullah Ali Presiden Direktur Bank Central Asia*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Amelia. (1986). *Mata uang logam dari situs Trowulan*. Jakarta: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Anwari, I.R.M (2016). *Kebijakan Perekonomian Gemeente Surabaya Tahun 1906-1942*. Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.
- Anonim. (1991). *Banknotes and Coins: From Indonesia 1945 – 1990*. Jakarta: Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 & Perum Peruri Jakarta.
- Anonim. (1996). *Melangkah Ke Masa Depan Dengan Kearifan Masa Lalu : Swadharma*

Bhakti Nagara Bank BNI 50 Tahun Emas. Jakarta : PT Bank Negara Indonesia (Perrsero).

Arsip Nasional Republik Indonesia. (1988). *Di bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*. Jakarta.

Balai Arkeologi Palembang. (2011). Tembikar dan Padi: Asia Tenggara dalam Perpektif Arkeologi. Katalog Pameran "*Semarak Arkeologi 2011*". Balai Arkeologi Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

Balk, G.L., F. van Dijk, & D.J. Kortlang. (2007). *The archives of the Dutch East India Company (VOC) and the local institutions in Batavia (Jakarta)*. National Archief, The Hague, The Netherlands.

Beng To, O. (1991). *Sejarah Kebijakan Moneter, Jilid I 1945 – 1958*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Boek, J.O.M. (1942). *The Economic Development of the Netherlands Indies*. New York.

Boediono. (1989). *Ekonomi Moneter*. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.

Creutzberg, P & van Laanen, J.T.M. (1987). *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Damais, S.J.H. (2012). *Majapahit Terracotta: The Soedarmadji Jean Henry Damais*. Jakarta: BAB Publishing Indonesia.

De Bree, L. (1928). *Gedenkboek van De Javasche Bank 1828-1928*. Deel 1 & 2. Weltevreden: G. Kolff & co.

Djiwandono, J.S. (2001). *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Djojohadikusumo, S. (1989). *Kredit Rakyat Di Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Francien van Anrooij. 2014. *De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942*. Edisi revisi Leiden.

- Ginting, J. (tanpa tahun). *Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>
- Groeneveldt, W.P. (1960). *Historical Notes on Indonesia and Malay Compiled from Chinese Sources*. Djakarta: C.V. Bhratara.
- Harnani, N. (1989). Arca Dewa Kemakmuran di Jawa. dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi V*, Buku IIa: hal. 413-33. Jakarta: Puslit Arkenas.
- Hartono, N. (1976). *Bank Indonesia : Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya*. Stensilan belum diterbitkan.
- Hermanu. (2005). *Mur Jangkung Jan Pieter Zoon Koen : Babad VOC*. Yogyakarta: Bentara Budaya.
- Inkeles, A. (1966). The Modernization of Man. Dalam *Modernization: The Dynamics of Growth* (ed. Myron Weiner): 151-63. Cambridge: Voice of America Forum Lectures.
- Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, S.S., M.A. 2016. *Kebijakan Perekonomian Gemeente Surabaya Tahun 1906-1942*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Irianti, M.B. (2014). *Menabur Kebiasaan: Propaganda Gerakan Menabung Jepang (1941-1945)*. Lembaran Sejarah, Vol. 11, No. 1, April 2014.
- Kardiyat Wiharyanto, A. *Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830-1901* (makalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta).
- Koentjaraningrat. (1990). Nilai Budaya Celengan di Indonesia. Dalam *Pameran Celengan dan Wuwungan Tradisional*. Jakarta: Bentara Budaya (23-31 Maret 1990), hal. 5-8.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium* Jilid 1. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S & Suryo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kusuma, E. (2014). *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Fragmen Sejarah Bank Sentral di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kustiasih, R. (2015). *Merawat Api Celengan Jamblang*. Kompas, 12 September 2015, hal. 24.
- Lenin, V.I. (1943). *Selected Works*, New York.

- Leirissa, R.Z. (1999). *VOC sebagai Sejarah Soasial*, Jurnal Wacana Vol. 1, No.1.
- Mallarangeng, R. (2002). *Mendobrak Sentralisme Ekonomi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Marwati. (1993). *Penyerahan Hindia Belanda tersebut terjadi di Kalijati, Jawa Barat*.
- Miksic, J.N. & Soekatnp, E. (eds). 1995. *The Legacy of Majapahit*. Singapore: National Heritage Board.
- Mills, J.V.G. (ed.). (1974). *Ma Huan Ying-Yai Sheng-lan. 'The Overall Survey of the Ocean's Shores' (1433)*. Diterjemahkan oleh Feng Ch'eng-chun. Cambridge: University Press.
- Mintoardjo, S. (2001). *BLBI Simalakama: Pertaruhan Kekuasaan Presiden Soeharto*. Jakarta: Penerbit RESI.
- Mufidha Brilian Irianti. 2014. *Menabur Kebiasaan: Propaganda Gerakan Menabung Jepang (1941-1945)*. Lembaran Sejarah, Vol. 11, No. 1, April 2014.
- Muller, H.R.A. (1978). *Javanese Terracottas*. Lochem: De Tijdstroom.
- Parakitri T. Simbolon. 2006. *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Grasindo Kompas.
- Poesponegoro, M.D & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. (2004). *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia sebuah Pengantar*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Prawiro, R. (1998). *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi*. Jakarta: PT. Eleksmedia Komputindo.
- Rahardjo, S. (1990). Tradisi Menabung dalam Masyarakat Majapahit. Telaah Pendahuluan terhadap Celengan di Trowulan. Dalam *Monumen: Karya Pesembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono*. (Editor Edi Sedyawati dkk.), hal. 203-18. Depok: Lembaran Sastra Seri Penerbitan Ilmiah No. 11 Edisi Khusus Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- (1990). Celengan Riwayatmu Dulu. Dalam *Pameran Celengan dan Wuwungan Tradisional*, hal. 23-26. Jakarta: Bentara Budaya Jakarta.
- (1990). Kuwera: Dewa "Businessman". Dalam *Pameran Celengan dan Wuwungan Tradisional*, hal. 23-26. Jakarta: Bentara Budaya Jakarta.
- (2011). *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir*. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta: Serambi.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Asian Studies Association of Australia.
- Rosidi, A. (1986). *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut kepada Allah Swt: Sebuah Biografi*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Simbolon, P.T. (2006). *Menjadi Indnesia*, Jakarta: Grasindo Kompas.
- Siahaan, B. (2005). *Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun dalam Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Buku II Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: ISEI.
- Soegondo, S. (1995). *Tradisi Gerabah di Indonesia dari Masa Prasejarah Hingga Masa Kini*. Jakarta: Himpunan Keramik Indonesia.
- Soeratman, D. (2000). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI
- Southworth, E. (2015). *The Roots of the Dutch Republic's Golden Age Commercial Success*. University of Massachusetts Dartmouth.
- Sri Wahyu Istana Trahutan, *Jurnal Sabda*, Vol. 8 Tahun 2013.
- Tim Penulis. (1995). *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Penulis Sejarah Bank Indonesia. (2006). *Sejarah Bank Indonesia Periode I – VI*. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia.
- Unit Khusus Museum Bank Indonesia *Sejarah Pra Bank Indonesia*: ([http:// www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/prabi-bi/Pages/sejarah_prabi_1.aspx](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/prabi-bi/Pages/sejarah_prabi_1.aspx))
- Van Anrooij, F. (2014). *De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942*. Edisi revisi Leiden.
- Wiharyanto, A. K. (tanpa tahun). *Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830-1901* (makalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta).
- Wie, T.K.(ed.). (2005). *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950 an sampai 1990 an*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- (2004). *Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Surat Kabar

Harian Merdeka, 5 Oktober 1945 dan 26 Agustus 1959.

Harian Sikap, 12 Maret 1959.

Pikiran Rakyat, 16 & 24 September 1971, dan 9 Oktober 1971.

Haluan, 26 Agustus 1971.

Harian Kompas, 20, 22, 21, 23, 26 Agustus 1971; 7 & 27 September 1971; 23 Februari 1974; 6 Juli 1974; 7 & 16 September 1974; 18 Agustus 1975; 2 April 1976; 3 Oktober 1985; 12 & 27 Juli 1989; 20 Desember 1989; dan 12 Agustus 1996.

Majalah Infobank, April 1990.

Majalah Info BCA, September 1991.

Pandji Poestaka, 1940.

Koran Djawa Tengah tahun 1937.

Soeara Asia, 21 Oktober 2602.

Asia Raja, 10 dan 20 Mei 2602

Soeara Asia, 6 Oktober 1942.

Soeara Asia, 29 Oktober 2602.

Soeara Asia 27 Desember 2602.

Djawa Baroe No. 8 tahun 2605.

Djawa Baroe No. 21 2604.

Jurnal dan Booklet

Annual Report of The Javasche Bank 1945 – 1949.

Report of The President of The Java Bank, 1948.

Laporan Tahunan Bank Indonesia 1950 – 1997.

Booklet Keuangan Inklusif Tahun 2014.

Outlokk Ekonomi Syariah 2012.

Jurnal INFORMASI, No. 1, XXXVII, Th. 2011.

Internet

<http://www.hariansejarah.id/search/label/Sejarah%20Indonesia?max-results=7>

Anonim. (2013). Sejarah Postspaarbank sebelum lahirnya Bank BTN. <http://antiquekunodandjadoel.blogspot.com/2013/05/sejarah-postspaarbank-sebelum-lahirnya.html>, diakses pada 2018.

Anonim. (2016). Box Uang Koin Poostspaarbank in Nederlandsch Indie Antik Langka dengan Isi. <https://www.kaskus.co.id/thread/581fbd8a582b2e08508b4567/box-uang-koin-postspaarbank-in-nederlandsch-indie-antik-langka-dgn-isi/>, diakses pada 2018.

<https://i.pinimg.com/originals/07/d7/3d/07d73da5f953652c44201d4fa25b55fa.jpg>



DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2019

ISBN 978-623-7092-07-0

